

Sampai pada titik ini, pertanyaan yang bisa diajukan adalah mengapa sampai sekarang tata-kelola sumber daya alam kehutanan masih diwarnai tingkat deforestasi dan kerusakan lingkungan yang tidak mengalami penurunan? Pertanyaan lain yang juga penting mengikutinya adalah setelah diperluasnya hak-hak rakyat secara kolektif untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam terbarukan, bagaimana kondisinya saat ini, mengapa pola ini juga kurang berkembang sebagai “model alternatif”, apa saja faktor-faktor yang menghambat.

Untuk menjawab persoalan itu, bab-bab dalam buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, berupaya untuk menjawab dan mengurai berbagai sisi menyangkut permasalahan tata kelola dan kemanfaatannya bagi umat manusia.

Cukup beruntung gagasan “Sekolah Hijau” mendapatkan kesempatan untuk menjadikan tiga desa di Sumatera Barat dan Jambi, atas dukungan MCA-Indonesia, untuk menjadi tempat mengaplikasikan gagasan dalam sebuah “laboratorium-lapangan”. Tiga desa/kampung yang menjadi ruang praktek bersama masyarakat penting digambarkan profilnya untuk dapat memberi gambaran utuh menyangkut karakteristik berikut permasalahan dan potensi yang dimiliki.

Proses membangun manusia, kelembagaan, dan jejaring melalui “Sekolah Hijau” tentu membutuhkan waktu yang tidak pendek termasuk dukungan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan diri mereka secara mandiri. Melalui benik-benih pengetahuan dan kesadaran untuk selalu mengembangkan diri secara individu dan kolektif adalah langkah awal bagi kesuksesan Sekolah Hijau.

“Buku, yang berisi landasan pikir dan pelaksanaan Sekolah Hijau di tiga desa di Jambi dan Solok Selatan, telah memberikan pelajaran berharga, baik bagi pengembangan Sekolah Hijau di ketiga desa maupun bagi kemungkinan replikasinya di desa-desa lain di Indonesia.”

Prof. Dr. Ir. M. Maksum Machfoedz, M.Sc.
(Wakil Ketua Umum PBNU dan Ketua *Steering Committee*
Konsorsium KEMALA)



KEMALA
KONSORSIUM ENERGI MANDIRI LESTARI

Website : www.konsorsiumkemala.org
Email : konsorsium.kemala@gmail.com

ISBN 978 602 60753 3 8



LAKPESDAM-PBNU

ANGGOTA KONSORSIUM



PUSTEK UGM



PSE UGM



C C E S



MILLENNIUM
CHALLENGE CORPORATION
UNITED STATES OF AMERICA



Sekolah Hijau

Sebuah Alternatif Model Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kata Pengantar Wakil Ketua Umum PBNU

Prof. Dr. Ir. M. Maksum Machfoedz, M.Sc.

Sekolah Hijau

**Sebuah Alternatif Model
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan**



SEKOLAH HIJAU

Sebuah Alternatif Model Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Editor
Dumairy
Puthut Indroyono

Tim Penulis

Satriyantono Hidayat	Fitrotun Aliyah
Rajib Khafif Arruzzi	Herry Wirianata
Dimas Deworo Puruhito	Marzuki Wahid
Dwi Novitasari	Rachmawan Budiarto
Imam Prakoso	Suci Handayani
Awan Santosa	Suwartanti Nayono
Aminatun Zubaedah	Yuli Nugroho

Tahun 2017

ANGGOTA KONSORSIUM



LAKPESDAM-PBNU



PUSTEK UGM



PSE UGM



C C E S

KEMALA - Konsorsium Energi Mandiri Lestari

1. LAKPESDAM-PBNU
2. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM
3. Pusat Studi Energi UGM
4. CCES Yogyakarta

Jakarta - Yogyakarta



MILLENNIUM
CHALLENGE CORPORATION
UNITED STATES OF AMERICA

SEKOLAH HIJAU
Sebuah Alternatif Model
Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Editor

Dumairy
Puthut Indroyono

Tim Penulis

Satriyantono Hidayat	Fitrotun Aliyah
Rajib Khafif Arruzzi	Herry Wirianata
Dimas Deworo Puruhito	Marzuki Wahid
Dwi Novitasari	Rachmawan Budiarto
Imam Prakoso	Suci Handayani
Awan Santosa	Suwartanti Nayono
Aminatun Zubaedah	Yuli Nugroho

Kontributor

Abdullah Ubaid, Ferry Edwin Sirait, Harumanto Sapardi,
Bergas Margono, Syukron Maksum, Elvira Roza, Rendra Dinata

Tata Letak dan Desain Sampul

Rajib Khafif Arruzzi dan Riyo Adhi Mahardika

Program Kerjasama

KEMALA - Konsorsium Energi Mandiri Lestari.

1. LAKPESDAM-PBNU | 2. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM |
3. Pusat Studi Energi UGM | 4. CCES Yogyakarta
konsorsiumKEMALA.org
Difasilitasi oleh Yayasan KEHATI GPM Lot 1

Disclaimer

Dokumen ini dibuat dengan dukungan masyarakat Amerika Serikat, melalui Millennium Challenge Corporation. Informasi, opini, dan kesimpulan yang dicantumkan di sini tidak mewakili posisi Millennium Challenge Corporation atau Pemerintah Amerika Serikat.

Diterbitkan oleh:

LAKPESDAM-PBNU
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Jl. KH Ramli Selatan 20A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta 12870
Telp. (021) 8298855/ 8281641, Fax. (021) 8354925 | lakpesdam.or.id

Edisi Desember 2017:

ISBN : 978 602 60753 3 8

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non komersial lainnya, serta bukan untuk diperjualbelikan

KATA PENGANTAR

KETUA *STEERING COMMITTEE*

KONSORSIUM KEMALA

Prof. Dr. Ir. M. Maksum Machfoedz, M.Sc. ^{1 2}

Penerbitan buku “Sekolah Hijau: Alternatif Model Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan” ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Konsorsium KEMALA, tidak hanya terbatas kepada daerah sasaran program, tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Sebagai model alternatif dalam pemberdayaan masyarakat, buku ini menawarkan pemikiran yang telah diujicobakan beberapa saat di kawasan program dan karena adopsinya memiliki validitas sangat memadai. Sebagai Ketua *Steering Committee* KEMALA, saya sungguh merasa bangga atas penerbitannya.

Konsorsium KEMALA merupakan kolaborasi dari 4 (empat) lembaga, yaitu Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-PBNU), Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (PUSTEK UGM), Pusat Studi Energi UGM (PSE UGM), dan *Center For Civic Engagement and Studies* (CCES) Yogyakarta. Lembaga-lembaga tersebut sejak lama dikenal luas

¹ *Steering Committee* Konsorsium KEMALA

² Wakil Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama

memiliki komitmen dan perhatian serius terhadap kajian dan pola pemberdayaan untuk mendorong perubahan sosial ekonomi yang lebih berkualitas dan demokratis.

Buku yang berisi landasan pikir dan pelaksanaan Sekolah Hijau di tiga desa di Jambi dan Solok Selatan, telah memberikan pelajaran berharga baik bagi pengembangan Sekolah Hijau di ketiga desa maupun bagi kemungkinan replikasinya di desa-desa lain di Indonesia. Ada beberapa hal yang patut digaris bawahi, yakni:

Pertama, keberdayaan desa adalah soal pandangan atau paradigma. Sekira dipandang pengetahuan selalu berada di luar desa, maka tidaklah berkembang pengetahuan tradisional yang dimiliki warga desa puluhan tahun lamanya. Maka warga desa tidak percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah modal utama bagi kemajuan desanya, melebihi modal finansial maupun alam mereka. Akibatnya akan terjadi ketergantungan permanen desa kepada kekuatan di luar mereka. Demikian pula, sekira dipandang pemuda tidak dapat dipercaya maka mereka enggan berbuat banyak untuk kemajuan desa. Kebanyakan mereka pergi karena melihat masa depan ada di luar desa. Sekolah Hijau di ketiga desa membuat kita memandang dengan cara yang berbeda, karena apa yang kita percaya adalah apa yang akan terjadi di desa ke depannya. Percayalah, masa depan selalu menjadi milik kaum muda desa.

Kedua, kemajuan desa adalah soal menjadi diri sendiri. Ini berkaitan dengan pelajaran pertama, di mana membangun desa bukan berarti membentuk desa menjadi seperti yang bukan mereka. Apa yang datang dari luar desa harus mengikuti apa yang ada di desa, bukan sebaliknya. Jadi semua bermula dari desa, baik itu mimpi, cita-cita, tujuan, harapan, keinginan,

kemauan, semangat, dan semua nilai-nilai baik lain yang menyertainya. Semua itu berawal dari apa yang ada di desa, bukan pula sebaliknya. Seperti Roosevelt pernah berkata, “bertahun-tahun orang kesana-kemari mencari kunci kesuksesan, sampai kemudian dia sadar bahwa kunci itu ada di sakunya sendiri”. Sekolah Hijau di ketiga desa membuat kita sadar bahwa kita hanya perlu menjadi teman belajar bagi desa. Setelah warga desa selesai dengan diri mereka, tidak ada yang dapat mewujudkan mimpi kecuali mereka yang punya.

Ketiga, perubahan mendasar terjadinya pasti lama. Berubahnya desa tidak seperti lari *sprint* yang butuh kecepatan, tetapi seperti lari marathon yang perlu stamina. Jarak yang jauh ditempuh lebih lama, meskipun kita dapat mempercepatnya. Melepas petani dari tengkulak misalnya, perlu waktu karena terjadinya sudah puluhan tahun lamanya. Kita hanya perlu mulai melangkah, dengan keyakinan bahwa seribu langkah besar selalu bermula dari satu langkah kecil saja. Sekolah Hijau di ketiga desa meyakinkan kita bahwa perubahan memerlukan ketahanan, kesabaran, ketangguhan, karena selalu ada tarik menarik diantara kekuatan yang ada di desa. Hal baik tidak selalu banyak pendukungnya. Selalu ada yang ingin bertahan, dan selalu ada yang hendak mengubahnya. Bukan lagi soal tua muda. Orang tua yang bergabung dalam barisan perubahan maka ia adalah muda, sedangkan anak muda yang enggan maka sesungguhnya ia menua sebelum waktunya.

Akhirnya proses yang berjalan satu setengah tahun ini meyakinkan kita bahwa Sekolah Hijau yang dikembangkan oleh Konsorsium KEMALA perlu ada di desa-desa Indonesia, dan tentu saja perlu terus ada di ketiga desa. Ini karena bukan saja padi dan jagung yang perlu dipupuk dan disiram, tetapi juga

petaninya. Tidak saja perlu dipilih bibit-bibit padi yang baik untuk meningkatkan hasil panennya, melainkan juga tunas-tunas muda penerus pertanian desa. Alangkah baik menanam padi dan pohon jati, tetapi jangan lupa menanam manusia juga. Jangan membangun irigasi, bendungan, jalan, dan bermacam infrastruktur lainnya saja, tetapi bangun jugalah pabrik pengetahuan desa, dan lahan untuk menanam manusia dan pabrik tempat memproduksi pengetahuan desa itu Sekolah Hijau namanya. Kritik dan saran tentu sangat dibutuhkan dalam penulisan buku ini, dan karenanya sangat diharapkan. Wassalam.

Yogyakarta, Desember 2017

Prof. Dr. Ir. M. Maksum Machfoedz, M.Sc.
Ketua *Steering Commitee* Konsorsium KEMALA
dan Wakil Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA <i>STEERING COMMITTEE</i> KONSORSIUM KEMALA	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAGIAN PERTAMA	1
PROLOG	3
BAB I MANIFESTO EKONOMI HIJAU	15
Mukadimah.....	15
Permasalahan: Degradasi Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial	17
Pengelolaan SDA Berbasis Komunal.....	20
BAB II “KEDAULATAN PANGAN” HARGA MATI	25
Produktivitas dan Nilai Tukar	25
Perangi Kemiskinan Petani.....	28
BAB III “REVOLUSI MENTAL”: DORONG PARTISIPASI SOSIAL	35
Peluang Partisipasi Sosial	35
Pentingnya Intelektual, Moral, dan Spirit	36
Saat Ini Masih Elitis dan Prosedural	40
Maju Ya Harus Sama-Sama	44
BAB IV ENERGI, HUTAN, DAN PILIHAN TEKNOLOGI.	47
Nekus Air-Pangan-Energi.....	47
Hutan Lestari Hasilkan Energi.....	55
Adaptasi Melalui “Sekolah Hijau”	60
BAB V GENDER DAN INKLUSI SOSIAL	65
Inpres Era Gus Dur	65
Realitas Masih “ <i>Suargo Nunut, Neraka Katut</i> ”	68
Dampak Terhadap Kemiskinan	71
Problem Ketidakadilan Sosial	77
Sebagai Perspektif	79
Inklusi Sosial Sebagai Solusi.....	80

BAB VI SEKOLAH HIJAU: SEBUAH ALTERNATIF MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	83
Tentang Pemberdayaan.....	83
Metode dan Pendekatan.....	86
<i>Roadmap</i> dan Tahapan	88
Pelembagaan dan Pengembangan Kurikulum (<i>School Establishment & Curricullum Development</i>).....	92
Kurikulum.....	95
Pengembangan Sekolah Hijau oleh Konsorsium KEMALA.....	102
Visi-Misi dan Tujuan	108
<i>BAGIAN KEDUA</i>.....	111
PROFIL TIGA DESA	113
BAB VII PROFIL JORONG TANDAI BUKIK BULEK.....	115
Bentang Alam dan Fisik Wilayah	116
Penduduk dan Sumber Pendapatan Keluarga	122
Infrastruktur dan Pelayanan Publik	136
BAB VIII PROFIL DESA SUNGAI RAMBUT.....	151
Kondisi Fisik Desa.....	153
Penduduk dan Sumber Pendapatan.....	154
Aspek Sosial Budaya.....	173
Infrastruktur dan Pelayanan Publik	180
BAB IX DESA RAWASARI:	199
Kondisi Fisik Wilayah	200
Penduduk dan Sumber Pendapatan.....	202
Kelembagaan Ekonomi	216
Sosial Budaya.....	221
Infrastruktur dan Pelayanan Publik	225
<i>BAGIAN KETIGA</i>	237
BAB X PEMBANGUNAN MANUSIA	239
Penyiapan Sekolah Hijau.	239
Pelatihan Dasar.....	257
Kampanye Hijau.....	267
Pelatihan Menengah	275
Rencana Tindak Lanjut.....	311
Pelatihan Lanjut.....	320

BAB XI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN	325
Sekolah Hijau dan Kader Hijau.....	325
Pendirian Koperasi di Desa Sungai Rambut	332
Sinergi Usaha dengan BUMDes Di Desa Rawasari...	337
Pengelolaan PLTS Berbasis Masyarakat	341
<i>Kelompok Usaha</i>	351
BAB XII ADVOKASI & MEMBANGUN JARINGAN	353
Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten	353
Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan	366
Pusat Informasi.....	369
<i>EPILOG</i>.....	371
REFLEKSI SATU TAHUN SEKOLAH HIJAU	373
Pendekatan Project <i>versus</i> Pemberdayaan.....	374
Penguasaan Konteks Lokal.....	376
Asimetri Informasi.....	379
Perubahan Paling Nyata	386
Dari “Memberi Ikan” ke “Memberi Kail”	399
Karakter – Kelembagaan – Jejaring.....	403
Pelajaran yang Terpelajari.....	407
DAFTAR PUSTAKA.....	413
RIWAYAT PENULIS	415
<i>LAMPIRAN</i>.....	427
DAFTAR KADER HIJAU DI SETIAP DESA PADA AWAL	
PEMBENTUKAN	429
Profil Konsorsium KEMALA.....	431

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Mengembangkan Kurikulum Menggunakan PAR...	96
Tabel 2	Rancangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Metode Penyampaiannya	97
Tabel 3	Materi Umum dan Kewirausahaan	99
Tabel 4	Materi Pengetahuan dan Keterampilan Khusus Energi Terbarukan	99
Tabel 5	Materi Pengetahuan dan Keterampilan Khusus Pertanian Terpadu.....	100
Tabel 6	Materi Pengetahuan dan Keterampilan Khusus Tata Lingkungan dan Sanitasi.....	100
Tabel 7	Materi Pengetahuan dan Keterampilan Khusus Sosial, Budaya, Politik Desa	100
Tabel 8	Materi Umum.....	101
Tabel 9	Penggunaan Lahan di Desa Sungai Rambut	154
Tabel 10	Pendapatan Warga Desa Sungai Rambut dari Bidang Pertanian.....	157
Tabel 11	Pendapatan Warga Desa Sungai Rambut dari Bidang Perikanan.....	157
Tabel 12	Pendapatan Warga Desa Sungai Rambut dari Bidang Non Pertanian dan Perikanan.....	157
Tabel 13	Pelaksanaan Pelatihan Dasar di 3desa lokasi Sekolah Hijau	259
Tabel 14	Pelatihan Energi Berkelanjutan	260
Tabel 15	Pelatihan Penghidupan Berkelanjutan	261
Tabel 16	Pelatihan Strategi Organisasi dan Perubahan Sosial	262
Tabel 17	Pelatihan Demokrasi dan Politik Desa	263
Tabel 18	Tabel Pertanian Berkelanjutan.....	264
Tabel 19	Pelatihan Pengelolaan Usaha Bersama.....	265
Tabel 20	Jenis Pelatihan dan Peserta.....	281
Tabel 21	Jadwal Pelatihan Menengah di Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari	283

Tabel 22	Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dan Advokasi Anggaran	311
Tabel 23	Kewirausahaan, Perencanaa Usaha dan Manajemen Koperasi/BUMDes.....	312
Tabel 24	Pelatihan Budidaya Padi di Desa Sungai Rambut dan Rawasari.....	314
Tabel 25	Pelatihan Budidaya Kakao Desa Sungai Rambut dan Rawasari.....	315
Tabel 26	Pelatihan Pembuatan Kompos Enceng Gondok, Pupuk Organik Padat/Cair	315
Tabel 27	Pelatihan Pembuatan Briket Arang Sekam di Desa Sungai Rambut dan Rawasari.....	316
Tabel 28	Pelatihan Penetasan Telur Ayam	317
Tabel 29	Pelatihan Pembuatan Keripik Pisang dan Kerupuk Udang.....	317
Tabel 30	RTL Pelatihan Menengah di Jorong Tandai Bukik Bulek.....	319
Tabel 31	Jadwal Pelatihan Lanjut Desa Sungai Rambut.....	323
Tabel 32	Jadwal Pelatihan Lanjut Desa Rawasari.....	323
Tabel 33	Perbedaan antara BUMDES dan KOPERASI	340
Tabel 34	Jumlah asosiasi/ kelompok kewirausahaan yang sudah berhasil terbentuk sebagai hasil dari program	352
Tabel 35	Ranking Prioritas Hasil Rekrutmen Calon Kader Hijau Desa Sungai Rambut	429
Tabel 36	Kader Hijau Desa Rawasari	430
Tabel 37	Kader Hijau Jorong Tandai Bukik Bulek.....	430

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jalan Keluar dari Kemiskinan.....	33
Gambar 2	Pendekatan Perencanaan Menurut UU 25 Tahun 2004.....	41
Gambar 3	Peta Jalan Sekolah Hijau.....	89
Gambar 4	Tahapan Sekolah Hijau.....	90
Gambar 5	Logframe Program	105
Gambar 6	Tiga Desa Lokasi Program KEMALA.....	113
Gambar 7	Peta Lokasi Sasaran program yang ditampalkan dengan wilayah DAS Batang Hari menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai	119
Gambar 8	Peta Persebaran Rumah di Jorong Tandai Bukik Bulek.....	123
Gambar 9	Ilustrasi Usaha Pemanfaatan Lahan Warga Bukik Bulek.....	128
Gambar 10	Atas, bangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Bawah, Generator PLTMH	138
Gambar 11	Penampungan Air Bersih hasil swadaya masyarakat di Korong Dataran, Jorong Tandai Bukik Bulek	143
Gambar 12	Gedung MIS Darul Ulya.....	147
Gambar 13	Poskesdes di Jorong Tandai Bukik Bulek	148
Gambar 14	Pulau Sako: Sejarah Desa Sungai Rambut	151
Gambar 15	Ibu Nur Asiah, Pedagang Krupuk Ikan Desa Sungai Rambut.....	156
Gambar 16	Sawah di Desa Sungai Rambut.....	159
Gambar 17	Perkebunan Pisang di Sungai Rambut	160
Gambar 18	Lahan warga yang tidak bisa digarap karena diklaim TNB, masuk batas 80m dari Sungai Batang Hari.....	160
Gambar 19	Belat: Jaring Nelayan di Sungai Batang Hari.....	162

Gambar 20	Ikan Aro Mata Merah, Bahan untuk Kerupuk dan Bakso Ikan (kiri) dan Tiang Keramba Apung di Sungai Rambut (kanan)	163
Gambar 21	Pompong Tengkulak Pengangkut Sawit.....	166
Gambar 22	Kondisi Rumah Salah Seorang Petani	167
Gambar 23	Rumah Warga Tanpa Listrik.....	170
Gambar 24	Suasana Pertemuan PKK di Kantor Desa	174
Gambar 25	Akses Jalan di Perkampungan.....	181
Gambar 26	Akses Jalan di Luar Pemukiman	181
Gambar 27	Jalan Tanah Sungai Rambut - Berbak (kiri) dan Jembatan Kayu di Kecamatan Berbak (kanan)...	183
Gambar 28	MCK di Anak Sungai Batang Hari.....	184
Gambar 29	Sumber Air Minum Warga	185
Gambar 30	Kantor Desa Sungai Rambut.....	187
Gambar 31	Gedung PAUD dan SD	193
Gambar 32	Gedung Madrasah Diniyah.....	193
Gambar 33	Bangunan Puskesmas.....	194
Gambar 34	Bangunan Polindes.....	195
Gambar 35	Masjid Desa Sungai Rambut	196
Gambar 36	Gedung Balai Warga	197
Gambar 37	Dermaga Utama (Blok O) Desa Rawasari.....	199
Gambar 38	Kanal Sungai Masih Menjadi Salah Satu Jalur Transportasi Utama Warga Desa	203
Gambar 39	Parit di Samping Lahan Pertanian	204
Gambar 40	Pembibitan Jelutung yang Belum Terjual	207
Gambar 41	Udang Hasil Pancingan dari Sungai Batang Hari	209
Gambar 42	Rumah Warga Dusun 1 Bangun Sari yang Sejak Masa Transmigrasi Masih Belum Berubah.....	211
Gambar 43	Ibu-Ibu Istirahat Setelah Gotong Royong Ngicir Padi (Tanam Padi Metode Tugal) di Sawah.....	220
Gambar 44	Jembatan Penghubung Antara Jalan Sekunder dengan Perumahan Warga	226
Gambar 45	Genset (mesin diesel) yang Dimanfaatkan Warga	228
Gambar 46	Salah Satu Cara Penampungan Air Hujan Menggunakan Talang Air	228

Gambar 47	Tahapan Pelembagaan Sekolah Hijau	240
Gambar 48	Tahap persiapan pelembagaan Sekolah Hijau ...	241
Gambar 49	Roses Rekrutmen Calon Kader Hijau di Sungai Rambut.....	243
Gambar 50	Kader Hijau Desa Sungai Rambut	245
Gambar 51	Kader Hijau Desa Rawasari Mendiskusikan Ide dan Gagasan Membangun Desa	246
Gambar 52	Kader Hijau Jorong Tandai Bukik Bulek.....	248
Gambar 53	Penyampaian Materi Pembangunan Hijau Oleh Awan Santosa.....	253
Gambar 54	Kader Hijau Jorong Tandai Bukik Bulek Menyampaikan Visi Pembangunan Hijau di Desanya.....	254
Gambar 55	Kader Hijau Ketiga Desa dan Manajemen KEMALA Usai Mengikuti Seminar Nasional “Globalisasi, Demokrasi, Agama dan Lingkungan: Pendekatan Multidisiplin untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan”	257
Gambar 56	Materi Pelatihan Dasar Sekolah Hijau.....	258
Gambar 57	Warga Perempuan Mengacungkan Jari Untuk Mengajukan Penawaran Lelang Kompos Saat Kampanye Hijau Desa Sungai Rambut.....	268
Gambar 58	Senandung Bajolo, Seni Tradisi Melayu di Desa Sungai Rambut.....	269
Gambar 59	Kampanye Hijau Desa Sungai Rambut.....	270
Gambar 60	Panggung Utama Kegiatan Kampanye Hijau di Desa Rawasari.....	271
Gambar 61	Kirab Kampanye Hijau yang Melibatkan Peserta Lintas Generasi	272
Gambar 62	Kampanye Hijau Jorong Tandai Bukik Bulek	274
Gambar 63	Fasilitator Menyampaikan Materi Pelatihan Menengah Sekolah Hijau	279
Gambar 64	Kurikulum Pendidikan Menengah.....	280
Gambar 65	Kurikulum Pendidikan Menengah di Jorong Tandai Bukik Bulek.....	281
Gambar 66	Proses Pelatihan yang Partisipatif dan Implementatif.....	284

Gambar 67	Peserta Pelatihan Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok	285
Gambar 68	Fasilitator Menjelaskan Cara Penggunaan Mesin Penetas Telur dengan Sumber Listrik PLTS	291
Gambar 69	Pelatihan Budidaya Padi dan Kakao	293
Gambar 70	Pelatihan Pembuatan Produk Pangan Hasil Olahan Pisang dan Ikan	297
Gambar 71	Pelatihan Gender dan Inklusi Sosial.....	299
Gambar 72	Fasilitator mengajak peserta melakukan analisis kelayakan usaha	304
Gambar 73	Bisnis Model Canvas	305
Gambar 74	Pelatihan Pemangkasan Pohon Kopi dari Koperasi Solok Rajo	307
Gambar 75	Pelatihan Pembuatan Kripik Jengkol untuk Ibu-Ibu PKK Jorong Tandai Bukik Bulek oleh UMKM Bhayangkari Solok Selatan.....	310
Gambar 76	Sinta Karmila, Kader Hijau Desa Rawasari, dengan Produk Keripik Pisang “Sari Rasa”	318
Gambar 77	Kedudukan Sekolah Hijau dan Kader Hijau di Struktur Desa (Rawasari)	325
Gambar 78	Sambutan Kepala Desa Sungai Rambut, 13 Januari 2017	327
Gambar 79	Ceramah Umum Tentang Sistem Energi Berkelanjutan Berbasis Komunitas Masyarakat Desa oleh Rachmawan Budiarto, dosen UGM...	329
Gambar 80	Peresmian dan peluncuran secara simbolis Sekolah Hijau oleh Kepala Desa Rawasari, didampingi ketua kader hijau dan manajemen KEMALA	329
Gambar 81	Peresmian Sekolah Hijau oleh Wali Nagari Lubuk Gadang Timur di Jorong Tandai Bukik Bulek...	331
Gambar 82	Masyarakat, Kader Hijau, Kelompok Ibu-Ibu dan Perempuan menghadiri Peluncuran Sekolah Hijau di Jorong Tandai Bukik Bulek.....	331
Gambar 83	Prinsip-Prinsip Koperasi yang Wajib Diterapkan pada Pengelolaan Usaha Bersama yang Dibangun Oleh Warga di Desa	333

Gambar 84	Rapat Pembentukan Koperasi Tunas Muda Nusantara, Desa Sungai Rambut, dihadiri Kabid Pembinaan Koperasi, Dinkop Kab. Tanjung Jabung Timur.....	334
Gambar 85	Transportasi PLTS Menggunakan Perahu Kecil (Pompong) Menuju Desa Rawasari	348
Gambar 86	Warga Bergotong Royong Mengangkut Komponen PLTS	349
Gambar 87	Rumah Bapak Sabar yang Tuna Netra dan Istrinya Tuna Rungu, Sudah Terpasang Lampu PLTS Jorong Tandai Bukik Bulek.	350
Gambar 88	Pelatihan Pemasangan PLTS Kepada Kader Hijau dan Relawan Warga di Desa Rawasari	351
Gambar 89	Studi Banding dan Audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur	354
Gambar 90	Studi Banding dengan PAM Desa	355
Gambar 91	Kunjungan Pada Sistem Pengangkatan Air dengan Tenaga Surya di Dusun Banyumeneng.....	358
Gambar 92	Suasana Studi Banding di Desa Percontohan di Pandan Lagan, Geragai.....	359
Gambar 93	Suasana Studi Banding Kopi di Solok Rajo	360
Gambar 94	Studi Banding ke Bank Sampah “Kartini”, Unit Usaha Mitra BUMDes “Karya Bersama”, Desa Pematang Rahim.....	362
Gambar 95	Studi Banding ke Unit Pengolahan Air Minum TELADAN.....	363
Gambar 96	Studi Banding ke KUD Suka Makmur	364
Gambar 97	Studi Banding ke Taman Teknologi Pertanian, KTM Geragai.....	365
Gambar 98	Sertifikat PIRT untuk Produk Kripik Pisang dan Kerupuk Ikan Desa Sungai Rambut	368
Gambar 99	Standing Banner di Pusat Informasi Pembangunan PLTS Desa Rawasari	369
Gambar 100	Forum Komunikasi Warga Tandai untuk Penjelasam Program KEMALA di JTBB yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Ninik Mamak,	

	Tokoh Pemuda, difasilitasi oleh Wali Nagari Lubuk Gadang Timur (7 April 2017).....	378
Gambar 101	Pelatihan melibatkan komunitas perempuan di desa Sungai Rambut.....	383

BAGIAN PERTAMA



Sekolah Hijau

Pemikiran yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama yang berdaulat (*people-driven*) dalam pengelolaan sumber daya alam masih belum berkembang di Indonesia meskipun gerakan reformasi telah menginjak hampir dua dasawarsa. Perdebatan menyangkut model pengelolaan sumber daya alam selalu bermuara pada dua kutub dikotomis, yang oleh Elinor Ostrom peraih hadiah nobel ekonomi tahun 2009, disebut antara “negara” dan “pasar” (Ostrom, 2009). Penelitian Fleischman menunjukkan contoh bagaimana pola pengelolaan khususnya di lingkungan sumber daya hutan (Fleischman, 2014). Ia mengamati ada perbedaan sudut pandang antara pemikiran teoritis yang berkembang pada aras lokal di satu pihak, dengan pemikiran teoritis pada aras nasional. Berbagai pemikiran yang kemudian dituangkan dalam tata kelola kehutanan pada aras lokal, sangat mementingkan peran partisipatif manusia sebagai penggerak (*human drivers*), sehingga pola pengelolaan sumber daya secara kolektif menjadi pilihan. Sementara pada aras nasional, pola pemikiran yang menjelma dalam kebijakan justru tidak dikembangkan berbasis tata-kelola partisipatif maupun kolektif, tapi lebih bersifat *top-down*, tetap menempatkan masyarakat sebagai “obyek”.

Ia mencoba membagi periode kepengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kehutanan dalam dua rejim yang berbeda dalam menguatkan argumennya, periode 1965-1998 dan periode 1998-2012. Tahun 1965-1998, pengelolaan SDA kehutanan Indonesia didominasi oleh aktor tunggal, dengan sistem tata pemerintahan yang *top-down*, menekankan kepada kepentingan organisasinya

sendiri. Rejim ini ia gambarkan sebagai penguasa yang berupaya mempertahankan dukungan politik elit melalui patronase dengan pemberian perijinan konsesi kayu, pertambangan dan perkebunan. Jumlah pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada era itu sejumlah 600 unit HPH dengan luas areal hutan produksi seluas 64 juta hektar. Jumlah pemegang HPH tersebut kalau dikelompokkan ternyata hanya dimiliki oleh 20 konglomerat kehutanan (Awang, 2008). Pajak dan royalti yang dihasilkan dari pengusahaan itu mengalir ke pemerintah pusat. Sementara kelompok orang, masyarakat adat, yang sebelumnya memiliki “hak adat” untuk memanfaatkan hutan dalam memanen produk-produk hutan, cenderung tersisih. Orang-orang yang mencoba menggunakan hak-hak mereka secara formal seringkali dieliminasi oleh pemegang hak konsesi yang mendapatkan dukungan kuat dari penguasa. Meskipun ekspansi konsesi penguasaan meluas dan menimbulkan penolakan oleh banyak masyarakat daerah di Indonesia, namun di beberapa tempat, terutama daerah sangat terpencil, masyarakat lokal tetap mampu memberlakukan peraturan mereka sendiri pada anggota masyarakat.

Sementara pada periode 1998-2012, rejim baru lahir diawali dengan ketegangan ekonomi dan politik di kalangan elit, antara elit dan masyarakat, yang mendorong jatuhnya rejim Orde Baru dan melahirkan Orde Reformasi. Potensi lahir dan berkembangnya model “ketiga” atau tata-kelola sumber daya secara kolektif sebagaimana dibayangkan Ostrom dan Fleischman, yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama, sebenarnya mulai nampak pada era ini. Optimisme ini antara lain ditunjukkan dengan munculnya semangat demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah, jargon “rakyat tidak hanya

menjadi penonton”, dan diakuinya hak-hak adat, serta terbuka ruang-ruang baru bagi pelaku ekonomi politik lokal, media masa, aktor-aktor baru, dan masyarakat sipil, untuk makin berperan dalam akses tata kelola sumber daya. Secara khusus, sistem pemerintahan ini memberikan kesempatan yang jauh lebih besar (meski masih terbatas) untuk mengelola pemerintahan sendiri (*self-governing*) baik pada skala lokal, regional, dan nasional. Pergeseran ini juga ditunjukkan dari beralihnya kewenangan dari pemerintah pusat ke 465 kabupaten, termasuk dalam pemberian ijin konsesi kayu maupun pemindahan petugas lapangan kehutanan pemerintah pusat ke kabupaten.

Sayangnya, pola yang muncul pada era ini, termasuk gejalanya tetap bertahan hingga akhir-akhir ini, cenderung berbentuk patronase baru pada tingkat lokal antara politisi lokal dan pengusaha besar. Desentralisasi dan otonomi daerah memberi peluang pada politisi lokal dan pengusaha untuk membangun patronase lokal. Komunitas adat yang secara formal memang diakui, namun kekuatan mereka tetap lemah. Ada penurunan dalam hal penindasan, mereka juga memiliki peningkatan dalam hal sarana yang lebih besar untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam mengembangkan jaringan dan perdagangan hasil hutan.

Selanjutnya bagaimana penerapan pola pengelolaan SDA dengan tema yang melatarbelakangi penulisan buku ini, yakni tentang pembangunan berkelanjutan? Fleischman tidak secara eksplisit mencoba membuat kesimpulan tentang bagaimana seharusnya mengembangkan tata kelola sumber daya alam. Tetapi ia menampilkan pola deforestasi yang terjadi pada masa

Orde Baru dan Orde Reformasi sebagai pertanda adanya degradasi lingkungan yang sangat masif. Sebagai salah satu paru-paru dunia, banyak yang merasa khawatir akan deforestasi yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Jika pada era tahun 1965, angka tutupan hutan sebesar 85 persen, maka pada tahun 2012 angka ini mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi hanya sebesar 50 persen. Tingkat kecepatan deforestasi dari *Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch* memperkirakan luasan hutan di Indonesia mencapai 162,29 juta Ha pada tahun 1950 dan 119,7 juta Ha tahun 1985, dan 100 juta Ha tahun 1997. Artinya rata-rata tingkat kehilangan hutan sebesar 1,2 juta Ha antara tahun 1950 dan 1985 dan 1,64 juta Ha antara tahun 1985 dan 1997. Data yang dikutip Fleischman pada era reformasi, data pada dekade 1990an dan sesudahnya menunjukkan tingkat deforestasi yang konsisten dengan era Orde Baru. Meskipun ada sedikit perbedaan tentang data yang menunjukkan adanya penurunan yang cukup dramatis pada tahun 2002 dan 2005, namun tahun-tahun berikutnya mengalami akselerasi deforestasi yang tinggi.

Laju deforestasi tidak dapat terlepas dari kebijakan pengelolaan hutan yang ditempuh dengan lebih mengandalkan kepada pemikiran berorientasi pertumbuhan ekonomi (*growth-oriented*) dan lebih mengandalkan “mekanisme pasar”. Akselerasi tingginya deforestasi berarti biaya kerusakan alam yang ditimbulkan juga sedemikian tinggi. Rincian kerusakan tentu tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya yang lebih luas. Ekosistem yang rusak berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, termasuk kebakaran hutan.

Sampai pada titik ini, pertanyaan yang bisa diajukan adalah mengapa sampai sekarang tata kelola sumber daya alam kehutanan masih diwarnai tingkat deforestasi dan kerusakan lingkungan yang tidak mengalami penurunan? Pertanyaan lain yang juga penting mengikutinya adalah setelah diperluasnya hak-hak rakyat secara kolektif untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam terbarukan, bagaimana kondisinya saat ini, mengapa pola ini juga kurang berkembang sebagai “model alternatif”, apa saja faktor-faktor yang menghambat.

Untuk menjawab persoalan itu, bab-bab dalam buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, berupaya untuk menjawab dan mengurai berbagai sisi menyangkut permasalahan tata kelola dan kemanfaatannya bagi umat manusia. Sidang pembaca diharapkan dapat memulai dengan **Bab 1** tentang manifesto, yang diantaranya berisi ajakan untuk merenungkan kembali arah tata kelola sumber daya alam di negeri ini. Perenungan kembali visi dan misi, konsep dasar atau landasan pikir yang digunakan dalam upaya penyusunan kebijakan dan program pengelolaan sumber daya baik yang terbarukan maupun yang tidak, baik pada aras nasional maupun lokal, mulai dari aspek penguasaan/pemilikan, produksi maupun mekanisme alokasi. Apakah landasan pikir yang digunakan dalam praktik pengelolaan sumber daya telah dilandasi oleh semangat memperbaharui dan melestarikan, atau sebaliknya, hanya untuk menghabiskan kekayaan material sekarang atau jangka pendek.

“Manifesto ekonomi hijau” juga menawarkan model tata kelola yang lebih menekankan pada semangat kolektifitas, tentu saja,

agar kemanfaatannya secara ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan, tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Landasan pikir ini sebenarnya telah diamanatkan oleh para pendiri bangsa (*founding father*) dalam rumusan UUD 1945, khususnya pasal 33 (Mubyarto: 2002). Sistem dan model pengelolaan sumber daya alam menurut amanat konstitusi ini, sekalipun menempatkan negara dalam posisi yang sentral, namun ada klausul yang menyatakan bahwa rakyatlah yang memberi mandat kepada negara, dan karenanya tata kelola juga harus “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selain itu, manifesto ini juga menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong kepemilikan dan pengelolaan atas sumber daya, baik dari sisi kepemilikan, produksi dan distribusi/konsumsi. *Last but not least*, bagaimana peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama ini telah dihasilkan antara lain oleh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset yang ada di negeri ini untuk seharusnya diabdikan.

Bab 2 “Daulat Pangan Harga Mati” mengulas argumen pentingnya pengelolaan sumber daya alam terbarukan khususnya pada wilayah yang paling dekat dengan penghidupan rakyat, yakni pertanian dan pangan. Pertanian sangat penting dalam hal pemenuhan berbagai kebutuhan hidup dasar umat manusia. Arti penting pertanian pangan antara lain dilihat dari saling keterkaitan, ketergantungan dan sinerginya dengan bidang atau sektor lain, sehingga bersentuhan dengan ekonomi, politik, sosial-budaya, dan lingkungan. Meskipun sistem produksi pertanian dan pangan memiliki peran strategis bagi kemandirian dan atau kedaulatan bangsa, namun sebagaimana diulas pada bab ini, masih

didominasi oleh pendekatan reduksionis mekanistik yang telah mengganggu relasi antara manusia dengan alam. Petani yang seharusnya menjadi aktor utama dalam pembangunan pertanian, justru semakin lama semakin tidak berdaya dan masuk dalam lingkaran kemiskinan.

Oleh karenanya, penulis menawarkan konsep pertanian berkelanjutan (PB) yang diharapkan menjadi solusi “tiga P” yang menguntungkan usaha (*profit*) bagi petani tentunya, mendorong keberlanjutan kehidupan sosial manusia (*people*), termasuk keberlanjutan ekologi alam (*planet*). Konsep yang ditawarkan ini selain menekankan pada pentingnya peningkatan aspek *on farm* dan *off farm* dalam suatu siklus usaha melalui adaptasi dan pemanfaatan teknologi yang berbasis kearifan lokal, juga menyoroti pentingnya kelembagaan petani agar mampu meningkatkan daya tawar dalam perniagaan khususnya dalam meningkatkan pendapatan riil (nilai tukar) di era saat ini dan ke depan. Salah satu upaya yang bisa ditempuh selain mendorong petani melalui introduksi dan inovasi teknologi bercocok tanam (budidaya), juga mendorong petani untuk mulai mengembangkan *processing* agar mampu mendiversifikasi pendapatan tidak hanya menjual bahan mentah.

Banyak yang menyebut, gerakan demokratisasi yang digulirkan sejak Orde Reformasi cenderung mengarah pada “demokrasi prosedural”, bukan demokrasi substantif. Alih-alih rakyat didorong untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, praktik partisipasi demokrasi pada era ini nampak masih jauh dari tuntutan perubahan yang diamanatkan pada saat reformasi. **Bab 3** buku ini (“Revolusi Mental”: Mendorong

Partisipasi), penulis menyoroti pentingnya aspek sosial budaya dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Penulis menganggap bahwa masyarakat (sosial) secara kelembagaan menjadi pilar, yang berhak terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut kehidupan dan lingkungan hidup mereka, saat ini dan ke depan. Beberapa aturan perundangan yang disebutkan dan memberikan hak, penulis mengakui bahwa pada saat ini posisi antara *das sollen* masih menganga jurang pemisahannya dengan *das sein*. Oleh karenanya, ia mengajak pembaca untuk lebih memikirkan dan mengembangkan prinsip-prinsip dari sistem nilai budaya seperti gotong royong dan musyawarah. Bagaimana memulai dan dengan cara apa, ini barangkali yang masih menjadi pertanyaan besar, mengingat perkembangan empirik masyarakat akhir-akhir ini seakan justru menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya. Bagaimana langkah-langkah dapat disusun secara sistematis agar kesadaran masyarakat dapat meningkat dan mampu menjadi pilar yang berdiri kokoh dalam proses perencanaan, proses pengambilan keputusan, serta proses pengawasan jalannya keputusan. Lebih jauh bagaimana kesadaran individu dan masyarakat dalam bergotong-royong tersebut mampu dilembagakan melalui institusi-institusi yang ada dalam masyarakat, agar demokrasi berjalan lebih substantif termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, baik pada level nasional, daerah, maupun komunitas desa.

Paparan para penulis **Bab 4**, secara khusus berupaya untuk mempromosikan penggunaan sumber daya energi terbarukan, karena sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan maupun semangat dari penulisan buku ini. Seperti diketahui

bersama, negeri ini masih sangat tergantung pada sumber daya energi yang tidak terbarukan. Berbagai contoh variasi sumber-sumber energi terbarukan ditawarkan, termasuk yang berasal dari hutan. Sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia dari sisi potensi tentu ketersediaannya masih sangat melimpah. Namun demikian banyak proses yang harus ditempuh agar potensi energi terbarukan dapat diubah menjadi produk energi yang siap dikonsumsi untuk kepentingan masyarakat. Salah satu faktor pentingnya adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan maksud untuk “menciuatkan semangat”, sebagaimana diungkapkan oleh penulis berdasarkan pengalaman mengubah ketergantungan energi ke bentuk energi yang lain di banyak negara, butuh waktu 60 tahun, bahkan lebih. Penulis hanya berusaha mengingatkan bahwa proses beralih ke pemanfaatan sistem energi yang berkelanjutan bukan merupakan masalah sederhana.

Oleh karena itu, selain dibutuhkan semangat dan dukungan semua pihak, perlu disusun masa transisi agar proses peralihannya berjalan secara sistematis sesuai dengan target perencanaan yang disusun. Misalnya pada tahun sekian, pemanfaatan energi terbarukan sudah mencapai sekian. Selain itu, untuk mengembangkan energi terbarukan sekurang-kurangnya ada 4 hal yang harus diperhatikan, yakni : aspek pelestarian lingkungan, aspek kehandalan, keterjangkauan, dan aspek akses. Oleh karenanya, bab ini juga menawarkan semacam strategi adaptasi, agar proses transisi pemanfaatan energi terbarukan lebih berjalan optimal. Pokok-pokok pikiran tentang proses adaptasi dapat dijadikan rujukan pengembangan program pemberdayaan masyarakat pedesaan, sebagaimana dibahas pada bab akhir bagian pertama. Para penulis bab ini juga

melengkapi dalam uraiannya tentang apa-apa saja jenis energi yang dapat dikembangkan dalam konteks perdesaan sesuai orientasi penulisan buku ini.

Untuk melengkapi perspektif pembahasan terkait hambatan dan tantangan demokratisasi dan pemenuhan hak asasi manusia dalam segala bidang mulai dari ekonomi, politik, dan sosial budaya, dibutuhkan satu bab khusus untuk membahas perspektif gender dan inklusi sosial. Ruang-lingkup yang disasar dari upaya demokratisasi ini dimulai pada lingkup keluarga, komunitas, daerah, dan bahkan nasional. Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya. Salah satu yang paling terkena dampak akibat buruknya tata kelola dalam bidang ekologi adalah perempuan. Oleh karenanya, salah satu gerakan yang muncul pada era reformasi adalah perlu dikembangkannya perspektif gender dan inklusi sosial, yang dalam buku ini secara khusus dikemukakan pada **Bab 6**. Terdapat beberapa momentum penting seperti lahirnya ketentuan pemerintah agar perspektif gender perlu di-*mainstream*-kan.

Bab akhir pada bagian pertama buku ini menampilkan sebuah usulan program untuk diimplementasikan dalam sebuah komunitas yakni desa. Semangat multidisiplin sebagai kerangka pikir maupun rencana kerja melandasi usulan kegiatan, dengan harapan dapat dicapai hasil (*outcome*) yang menjawab berbagai permasalahan.

Cukup beruntung gagasan “Sekolah Hijau” mendapatkan kesempatan menjadikan tiga desa di Sumatera Barat dan Jambi, atas dukungan MCA-Indonesia, untuk menjadi tempat mengaplikasikan gagasan dalam sebuah “laboratorium-

lapangan". Tiga desa/kampung yang menjadi ruang praktik bersama masyarakat penting digambarkan profilnya untuk dapat memberi gambaran utuh menyangkut karakteristik berikut permasalahan dan potensi yang dimiliki. Melalui tiga bab dalam bagian kedua buku ini, secara khusus digambarkan profil tiga desa, yang sudah pasti memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, baik dari aspek sumberdaya manusia, kondisi alam, dan akses masyarakat terhadap sumberdaya.

Proses membangun manusia, kelembagaan, dan jejaring melalui "Sekolah Hijau" tentu membutuhkan waktu yang tidak pendek termasuk dukungan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan diri mereka secara mandiri. Melalui benih-benih pengetahuan dan kesadaran untuk selalu mengembangkan diri secara individu dan kolektif adalah langkah awal bagi kesuksesan Sekolah Hijau. Namun demikian, waktu satu setengah tahun (Juli 2016 – Februari 2018) mungkin terlalu pendek untuk sebuah perubahan dalam masyarakat. Meski waktu terasa pendek untuk menilai sebuah kesuksesan dalam pelebagaan gagasan dan model perubahan, namun kerja-kerja selama satu setengah tahun tersebut cukup disayangkan jika hanya dibuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban administratif. Kerja-kerja tersebut tidak hanya berhenti sampai di sini, namun dapat digunakan untuk tujuan yang lebih luas dalam memberikan inspirasi tidak hanya masyarakat di ketiga desa. Pendek kata, sekecil apapun praktik baik (*best practices*) dan pembelajaran Sekolah Hijau sayang untuk tidak didokumentasikan dan dibagikan kepada mereka yang memiliki perhatian pada dunia pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Indonesia. Bagian ketiga buku ini

secara rinci menjelaskan tahapan dan praktik kegiatan sekolah hijau dalam tiga bab X, XI, dan XII, khusus yang tersaji secara tematik sesuai misi program, yakni aspek manusia, kelembagaan dan pengembangan jejaring. Sidang pembaca dapat mengikuti tahapan proses kegiatan dan dinamika yang terjadi selama proses berlangsung di ketiga desa/kampung, Jorong Tandai Bukik Bulek, Desa Rawasari, dan Sungai Rambut. Ada banyak faktor dan kondisi serta tingkat partisipasi “kader hijau” dalam komunitas pada tahap awal implementasi sehingga membutuhkan pola dan strategi interaksi dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai latarbelakang sosial, ekonomi, dan budayanya. Demikian pula dari sisi kelembagaan, masing-masing menghasilkan rencana tindak lanjut berbeda sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat. Ada yang menggagas pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Koperasi, kelompok usaha bersama, dan-lain-lain, suatu kelembagaan bersendikan kepentingan kolektif. Akhir kata, kesadaran usaha kolektif bermodalkan akumulasi pengetahuan (modal intelektual) dan akumulasi modal sosial (modal kelembagaan) melalui inisiasi Sekolah Hijau, diharapkan menghasilkan partisipasi yang luas kepada masyarakat desa tidak hanya dari sisi produksi, distribusi, tetapi juga dalam hal penguasaan faktor produksi. Seringkali sulit membedakan antara partisipasi dan mobilisasi dalam praktik pembangunan.

BAB I

MANIFESTO EKONOMI HIJAU

Awan Santosa

Mukadimah

Selama ini pembahasan soal rakyat yang menjadi pelaku utama atau pemegang kendali pengelolaan sumber daya kurang mendapat perhatian yang mendalam. Pendulum selalu diputar ekstrim di antara dua kutub pembahasan, yang pertama negara dan yang kedua swasta (pasar). Apalagi dalam konteks Indonesia, maka berbicara soal pendulum ketiga yaitu rakyat, orang cenderung menaruh kehati-hatian. Pelabelan atau asosiasinya dengan komunisme atau sekurang-kurangnya sosialisme, dengan kepentingan tertentu, sering dijadikan alasan.

Padahal dalam rentetan sejarah yang sudah sangat panjang, jauh sebelum hadirnya negara (republik) seperti sekarang, rakyat yang terhimpun dalam beberapa kelompok etnis, suku, dan adat sudah menjalankan praktik-praktik keekonomian, istilah orang belakangan. Kelompok tersebut tumbuh serta berinteraksi dengan sumber daya alam, baik tanah, air, hutan, bukit, pertanian, pangan, maupun sumber daya yang dikenal dengan istilah energi pada saat sekarang. Telah lama mereka terbiasa mengelola sumber-sumber kemakmuran tersebut secara komunal, menurut perangkat nilai dan hukum adat, serta hasil

yang nampak berlainan dengan sistem pengelolaan yang dominan berlaku sekarang.

Hidup bersama dengan alam maka menghancurkannya sama saja dengan menghancurkan diri sendiri, dan masa depan. Mengambil sesuai kebutuhan, menggantinya dengan yang baru untuk hari kemudian, maka sesuatu yang “baru-baru” ini disebut dengan istilah “terbarukan” sebenarnya bukan lagi barang “baru”. Tata kelola komunal yang diikat kuat dengan hukum adat yang berlandaskan nilai-nilai dan kearifan dalam sejarahnya telah menjadi penjaga bagi keberlangsungan ekosistem, yang membawa kita pada keadaan sekarang. Bahwa saat ini semakin ramai dibincangkan soal sumber daya atau energi terbarukan maka ia bisa berarti munculnya “kesadaran” baru atau justru adanya segelintir orang yang mulai melihat perlunya “komoditi” baru.

Masyarakat adat di wilayah Sulawesi Barat, yang terhimpun secara komunal, yang kemudian berkembang menjadi etnis *Campalagian* misalnya, telah lama memiliki tata kelola hutan yang sama sekali tidak berkaitan dengan urusan penghancuran alam. Melalui seperangkat falsafah dan nilai luhur yang dibentangkan melalui serangkaian ritual, cerita, dan peraturan hidup komunal maka bertahun-tahun mereka tumbuh menyatu dengan mengelola alam, utamanya hutan, pertanian, dan pangan yang menjadi sumber penghidupan. Kerusakan dan pembakaran hutan dewasa ini sama sekali tidak mencerminkan cara mereka mengelola hutan, yang sekaligus menjadi cara mereka melindungi diri dan berhubungan dengan Tuhan.

Saat yang sama di tempat berbeda masyarakat Suku Amungme di Papua memandang bukit-bukit penuh kekayaan yang

mengelilingi pemukiman mereka sebagai “ibu” yang menjadi sumber penghidupan. Berbagai perangkat adat dan ritual diciptakan sebagai pengejawantahan konsepsi ini, sehingga menjaga kelestarian alam adalah menjaga diri, komunitas, dan anak cucu mereka ke depan. Mereka menumbuhkan dan merawat tanaman pangan dan mencari ikan dari sungai-sungai kecil yang mengalir di balik-balik bukit dan pegunungan. Kerusakan apalagi kehancuran lingkungan sama sekali tidak dikenal dalam tatanan masyarakat komunal tersebut. Mereka mengelola pertanian, pangan, sumber daya alam, termasuk sumber-sumber energi di dalamnya, penuh dengan nilai dan kearifan.

Demikian, pada masyarakat komunal yang bertahan hidup dan tumbuh berkembang dengan mengelola sumber daya alam, maka konsepsi keterbarukan sudah melekat secara intrinsik dalam cara mereka berkehidupan. Tanpa keterbaruan maka tidak ada tempat bagi mereka, apalagi anak cucu mereka di masa mendatang. Keterbaruan menjadi bagian dari naluri alamiah masyarakat komunal untuk berkembang. Tentu saja naluri alamiah manusia yang terdalam pasti berkaitan dengan hubungan transedental mereka dengan Tuhan, Yang Maha Pencipta Alam. Merusak alam bukan saja membunuh kehidupan, tetapi juga mengkhianati Tuhan. Maka keterbaruan adalah elemen yang melekat erat dengan komunitas lokal, ketika rakyat yang mengelola sumber daya secara komunal.

Permasalahan: Degradasi Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial

Lalu darimana datangnya berbagai kerusakan dan kehancuran sekarang? dan mengapa konsepsi keterbaruan datang

belakangan, setelah berbagai sumber-sumber kekayaan dan energi tak terbarukan hampir dihabiskan?

Semua bermula dari salah urus pengelolaan. Komunalitas dalam mengelola sumber daya alam, pertanian, dan pangan dihancurkan manakala terjadi ekspansi dan okupasi oleh perusahaan perorangan, baik melalui perantara negara maupun yang dilakukan melalui penjajahan. Perusahaan perorangan yang digerakkan oleh profit maksimal bagi segelintir orang mendorong mereka menguasai bahan baku, tenaga kerja, dan juga pasar. Pengelolaan sumber daya tidak lagi berdasar semangat memperbarui dan melestarikan, melainkan untuk menghabiskan demi kekayaan material sekarang. Tentu saja demikian karena mereka sama sekali tidak memiliki masa depan di wilayah kekuasaan. Pemerintahan, termasuk di dalamnya dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, pangan, dan energi, yang dikendalikan oleh perusahaan swasta, yang sekarang dikenal dengan istilah korporatokrasi adalah titik balik peradaban.

Korporatokrasi berkembang luas karena akumulasi kapital hanya mungkin dilakukan melalui eksploitasi baik terhadap manusia maupun alam, yang sekiranya sudah mengalami sumbatan di dalam, maka ia harus disalurkan melalui ekspansi, yang kita sebut kemudian dengan penjajahan. Perusahaan swasta, sebagian besarnya multinasional yang mengelola hutan tropis, minyak mentah, gas, batu bara, emas, dan berbagai kekayaan alam, pertanian, pangan, dan sumber energi tak terbarukan lainnya adalah pemicu kerusakan dan kehancuran alam, dan sama sekali tidak berkaitan dengan jalan keluarnya. Individualisme yang menjadi dasar, orientasi, dan perilaku

mereka memang tidak memungkinkan mereka berpikir soal keterbaruan.

Kerusakan yang ditimbulkan dengan mengangkut seperangkat nilai diametral dengan nilai-nilai dan kearifan setempat tersebut bahkan semakin menyebar. Bukan saja lingkungan yang semakin rusak, melainkan juga sistem nilai setempat, yang pada akhirnya merusak pula sistem moral, sosial, ekonomi, dan politik pemerintahan yang seakan tidak pernah mampu keluar dari belitan korupsi di berbagai bidang dan lembaga kenegaraan. Maka dengan dalih apapun korporatokrasi tidak akan membawa kebaikan apalagi kesejahteraan. Kekuasaan dalam mengelola sumber daya alam dan energi oleh perusahaan yang demikian besar karena semakin dilemahkannya negara dan pemerintahan telah terbukti berbuah kehancuran, dan sama sekali bukan keterbaruan.

Korporatokrasi dan keterbaruan tidak mungkin dapat berjalan beriringan. Kepemilikan bersama, seperti yang disematkan pada sumber daya alam tidak mungkin dibaurkan dengan pengelolaan perorangan. Sudah terlalu banyak contoh bagaimana sumber daya yang dikelola perorangan akan menghasilkan distribusi kesejahteraan yang sangat timpang. Seperti diuraikan di awal, pendelegasian pengelolaan kepada perusahaan perorangan oleh pemerintah merupakan sebuah bentuk korupsi kalau tidak boleh dibilang legitimasi penjarahan. Inilah alasan kenapa korupsi begitu sulit diberantas sampai sekarang. Negara yang mendapat mandat rakyat untuk mengelola kekayaan alam karena pertimbangan skala produksi, biaya, dan teknologi justru melimpahkan mandat itu kepada

perusahaan perorangan yang semestinya dijauhkan dari bisnis yang berkaitan dengan hajat hidup orang kebanyakan.

Demikian, memanfaatkan sumber daya terbarukan tanpa mengubah sistem pengelolaan sumber daya yang kapitalistik, termasuk di dalamnya sumber daya pertanian, pangan, dan energi, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan tidak akan membawa banyak kemanfaatan. Bukan karena komitmen terhadap masyarakat, alam, dan lingkungan perusahaan kapitalis bersedia mengelola sumber daya alam dan energi, melainkan karena keuntungan maksimal yang harus dipersembahkan kepada para pemegang saham. Tidak jadi soal kalau itu harus dilakukan dengan cara merusak, menjarah, menjajah, bahkan menghancurkan kehidupan.

Pengembangan sumber daya terbarukan tanpa perubahan mendasar ini patut dicurigai sebagai upaya penyamaran dari dominasi dan okupasi sumber daya alam dan energi tak terbarukan yang tidak tergoyahkan hingga sekarang. Setelah negara mengeluarkan begitu banyak investasi, anggaran, teknologi, dan kebijakan untuk mengembangkan energi terbarukan, dan setelah energi tak terbarukan semakin habis mereka perdagangkan pada saatnya, maka mereka pulalah yang bersiap-siap menguasai energi terbarukan, bukan rakyat kebanyakan. Tentu saja ini sangat jauh berbeda dengan hakekat dan tujuan pendayagunaan sumber daya terbarukan.

Pengelolaan SDA Berbasis Komunal

Pendayagunaan sumber daya terbarukan baik SDA, pertanian, energi, maupun pangan umumnya dipandang berteknologi tinggi dan berbiaya mahal. Hal ini karena mengikuti pandangan ekonomi pasar, di mana sumber daya tersebut pasti dapat

dijadikan komoditi dan diperdagangkan. Tentu ini berbeda sekali dengan pemanfaatan sumber daya alam termasuk sumber energi, pertanian, dan pangan di era masyarakat komunal sebagai sumber pemenuhan kebutuhan langsung bagi kehidupan. Akibatnya adalah pilihan-pilihan sumber daya dan energi terbarukan yang kemudian cenderung padat teknologi dan ujung-ujungnya padat modal. Lalu ini dengan segera akan menjadi pintu masuk bagi pemilik kapital untuk menimbang investasinya bagi mereka yang berkemampuan. Pengetahuan dan teknologi SDA, pertanian, pangan, dan energi terbarukan dengan begitu tidak berkembang berdasar kebutuhan masyarakat komunal, melainkan sesuai dengan kepentingan investor dan pasar.

Seperti diuraikan di depan, komunalitas dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, pangan, dan energi terbarukan akan menjadi penentu bagi pengembangannya ke depan. Maka dari itu, pengembangan sumber daya terbarukan berbasis komunitas lokal setidaknya mengacu pada beberapa pola berikut ini:

Pola Kepemilikan dan Pengelolaan

Perlu dipahami bahwa sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya pertanian, pangan, dan energi adalah milik bersama, bukan milik negara. Negara hanya memperoleh mandat untuk menguasai dan mengelolanya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat ini khususnya berkaitan dengan sumber daya alam dan energi yang tidak memungkinkan dikelola secara kolektif oleh masyarakat karena pertimbangan skala produksi, teknologi, dan biayanya yang

terlampau besar. Klausul ini kiranya lebih berkesesuaian alam konteks SDA dan energi tak terbarukan, akan tetapi dalam pengembangan sumber daya terbarukan maka sangat relevan pengelolannya secara komunal, berbasis komunitas lokal. Hal ini mengingat keterbaruan sudah menjadi bagian dari komunalitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

SDA dan energi terbarukan dikelola secara komunal sesuai dengan kebutuhan dan taraf perkembangan masyarakat setempat, mulai dari mikrohidro, biogas, tenaga surya, dan kincir angin yang terjangkau oleh masyarakat. SDA dan energi terbarukan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan komunal dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya umum (publik) lainnya. Pengelolaan SDA dan energi terbarukan secara kolektif menjadi bagian dari pengembangan *eco-village* dalam lingkup spasial yang lebih luas. Sebuah kehidupan yang tidak saja baru, namun juga terbarukan dan maju merupakan arah pengembangan perdesaan serta tumbuh berkembang tanpa harus mengikuti pola pertumbuhan perkotaan yang dipenuhi dengan berbagai bentuk ketergantungan.

Pola Produksi

Bagaimana dengan pola produksi SDA, pertanian, pangan, dan energi terbarukan berbasis komunitas lokal? tentu saja poros utama kreasi dan produktivitas bertumpu pada pertumbuhan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, pangan, dan energi terbarukan. Oleh karenanya, ilmu pengetahuan dan teknologi SDA dan energi terbarukan berangsur-angsur ditumbuhkan dan dialihkan kepada masyarakat komunal. Ia tidak boleh hanya dikuasai oleh

segelintir elit akademisi di perkotaan, sehingga perlu kerja keras dari para ilmuwan untuk berbaur menjadi bagian dari proses perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang lebih dulu dan maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi mitra produksi pertanian, pangan, dan energi terbarukan bagi masyarakat komunal, yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana-dana masyarakat yang dipungut pemerintah lewat pajak dan sebagian dialokasikan melalui perguruan tinggi.

Pola Distribusi dan Konsumsi

Bagaimana dengan pola distribusi dan konsumsi SDA, pertanian, pangan, dan energi terbarukan? dalam hal alokasi dan konsumsi SDA, pertanian, pangan, dan energi terbarukan yang berasal dari produksi komunal pertama kalinya tentu akan berorientasi pada masyarakat komunal itu sendiri. Pola konsumsi umumnya akan mengikuti pola produksi. Upaya agar masyarakat menggunakan sumber-sumber terbarukan tersebut adalah dengan menjadikan mereka sebagai penghasil sumber daya terbarukan tersebut. Tentu saja ini mensyaratkan keterjangkauan masyarakat terhadap faktor-faktor dan cara produksi

SDA, pertanian, pangan, dan energi terbarukan baik dari sisi kapasitas, teknologi, maupun pendanaan. Tugas pemerintah baik pusat maupun daerah adalah bagaimana memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya terbarukan secara komunal, melalui kelembagaan khas di tingkat lokal.

Relevansi Sekolah Hijau dalam konteks ini adalah semacam pabrik pengetahuan hijau, sebagai inisiasi awal pengembangan kewirausahaan hijau berbasis komunitas lokal. Sekolah Hijau

inilah yang akan mengawal peningkatan kapasitas komunitas lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya terbarukan. Sekolah Hijau merupakan gerakan bersama yang pada saatnya nanti akan melahirkan Jaringan Hijau sebagai prasyarat terjadinya perubahan sosial di Indonesia.

BAB II

“KEDAULATAN PANGAN” HARGA MATI

Herry Wirianata
Dimas D. Puruhito

Produktivitas dan Nilai Tukar

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian melalui pengertian tersebut memiliki arti penting dalam posisinya bersama dengan bidang dan sektor lain dilihat dari perannya bagi kesejahteraan dan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Pertanian menjadi sangat penting dalam hal pemenuhan berbagai kebutuhan hidup umat manusia. Arti penting pertanian dilihat dari saling keterkaitan, saling ketergantungan dan sinerginya dengan bidang atau sektor lain, sehingga pertanian menjadi aktivitas yang sarat dengan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertanian juga dilihat dari kondisi saat ini danantisipasi masa depan akan pemenuhan kebutuhan energi, permintaan makanan yang sehat, reduksi gas rumah kaca, udara bersih, dan kesehatan lingkungan.

Sebagai negara tropika dengan sinar matahari yang melimpah, produksi pertanian Indonesia masih rendah dan terbuka peluang besar untuk ditingkatkan. Wilayah tropika dikenal

memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah bagi masa depan kemanusiaan. Kecukupan pangan sering menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat kita, padahal potensi sumber daya pertanian sangat besar. Laju penyediaan pangan yang diramalkan mengikuti deret hitung sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang menuntut pemenuhan pangan mengikuti deret ukur, menuntut dilakukannya langkah-langkah cerdas mengatasi keterbatasan tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan hasil panen per satuan luas lahan (produktivitas). Peningkatan produktivitas harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, petani harus dapat menikmati margin peningkatan produktivitasnya secara ekonomi. Kondisi paradoks ini menjadi diskursus berkepanjangan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam memaknai kinerja pertanian kita. Oleh karena itu diperlukan pendekatan multidimensi dalam pembangunan pertanian. Pembangunan sektor pertanian jangan hanya ditujukan untuk menghasilkan bahan pangan murah sehingga mampu menekan laju inflasi saja. Namun lebih dari itu, pembangunan pertanian haruslah memiliki tujuan yang lebih mulia, yaitu pembangunan yang mampu mensejahterakan secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi para pelaku utamanya dan memberi dampak positif bagi masyarakat sehingga dapat berkelanjutan (*sustainable*).

Pembangunan pertanian untuk mencapai kemandirian pangan harus didasarkan pada pengembangan kecakapan petani dan masyarakat tani dalam mengelola lahannya yang ditunjang sistem yang mengintegrasikan *on-farm* dan *off-farm*. Kecakapan ini menjadi modal dasar dalam mengelola sumber daya lokal. Pengembangan kecakapan dalam pertanian tanaman pangan

banyak terhambat oleh ketergantungan petani pada pihak eksternal dan belum terbangunnya sinergi yang menuju kepada kemandirian petani. Peningkatan produksi beberapa tanaman pangan seperti padi, kedelai, dan jagung telah berhasil dicapai oleh petani. Namun, dari sisi pengadaan *input* dan penjualan *output*-nya petani masih sangat tergantung kepada penyedia benih unggul, pupuk kimia dan pestisida kimia, serta tengkulak dan pengumpul produk dan hasil pertanian. Ketergantungan petani pada pihak luar (korporasi dan pemburu *rente*) ini selain berpotensi menyebabkan erosi genetik, hilangnya plasma nutfah lokal yang menjadi kebanggaan kita selama ini, juga secara sistemik akan menghilangkan kemandirian dan jatidiri petani beserta kelembagaannya di perdesaan.

Kecukupan pangan dalam arti kuantitas, kualitas dan kontinuitas telah menjadi bagian penting dalam sistem produksi nasional sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *World Conference on Human Right* tahun 1993. Konsumsi pangan dan gizi menjadi bagian penting dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia. Persebaran penduduk yang tidak merata menjadi masalah untuk memenuhi kecukupan pangan selama ini, karena sistem produksi pangan memerlukan akses infrastuktur yang didukung sistem kelembagaan yang mampu menjangkau seluruh wilayah nasional. Kontras kesenjangan akses terhadap pangan dan gizi masih sering terjadi dalam bentuk busung lapar dan gizi buruk pada anak-anak dan balita. Malnutrisi berkelanjutan meningkatkan angka kematian anak. Kecukupan pangan berarti kemampuan memenuhi kebutuhan pangan yang dapat dilakukan secara mandiri ataupun melalui kerjasama antar negara. Namun menilik geografi dan bonus demografi

yang dimiliki, swasembada lokal untuk pangan sangat penting bagi pembangunan pedesaan dalam jangka panjang.

Sistem produksi pertanian (tanaman pangan) selama ini didominasi oleh pendekatan reduksionis mekanistik dan telah mengganggu relasi manusia dengan alam. Pemanasan global, bencana kekeringan, erosi genetik, dan gangguan hama dan penyakit menjadi masalah yang dihadapi petani. Semakin lama petani semakin tergantung dan tidak berdaya, sementara itu, kapasitas belajar mereka terhadap kondisi setempat tidak terbangun. Pertanian Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) yang menjadi bagian dari Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) selayaknya menjadi upaya solutif untuk membangun kapasitas petani dalam rangka peningkatan produksi pertanian yang berwawasan ekologis.

Perangi Kemiskinan Petani

Pertanian Berkelanjutan (PB) menekankan pada keberlanjutan usaha ekonomi (*profit*), keberlanjutan kehidupan sosial manusia (*people*), keberlanjutan ekologi alam (*planet*). Penerapan konsep PB di lapangan memerlukan rekayasa sosialekologis. Penerapan konsep ini sebaiknya mengutamakan dinamika sosial interaktif yang berkembang di masyarakat atau kelompok tani di mana proses belajar bersama terarah ke suatu perubahan yang bisa direkayasa. Kondisi-kondisi yang menunjang proses pengembangan PB diciptakan dalam bentuk terciptanya sistem pertanian ekologis masyarakat melalui perubahan kebijakan, kelembagaan dan perilaku. Pengertian tentang pengembangan PB dengan demikian perlu dipercayakan sepenuhnya kepada hasil proses belajar masyarakat (kelompok tani). Kelompok tani bisa saja memasukkan komponen-komponen luar seperti : bibit

tanaman baru, pupuk jenis baru, teknologi baru termasuk bioteknologi di dalam usaha pengembangan pertanian mereka asalkan tetap berperspektif pada terciptanya keberlanjutan, alternatif saluran pemasaran, kelembagaan baru dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Arthur Mosher bahwa terdapat syarat pokok dan syarat pelancar bagi pembangunan pertanian di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Syarat pokok pembangunan pertanian meliputi; (1) pasar untuk hasil pertanian, (2) teknologi yang senantiasa berkembang, (3) tersedianya bahan dan alat produksi pertanian di tingkat lokal, (4) adanya perangsang produksi bagi petani, dan (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. Sedangkan syarat pelancar pembangunan pertanian meliputi; (1) pendidikan pembangunan, (2) kredit produksi, (3) kegiatan gotong royong oleh petani, (4) perbaikan dan perluasan lahan pertanian, dan (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian. Jika salah satu dari syarat pokok tidak tersedia, maka kegiatan pembangunan pertanian akan mengalami stagnan/kemandegan. Artinya syarat pokok tersebut mutlak diperlukan di dalam pembangunan pertanian sebuah negara. Sedangkan jika salah satu syarat pelancar tidak tersedia akan membuat pembangunan pertanian menjadi lambat.

Ada lima dimensi analisis di sistem pengetahuan ekologis yang perlu selalu dilihat dalam pelaksanaan PB, yakni: (1) Sistem kompleks usaha pertanian yang andal secara ekologis; (2) Terciptanya proses belajar bersama; (3) Penciptaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan; (4) Pembentukan lembaga-lembaga serta jaringan pendukung; dan (5) Konteks kebijakan yang kondusif.

Selain itu, diperlukan pembentukan *platform* di tingkat ekosistem lebih sebagai forum pencarian kesepakatan bersama menyangkut penggunaan sumber daya tersedia (air, lahan dan udara) dan forum penyelesaian masalah dan konflik-konflik yang dapat terjadi.

Perdagangan bebas sangat mempengaruhi ketersediaan dan akses terhadap pangan itu sendiri, melalui modifikasi produksi, distribusi dan lingkungan perdagangan pangan. Rantai perdagangan yang ada saat ini sangat padat modal dan teknologi serta akses pasar dan jaringan pemasaran yang luas. Kelompok tani tidak akan mampu melawan kondisi tersebut. Oleh karena itu petani harus dibangun keberdayaannya. Keberdayaan petani harus dilihat sebagai usaha meningkatkan kemampuan internal petani sekaligus juga membuka akses dan kesempatan yang lebih luas bagi petani untuk mendapatkan dukungan sumber daya produktif maupun untuk mengembangkan usaha yang lebih mensejahterakan. Penyuluhan dan pendidikan pertanian menjadi agenda operasional yang sangat penting. Pengembangan lembaga pembiayaan dengan produk yang sesuai dengan karakter petani dan pertanian akan menentukan kemudahan akses pada sumber daya finansial. Akses penguasaan petani terhadap kegiatan lanjutan khususnya agroindustri dan jasa pertanian yang memiliki insentif lebih baik sekaligus menentukan kinerja usaha taninya juga semakin terbuka. Penguatan posisi tawar dan pengembangan kapasitas petani melalui kelembagaan semisal; kelompok tani sehamparan, koperasi tani, dan waserda/kios tani sangat diperlukan dan memiliki peran strategis di kemudian hari.

Globalisasi pangan telah memicu munculnya penyeragaman diet dan gaya hidup yang menyertainya. Memang hal ini mendorong pengembangan teknologi dan rekayasa produk pangan. Pengembangan pangan berbasis produk pertanian lokal memang bertolak belakang dengan globalisasi pangan, namun pemanfaatan dan adaptasi teknologi yang menyertainya sangat penting untuk pertanian lokal. Selain itu, PB dapat berperan mengurangi kehilangan plasma nutfah akibat penyeragaman bahan tanam dan pangan yang dihasilkan.

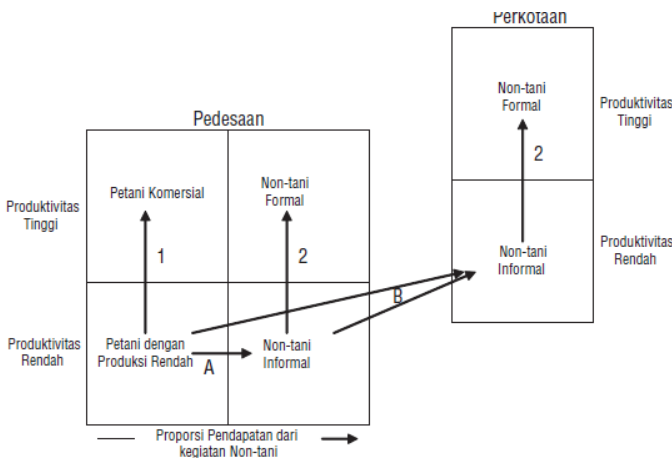
Teknologi yang diadopsi dalam pengembangan PB mengutamakan kearifan lokal (ekologis). Petani dan kelompok tani diberi tanggung jawab sama tetapi diwujudkan dalam cara yang berbeda, sehingga nilai tambah dari usaha taninya saling melengkapi. Beberapa ragam teknologi yang dipergunakan dalam pengembangan PB adalah : (1) Teknologi daur ulang materi dan energi: penggunaan limbah pertanian dalam bentuk biomassa tanaman sebagai pupuk organik; (2) Konservasi plasma nutfah lokal atau memperkaya plasma nutfah tersebut melalui persilangan yang didukung oleh penentuan waktu tanam mengacu kepada kondisi agroklimat lokal; (3) Introduksi dan inovasi teknologi bercocok tanam yang mampu meningkatkan kinerja tanaman yang telah ada atau telah diusahakan oleh masyarakat setempat; (4) Pengembangan produk olahan berbasis pangan lokal atau introduksi yang sesuai dengan kecakapan dan kebutuhan petani setempat; (5) Penggunaan sumber energi alternatif ramah lingkungan dalam pascapanen dan pengolahan produk pertanian; dan (6) Mendukung pemanfaatan pengetahuan dan teknologi asli dan disinergikan dengan teknologi luar.

Kesulitan umum yang dihadapi petani pasca panen adalah akses pasar untuk menjual produk pertaniannya. Hal ini dapat memberikan umpan balik negatif terhadap keberlanjutan usaha produktif *on-farm*.

Aktivitas pertanian yang memerlukan luasan lahan, banyak dilakukan masyarakat di perdesaan Indonesia. Hal ini menjadikan keidentikan antara kegiatan pertanian dan perdesaan. Namun demikian, justru di perdesaan lah dijumpai sebagian besar kantung-kantung kemiskinan. Artinya, aktivitas pertanian yang pada umum dilakukan dan telah menjadi mata pencaharian penduduk perdesaan, belum dapat memberikan pendapatan yang layak bagi petani khususnya dan menjadi sumber kegiatan produktif yang memandirikan desa. Data dari Bank Dunia menyatakan bahwa di negara-negara berkembang, tingkat kemiskinan di perdesaan sangatlah tinggi yakni mencapai 82%. Artinya petani yang sebagian besar berada di perdesaan merupakan bagian dari golongan miskin tersebut. Rendahnya pendapatan riil petani akibat nilai tukar hasil pertanian yang realtif rendah dalam jangka panjang akan membuat ketidaktertarikan masyarakat perdesaan untuk menekuni aktivitas pertanian. Fenomena urbanisasi dan alih fungsi lahan telah menunjukkan hal tersebut. Selain itu, pada kenyataannya bahwa masyarakat perdesaan/petani merupakan konsumen bahan pangan terbesar telah menyadarkan kita, bahwa sesungguhnya ketersediaan, ketahanan dan kedaulatan pangan di perdesaan pun tengah berada dalam jurang masalah.

Bank Dunia menyebutkan bahwa salah satu golongan miskin di Indonesia adalah rumah tangga miskin di perdesaan dengan tingkat pendidikan rendah dan anggotanya kebanyakan terlibat

dalam kegiatan-kegiatan pertanian yang produktivitasnya rendah dan kebanyakan tidak terhubung dengan pusat pertumbuhan utama. Selanjutnya Bank Dunia menawarkan dua jalan “produktivitas” untuk keluar dari kemiskinan, pertama adalah berpindah dari sektor pertanian subsisten yang memiliki produktivitas rendah ke sektor pertanian komersial. Hal ini mencakup intensifikasi melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan dan juga diversifikasi dengan tanaman yang bernilai lebih tinggi, baik tanaman pangan maupun non pangan. Ini disebut sebagai jalan 1 pada gambar 1, juga mencakup mereka yang keluar dari kemiskinan karena mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik di sektor pertanian komersial. Jalan kedua, melalui peningkatan produktivitas dan keuntungan usaha non pertanian, termasuk pekerjaan baru dan pekerjaan formal dengan upah yang lebih baik dalam bidang usaha tersebut. Ini disebut sebagai jalan 2 pada gambar 1, dan hal tersebut dapat dilakukan di pedesaan dan perkotaan.



Sumber: Bank Dunia 2007

Gambar 1 Jalan Keluar dari Kemiskinan

Dua penggerak produktivitas tersebut disertai dengan dua fase transisi yang dapat dilalui individu untuk mencapai jalan kedua untuk dapat keluar dari kemiskinan. Pertama, adalah fase transisi A, yaitu peralihan sektor dari lapangan kerja sektor pertanian ke sektor non pertanian di daerah perdesaan. Kedua, adalah fase transisi B, yaitu peralihan lokasi dari perdesaan ke lapangan kerja di perkotaan, baik melalui migrasi musiman/permanen. Hal ini dapat terjadi pada rumah tangga yang sekarang terlibat dalam sektor pertanian subsisten dan rumah tangga yang sekarang terlibat di sektor perdagangan, manufaktur, dan jasa dalam skala kecil (rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian dan rumah tangga yang bekerja di sektor non-pertanian) perdesaan.

Dapat dilihat dari uraian di atas bahwa betapa pentingnya peranan pertanian didalam membangun perekonomian desa. Pertanian dan perdesaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pertanian haruslah dilihat sebagai aktivitas kompleks yang melibatkan sebagian besar *stakeholder* di perdesaan untuk menghasilkan produk primer yang berkelanjutan, yang sangat diperlukan sebagai bahan baku sektor industri dan jasa lainnya di luar perdesaan. Aktivitas kompleks tersebut meliputi manajemen produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

BAB III

“REVOLUSI MENTAL”: DORONG PARTISIPASI SOSIAL

Suci Handayani
Aminatun Zubaedah

Peluang Partisipasi Sosial

Sebagai pendekatan, pembangunan sosial bukan konsep baru. Konsep ini pada awalnya untuk mengurangi dampak negatif pembangunan ekonomi yang tidak diinginkan seperti kesenjangan sosial, ekonomi, disintegrasi, dan lain-lain. Pembangunan sosial juga dipahami sebagai upaya pencapaian kualitas kehidupan yang diinginkan dan karena itu lebih memusatkan perhatian pada individu dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang bersifat inklusif dan universal. Pendekatan pembangunan sosial menggabungkan berbagai unsur sosial di masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu, keluarga, dan masyarakat, serta tidak hanya mengandalkan pembangunan ekonomi semata (Drolet dan Sampson, 2014).

Pembangunan sosial bertujuan memfasilitasi partisipasi masyarakat di semua lembaga sosial untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*promotion of social welfare*) melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan 3 strategi utama yaitu: (1) Pembangunan melalui individu (*social development by individuals*), bertujuan untuk

membangun kemampuan individu untuk bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhannya (*individual approach*); (2) Pembangunan melalui komunitas (*Social Development by Communitites*), bertujuan agar masyarakat secara bersama-sama mengembangkan komunitas lokalnya (*communitarian approach*); dan (3) Pembangunan melalui pemerintah (*Social Development by Government*). Strategi ini dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam organisasi pemerintahan. Strategi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengelola masalah-masalah sosial, dan mampu memaksimalkan peluang yang ada (Midgley (1997).

Pembangunan sosial diperkuat dengan konsep kesejahteraan sosial. Makna kesejahteraan tidak hanya diukur dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga dengan ukuran bagaimana masyarakat mampu mengelola masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, serta meningkatnya peluang masyarakat dalam berpartisipasi (Midgley dalam Adivar dkk, 2010).

Pentingnya Intelektual, Moral, dan Spirit

Pembangunan berkelanjutan sejak lama menjadi perhatian para ahli. Berbagai pengertian tentang pembangunan berkelanjutan misalnya adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland dari PBB, 1987). Ahli lain menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan

aspirasi manusia (Emil Salim, 1990). Pembangunan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar-generasi di masa kini maupun masa mendatang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH, 1990), pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi, dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Perserikatan Bangsa Bangsa pada Konferensi Tingkat Tinggi tahun 2005, menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan), tiga pilar yang saling bergantung dan memperkuat. Sedikit berbeda dengan itu, skema pembangunan berkelanjutan sebagaimana dideklarasikan Deklarasi Universal Keberagaman Budaya tahun 2001 juga lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa "*...keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam*". Oleh karena itu "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". Keragaman budaya dalam pandangan ini merupakan "kebijakan keempat" dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan lepas dari aspek-aspek tersebut di atas, yaitu aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya.

Masyarakat (sosial) dalam konteks sosial dan budaya, merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Masyarakat menjadi elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan karena berperan sebagai subyek sekaligus objek pembangunan sehingga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan lingkungan mereka di masa mendatang. Oleh karena itu keterlibatan dalam proses perencanaan sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan.

Proses perencanaan dan penggunaan sumber daya dalam pembangunan berkelanjutan berarti membicarakan masa depan yang lebih baik dan tertata bagi generasi yang akan datang. Upaya ini mencoba memandang dari segi keberlanjutan sumber daya dengan menciptakan kondisi di mana generasi masa depan memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya sesuai definisinya yaitu sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (United Nations, 1987).

Pendekatan perencanaan sudah semestinya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Wacana partisipasi sudah puluhan tahun lalu digulirkan. Konsep pembangunan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” telah masuk dalam GBHN sejak tahun 1970an. Tahun 1990an kegiatan pembangunan wilayah dirancang partisipatif melalui lembaga pengambilan keputusan dari tingkat bawah, mendekatkan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep hubungan partisipasi dan pembangunan antara lain terinspirasi dari penerapan metode partisipasi di beberapa negara

penerima pinjaman Bank Dunia dan dari banyak penelitian (Putnam, 1995; Chamber, 1997). Secara umum, yang dimaksud partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan sehingga berimplikasi terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan warga kearah yang lebih baik, menjamin terpeliharanya infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan lainnya dalam masyarakat.

Pasca era desentralisasi, ruang-ruang partisipasi masyarakat mulai terbuka lebar dan pada saat bersamaan partisipasi masyarakat juga mulai meningkat. Sejak terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, di level desa demokrasi menjadi semakin menggeliat. Begitupun setelah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, desa makin mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahannya salah satunya melalui perluasan partisipasi warga dalam proses perencanaan desa. Bahkan UU Desa tidak hanya menekankan partisipasi warga dalam bentuk memberikan masukan, tetapi sampai pada bentuk mengambil keputusan. Partisipasi dalam bentuk tersebut mewajibkan adanya wakil unsur perempuan dan masyarakat miskin di dalam musyawarah desa, serta wakil perempuan dalam keanggotaan BPD.

Peran dan keterlibatan masyarakat secara terpisah dirinci melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, terutama pasal 3 ayat 2 menjelaskan hak masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa. Disebutkan dengan jelas bahwa negara menjamin masyarakat

untuk mendapatkan informasi yang benar tentang kondisi di desanya sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan memberi pengaruh terhadap arah kebijakan desa secara tepat. Masyarakat diposisikan sebagai subyek pembangunan sehingga muncul rasa memiliki yang kuat dan tingginya kepedulian terhadap pembangunan desa dalam merancang masa depan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Saat Ini Masih Elitis dan Prosedural

Pembangunan Indonesia sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2015-2019 menegaskan ada 3 prinsip yang menjadi arus utama dalam pembangunan, yaitu (1) Prinsip *good governance*/ tata kelola pemerintahan yang baik, (2) *Sustainability*/ keberlanjutan dan (3) Gender. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah satu prinsip di mana pembangunan menjadi tanggungjawab semua pihak. Artinya pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masyarakat dan dunia usaha, memiliki tanggungjawab bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini mensyaratkan partisipasi semua pihak dalam proses pembangunan dan pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi dan mengelola proses dan sumber daya.

Pendekatan Perencanaan

(UU 25/2004)



5

Gambar 2 Pendekatan Perencanaan Menurut UU 25 Tahun 2004

Pengalaman masyarakat dalam mengikuti musrenbang, sebagian menjadi apatis setelah berkali-kali usulan mereka tidak menjadi prioritas dan tidak bisa mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan. Minimnya sosialisasi tentang prioritas pembangunan pemerintah, serta keterwakilan masyarakat yang tidak merepresentasikan kebutuhan masyarakat ditengarai menjadi salah satu penyebab apatisme partisipasi dalam musrenbang. Proses politik dalam pengambilan kebijakan dan anggaran berkontribusi besar dalam membuat skala prioritas cenderung meminggirkan usulan partisipatif masyarakat.

Penerapan strategi pembangunan sosial melalui pemberdayaan individu dan masyarakat harus dilakukan agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkualitas baik. Pengembangan kualitas partisipasi ini dapat dilakukan dengan

memberikan kesempatan kepada individu/kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Peningkatan kapasitas juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas analisa sosial masyarakat dan individu sehingga dalam musyawarah perencanaan mampu mengajukan usulan pembangunan yang benar-benar merupakan satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemampuan analisis sosial ini meliputi kemampuan memetakan potensi sumber daya baik manusia maupun sumber daya alam dan anggaran, kemampuan melihat peluang kebijakan, maupun kemampuan memetakan risiko dari setiap pilihan strategi. Analisa sosial juga meliputi kemampuan memetakan para pihak yang sejalan dengan tujuan masyarakat ataupun yang berpotensi menggagalkan tujuan. Selain kemampuan melakukan analisa sosial, yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan negosiasi dan beradu argumen. Keterbatasan anggaran menjadikan tidak semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dalam satu periode pembangunan. Harus ada prioritas dalam pembangunan. Setiap usulan masyarakat akan dihitung bobot prioritasnya untuk merumuskan prioritas pembangunan, dalam situasi ini maka masyarakat harus mampu mengembangkan argumen sehingga kebutuhannya terpenuhi.

Pembangunan yang sudah berjalan telah memberikan banyak hasil peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya bisa dilihat dari meningkatnya indeks kesejahteraan, turunnya angka kemiskinan, ataupun tingginya usia harapan hidup misalnya. Pembangunan infrastruktur yang semakin memudahkan akses dan distribusi hasil pembangunan juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proteksi sosial yang banyak digulirkan seperti Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu

Indonesi Sehat, Kartu Indonesia Pintar, maupun skema bantuan tunai bersyarat seperti Program Keluarga Harapan, menjadi salah satu potret kebijakan perlindungan bagi masyarakat marginal. Begitupun program pemberdayaan seperti pemberdayaan masyarakat pesisir, pemberdayaan kelompok tani hutan, kelompok wanita tani, KUBE bagi pelaku usaha kecil/mikro dan sebagainya.

Namun pembangunan juga seringkali menyisakan persoalan distribusi sumber daya yang tidak setara. Keterbatasan akses masyarakat marginal dalam memanfaatkan sumber daya membuat masyarakat yang miskin semakin tidak mampu mengejar ketertinggalannya dalam meningkatkan kesejahteraan. Meski banyak program pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat marginal, namun dalam praktiknya masih ditemukan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat juga penerima manfaat yang salah sasaran. Hal ini sesungguhnya menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat untuk meminimalkan keputusan bersifat elitis yang cenderung menguntungkan pihak yang memiliki akses terhadap sumber daya.

Pembangunan pertambangan, industri, HTI juga masih menyisakan PR tentang restorasi dan kerusakan lingkungan. Artinya, aspek *sustainability* masih menjadi slogan dan belum merupakan *mainstream* dalam pembangunan. Kondisi ini tentu paling dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi pertambangan dan industri tersebut. Gangguan kesehatan karena debu, suara maupun air bersih yang tidak berkualitas sering ditemukan pada masyarakat di seputar proyek. Masyarakat dalam situasi ini tidak cukup memiliki kuasa untuk

mengajukan keberatan dan meminta ganti rugi. Keberadaan undang-undang tentang CSR, juga UU tentang lingkungan hidup dan pertambangan menjadi peluang bagi masyarakat untuk dapat memastikan pertambangan dan industri yang ada di sekitar mereka mendapatkan ganti rugi atas dampak lingkungan dan kerusakan yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan tersebut.

Maju Ya Harus Sama-Sama

Prinsip partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya bagi generasi yang akan datang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan kultur, budaya atau perilaku yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa budaya yang telah ada dan berjalan baik di masyarakat mestinya bisa terus dikembangkan untuk memampukan masyarakat dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan di semua level pemerintahan, termasuk di level desa.

Gotong royong/ kebersamaan, bisa terus dikembangkan untuk memastikan masyarakat berada dalam satu kepentingan yang sama untuk tetap memastikan lingkungan tetap terjaga, dan menjadikan masyarakat berada dalam satu strata sosial yang sama tanpa membedakan ekonomi, status sosial dan gender. Gotong royong ini juga sekaligus memastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membangun rasa memiliki atas kebijakan yang ditetapkan bersama.

Kearifan lokal. Banyak budaya lokal yang sesungguhnya memiliki visi menjaga sumber daya dan menerapkan prinsip keberlanjutan. Kearifan lokal ini juga berpeluang memampukan

masyarakat untuk meminimalkan konflik yang merupakan salah satu potensi risiko (ekses) dalam proses pembangunan dengan sumber daya yang terbatas.

Menghargai pengalaman setiap individu/ anggota masyarakat.

Prinsip *apresiative inquiry* ini memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan kapasitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Prinsip ini juga sejalan dengan konsep pembangunan berperspektif HAM. Menghargai individu lain menjadi prasyarat dalam masyarakat demokratis yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai permufakatan. Menghargai orang lain ini juga berarti bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan publik, hal ini tentu berlaku baik bagi semua jenis kelamin dan interseksi gender seperti umur, strata sosial, kedisabilitasian maupun status perkawinan.

Musyawarah dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya dalam jangka panjang. Keputusan dalam musyawarah ini akan mengikat setiap individu dan kelembagaan dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan hasil musyawarah.

Mengembangkan Kemandirian. Undang-undang Desa mengamanatkan pembentukan BUMDes yang potensial untuk mengembangkan sumber daya lokal sekaligus menjadi sumber pendanaan bagi peningkatan kesejahteraan. Kemandirian ini juga memungkinkan masyarakat untuk memilih dan menentukan kebijakan yang tepat bagi desa masing masing.

Penguatan Kelembagaan. Kelembagaan biasanya mengacu pada bekerjanya aturan main suatu kelompok sosial kemasyarakatan maupun soal perilaku, baik tersurat ataupun konsensus. Institusi sosial ataupun kelembagaan bekerja untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus menerapkan prinsip keberlanjutan, baik dalam aspek ekonomi, energi, lingkungan, pertanian maupun sosial budaya. Penguatan pada level individu akan membangun karakter. Karakter individu-individu inilah yang sesungguhnya membangun norma sosial yang berlaku di masyarakat. Norma-norma yang berlaku pada gilirannya mendorong perubahan perilaku, membentuk kultur masyarakat. Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, norma sosial ini yang diharapkan menjadi koridor bagi masyarakat untuk lebih arif dalam melaksanakan pembangunan maupun memastikan kemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif dan berkeadilan.

BAB IV

ENERGI, HUTAN, DAN PILIHAN TEKNOLOGI

Rachmawan Budiarto
Suwartanti Nayono
Yuli Nugroho

Neksius Air-Pangan-Energi

Kata "energi" berasal dari bahasa Yunani "*en*" (= dalam) dan "*ergon*" (= usaha). Energi secara teknis diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas. Energi adalah salah satu penentu keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Hal itu karena aktivitas yang bisa dilakukan dengan pemanfaatan energi dalam menjaga berbagai proses ekologis, menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Ketersediaan energi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan energi tersebut akan mempengaruhi kemampuan dan cara manusia dalam mengolah bahan dan hasil pertanian, memasak, menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas usaha, fasilitas telekomunikasi, fasilitas hiburan dan sebagainya."Layanan" yang disediakan oleh energi adalah yang dimanfaatkan; bukan energi itu sendiri. Layanan energi (*energy service*) adalah berupa manfaat yang dihasilkan oleh pembawa energi bagi kepentingan hidup manusia (Modi dkk., 2005).

Terdapat tingkat minimal tertentu konsumsi energi per kapita per hari yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar warganya mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar dan mencapai standar hidup yang layak. *World Summit on Sustainable Development* tahun 2002 (UN 2002) menekankan bahwa akses terhadap energi merupakan salah satu syarat inti yang harus dipenuhi dalam usaha pengentasan kemiskinan. Kemampuan memanfaatkan layanan energi menjadi sangat penting, antara lain untuk meningkatkan produktivitas usaha, meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru, serta secara umum meningkatkan kualitas hidup terutama bagi ibu dan anak-anak. Penegasan di tahun 2002 ini masih terus relevan dalam usaha pembangunan di Indonesia sekarang ini.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana disebut di bagian pendahuluan ke dalam kebijakan dan kegiatan secara sistemik merupakan tantangan besar. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan berkelanjutan adalah langkah yang perlu dijalankan dengan memperhatikan tiga elemen sekaligus, yaitu (1) ekonomi, (2) sosial, dan (3) lingkungan dengan energi berada di pusatnya. Energi dalam wacana hubungan antara energi dan pembangunan yang berkelanjutan ini dapat dipandang melalui tiga dimensi, yaitu (1) energi sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi, (2) energi sebagai syarat pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan kesejahteraan sosial, dan (3) utamanya energi fosil sebagai penyebab tekanan pada lingkungan (Najam dan Cleveland, 2003).

Tentu energi bukan satu-satunya variabel pokok yang menopang kualitas kelangsungan hidup manusia. Terdapat

variabel pokok lainnya, yaitu air dan pangan. Konsep bahwa keamanan air, pangan, dan energi menjadi perhatian serius di mana ketiga komponen tersebut saling tergantung satu sama lain. FAO (2014) menjelaskan uraian mendalam tentang interaksi tiga aspek ini. Air dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai produk pertanian di sepanjang rantai pasoknya. Sementara itu energi dibutuhkan untuk memasok (produksi dan distribusi) air dan makanan. Berbagai aktivitas di sepanjang rantai pasok makanan membutuhkan energi, seperti guna pengoperasian pompa untuk memanfaatkan air tanah dan air permukaan, pengoperasian traktor dan berbagai piranti operasional irigasi, serta pendistribusian berbagai produk pertanian. Ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem energi perlu mempertimbangkan konsep *water-food-energy nexus* ini.

Secara garis besar, sumber energi dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Berbagai sumber energi masuk dalam kelompok terbarukan karena dapat tersedia kembali atau terbarui kembali dalam periode relatif pendek (dalam orde bulan atau tahun; bukan abad atau bahkan jutaan tahun). Akan tetapi sumber energi terbarukan akan menjadi tak terbarukan mana kala laju eksploitasi sumber daya tersebut menjadi lebih besar dibandingkan laju generasinya/pembaruannya.

Sementara itu yang dikelompokkan sebagai sumber energi tak terbarukan adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil berasal dari sisa organisme yang hidup jutaan tahun yang lalu dengan komponen utama rantai karbon. Bahan bakar fosil secara umum terdiri dari tiga jenis: batubara, minyak dan gas.

Berbagai bahan bakar fosil didapatkan dari pengolahan minyak dan gas alam, misalnya gas propan, butan, metanol dan lainnya. Terdapat pula beberapa bahan bakar fosil lainnya yang masih belum bisa diekstrak atau dikonsumsi secara efisien karena keterbatasan kemampuan teknologi, misalnya gas *hidrate*. Ini merupakan deposit metana dan air yang membentuk kristal-kristal di dasar samudera.

Ketergantungan terhadap energi fosil dewasa ini menimbulkan berbagai masalah besar yang saling terkait akibat berkurangnya cadangan utama minyak bumi, sumber energi fosil dunia yang tidak terdistribusi dengan baik, harga energi fosil, utamanya minyak bumi, yang fluktuatif, spekulatif, dan cenderung naik, potensi konflik politik bahkan militer yang didorong oleh masalah energi fosil dan juga masalah lingkungan yang sangat kompleks dengan berbagai dampak negatifnya yang sangat luas (Budiarto, 2013).

Tinjauan tentang eksternalitas terkait sistem energi menjadi relevan dalam kaitannya dengan berbagai masalah di atas. Biaya eksternal adalah biaya yang dibebankan pada pihak lain (misal konsumen atau masyarakat atau negara) yang tidak dimasukkan ke dalam harga produk yang ditawarkan di pasar (Rogner, 1999). Biaya eksternal terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil disebabkan oleh banyak hal. Biaya eksternal ini termasuk polusi dan degradasi lingkungan akibat dari ekstraksi sumber daya, polusi udara baik di dalam maupun luar ruangan yang disebabkan langsung oleh pembakaran dan juga emisi non-pembakaran seperti emisi yang berasal dari proses industri, serta dampak negatif cuaca ekstrim yang disebabkan oleh pemanasan global (IRENA, 2016). Biaya eksternal bersifat negatif yang

diakibatkan oleh pemanfaatan energi fosil bisa menjadi sangat besar.

Layanan energi perlu ditopang oleh suatu sistem yang berkelanjutan. Seperti halnya ekosistem, sistem energi yang berkelanjutan ditandai oleh kemampuannya memasok layanan energi dalam batas ketersediaan sumber energi dan kemampuan mengurai berbagai limbah dan dampak negatif sebagai akibat siklus hidup pemanfaatan sumber energi tersebut (Hughes, 2000).

Energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan sejak makin seriusnya masalah ketersediaan bahan bakar fosil, kecenderungan harga yang meningkat sehingga memberatkan, emisi gas rumah kaca, dan berbagai masalah multi disiplin lainnya (Manso dan Behmiri, 2008). Karena sifat-sifat inherennya, energi terbarukan menjadi lebih sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang berusaha melestarikan daya dukung lingkungan untuk kepentingan masa depan.

Pertimbangan kelestarian lingkungan hidup ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi dasar perencanaan dan operasional sistem energi berkelanjutan. Selain itu adalah aspek kehandalan (*reliability*), keterjangkauan (*affordability*) dan akses (*accessibility*) sistem perlu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam usaha menjamin layanan energi.

Kehandalan suatu sistem energi merupakan kombinasi tiga faktor: 1) kehandalan yang terkait pada kinerja satu bagian alat atau komponen sistem tersebut, 2) kemampuan untuk dipelihara (*maintainability*) yaitu kemungkinan untuk mendeteksi kesalahan kemudian mencapai dan mengatasi masalah pada

komponen itu sampai menggantinya jika perlu, dan 3) keamanan pemeliharaan yang mencakup suku cadang, peralatan pemeliharaan dan kemampuan para staf (Guldbrand, 2007).

Ketika sebuah negara menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan energi terbarukan sebagai sumber energi, keterjangkauan menjadi salah satu pertimbangan utama. Faktor keterjangkauan ini bergantung pada jenis teknologi, arah kebijakan, dan pertimbangan investasi. Semua aspek ini berpengaruh secara langsung terhadap harga akhir yang akan dibayarkan oleh konsumen. Hal-hal terkait biaya bisa menjadi penghalang serius upaya suatu negara untuk bermigrasi ke energi terbarukan. Tanpa teknologi konversi yang tepat dan keterjangkauan energi terbarukan ke rata-rata warna negara, manfaat sosio-ekonomi yang ditargetkan tercapai oleh peralihan ke penggunaan energi terbarukan akan tetap minimal. Energi terbarukan yang terjangkau memungkinkan menurunkan biaya energi secara umum dan meningkatkan penggunaannya. *World Energy Assessment (WEA)* yakin bahwa jika diterapkan dengan cara yang tepat, sumber energi terbarukan dapat memberi kontribusi positif terhadap pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi suatu negara (Kaggwa dkk., 2011).

Sementara itu, akses terhadap listrik diukur dengan jumlah presentase warga yang memiliki sambungan listrik rumah tangga. Sambungan listrik dapat bervariasi menurut kuantitas (misalnya jam ketersediaan/jam kesiapan dalam sehari), kualitas (misalnya tegangan dan frekuensi pengenal), dan penggunaan (misalnya penggunaan lampu). Akses terhadap bahan bakar modern diukur sebagai persentase warga yang

menggunakan listrik, bahan bakar cair, atau bahan bakar gas sebagai bahan bakar utama untuk memenuhi kebutuhan memasak. Ini tidak termasuk biomassa tradisional (misalnya kayu bakar, arang, kotoran, dan sisa tanaman) dan batubara. Akses terhadap tenaga mekanik, diukur dengan jumlah persentase warga yang menggunakan teknologi mekanis untuk aplikasi industri non-industri produktif, seperti pemompaan air, mekanisasi pertanian, dan pengolahan agro skala kecil (misalnya proses penggilingan). Hal ini mengacu pada transmisi energi melalui berbagai cara guna menghasilkan kerja, seperti untuk memompa, mendorong, dan kebutuhan serupa lainnya (Legros dkk., 2009).

Sebagai konsekuensi, langkah pemilihan teknologi energi perlu dilakukan dengan sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketersediaan daya dukung alam setempat. Sambungan listrik pada daerah-daerah terpencil terhitung mahal dan sering tidak menghasilkan keuntungan bisnis (sehingga dibutuhkan kehadiran skema non-bisnis). Proyek-proyek mikro yang bersifat desentralistik dalam kasus semacam ini sangat layak dipertimbangkan. Proyek-proyek tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi alternatif, misalnya diesel, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa, Pembangkit Listrik Tenaga Air (mikro hingga kecil), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, dan sistem sel surya. Konsep ini membutuhkan pertimbangan komprehensif yang memadukan berbagai aspek, antara lain pemilihan teknologi yang sarat dengan kompromi sisi kekuatan dan kelemahan masing-masing pilihan teknologi, kredit mikro dari sisi finansial dan program *capacity building* bagi warga/institusi lokal untuk kemampuan operasional dan pemeliharaan.

Biaya yang diperlukan untuk menikmati layanan listrik menjadi masalah tersendiri terutama untuk daerah pedesaan. Biaya instalasi awal, termasuk di dalamnya untuk perkabelan di dalam rumah, bisa jadi akan terlampaui mahal bagi warga setempat. Selain itu, karena banyak penduduk desa tidak mempunyai penghasilan tetap, iuran listrik bulanan bisa menjadi memberatkan.

Proses beralih ke pemanfaatan sistem energi yang berkelanjutan bukan merupakan proses singkat dan sederhana. Sejarah menunjukkan pula bahwa umat manusia memerlukan waktu sekitar 60 tahun untuk beralih dari ketergantungan pada suatu sumber energi ke sumber yang lain; dari ketergantungan pada kayu bakar ke ketergantungan pada batubara dan dari ketergantungan pada batubara ke ketergantungan utamanya pada minyak bumi (Aitken, 2003). Periode transisi itu kurang lebih akan berlaku pula untuk peralihan mencapai era yang didominasi oleh energi terbarukan dari era sebelumnya. Bahkan periode tersebut bisa membutuhkan waktu yang lebih panjang. *Institute for Applied System Analysis* memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 70 hingga 120 tahun untuk mencapai kondisi di mana peran energi terbarukan mencapai 30% – 50% (Berthold dan Dewey, 2004). Terjadi perubahan mendasar dan berdimensi dalam masyarakat pada masa transisi ini. Transisi dari sistem energi satu ke sistem energi yang lain dipacu oleh kombinasi antara faktor-faktor energi, ekonomi, teknologi, dan institusi (Cleveland, 2000).

Hutan Lestari Hasilkan Energi

Tahun 2017 peringatan hari hutan internasional (tanggal 21 Maret) mengambil tema “Hutan dan Energi”. Tema ini bermakna hutan bisa sebagai sumber energi, bahan bakar nabati cair, dan peneduh untuk mengurangi penggunaan energi. Hutan bisa jadi sumber energi kalau terjaga kelestariannya. Hutan sebagai bahan pemanas bisa menjadi sumber energi terbarukan utama dunia, dan hutan adalah sumber energi yang terbarukan.

Melalui peringatan HHI tahun 2017, terdapat empat pesan yang ingin disampaikan, yaitu: *Pertama*, hutan bisa menjadi sumber dari energi terbarukan. Energi dari kayu dapat bersifat ramah lingkungan, berkelanjutan, dan secara ekonomis menguntungkan dengan teknologi yang sesuai. *Kedua*, hutan sebagai sumber ekonomi hijau bagi masyarakat, karena kehutanan diproyeksikan memiliki peranan yang semakin penting di dalam perkembangan ekonomi perdesaan. Pesan yang *ketiga* yaitu bagaimana mengoptimalkan kehidupan di area perkotaan melalui kegiatan penanaman tanaman kayu di lingkungan perkotaan. *Keempat* sekaligus sebagai pemenuhan target Negara Indonesia dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan target peningkatan konsumsi energi terbarukan sebanyak 23% di tahun 2025.

Selama ini, potensi hutan sebagai energi terbarukan (seperti panas bumi, dan air, yang potensi dan keberadaan semuanya terkait dengan kelestarian hutan) belum dimanfaatkan optimal karena 90% sumber energi Indonesia masih berasal dari energi fosil seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam (Mongabay, 2017). Padahal penggunaan energi fosil (dalam hal ini: penambangan batubara secara terbuka) telah mengakibatkan

kerusakan hutan yang cukup parah sebagaimana terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Pemakaian batubara dan energi tak terbarukan yang lain juga telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi, pencemaran lingkungan, perubahan iklim serta pemanasan global saat ini. Fungsi hutan, di mana lokasi pertambangan energi fosil berada, semakin berkurang fungsinya untuk menjaga dan menyangga kehidupan baik manusia maupun makhluk yang lain. Dampak negatif pemakaian energi fosil ini sering tidak diperhitungkan sehingga terkesan pemakaian energi fosil lebih murah dibandingkan energi terbarukan.

Dampak kerusakan hutan (lingkungan) akibat eksploitasi energi fosil mengharuskan kita untuk segera mulai mengurangi penggunaan energi fosil, beralih ke sumber energi baru dan terbarukan. Pengurangan energi fosil menjadi bagian penting dari target pemenuhan komitmen Indonesia dalam kerangka konvensi perubahan iklim. Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Paris menjadi undang-undang, yang mengikat Indonesia mengimplementasikan kebijakan pengurangan emisi nasional, terutama di sektor energi. Indonesia dengan meratifikasi Perjanjian Paris, sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 17,32% dari 29% dan 23,13% dari 41% melalui sektor kehutanan. Sementara, sektor energi menurunkan emisi 11% dari 29% dan 14% dari 41%. Bahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, porsi energi terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 30% pada tahun 2050 (Satriastanti, 2016).

Salah satu upaya melestarikan lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui atau berasal dari fosil, yang digantikan dengan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Hutan sebenarnya menyimpan potensi energi terbarukan berupa energi panas bumi. Menurut Kementerian LHK, setidaknya ada 48 titik sumber energi panas bumi dalam kawasan konservasi, 56 titik di hutan lindung, 50 titik di hutan produksi dan alokasi penggunaan lain 145 titik. Semua potensi panas bumi ada 199 titik dengan perkiraan 28.617 Megawatt. Sayangnya potensi energi terbarukan tersebut sebagian besar berada di dalam kawasan taman nasional (seperti Telaga Bodas, Kamojang, Batang Gadis, Kerinci Seblat, Halimun Salak, Ciremai, Rinjani, Bogani Nawarta Bone dan lain-lain) yang memerlukan upaya khusus (infrastruktur, kebijakan) untuk mewujudkannya.

Pengurangan penggunaan energi fosil dan peningkatan penggunaan energi terbarukan tidak bisa terlepas dari peranan hutan. Secara tidak langsung, dengan menanam pohon di perkotaan akan menghemat energi dan bisa menurunkan temperatur sekitar dua sampai delapan derajat celcius. Makin banyak tanam pohon, katanya, udara jadi makin sejuk hingga mengurangi penggunaan pendingin ruangan (AC). Secara langsung hutan juga bisa menghasilkan energi dari hasil tanam pohon yakni, biofuel dan biomassa. Pemanfaatan biomassa sebagai bahan baku energi lebih mudah dan bisa dikembangkan dalam skala yang luas. Bahkan di Finlandia, energi biomasa diperoleh dari limbah pengelolaan pulp dan kertas. Tahun 2016 saja energi biomassa limbah ini menghasilkan 130 terawatt untuk listrik, pemanasan dan biofuel (Della Syahni, 2017).

Kementrian LHK telah mengkaji areal hutan produksi menjadi areal tanaman sumber energi biofuel dan biomassa, seperti eucaliptus, sengon, nyamplung, akasia, kaliandra dan kemiri. Salah satu contoh sukses keberhasilan pembangunan hutan dalam kaitan dengan energi adalah: kebun energi kaliandra (*calliandra callothyrsus*) yang dibangun oleh masyarakat di Kecamatan Geger, Bangkalan. Proyek yang diinisiasi oleh LSM Ideas ini mendapat bantuan dana dari ICCTF (*Indonesia Climate Change Trust Fund*) mengalir ke Kementerian Kehutanan, melalui sebuah proyek pengembangan Kebun Energi Kaliandra dan Pabrik *Wood Pellet* skala inkubator. Kebun Energi Kaliandra Merah dibangun oleh masyarakat atau kelompok tani FMU (*Forest Management Unit*) Gerbang Lestari yang terdiri dari 10 kelompok tani sejak tahun 2013.

Proyek yang didanai oleh ICCTF ini menjalankan program utama yaitu: (1) Membangun Kebun Energi Kaliandra Merah dengan pola *Short Rotation Coppice* (SRC) sistem atau 3T yaitu Tanam, Tebang, Trubus; (2) Membangun industri pelet kayu berbasis masyarakat dalam skala inkubator; dan (3) Mengembangkan kapasitas dan edukasi ke berbagai pihak seperti masyarakat terutama petani dan kelompok tani, pemerintah lokal, pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan pengolahan data penghitungan karbon di Kebun Energi, perkiraan penurunan emisi (*Estimated Emission Reduction*) pada area Kebun Energi Kaliandra FMU sebesar 69,69 ton CO₂eq/ha/tahun (emisi Kebun Energi Kaliandra) - 22,02 ton CO₂eq /ha/tahun (emisi hutan rakyat FMU) = 47,67 ton CO₂eq /ha/tahun. Secara teoritis, CO₂ yang terserap di

dalam tanaman melalui proses fotosintesis akan menjadi karbon padat, dan dilepaskan kembali ketika dibakar sehingga hasilnya adalah kenaikan nol tingkat emisi karbondioksida (CO₂) dalam atmosfer.

Selain itu, ketika bahan bakar berbasis biomasa seperti *wood pellet* dibakar, maka bersamaan dengan proses itu kita bisa mengerem laju pembakaran bahan bakar berbasis fosil seperti batu bara atau minyak bumi ke udara setara dengan jumlah *wood pellet* yang dibakar tersebut. *Wood pellets* dengan demikian berfungsi sebagai barang substitusi terhadap bahan bakar fosil yang mengeluarkan emisi tinggi. Tidak hanya membangun pabrik *wood pellet*, proyek ini dirancang untuk menyediakan bahan baku secara lestari melalui penanaman kaliandra di lahan tidak produktif atau lahan kosong milik masyarakat yang kita sebut sebagai kebun energi (*Biomass Energy Estate*).

Kebun energi yang dibangun akan meningkatkan kualitas ekosistem dan memperbaiki struktur tanah dan tata air. Petani yang menanam kaliandra akan memperoleh insentif ekonomi melalui penjualan bahan baku kaliandra, pemanfaatan daun kaliandra sebagai makanan ternak, dan kemungkinan mengembangkan usaha perlebahan dan madu sebagai usaha tambahan, di mana akan berlangsung terus-menerus selama 15-20 tahun selama terubusan kaliandra tumbuh.

Wood pellet merupakan bahan bakar “hijau” terbarukan padat, dalam arti mereka merupakan sumber energi yang bersifat karbon netral di mana hasil pembakaran *wood pellet* juga dapat membantu mengatasi perubahan iklim. Penanganannya dalam proses pembakaran lebih mudah dan bersih dengan kadar abu yang sangat sedikit, sehingga sangat menarik untuk digunakan.

Wood pellet pada dasarnya solid dan konsisten keras. Memiliki kadar air sangat rendah (kelembaban antara 7-10%), mengandung komponen energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan batubara kalori tinggi. Hal ini hanya akan berarti bahwa konten kelembaban rendah sangat menghemat banyak energi yang dibutuhkan untuk suatu pembakar. Kelembaban rendah dan kepadatan tinggi, memungkinkan *wood pellet* sangat efektif sebagai bahan bakar yang mudah dibakar. *Wood pellet* menghasilkan output panas yang sangat tinggi dengan kadar panasnya bisa mencapai 5.000 kilo kalori setara dengan batubara muda dan tergantung pada jenis biomasanya. Bukan pellet biasa, karena *wood pellet* dari Bangkalan ini berasal dari bahan baku kaliandra dan kayu kemlandingan yang memiliki kalori tinggi, *ash* konten rendah dan mutu pembakaran yang sangat bagus.

Adaptasi Melalui “Sekolah Hijau”

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang sering merujuk pada *Brundtland Report* (WCED, 1987), yaitu “pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang”. Untuk dapat menegakkan prinsip keberlanjutan tersebut, maka ada beberapa konsensus yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam (Ludwig, 1997), yaitu: (1) Laju eksploitasi sumber daya terbarukan tidak boleh melebihi laju regenerasi sumber daya terbarukan tersebut; (2) Eksploitasi sumber daya tidak terbarukan dapat dilaksanakan selama tidak ada kebutuhan yang lebih mendesak dari generasi yang akan datang; dan (3) Beban lingkungan tidak boleh melebihi daya dukung ekosistem tersebut.

Terkait dengan keberlanjutan, ada tiga area utama yang perlu keberlanjutan (*U.S. National Research Council, 1999*): alam, sistem pendukung kehidupan, dan komunitas yang terdiri dari umat manusia, flora dan fauna. Terdapat pula tiga area yang perlu dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan tersebut, yaitu pembangunan manusia, kelembagaan dan ekonomi.

Teknologi adalah salah satu komponen dalam membangun manusia, kelembagaan dan ekonomi. Namun begitu, peran teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan juga ambivalen (*Weaver et.al, 2000; Fleischer and Grunwald, 2002*). Teknologi disatu sisi dianggap sebagai penyebab masalah bagi keberlanjutan. Penciptaan dan pengembangan teknologi membutuhkan banyak bahan baku dan energi, dan juga menyebabkan emisi dan limbah. Teknologi disisi lain merupakan salah satu faktor kunci untuk keberlanjutan. Inovasi teknologi memengaruhi gaya hidup, pola konsumsi, hubungan sosial, pembangunan budaya dan juga kemakmuran masyarakat (*Fleischer dan Grunwald, 2002; Grunwald, 2012*). Mengingat ambivalensi yang melekat pada teknologi, maka pengembangan teknologi perlu dipikirkan matang-matang agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan umat manusia. Pengembangan dan aplikasi teknologi menurut Grunwald (2012) harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, mengkaji dampak utama dan dampak sampingan teknologi yang bersifat positif dan negatif; *kedua*, mengembangkan strategi untuk mengantisipasi dampak yang sifatnya negatif dan menyediakan peringatan awal kepada masyarakat yang akan terkena dampaknya; dan *ketiga*, menerapkan teknologi yang sesuai dengan konteks atau kondisi lokal (tepat guna dan berkelanjutan)

Ranis (1980) dalam Murphy (2009) mendefinisikan teknologi tepat guna sebagai teknologi yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya lokal, pilihan serta kemampuan pengguna teknologi, waktu dan tempat di mana teknologi diterapkan. Perlu adanya proses seleksi bersama antara pengguna teknologi dan pemrakarsanya untuk memenuhi asas tersebut. Proses ini menjadi sangat penting bagi beberapa sistem teknologi di mana terjadi kontak langsung antara pengguna/operator dan teknologi tersebut. Interaksi antara manusia dan teknologi umumnya terjadi di sistem teknologi seperti: pengelolaan air bersih, pengolahan limbah domestik, atau pembangkit listrik di mana isu sosial dan teknis (*socio-technical issue*) menjadi penting. Selain pemilihan teknologi yang sesuai, teknologi tepat guna memerlukan proses transfer pengetahuan, komunikasi dan pembangunan kelembagaan yang tidak kalah pentingnya dengan aspek teknis teknologi itu sendiri.

Transfer teknologi dapat diartikan sebagai pertukaran informasi ilmiah dan pemikiran baru terkait aspek teknis dan non teknis teknologi, antara pemrakarsa teknologi (ilmuwan, pembuat teknologi, agen donor, dll) ke pengguna teknologi (Rogers, 1995). Transfer teknologi seyogyanya dilakukan sebelum proyek dilaksanakan. Namun cara yang sering ditempuh adalah komunikasi satu arah sejak awal proyek, di mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan teknologi diabaikan. Teknologi pada umumnya diciptakan untuk memecahkan suatu masalah pada konteks tertentu. Ketika teknologi yang sama dibawa untuk memecahkan permasalahan yang kurang lebih sama namun pada konteks yang berbeda, teknologi perlu diadaptasi sesuai dengan masukan pengguna. Jika proses pemberian masukan ini ditiadakan sejak awal, maka teknologi tersebut

kemungkinan besar akan mengalami kegagalan (Smits dkk, 2007). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan adaptasi teknologi sangatlah penting.

Program pemberdayaan masyarakat terutama akan dilakukan untuk mendorong kesadaran kolektif dan partisipasi warga melalui pendekatan: (a) pengembangan partisipasi masyarakat dan instansi terkait; (b) penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat; dan (c) optimalisasi fungsi dan manfaat sumber daya alam. Pengembangan kelembagaan dimaksud adalah pengembangan “Sekolah Hijau” yang akan menjadi inti kegiatan pengelolaan pengetahuan, pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis. Sekolah Hijau dapat dipahami sebagai lembaga masyarakat mandiri yang bergiat untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan teknis, produktifitas dan kesejahteraan para anggota dan pegiatnya. Sekolah Hijau akan menjadi wahana untuk: (a) saling belajar-mengajar; (b) berkemampuan mengidentifikasi masalah dan pengambilan keputusan bersama; (c) mobilisasi sumber daya; dan (d) mengembangkan komunikasi dengan pihak lain.

Penilaian atau seleksi terhadap pilihan teknologi dapat mempertimbangkan beberapa faktor. Nayono (2016) menyimpulkan beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam memilih sistem teknologi di mana isu sosial-teknis dominan: (1) Penerimaan sosial terhadap teknologi; (2) Resiko keselamatan dan kesehatan pengguna yang berinteraksi langsung dengan teknologi; (3) Keterjangkauan biaya investasi dan operasional; (4) Kemampuan masyarakat untuk mengoperasikan teknologi secara mandiri setelah pendampingan; (5) Ketersediaan suku cadang utama dan

bengkel pendukung di sekitar lokasi; (6) Konektifitas/kesesuaian dengan sistem sebelumnya (jika sudah ada teknologi lain yang masih beroperasi); (7) Ketersediaan sumber daya lokal untuk mengoperasikan teknologi; (8) Efisiensi teknologi; (9) Luas area yang dibutuhkan untuk membangun instalasi; dan (10) Produk sampingan (baik positif maupun negatif) dari teknologi.

BAB V

GENDER DAN INKLUSI SOSIAL

Marzuki Wahid

Inpres Era Gus Dur

Berbeda dengan orde-orde sebelumnya, sejak Orde Reformasi membicarakan pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial adalah suatu keharusan. Yakni, keniscayaan yang melekat dalam diskursus ilmiah dan politik di segala bidang. Dulu, dua wacana ini seolah hanya milik *civil society*, menjadi kegelisahan, kepedulian, dan bagian advokasi yang terus digalakkan oleh organisasi masyarakat sipil kepada negara. Namun kini, sejak Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) resmi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional pada 19 Desember 2000, wacana gender sudah menegara (masuk ke dalam alam pikir dan tubuh negara) yang diperjuangkannya melalui program-program pembangunan yang dicanangkan.

Lebih dari itu, pemberdayaan perempuan telah menjadi nomenklatur kementerian negara, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA). Kementerian ini secara khusus bertugas mengarusutamakan gender, pemberdayaan perempuan dan anak ke dalam seluruh program pembangunan, baik yang dilakukan oleh kementeriannya maupun kementerian dan lembaga negara yang lain.

Wacana pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial, baik secara literal, maupun substantif telah mendasari dan menjiwai Amandemen UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang disahkan selama Orde Reformasi dan orde sebelumnya. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 secara tegas dan lugas menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Ini pasal dalam konstitusi yang menjadi landasan dasar kebijakan dan tindakan anti diskriminasi dan anti eksklusi sosial dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Lebih dari itu, pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial juga telah masuk ke dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terukur dan ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari MDGs (*Millennium Development Goals*).

Ada 12 *goals* dan 40 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan, dan anak perempuan dari 17 *goals* dan 169 target dalam SDGs. Kemudian dari 303 indikator SDGs terdapat 65 indikator yang terkait dengan kesetaraan gender, HAM perempuan, dan anak perempuan.

Goal ke-5 adalah khusus kesetaraan gender, bertujuan untuk mengubah hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, yang menghambat kemajuan secara struktural dan budaya. Ada 9 target dalam *goal* 5 sebagai syarat

utama, yakni: (1) Menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, serta mengubah hukum, undang-undang, dan norma-norma sosial yang diskriminatif. Implementasi kesetaraan yang substantif; (2) Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual. Melarang pernikahan anak-anak, sunat perempuan, dan melakukan reformasi hukum untuk melindungi perempuan dan anak perempuan; (3) Menjamin pekerjaan dan upah yang layak dan bermartabat untuk perempuan; (4) Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, di ranah domestik dan publik; (5) Perempuan memiliki hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta untuk mengontrol dan memutuskan secara bebas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Untuk ini, mereka memerlukan akses ke informasi penting, pendidikan, dan layanan; (6) Memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam. Hal ini penting untuk keamanan ekonomi dan status, untuk pekerjaan yang layak, mata pencaharian yang berkelanjutan dan untuk memastikan standar hidup yang layak; (7) Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi komunikasi informasi (ICT), untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan; (8) Memperkuat kebijakan dan undang-undang untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan; dan (9) Demokrasi dan legitimasi untuk

keterlibatan penuh perempuan adalah kunci dalam melaksanakan agenda pembangunan baru.

SDGs juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif untuk mewujudkannya semua *goals*. Bahkan SDGs sendiri adalah program inklusif. Tujuh target SDGs sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk anti diskriminasi.

Goal ke-8 dan ke-16 secara tegas dijelaskan: mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan bertahan, lapangan kerja yang produktif dan bermartabat; serta mempromosikan perdamaian dan inklusi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, akses pada keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan berguna untuk semua.

Realitas Masih “*Suargo Numut, Neraka Katut*”

Meski secara normatif telah jelas dinyatakan dalam berbagai regulasi yang sangat kuat, baik dalam tingkatan nasional dan internasional, namun faktanya Komnas Perempuan masih mencatat terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2015. Data Komnas Perempuan menunjukkan sepanjang 2015 kekerasan tidak hanya terjadi di wilayah domestik, personal, melainkan telah meluas di berbagai ranah termasuk di wilayah publik, komunitas dan negara.

Kasus kekerasan pada tahun 2015 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari kasus kekerasan sebelumnya pada 2014 yang hanya 293.220 kasus. Kecenderungan kekerasan terhadap perempuan ternyata menunjukkan peningkatan sejak tahun

2010. Tahun 2013, kekerasan perempuan hanya sebanyak 279.688 kasus, lebih rendah dari jumlah kasus tahun 2014.

Membaca jumlah kasus kekerasan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kondisi perempuan berada dalam situasi ketidakadilan dan diskriminasi. Secara konseptual, ketidakadilan gender terjadi apabila dalam relasi laki-laki dan perempuan menimbulkan lima hal berikut ini: *Pertama, Stereotip*. Stereotip adalah pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin. Contoh pelabelan negatif adalah sebutan bahwa perempuan itu lemah, emosional, atau nafsunya sembilan, akalunya satu. Pelabelan ini sumber dari tindak ketidakadilan lain. Tindakan subordinasi, marginalisasi, beban berlebihan, dan kekerasan merupakan akibat dari stereotip. Oleh karena perempuan lemah dan emosional, maka tidak layak untuk menjadi pemimpin; *Kedua, Subordinasi*. Subordinasi yakni sikap merendahkan atau menomorduakan posisi/status sosial salah satu jenis kelamin. Contohnya adalah pandangan budaya dan keagamaan bahwa nasib perempuan itu tergantung suaminya, *surga nunut, neraka katut* (pergi ke surga mendapat tumpangan, demikian juga ke neraka). Sikap ini juga bisa berakibat pada tindak ketidakadilan yang lain, seperti marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan. Karena cara pandang itu, posisi perempuan menjadi subordinatif, seolah menjadi bagian dari suaminya. Sementara suami menguasai perempuan; *Ketiga, Marginalisasi*. Marginalisasi adalah peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Akibat dari marginalisasi, yang paling kentara biasanya adalah pembodohan dan pemiskinan. Contohnya adalah penyelenggaraan rapat desa pada malam hari. Karena rapat diselenggarakan pada malam hari, besar kemungkinan

perempuan tidak bisa terlibat dalam rapat, karena pada saat malam hari perempuan menemani anak-anaknya untuk tidur atau belajar; *Keempat, Beban Berlebih*. Beban berlebih yakni pembebanan tugas-tugas yang tidak proporsional dan tidak seimbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup salah satu jenis kelamin. Contohnya, perempuan menjalani pekerjaan domestik sekaligus pekerjaan publik, mencari nafkah. Sementara laki-laki hanya menjalani pekerjaan publik saja. Situasi ini tentu tidak adil dan berdampak pada penurunan kualitas hidup perempuan; *Kelima, Kekerasan*. Perlakuan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal tindak kekerasan secara fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, kerusakan alat kelamin perempuan, tetapi juga kekerasan di luar hubungan suami-isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

Apabila perbedaan gender menimbulkan salah satu atau lebih dari lima hal tersebut di atas, maka berarti terjadi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Lima tindakan ketidakadilan gender ini, satu per satu atau semuanya dapat berdampak pada diskriminasi. Diskriminasi didefinisikan Konvensi CEDAW (UU

No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) Pasal 1 sebagai *“setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”*

Namun, dari sisi partisipasi politik dalam catatan keterwakilan di DPR, jumlah perempuan cenderung meningkat. Sejak reformasi tahun 1999, jumlah anggota dewan perempuan mengalami peningkatan. Tahun 1999, hanya 9,2% kursi DPR RI yang diduduki perempuan. Tahun 2004 jumlahnya meningkat menjadi 11,81%. Tahun 2009 jumlahnya kembali meningkat menjadi 18%. Namun pada tahun 2014 justru turun menjadi 17,32%. Hanya terdapat 97 orang perempuan dalam komposisi DPR periode 2014-2019. Jumlah ini tentu menurun daripada periode 2009-2014. Periode 2009-2014, terpilih 103 perempuan menjadi anggota DPR, atau sebesar 18%.

Dampak Terhadap Kemiskinan

Kasus kekerasan dan realitas politik di atas tentu menunjukkan tingkat keberdayaan perempuan. Partisipasi politik perempuan pada era reformasi yang menunjukkan peningkatan dari periode ke periode yang lain adalah perkembangan positif dari kondisi perempuan Indonesia. Namun memperhatikan biaya politik yang tinggi dan pola rekrutmen politik yang oligarkis dapat diduga bahwa para politisi yang singgah di bangku parlemen adalah perempuan kelas menengah, terdidik, dan pada

umumnya berada di perkotaan. Sementara kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan sebagaimana disebutkan di atas tentu berbeda dari kondisi perempuan politisi. Sebagian besar perempuan korban kekerasan ini adalah perempuan kelas bawah, tidak berpendidikan tinggi, dan tinggal di pedesaan.

Meskipun tidak selalu, dari penjelasan di atas tampak terdapat keterkaitan antara perempuan korban kekerasan dengan kondisi kemiskinan. Budaya patriarkhi yang mewujud dalam tindakan subordinasi, stereotip, marginalisasi, beban berlebih, dan kekerasan, secara langsung telah memberikan batasan-batasan bagi perempuan sehingga menciptakan ketidakadilan serta ketidaksetaraan. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan ini turut serta melahirkan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan.

Oleh karena itu, strategi nasional dan global yang diimplementasikan bagi penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan kesejahteraan bagi perempuan. Apabila perempuan tidak dijadikan target sasaran pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik.

Persoalan ketimpangan gender terdapat dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari struktur sosial, politik, ekonomi, kultur masyarakat, sampai pada produk kebijakan yang dilahirkan. Setidaknya terdapat sembilan aspek yang menunjukkan perempuan begitu dekat dengan kemiskinan, dikarenakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami

oleh perempuan (Noerdin, 2006), di antaranya: *Pertama*, akses perempuan terhadap politik tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal, baik di tingkat nasional maupun lokal, besar pengaruhnya terhadap kualitas hidup perempuan. Hal ini terjadi karena kualitas hidup perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik, apalagi mengingat kebijakan tersebut juga diikuti oleh alokasi anggaran untuk implementasinya. Kurangnya kepekaan pemerintah terhadap persoalan gender, apabila perempuan tidak ikut serta menentukan kebijakan yang mengatur kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraannya, sangat mungkin kebutuhan perempuan akan ditempatkan pada skala prioritas yang rendah.

Kedua, akses perempuan terhadap pekerjaan. Ada kecenderungan dalam hal akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja, bahwa perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja jauh lebih kecil jumlahnya daripada laki-laki. Sementara itu bagi perempuan yang mencoba memasuki pasar tenaga kerja, ternyata juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Tingginya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses ke pasar tenaga kerja, disebabkan oleh beberapa hal: (1) Ketika ingin bekerja di luar rumah, perempuan yang belum menikah pada umumnya harus mendapatkan izin dari orang tua, dan yang sudah menikah harus mendapatkan izin dari suami; (2) Perempuan mempunyai beban ganda karena bekerja di luar rumah dan tetap harus bertanggungjawab melakukan pekerjaan rumah tangga sampai mengasuh anak; (3) Pembagian peran berdasarkan gender yang menyebabkan perempuan diasosiasikan dengan kegiatan yang berada di lingkup domestik

dan laki-laki dengan lingkup publik. Hal ini memperkecil akses perempuan terhadap pekerjaan yang biasanya diasosiasikan dengan ranah publik dan berada di sektor formal.

Ketiga, akses perempuan terhadap upah yang sama. Selain menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar tenaga kerja dan pekerjaan, perempuan juga menghadapi diskriminasi upah. Angka perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan dapat dijumpai dalam data Susenas, Sakernas, maupun dari laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, BPS, maupun UNDP. Kebijakan pengupahan yang diskriminatif terhadap perempuan juga merupakan akibat dari UU Perkawinan Tahun 1974, yang secara eksplisit dinyatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pernyataan tersebut sangat berdampak pada kehidupan perempuan, karena UU tersebut dijadikan rujukan bagi setiap kebijakan publik yang timbul kemudian hari. Contohnya, laki-laki yang dinyatakan sebagai kepala keluarga mendapatkan tunjangan untuk anak dan istri dari tempat kerjanya, sedangkan perempuan yang dianggap sebagai pekerja pencari nafkah tambahan selalu dianggap sebagai pekerja lajang yang tidak mendapatkan tunjangan keluarga.

Keempat, akses perempuan terhadap aset produktif. Aset produktif berupa tanah, rumah dan aset produktif lainnya sebagian besar dikuasai oleh laki-laki. Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber produksi atau aset produktif seperti tanah atau rumah misalnya, juga menentukan ada tidaknya akses perempuan ke modal atau kredit. Karena aset produktif dikuasai oleh laki-laki, apabila perempuan ingin

melakukan kegiatan ekonomi berkaitan dengan aset tersebut, harus mendapatkan izin dari suaminya terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan atau kontrol produksi yang didominasi oleh laki-laki. Keterbatasan penguasaan aset produksi mengakibatkan perempuan juga memiliki keterbatasan aksesnya ke kredit (karena tidak memiliki jaminan) sehingga berakibat pada keterbatasan perempuan dalam mengembangkan usahanya.

Kelima, akses perempuan terhadap perlindungan hukum. Banyak perempuan (terutama di pedesaan) yang tidak memiliki aset produksi dan keterampilan untuk bekerja di sektor formal akhirnya harus mengadu nasib ke sektor informal, antara lain dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKW adalah salah satu contoh bagaimana perempuan miskin bekerja di sektor yang bersifat informal, seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT), sulit mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum yang memadai. Justru di era otonomi daerah, bukan malah TKW mendapatkan perlindungan secara hukum, malah pemerintah daerah (Pemda) berlomba menarik retribusi dari para TKW.

Keenam, akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi. Angka kematian ibu ketika melahirkan jumlahnya masih sangat tinggi, di mana angka kematian ibu yang melahirkan tetap di atas rasio 300/100.000 kelahiran. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor yang saling berkaitan, mulai dari masalah diskriminasi gender yang sangat mengakar pada budaya, interpretasi agama, juga masalah lemahnya koordinasi antar sektor pemerintah terkait dalam menanggulangi masalah tersebut. Selain terdapat mitos-mitos seputar peran perempuan pada umumnya dan peran ibu

melahirkan pada khususnya, masalah gizi buruk yang dialami oleh perempuan akibat budaya makan yang mendahulukan laki-laki menjadi kendala besar dalam upaya penurunan angka kematian ibu ketika melahirkan. Kendala lain berupa keterbatasan dana untuk melahirkan di rumah sakit, dan di daerah-daerah terpencil juga banyak keterbatasan tenaga bidan untuk membantu masalah kelahiran.

Ketujuh, akses perempuan terhadap layanan pendidikan. Indonesia termasuk negara yang cukup baik dalam menyediakan akses terhadap pendidikan dasar. Tingkat partisipasi pendidikan dasar mencapai lebih dari 97% baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi sayangnya akses terhadap pendidikan ini semakin berkurang untuk tingkat pendidikan lanjutan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, ada berbagai alasan mengapa anak perempuan tidak menamatkan sekolahnya atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu alasan tersebut adalah adanya hambatan kultural, yaitu masih kuatnya budaya kawin muda bagi perempuan yang tinggal di daerah pedesaan. Anggapan yang berlaku adalah bahwa setinggi-tingginya perempuan sekolah, akhirnya tidak akan bekerja karena perempuan harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan rumah tangga (domestik). Hal yang paling dominan adalah hambatan ekonomi, yaitu keterbatasan biaya untuk sekolah sehingga keluarga miskin terpaksa menyekolahkan anak laki-laki ketimbang anak perempuan.

Problem Ketidakadilan Sosial

Sembari mengurai faktor-faktor kemiskinan perempuan, kami ingin menarik masalah gender ke dalam masalah sosial yang lebih luas. Kami memandang masalah gender adalah salah satu masalah sosial, yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Mengurai problem ketidakadilan gender perlu senafas dengan analisis problem ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh relasi etnik, relasi antar agama, relasi inter agama, relasi antar ras, maupun relasi mayoritas-minoritas.

Seperti diketahui, dalam kenyataannya realitas sosial ini bersifat plural, baik dari sisi komposisi sosial maupun kepentingan. Komposisi masyarakat di Indonesia pada umumnya selalu terdiri dari beragam suku/etnik, asal daerah, bahasa, gender, dan profesi. Mengurai komposisi masyarakat yang plural dibutuhkan instrumen yang kompleks agar mampu menyentuh keragaman aspek kehidupan tersebut. Keragaman komponen sosial itu dalam pandangan hak asasi manusia dan teologi kemanusiaan pada dasarnya berkedudukan setara dan memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Namun, selalu saja muncul masalah-masalah sosial sebagai dinamika kehidupan bersama. Biasanya masalah sosial muncul ketika terjadi benturan kepentingan antar kelompok sosial akibat perebutan sumber-sumber ekonomi atau sumber daya alam yang tersedia secara tidak memadai. Masalah sosial ini bisa berujung pada ketidakadilan sosial, yang disebabkan oleh berkembangnya stereotip pada suatu kelompok sosial, subordinasi sosial, marginalisasi, dan kekerasan suatu kelompok sosial atas kelompok sosial yang lain.

Apabila terjadi pembedaan, pengurangan, atau pengebirian hak satu kelompok sosial atas kelompok sosial lain berarti terjadi diskriminasi sosial. Yakni, *“setiap pembedaan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual ataupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”*

Bagi penulis, diskriminasi ini adalah sumber masalah sosial. Diskriminasi bisa berdampak pada terjadinya ketidakadilan sosial, baik ketidakadilan struktural maupun ketidakadilan horizontal. Ketidakadilan struktural yang dimaksud adalah ketidakadilan antara pemerintah dan rakyat. Adapun ketidakadilan horizontal adalah ketidakadilan yang terjadi akibat relasi yang timpang antar kelompok sosial yang berbeda. Adanya diskriminasi dapat berdampak pada pemiskinan dan pembodohan, karena hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan hak politiknya terhambat. Hak untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat atas sumber daya alam dan atas pembangunan terhambat karena diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial dalam jangka panjang akan memporakporandakan tatanan kehidupan sosial umat manusia.

Sebagai Perspektif

Kita hendak menggunakan gender sebagai perspektif untuk merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan yang hendak dilakukan dalam konteks ini. Sebagai perspektif, gender harus ditempatkan sebagai kesadaran, kepekaan, dan paradigma dalam setiap langkah implementasi program.

Pelaksana program harus selalu menyadari bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia yang berkedudukan setara, memiliki hak dan kewajiban sosial yang sama, dan harus diperlakukan secara adil. Laki-laki dan perempuan harus selalu hadir dalam setiap langkah dan setiap ruang pelaksanaan program. Mereka harus diberi akses/kesempatan, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang adil dari setiap program yang dilaksanakan. Itulah keadilan gender.

Apa itu keadilan gender bagi mereka? Keadilan gender adalah suatu proses yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari program pembangunan.

Bagi saya, tidak ada keadilan gender tanpa kesetaraan. Demikian juga bukan kesetaraan tanpa disertai keadilan. Keadilan dan kesetaraan adalah ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional.

Gender sebagai perspektif artinya suatu upaya sistematis yang terintegrasi dalam implementasi program untuk mencapai

kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan kemanfaatan harus melibatkan dan mempertimbangkan sepenuhnya laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang mandiri, tetapi saling melengkapi.

Sebagai perspektif, gender bekerja selalu dalam orientasi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak hanya dipahami sebagai kepentingan, tetapi juga representasi yang harus hadir dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan kemanfaatan dari program-program pembangunan yang diselenggarakan.

Inklusi Sosial Sebagai Solusi

Perspektif gender saja tampaknya tidak cukup, karena realitas sosial yang kita hadapi lebih kompleks dari sekadar relasi laki-laki dan perempuan. Selain laki-laki dan perempuan sebagai komponen sosial yang melekat dalam entitas kemanusiaan, di dalam kehidupan masyarakat desa juga terdapat komponen sosial lain yang juga melekat dalam kehidupan sosial. Diantaranya adalah entitas etnik, agama/kepercayaan, bahasa, asal daerah, orientasi seksual, dan lain-lain. Entitas dan identitas sosial ini seringkali menjadi faktor penting dalam interaksi dan relasi sosial. Interaksi sosial ini membentuk struktur sosial dalam kehidupan sosial mereka.

Relasi dan interaksi ini seringkali timpang dan tidak adil, karena terdapat kepentingan di dalamnya. Kepentingan ini pada umumnya bermuara pada kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Kepentingan ekonomi dibutuhkan untuk mempertahankan *survival* kehidupan mereka, dan kepentingan

politik dibutuhkan untuk mengokohkan martabat dan kewibawaan mereka.

Meskipun di lapangan bisa terjadi relasi yang timpang dan tidak adil antar kelompok sosial, atau terjadi benturan kepentingan untuk *survival* kehidupan mereka, tetapi program ini bermaksud melibatkan semua kelompok sosial, baik mayoritas maupun minoritas, secara setara dalam program yang akan dilaksanakan. Mereka kita posisikan secara setara dan diberi ruang yang sama untuk dapat mengakses, berpartisipasi, melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat dari program ini.

Walhasil, program-program pembangunan ini harus mengakui (rekognisi) semua kelompok sosial yang ada di masyarakat, apapun identitas sosialnya, agamanya, kepercayaannya, sukunya, asal daerahnya, bahasanya, maupun profesinya. Program ini tidak boleh membeda-bedakan (mendiskriminasikan) kelompok sosial atas dasar apapun. Setelah mengakui keberadaan mereka dengan berbagai keragamannya, program ini juga harus mampu menerima mereka secara utuh apa adanya, dan dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Mereka diposisikan secara setara dalam memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dari program yang dijalankan.

Diharapkan inklusi sosial terwujud dalam implementasi program yang dikembangkan dengan upaya ini. Tidak saja kebersamaan, solidaritas sosial, dan kedamaian yang terwujud dari seluruh rangkaian program ini, melainkan juga semua pihak memperoleh keadilan dan kemakmuran dari potensi sumber daya alam dan sumber daya lain yang melimpah dalam kehidupan mereka.

BAB VI

SEKOLAH HIJAU: SEBUAH ALTERNATIF MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Awan Santosa
Satriyantono Hidayat**

Tentang Pemberdayaan

Masalah mendasar dari hasil riset di desa-desa Indonesia yang ditemui berupa lemahnya penguasaan masyarakat desa atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah ini telah lama berimplikasi pada kelambatan inovasi bisnis, kecilnya nilai tambah ekonomi, dan ketergantungan desa pada perantara dari luar desa, termasuk perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keberdikarian dan keahlian orang desa yang dahulu pernah mewujud telah memudar dan berganti oleh dominasi korporasi swasta besar dari luar desa. Sedikitnya kisah sukses desa mandiri seakan menjadi pertanda pendidikan tinggi kita yang belum sepenuhnya berorientasi pada keberdikarian desa. Alih-alih itu, jiwa keberdikarian perguruan tinggi justru masih menjadi tanda tanya manakala terjadi penetrasi institusional Bank Dunia dan Pemerintah AS di beberapa perguruan tinggi kita. Pola relasi yang selama ini terbangun di mana prakarsa transfer IPTEK selalu datang dari luar desa perlu

ditinjau ulang dengan semangat transformasi kuasa pengetahuan oleh rakyat desa. Efektifitas proses tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan penguasaan metodologi pengembangan IPTEK oleh mereka, di mana merekalah yang akan merancang tata kelola pengetahuan dan pembangunan di wilayah desa.³

Kondisi seperti ini memunculkan ide untuk mengembangkan model pendidikan (sekolah) yang berbasis kemakmuran dan keberdikarian masyarakat desa yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat desa. Sekolah yang akan menjadi konsultan bagi rencana pembangunan desa dan berbagai program (*project*) yang masuk ke desa. Sekolah inilah yang akan membantu mengarahkan proses transformasi desa melalui rancang bangun pemajuan dan pemandirian desa selama kurun waktu 5-10 tahun depan.

Kerangka pikir ini yang menjadi latar belakang gagasan Sekolah Hijau, satu model pendidikan alternatif berbasis konteks lokal dan mengedepankan berkelanjutan (*sustainability*) sumberdaya. **Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Melalui Praktik Usaha Hijau yang Didukung Oleh Energi Terbarukan**, dalam konteks kegiatan Sekolah Hijau akan menjadi kegiatan inti pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) dari program kewirausahaan hijau, pertanian terpadu, pengembangan energi terbarukan, perencanaan tata ruang hijau dan sistem informasi desa. Sekolah Hijau berfungsi

³ Dicuplik dengan penyempurnaan dari artikel Awan Santosa, berjudul "Ayo Bangun Perguruan Tinggi Desa".

sekaligus sebagai sosialisasi gagasan dan metode pada tahap awal dan juga pengelolaan pengetahuan yang kemudian muncul dalam siklus riset-aksi-refleksi dari program ini. Berbeda dengan sekolah reguler yang memerlukan persyaratan akademik tertentu, Sekolah Hijau dapat diakses oleh setiap lapisan masyarakat. Prioritas khusus akan diberikan kepada perempuan dan kaum miskin sebagai peserta Sekolah Hijau

Sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka pikir pengembangan Sekolah Hijau sebagai model pemberdayaan masyarakat, misi utama Sekolah Hijau adalah membangun gerakan pembangunan hijau di desa. Sebagai sebuah lembaga, Organisasi Sekolah Hijau ini memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah tangga miskin dan juga menjadi tangan proyek dalam mengelola sarana peningkatan usaha untuk mendorong berbagai upaya ekonomi produktif yang dikembangkan secara kolektif dan berbasis komunitas dalam perspektif pembangunan hijau. Upaya Sekolah Hijau ini diharapkan menumbuhkan kohesi sosial serta semangat keberlanjutan dalam masyarakat, terutama rumah tangga miskin. Selanjutnya, organisasi sosial ini dapat secara terus menerus memberi layanan di desa agar peningkatan pendapatan dapat terus terjadi, sekaligus perbaikan kualitas lingkungan dapat terus diperbaiki.

Keberlanjutan melalui pendekatan ini dapat dilihat dari dua sisi yakni pertama jika organisasi ini berhasil dikelola dengan baik oleh kader-kader desa yang potensial maka keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan di desa akan berjalan terus. Kedua, melalui peningkatan kapasitas yang dijalankan oleh organisasi lokal ini, pengetahuan tentang praktik usaha hijau dan misi pengurangan emisi karbon dapat dipahami oleh rumah tangga

miskin. Praktik-praktik yang dilakukan dalam proyek dan pengetahuan yang dimiliki rumah tangga miskin dapat mendorong perlindungan lingkungan.

Pengalaman membuktikan bahwa orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa (*the have not*), namun mereka memiliki sesuatu potensi meskipun sedikit (*the have little*). Potensi masyarakat akan teraktualisasikan bila mereka bergabung dalam kelembagaan yang mereka percaya dan mereka mampu mengontrolnya. Apalagi kalau kelembagaan itu dikelola secara transparan, demokratis, berorientasi pada peningkatan produktifitas dan pendapatan, serta difasilitasi dengan tepat, maka orang miskin dapat mengatasi masalah kemiskinan mereka sendiri

Metode dan Pendekatan

Metode pendidikan yang digunakan dalam penyelenggaraan Sekolah Hijau ini disarikan dari praktik-praktik terbaik dalam pendidikan orang dewasa (*adult education*) yang berorientasi pada pemecahan masalah riil (*real problem solving*). Pendekatan pengajaran menggunakan metode *Participatory Action-Research* (PAR), yaitu pendekatan di mana menjadikan partisipasi sebagai hak masyarakat sendiri serta memberikan kesempatan masyarakat untuk lebih aktif dalam membangun kemandirian mereka sendiri. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam metode PAR adalah sebagai berikut:

1. Belajar secara langsung, yaitu belajar dari masyarakat secara langsung untuk mendapatkan pengetahuan fisik, teknis dan sosial secara lokal.

2. Belajar secara cepat dan progresif, yaitu belajar secara cepat dan progresif melalui eksplorasi yang terencana dan pemakaian metode yang fleksibel.
3. Komunikasi rilek dan bersifat kekeluargaan, yaitu menyeimbangkan bias, rileks dan tidak tergesa-gesa, mendengarkan dan bukan menggurui, tidak memaksakan dan mencari masyarakat yang lebih miskin, kehadiran orang luar hendaknya masuk dalam proses diskusi sebagai anggota. Oleh karena itu, komunikasi yang ada harus bersifat kekeluargaan.
4. Optimalisasi pertukaran, mengaitkan biaya pemahaman dengan informasi yang benar-benar bermanfaat dengan pertukaran antara kuantitas, kegayutan, keakuran serta ketepatan waktu.
5. Membuat jaringan titik-titik pengukuran, dapat diartikan sebagai penggunaan waktu kisaran yang terdiri dari metode, diskusi, jenis informasi untuk pengecekan silang.
6. Mencari keanekaragaman, mencari hal yang berbeda-beda daripada rata-rata. Metode triangulasi dalam hal ini dipergunakan untuk memperoleh informasi yang kedalamannya dapat diandalkan.
7. Pemberian fasilitas, artinya memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penyajian dan pemahaman oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya serta juga mempelajarinya.
8. Kesadaran dan tanggung jawab diri yang kritis, fasilitator secara terus menerus menguji tingkah laku mereka dan mencoba melakukannya secara lebih baik. Kesalahan harus dipahami sebagai suatu kesempatan untuk belajar melakukan yang lebih baik.

9. Saling berbagi informasi dan gagasan antar sesama masyarakat desa, antar masyarakat desa dengan fasilitator, dan antar fasilitator yang berbeda, serta saling berbagi wilayah kegiatan, pelatihan dan pengalaman antar organisasi yang berbeda.

Metode pengajaran yang diterapkan dalam Sekolah Hijau meliputi: diskusi kelas, diskusi kelompok, praktik kelas, *mentoring (coaching)*, observasi lapangan dan praktik lapangan. Sekolah Hijau dengan prinsip-prinsip dan metode tersebut merupakan sebuah “*action-training*”. Para peserta didik akan mendapatkan pemahaman baru serta mengembangkan berbagai ketrampilan hijau baru (*new green skills*) di bidang kewirausahaan hijau, pertanian terpadu, pengembangan energi terbarukan, tata ruang hijau desa dan pemanfaatan teknologi informasi.

Roadmap dan Tahapan

Roadmap Sekolah Hijau tergambar 3 peta jalan sebagaimana tergambar dalam diagram.

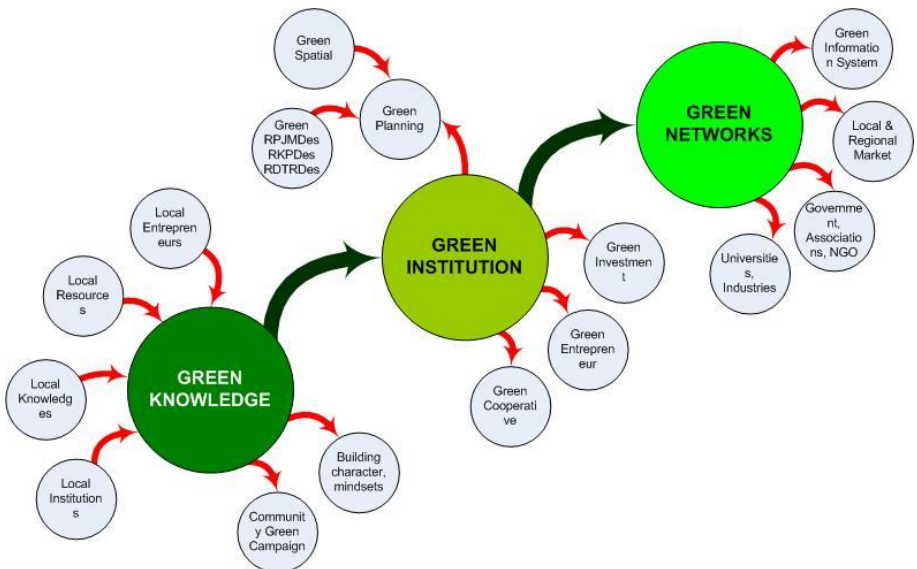
- *Green Knowledge*
Pertama-tama Sekolah Hijau dibangun atas fondasi pengetahuan dan teknologi hijau yang digali dan dipelajari melalui praktik-praktik cerdas yang dikumpulkan dari berbagai lokasi. Bersama pengembangan pengetahuan dan teknologi lokal yang berbasis sumberdaya dan kelembagaan lokal, pengetahuan hijau dikembangkan di masyarakat melalui pengembangan karakter, perubahan *mindset* yang dimulai dari level individu dan keluarga.

- *Green Institution*

Sekolah Hijau pada level selanjutnya dikembangkan pada level komunitas dan kelembagaan dengan mengembangkan berbagai ketrampilan hijau dan skema-skema kelembagaan hijau melalui pengembangan kewirausahaan hijau dan investasi hijau desa di level mikro. Dilakukan penyusunan rencana pembangunan hijau dan tata ruang hijau di level makro.

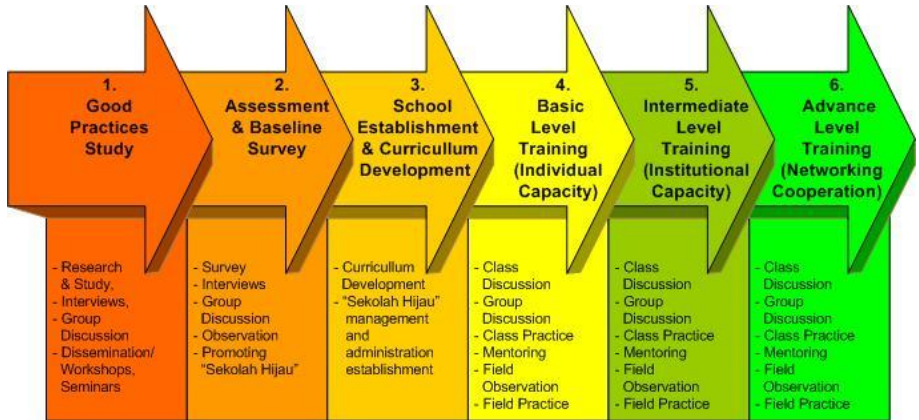
- *Green Networks*

Dikembangkan jaringan dan sistem informasi hijau pada level lanjut di mana dapat terjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan pengetahuan dan bisnis hijau yang berlanjut, berkesinambungan dan memakmurkan warga.



Gambar 3 Peta Jalan Sekolah Hijau

Tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Hijau terdiri atas enam tahapan berkesinambungan sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini :



Gambar 4 Tahapan Sekolah Hijau

Studi Praktik Cerdas/Good Practice Study

Kegiatan studi praktik cerdas ditujukan untuk menggali dan mempelajari praktik-praktik cerdas yang telah ada dari berbagai lokasi di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui metode studi literatur, wawancara, dan diskusi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan :

- Database mengenai praktik-praktik cerdas dari berbagai penjuru Indonesia.
- Materi sebagai pembanding dan pembelajaran mengenai praktik-praktik pengetahuan dan teknologi hijau.
- Film yang menarasikan pengetahuan dan teknologi hijau.
- Website sebagai salah satu media untuk menyebarkan pengetahuan dan teknologi hijau.

Assessment dan Baseline Survey

Tahapan kegiatan *assessment* dan *baseline survey* ditujukan untuk:

- memetakan potensi permasalahan dan isu yang dihadapi oleh masyarakat,
- memetakan pihak-pihak yang berkaitan dengan kondisi yang berlangsung,
- memetakan materi kurikulum pendidikan dasar, dan
- memetakan calon kader Sekolah Hijau.

Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Audiensi kepada bupati, Bappeda, camat, lurah/kepala desa, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- Survei menggunakan instrumen berupa kuesioner tertutup. Responden diambil dengan menggunakan teknik *convenience sampling* meliputi unsur-unsur dari pemerintah desa, karang taruna, kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok nelayan, kelompok usaha, koperasi, LSM, perguruan tinggi, sekolah, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya.
- Wawancara menggunakan instrumen berupa kuesioner terbuka. Responden diambil dengan menggunakan teknik *convenience sampling* meliputi unsur-unsur dari pemerintah desa, karang taruna, kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok nelayan, kelompok usaha, koperasi, LSM, perguruan tinggi, sekolah, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya.
- *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan untuk membahas hasil dari survei dan wawancara. Peserta FGD berasal dari pemerintah desa, karang taruna, kelompok

tani, kelompok perempuan, kelompok nelayan, kelompok usaha, koperasi, LSM, perguruan tinggi, sekolah, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya.

- Observasi lapangan yang dilakukan dua kali untuk setiap lokasi.

Kegiatan *assessment* dan *baseline survey* ini diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- Gagasan dan rencana pelaksanaan Sekolah Hijau tersampaikan kepada masyarakat.
- Tersusun data dasar mengenai potensi, permasalahan, dan isu yang dihadapi oleh masyarakat.
- Terpetakan pihak-pihak yang berkaitan dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat.
- Terpetakan gambaran materi kurikulum pendidikan dasar.
- Terpetakan calon-calon kader Sekolah Hijau.

Pelembagaan dan Pengembangan Kurikulum (*School Establishment & Curriculum Development*)

Organisasi dan Pengelolaan

Sekolah Hijau adalah salah satu aset desa yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh warga desa. Sekolah Hijau adalah salah satu model alternatif pendidikan non formal dan atau pendidikan berbasis masyarakat yang berkembang atas prakarsa masyarakat desa setempat. Sekolah Hijau dengan begitu adalah manifestasi kedaulatan rakyat dalam pengelolaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Struktur pengelola Sekolah Hijau di desa sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Majelis Sekolah Hijau; yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang dari dalam dan atau luar desa dengan tugas utama mengarahkan dan memberi panduan bagi pengelola Sekolah Hijau agar sejalan (sesuai) dengan latar belakang dan tujuan pendiriannya, serta melakukan monitoring dan evaluasi (penilaian) keberhasilan Sekolah Hijau.
2. Ketua Sekolah Hijau; yang diutamakan berasal dari desa setempat (tetapi dapat juga pada awalnya/2 tahun pertama berasal dari luar desa) dengan tugas utama mengelola dan menjalankan kegiatan diklat Sekolah Hijau.
3. Sekretaris Sekolah Hijau; berasal dari dalam desa dengan tugas utama membantu Ketua Sekolah Hijau dalam menjalankan kegiatan Sekolah Hijau dalam hal administrasi dan berbagai kelengkapan pendukung lainnya.
4. Bidang Akademik; menyiapkan usulan desain kurikulum, merekrut tenaga pengajar, dan mengatur proses pembelajaran
5. Bidang Operasional Kelas; menyiapkan berbagai kebutuhan operasional baik sarana maupun prasarana dalam perkuliahan.
6. Bidang Pembiayaan; meyusun kebutuhan anggaran dan menggali sumber pendanaan dari dalam desa (APBDes) dan pendanaan pendukung dari lembaga dan atau pihak-pihak yang sejalan pemikiran dan mendukung program Sekolah Hijau di Indonesia sepertihalnya, Pemerintah Daerah, BUMD, BUMN, Depdiknas, Perguruan Tinggi, dan LSM.

7. Bidang Rekrutmen dan SDM; melakukan berbagai macam sosialisasi untuk merekrut calon peserta diklat Sekolah Hijau dari warga desa setempat, serta mengelola SDM peserta program diklat Sekolah Hijau.

Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar Sekolah Hijau adalah siapa saja yang bersedia menjadi relawan pengajar dan memiliki komitmen juang yang kuat dalam usaha merealisasikan kesejahteraan dan keberdikarian masyarakat desa, yang dapat terdiri dari berbagai unsur sebagai berikut:

1. Warga desa setempat (kepala desa, ketua koperasi, ketua lembaga keuangan desa, tokoh pembaharu, ketua kelompok perempuan, petani, tokoh adat, dan sebagainya).
2. Staf pengajar perguruan tinggi setempat
3. Pegiat Konsorsium KEMALA
4. Aktivis *Non Government Organisation* (NGO) dan wirausahawan sosial dari berbagai latar belakang (bidang)
5. Mahasiswa perguruan tinggi
6. Relawan lain yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga lokal

Jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar menyesuaikan mata diklat yang berjalan di Sekolah Hijau, di mana proses rekrutmen dilakukan oleh pengelola (manajemen) Sekolah Hijau. Satu mata diklat dapat terdiri lebih dari satu tenaga pengajar (*team-trainer*).

Peserta Didik

Peserta didik Sekolah Hijau yang dimaksud adalah para pemangku kepentingan dalam pembangunan desa, tidak terbatas pada perangkat desa dan kelembagaan desa semata,

tetapi mencakup petani dan nelayan, kaum perempuan, pemuda dan pelajar, dan kaum miskin. Perempuan dan kaum miskin akan mendapat prioritas sebagai bentuk apresiasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Apresiasi ini juga bentuk dari distribusi sumberdaya yang lebih adil gender untuk percepatan tercapainya kesetaraan gender.

Kurikulum

Kurikulum Sekolah Hijau didesain bermuatan pendidikan yang (langsung) dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pelestarian desa, serta dengan mempertimbangkan problem kontekstual, potensi, dan perkembangan kebutuhan penguasaan IPTEK yang dinamis dan progresif di setiap desa. Penyusunan kurikulum dilakukan secara partisipatif melalui serangkaian kegiatan *assesment* di lapangan melibatkan para pihak selama 3 bulan. Materi kurikulum dibagi menjadi dua yakni materi umum dan materi khusus. Materi umum adalah materi yang bersifat pemahaman umum, sedangkan materi khusus adalah materi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Materi kurikulum mencakup lima tema yakni:

1. Kewirausahaan hijau
2. Penataan produksi dan pertanian terpadu,
3. Pengembangan energi terbarukan sesuai ekosistem,
4. Penataan Lingkungan dan Sanitasi
5. Sosial, Budaya dan Politik Desa

Prinsip PAR (*Participatory Action Research*) dalam pengembangan Sekolah Hijau dapat dijadikan instrumen untuk mengidentifikasi urutan yang diperlukan dalam mengembangkan kurikulum yang akan diterapkan di lapangan. Urutan kebutuhan disesuaikan dengan poin permasalahan yang

dimiliki di setiap lokasi. Kurikulum yang disediakan tidak serta merta menjadi fleksibel secara keseluruhan, tetapi juga tidak harus dilaksanakan secara kaku. Untuk itu disediakan kurikulum umum dan khusus. Semakin rendah poin potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah, maka semakin sedikit kurikulum khusus yang akan diberikan kepada masyarakat. Ilustrasi desain kurikulum dengan menggunakan PAR dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Mengembangkan Kurikulum Menggunakan PAR

Prov:		Kec:					
Kab:		Desa:					
No	Materi	Poin Dimensi					Total Poin
		Kewirausahaan Hijau	Pertanian Terpadu	Energi Terbarukan	Tata Lingkungan Sanitasi	Sosial Budaya Politik	
1	Pengetahuan Lokal						
2	Teknologi Lokal						
3	Praktik Lokal						
4	Kemandiri-an						
5	Struktur Sosial Ekonomi						
6	Struktur Sosial Politik						
7	Inisiatif Lokal						
8	Pengambilan Keputusan						
9	Kelembagaan						

Basic Level Training/ Pendidikan Tingkat Dasar

Pendidikan dasar lebih menekankan kepada aspek pengembangan kapasitas individu untuk memperoleh perubahan perilaku dan mengembangkan kesadaran terhadap perubahan lingkungan serta sosialisasi gagasan-gagasan pembangunan hijau.

Materi yang disampaikan melalui diskusi kelas, diskusi kelompok, praktik kelas dan mentoring ditekankan kepada materi-materi pemahaman umum untuk mengembangkan karakter manusia unggul, merubah pola pikir (*mindset*) serta mendorong kepedulian peserta pelatihan kepada lingkungan dan kelestarian desa.

Akhir sesi peserta mendapatkan materi-materi yang disampaikan melalui observasi lapangan dan praktik lapangan di mana peserta akan didorong untuk mengamati kejadian dan perubahan lingkungan di lokasi sekitar rumah dan menggerakkan warga desa untuk melakukan kampanye kegiatan hijau bersama.

Tabel 2 Rancangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Metode Penyampaiannya

No.	Materi	Kegiatan/ Metode
1	Kemandirian dan Keswadayaan	Diskusi Kelas, Diskusi Kelompok, Praktik Kelas, Mentoring
2	Kepedulian Lingkungan dan Kelestarian Desa	
3	Pengembangan Komunitas	
4	Pengenalan Pengetahuan dan Teknologi Lokal	
5	Prinsip-Prinsip Pembangunan Hijau	
6	Kegiatan Hijau Skala Rumah Tangga	
7	Pengenalan IPTEK dan Kesiapan Masyarakat	
8	Kegiatan Hijau Keluarga	Observasi Lapangan, Praktik Lapangan
9	Kampanye/ Gerakan Bersama Kegiatan Hijau Desa	

Pengajaran akan dilakukan terhadap warga desa terpilih dalam waktu kurang lebih 5 bulan dengan waktu pertemuan efektif 60 jam per peserta. Pembagian waktu pertemuan dan metode pengajaran adalah sebagai berikut :

- Diskusi kelas : 25% = 15 jam
- Diskusi kelompok : 25% = 15 jam
- Praktik kelas : 5% = 3 jam
- Mentoring (coaching) : 10% = 6 jam

- Observasi lapangan : 10% = 6 jam
- Praktik lapangan : 25% = 15 jam

Intermediate Level Training/ Pendidikan Tingkat Menengah

Pendidikan menengah lebih ditekankan kepada pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan ketrampilan-ketrampilan hijau serta kontekstualisasi pembangunan hijau sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil lokasi yang dimanifestasikan dalam penyusunan rencana pembangunan hijau desa yang bersifat makro serta penyusunan rencana-rencana bisnis dan investasi yang bersifat mikro. Materi yang disampaikan pada tahap ini meliputi materi-materi umum dan materi-materi khusus. Materi-materi umum ditekankan kepada pemahaman umum mengenai kelembagaan, kewirausahaan dan pembangunan hijau, yaitu antara lain:

- Pengantar Kelembagaan Hijau
- Perencanaan Pembangunan Hijau
- Manajemen Kewirausahaan Hijau

Akhir sesi para peserta didorong untuk membentuk usaha produktif bersama serta membentuk lembaga pengelolaan pembiayaan investasi hijau dalam skema *Eco-Fund* dan *Eco-Investment*. Peserta juga didorong untuk menyusun proposal-proposal investasi hijau yang dikembangkan untuk desa. Proposal-proposal terpilih akan didukung melalui dana stimulan serta diwujudkan dalam skala pilot project di desa.

Tabel 3 Materi Umum dan Kewirausahaan

No.	Materi	Kegiatan/ Metode
1	Pengantar Kelembagaan Hijau	Diskusi Kelas, Diskusi Kelompok, Praktik Kelas, Mentoring
2	Perencanaan Pembangunan Hijau	
3	Analisis Ekonomi dan Perencanaan Desa	
4	Pengantar Kewirausahaan Hijau	
5	Pengelolaan Bisnis Hijau	
6	Pengelolaan Ekowisata	
7	Manajemen Logistik, Distribusi dan Pemasaran	
8	Manajemen Koperasi	
9	Rencana Bisnis Hijau	
10	Lembaga Keuangan Mikro	
11	Penyusunan Proposal Bisnis Hijau	Praktik Kelas Observasi Lapangan, Praktik Lapangan
12	Administrasi Usaha Terapan	
13	Administrasi Keuangan Terapan	
14	Kontribusi RPJMDes, RKPDes, RDTR Desa	

Materi-materi khusus lebih ditujukan kepada pelatihan ketrampilan untuk mengembangkan keahlian-keahlian baru peserta pendidikan terutama keahlian yang berprinsip pembangunan hijau dan aktifitas rendah carbon. Materi-materi yang disampaikan akan disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan di lokasi setempat. Bidang ketrampilan yang dilatih meliputi:

- Energi terbarukan
- Pertanian terpadu
- Tata Lingkungan dan Sanitasi
- Sosial, Budaya dan Politik Desa

Tabel 4 Materi Pengetahuan dan Ketrampilan Khusus Energi Terbarukan

No.	Materi	Kegiatan/ Metode
1	Biomassa untuk Energi Bahan Bakar dan Biogas	Diskusi Kelas/ Kelompok, Praktik Kelas, Mentoring, Observasi Lapangan, Praktik Lapangan
2	Pengolahan Limbah Anorganik	
3	Limbah dan Pengolahan Limbah Cair	
4	Mikro-Hidro untuk Listrik Rumah Tangga	
5	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	

Tabel 5 Materi Pengetahuan dan Keterampilan Khusus Pertanian Terpadu

No.	Materi	Kegiatan/ Metode
1	Sistem Pertanian Terpadu	Diskusi Kelas/ Kelompok, Praktik Kelas, Mentoring, Observasi Lapangan, Praktik Lapangan
2	Pertanian Organik	
3	Pengolahan Limbah Pertanian	
4	Konservasi Lahan dan Air	
5	Pengolahan Hasil Pertanian	
6	Pengelolaan Pangan Lokal	

Tabel 6 Materi Pengetahuan dan Keterampilan Khusus Tata Lingkungan dan Sanitasi

No.	Materi	Kegiatan/ Metode
1	Pengembangan Tata Ruang & Pemukiman Hijau	Diskusi Kelas/ Kelompok, Praktik Kelas, Mentoring, Observasi Lapangan, Praktik Lapangan
2	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	
3	Sanitasi Industri dan Lingkungan Rumah Tangga	

Tabel 7 Materi Pengetahuan dan Keterampilan Khusus Sosial, Budaya, Politik Desa

No.	Materi	Kegiatan/ Metode
1	Strategi Advokasi dan Pengorganisasian	Diskusi Kelas/ Kelompok, Praktik Kelas, Mentoring
2	Demokrasi dan Politik Desa	
3	Internet, Jurnalisme Desa dan Media Sosial	
4	Gender Dan Inklusi Sosial	

Pengajaran akan dilakukan terhadap 160 warga desa terpilih dalam waktu kurang lebih 12 bulan dengan waktu pertemuan efektif 144 jam per peserta. Pembagian waktu pertemuan dan metode pengajaran adalah sebagai berikut :

- Diskusi kelas : 15% = 21,6 jam
- Diskusi kelompok : 15% = 21,6 jam
- Praktik kelas : 5% = 7,2 jam
- Mentoring (*coaching*) : 20% = 28,8 jam
- Observasi lapangan : 20% = 28,8 jam
- Praktik lapangan : 25% = 36 jam

Advance Level Training/ Pendidikan Tingkat Lanjut

Pendidikan lanjut lebih menekankan kepada pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk menjalin kerjasama dengan mitra usaha, mengembangkan skala ekonomi dan jaringan usaha. Kerjasama didorong dengan berbagai kalangan, yaitu kalangan industri dan pelaku bisnis dan perdagangan, universitas, pemerintah daerah serta organisasi dan komunitas-komunitas terkait.

Tabel 8 Materi Umum

No.	Materi	Kegiatan/ Metode
1	Kewirausahaan Sosial	Diskusi Kelas, Diskusi Kelompok, Praktik Kelas, Mentoring
2	Kemitraan Usaha	
3	Strategi Pemasaran	
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Bisnis UMKM	
5	Pola Kemitraan Lokal	Observasi Lapangan, Praktik Lapangan
6	Perjalanan Bisnis	

Pengajaran akan dilakukan terhadap warga desa terpilih dalam waktu kurang lebih 8 bulan dengan waktu pertemuan efektif 96 jam per peserta. Pembagian waktu pertemuan dan metode pengajaran adalah sebagai berikut :

- Diskusi kelas : 15% = 14,4 jam
- Diskusi kelompok : 15% = 14,4 jam
- Praktik kelas : 5% = 4,8 jam
- Mentoring (coaching) : 20% = 19,2 jam
- Observasi lapangan : 20% = 19,2 jam
- Praktik lapangan : 25% = 24 jam

Pengembangan Sekolah Hijau oleh Konsorsium KEMALA

Pembangunan Indonesia ke depan harus lebih mempertimbangkan berbagai dimensi sebagai sasaran akhir. Degradasi lingkungan yang semakin mengemuka serta terjadinya perubahan iklim merupakan dampak dari berkontribusinya model pembangunan yang diimplementasikan secara parsial. Implementasi yang melahirkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengindahkan keberlanjutan sumberdaya tidak saja menghasilkan keterpurukan dan semakin meningkatkan jumlah orang miskin saat ini, namun juga telah mengancam masa depan bangsa itu sendiri.

Persoalan lain yang juga semakin mengemuka adalah praktik pembangunan yang lemah dalam menangkap kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan maupun implementasinya. Sehingga *misleading* program pembangunan sering terjadi. Koreksi atas model pembangunan semacam ini terus menerus dilakukan, namun *effort* yang diberikan untuk menangkap kebutuhan *grassroot* hampir sering mengalami kegagalan. Partisipasi serta kapasitas masyarakat yang rendah dan belum dimilikinya wawasan merupakan ujung dari persoalan ini. Pemaknaan pembangunan berbasis masyarakat masih selalu diterjemahkan secara sempit (sering rancu dengan pengertian mobilisasi masyarakat) dan dianggap menimbulkan konsekuensi biaya besar dan tidak efektif.

Masih banyak dijumpai desa-desa tanpa listrik pada beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi besar bagi warga yang bermukim di sana. Selain keterbatasan soal

penerangan, berbagai peluang berkembangnya usaha produktif dan memberi nilai tambah bagi peningkatan pendapatan masyarakat turut terhambat, karena rumah tangga petani hanya memanfaatkan apa yang ada untuk digunakan berproduksi. Pengelolaan sumberdaya alam seperti lahan dan juga hasil pertanian masih sangat terbatas. Termasuk didalamnya hasil dari sektor perikanan yang dipasarkan secara terbatas tanpa pengolahan. Sehingga, pendapatan rumah tangga petani menjadi sulit untuk meningkat. Dengan kata lain, lingkaran kemiskinan yang selama ini terjadi pada rumah tangga petani di wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik akan terus bertahan jika tanpa intervensi dari luar.

Program Kemakmuran Hijau yang dikembangkan oleh MCC (*Millenium Challenge Corporation*) dan dipraktikkan di Indonesia melalui MCA Indonesia adalah mencoba mempertegas dan memperkuat komitmen negara didalam menata strategi pembangunan ke depan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor lingkungan tanpa sedikitpun menghilangkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di pedesaan.

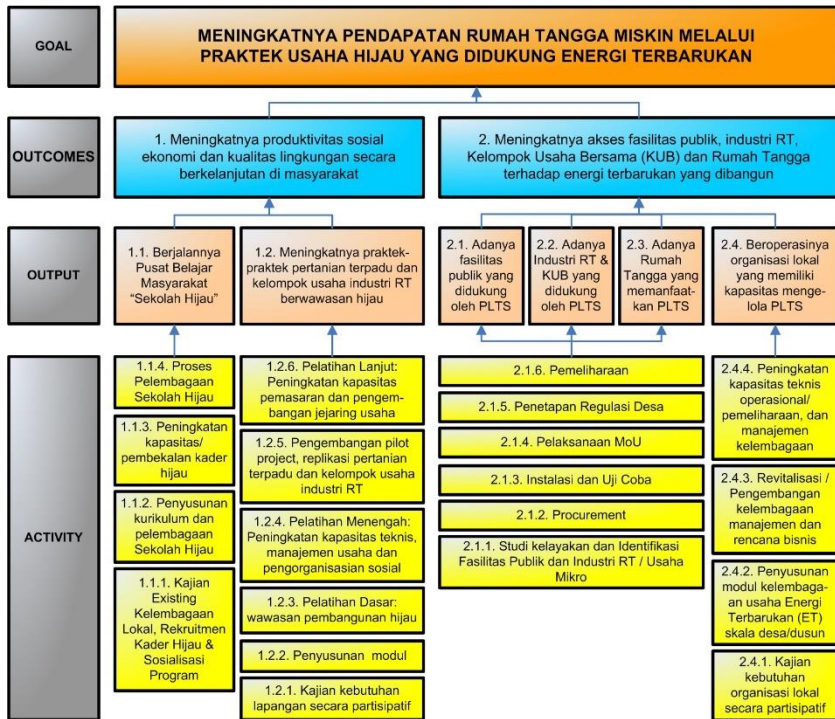
Usulan proyek yang diusulkan oleh Konsorsium KEMALA sejalan dan memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan proyek Kemakmuran Hijau yang terfokus pada dua hal yang saling berkaitan satu sama lainnya yakni: (1) peningkatan pendapatan masyarakat guna mengurangi kemiskinan dan (2) pemanfaatan energi dan mendorong perilaku berusaha ramah lingkungan melalui pengurangan emisi karbon sebagai penyelamatan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

Proyek di dalam jendela 2 ini merupakan proyek skala terbatas yang dimaksudkan untuk mempraktikkan berbagai model pembangunan berbasis komunitas dalam mewujudkan kedua tujuan di atas. KEMALA meresponnya dengan memilih menggunakan energi terbarukan sebagai pendekatan utama yang mendorong pengurangan emisi karbon guna memberi peluang peningkatan nilai tambah dari usaha sektor pertanian yang pada gilirannya dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga miskin yang tinggal di desa non-listrik tersebut.

KEMALA menempatkan tujuan proyek secara lebih spesifik, dengan merumuskan objektif proyek yakni untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin melalui praktik usaha hijau yang didukung energi terbarukan. Guna mengukur keberhasilan tujuan ini, KEMALA menempatkan indikator pendapatan rumah tangga dan juga omset usaha pertanian/mikro sebagai ukuran keberhasilan. Disamping itu, dengan meningkatnya praktik-praktik usaha hijau serta penggunaan energi terbarukan akan mengurangi emisi karbon. Indikator keberhasilannya adalah jumlah emisi karbon yang berkurang secara signifikan.

Alur kegiatan dari sisi logika, proposal ini akan memulai dari *Outcome Kedua*, yang diharapkan terjadi adalah dengan penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat meningkatkan akses fasilitas publik, industri rumah tangga, kelompok usaha bersama dan juga rumah tangga miskin kepada listrik. Melalui listrik baik dalam bentuk penerangan atau untuk menggerakkan sarana yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi produktif yang pada gilirannya diharapkan dapat

memberi peluang rumah tangga miskin meningkatkan taraf hidupnya.



Gambar 5 Logframe Program

Untuk memastikan bahwa akses listrik dapat memberi peluang meningkatkan taraf hidupnya dan berkelanjutan, maka pengelolaan energi terbarukan dalam hal ini tenaga surya harus menjadi keluaran penting yang dapat dipastikan terjadi. Pengelolaan dilaksanakan oleh pengelola yang berasal dari organisasi lokal yang dibentuk/ direvitalisasi guna memastikan terjadinya kesinambungan pemeliharaan sarana listrik tenaga surya tersebut. Keberlanjutan dalam hal pembiayaan di sisi lain juga menjadi isu penting. Oleh karenanya, selain memastikan kontribusi penerima manfaat, dukungan kebijakan pada tingkat

desa sangat diperlukan. Kebijakan desa diharapkan dapat mengantisipasi biaya pemeliharaan serta replikasi pada jenis fasilitas publik lain di desa yang belum tersentuh.

Kemudian **Outcome Pertama**, dengan akses tenaga surya yang didapatkan, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas sosial ekonomi dan kualitas lingkungan secara berkelanjutan di masyarakat. *Outcome* tersebut dapat terjadi ketika paling tidak dua hal terjadi. *Pertama*, praktik pertanian terpadu maupun usaha ekonomi mikro yang dikembangkan warga mampu memberikan nilai tambah yang berdampak pada meningkatnya penghasilan yang diterima oleh rumah tangga miskin. Hal ini akan diukur dengan seberapa banyak praktik-praktik tersebut terjadi di dalam wilayah proyek dan seberapa meningkatnya penghasilan rumah tangga akibat menjalankan praktik-praktik tersebut. *Kedua*, praktik-praktik di atas dapat terjadi melalui keterlibatan wadah setempat yang berperan memfasilitasi terjadinya peningkatan kapasitas rumah tangga miskin serta Bergeraknya mereka menjalankan kerja produktif, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih baik. Wadah organisasi tersebut dapat berupa organisasi independen ataupun dibawah payung pemerintah desa. Proses penetapannya dilakukan secara demokratis oleh stakeholder. Nama generik yang diberikan oleh proyek adalah Sekolah Hijau. Misi utama Sekolah Hijau adalah membangun gerakan pembangunan hijau di desa. Organisasi ini memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah tangga miskin dan juga menjadi tangan proyek dalam mengelola sarana peningkatan usaha untuk mendorong berbagai upaya ekonomi produktif yang dikembangkan secara kolektif dan berbasis komunitas dalam perspektif pembangunan hijau. Upaya Sekolah Hijau ini diharapkan menumbuhkan kohesi sosial serta

semangat keberlanjutan dalam masyarakat, terutama rumah tangga miskin. Selanjutnya, organisasi sosial ini dapat secara terus menerus memberi layanan di atas agar peningkatan pendapatan dapat terus terjadi, sekaligus perbaikan kualitas lingkungan dapat terus diperbaiki.

Sekolah Hijau berdiri melalui proses yang difasilitasi proyek. Proyek mengidentifikasi dan memberdayakan kader potensial di desa untuk mengelola organisasi yang dapat mengelola berbagai upaya ekonomi produktif di desa. Keberlanjutan melalui pendekatan ini dapat dilihat dari dua sisi yakni jika organisasi ini berhasil dikelola dengan baik oleh kader-kader desa yang potensial maka keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan di desa akan berjalan. Kedua, melalui peningkatan kapasitas yang dijalankan oleh organisasi lokal ini, pengetahuan tentang praktik usaha hijau dan misi pengurangan emisi karbon dapat dipahami oleh rumah tangga miskin. Praktik-praktik yang dilakukan dalam proyek dan pengetahuan yang dimiliki rumah tangga miskin dapat mendorong perlindungan lingkungan.

Kegiatan-kegiatan proyek dan intervensi yang dilakukan untuk memenuhi kedua *outcome* di atas, walau terdiri atas berbagai jenis kegiatan, pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian yang sama dan bersifat terpadu. Intervensi juga tidak berarti adanya pengalihan sumber daya yang bersifat eksternal, namun justru sebaliknya berpijak pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia di masyarakat yang menjadi sasaran utama program ini.

Visi-Misi dan Tujuan

Secara spesifik, pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas untuk peningkatan praktik-praktik pengelolaan SDA yang lebih baik ini dilaksanakan melalui payung kegiatan “Sekolah Hijau”. Program ini akan melakukan “intervensi” menghasilkan lima keluaran kegiatan, yaitu: (1) Berjalannya pusat belajar masyarakat “Sekolah Hijau”; (2) Meningkatnya praktik-praktik pertanian terpadu; (3) Meningkatnya pengelolaan SDA berbasis masyarakat; (4) Meningkatnya produktifitas industri rumah tangga dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berwawasan hijau; dan (5) Beroperasinya organisasi lokal yang memiliki kapasitas mengelola PLTS.

Program pemberdayaan masyarakat terutama akan dilakukan untuk mendorong kesadaran kolektif dan partisipasi warga melalui pendekatan: (a) pengembangan partisipasi masyarakat dan instansi terkait; (b) penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat; dan (c) optimalisasi fungsi dan manfaat sumber daya alam. Pengembangan kelembagaan dimaksud adalah pengembangan “Sekolah Hijau” yang akan menjadi inti kegiatan pengelolaan pengetahuan, pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis. Sekolah Hijau dapat dipahami sebagai lembaga masyarakat mandiri yang bergiat untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan teknis, produktifitas dan kesejahteraan para anggota dan pegiatnya. Sekolah Hijau akan menjadi wahana untuk: (a) saling belajar-mengajar; (b) berkemampuan mengidentifikasi masalah dan pengambilan keputusan bersama; (c) mobilisasi sumber daya; dan (d) mengembangkan komunikasi dengan pihak lain.

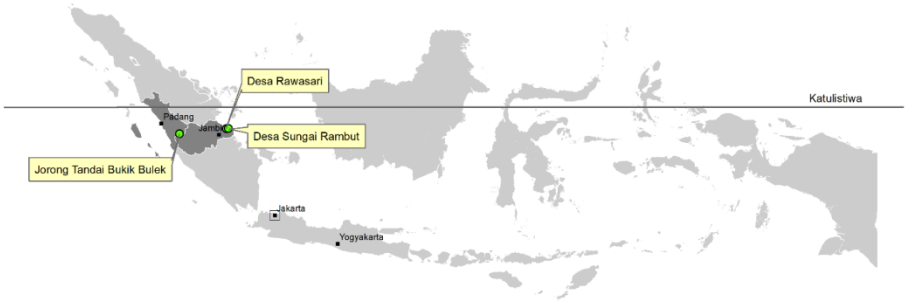
Berbeda dengan sekolah formal/reguler yang memerlukan persyaratan akademik tertentu, Sekolah Hijau adalah bentuk lembaga pendidikan alternatif/informal yang dapat diakses oleh setiap lapisan masyarakat. Peserta didik Sekolah Hijau adalah para pemangku kepentingan dalam pembangunan desa, yang mencakup tapi tidak terbatas pada : perangkat desa, petani/ peternak/ nelayan, pelaku usaha mikro, kaum ibu-ibu/perempuan, pemuda, pelajar, dan warga miskin. Peran perempuan dan kaum miskin akan mendapat prioritas sesuai dengan Rencana Integrasi Sosial dan Gender Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia.

BAGIAN KEDUA



Sekolah Hijau

PROFIL TIGA DESA



Gambar 6 Tiga Desa Lokasi Program KEMALA

Bagian pertama buku ini telah diuraikan secara ringkas dalam beberapa bab pemikiran konseptual dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan tentang pembangunan berkelanjutan. Perspektif tersebut dibutuhkan untuk menyusun program “Sekolah Hijau”, yang nantinya diterapkan oleh Konsorsium KEMALA, di tiga lokasi desa sasaran. Ketiganya berada di Pulau Sumatera, satu desa di Provinsi Sumatera Barat, dan dua desa lainnya di Provinsi Jambi.

Bagian kedua buku ini berisi profil tiga desa sasaran program, yang meskipun letaknya relatif tidak berjauhan, namun memiliki karakteristik atau tipologi desa yang berlainan. Desa-desanya tersebut adalah: 1) Jorong Tandai Bukik Bulek; 2) Desa Sungai Rambut; dan 3) Desa Rawasari. Jorong Tandai Bukik Bulek merupakan sebuah desa dengan latar belakang dan karakteristik alam pegunungan, sebaliknya kedua desa yang

lain, Sungai Rambut dan Rawasari, merupakan desa dengan karakteristik daerah “pesisir” di muara sungai besar. Ketiganya sama-sama berada di wilayah hutan karena berada dekat dengan hutan taman nasional, bedanya satu di hutan pegunungan, sedangkan dua lainnya di hutan rawa (gambut) di wilayah pesisir. Perbedaan karakteristik alam tersebut tentu akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, termasuk dalam mendorong strategi implementasi program Sekolah Hijau.

BAB VII

PROFIL JORONG TANDAI BUKIK BULEK

Dwi Novitasari
Rajib Khafif Arruzzi

Nama Jorong “Bukik Bulek” diambil dari nama salah satu perbukitan yang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Terdapat salah satu bukit yang berbentuk bulat sehingga bila dilihat dari berbagai sudut tampak sama. Dengan ciri khas tersebut maka salah satu jorong yang secara administratif berada di Nagari Lubuk Gadang Timur diberi nama Jorong Tandai Bukik Bulek (bahasa Indonesia: “bukit bulat”). Awalnya Jorong Tandai Bukik Bulek berada di wilayah administratif Desa

“Pada awalnya jorong ini masuk ke Nagari Lubuk Gadang dan wilayahnya luas sekali. Karena luas banget maka dipecah atau istilahnya dimekarkan menjadi beberapa Nagari. Nah sekarang Bukik Bulek masuk di Nagari Lubuk Gadang Timur...” (tokoh masyarakat. SHR. 50 th)

Sungai Aro. Nama desa bertahan hingga masa reformasi. Setelah reformasi dan pengembalian ke kearifan dan istilah lokal maka pada tahun 2004 Desa Sungai Aro berubah menjadi Nagari Lubuk Gadang. Dikarenakan sangat luas cakupan wilayahnya, maka pada tahun 2008 Nagari Lubuk Gadang dimekarkan atau dipecah menjadi 4 Nagari, yang terdiri dari Nagari Lubuk Gadang Induk, Nagari Lubuk Gadang Timur, Nagari Lubuk Gadang Selatan, dan Lubuk Gadang Utara. Dengan pemekaran tersebut, Nagari Lubuk Gadang Timur secara administratif

mempunyai 17 jorong, di mana salah satunya Jorong Tandai Bukik Bulek.

Menurut masyarakat di beberapa jorong merasa wilayah Nagari Lubuk Gadang Timur masih dirasa terlalu luas dan dapat dimekarkan kembali. Tahun 2013, Nagari Lubuk Gadang Timur dimekarkan kembali menjadi dua nagari, yaitu Nagari Lubuk Gadang Timur dan Nagari Lubuk Gadang Tenggara. Nagari Lubuk Gadang Tenggara terdiri dari 8 jorong, di mana Jorong Tandai Bukik Bulek termasuk di dalamnya. Peresmian pemekaran ini sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri namun masih menunggu nomor registrasi atau persetujuan dari instansi terkait. Berikut adalah profil Jorong Tandai Bukik Bulek, sebuah kawasan desa yang menjadi salah satu desa yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini.

Bentang Alam dan Fisik Wilayah

Secara fisik Jorong Tandai Bukik Bulek terletak di tengah hutan. Hal ini dikarenakan selama perjalanan menuju ke sana banyak menemui bukit dan lembah yang masih banyak pepohonan dan kadang-kadang muncul hewan seperti babi hutan dan monyet yang berkeliaran. Terdapat istilah yang sering diungkapkan oleh teman-teman di Padang Aro ataupun Jorong Tandai Bukik Bulek bila kita akan menuju atau pergi dari lokasi. Teman-teman Padang Aro dan Jorong Tandai Bukik Bulek menggunakan istilah “masuk” bila kita akan menuju ke daerah Tandai. Banyak warga di luar mengenal Jorong Tandai Bukik Bulek sebagai daerah Tandai. Hal ini dikarenakan pada awalnya jorong ini dikenal dengan istilah Tandai, padahal daerah Tandai terdiri dari 4 jorong (dusun).

Perjalanan menuju Padang Aro melewati daerah yang berbukit dan ditemani dengan berbagai macam jenis jalan, antara lain jalan aspal yang halus, ada juga yang berlubang. Jalan yang dilewati tidak hanya menghantarkan kita ke Kabupaten Solok Selatan namun juga bisa ke kabupaten atau provinsi lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan bila dalam perjalanan kita terdapat beberapa titik infrastruktur jalan yang sedang dalam renovasi atau perbaikan. Selain jalan yang beraneka macam, pemandangan bukit dan danau juga menjadi teman perjalanan. Setelah sampai di Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan (Padang Aro), perjalanan dilanjutkan kembali dengan menggunakan kendaraan bermotor (sepeda motor atau mobil) untuk menuju Jorong Tandai Bukik Bulek.

“Mereka memilih untuk tidak pergi ke luar desa, kecamatan, atau pusat kota untuk mencari penghasilan. Bahkan beberapa pendatang datang ke Jorong Bukik Bulek, karena kesuburan tanahnya.

Dengan kondisi Jorong Tandai Bukik Bulek yang dikelilingi oleh bukit dan terisolir mempunyai faktor sendiri yang membuat warga yang sudah lama bermukim memutuskan untuk

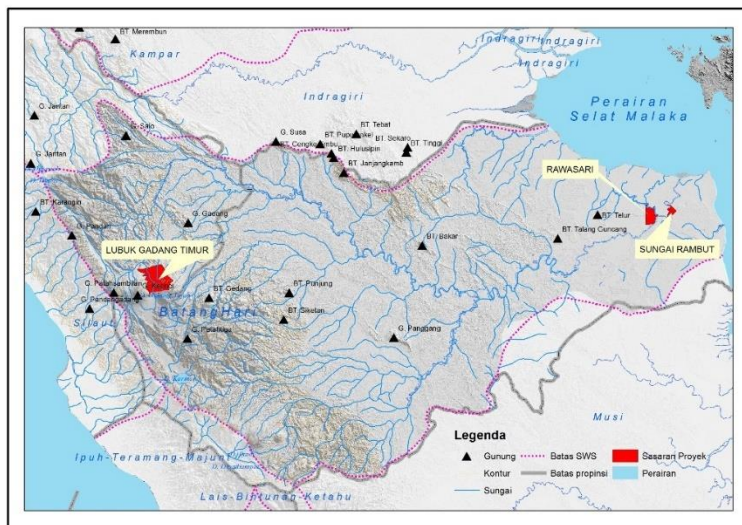
tetap tinggal. Mereka memilih untuk tidak pergi ke luar desa, kecamatan atau pusat kota kabupaten untuk mencari penghasilan. Bahkan terdapat beberapa pendatang yang tertarik untuk datang ke Jorong Tandai Bukik Bulek. Para pendatang tertarik datang dan tetap bertahan tinggal di Bukik Bulek karena kesuburan tanahnya.

Selain perbukitan, wilayah Jorong Tandai Bukik Bulek juga dikelilingi oleh beberapa perusahaan, salah satunya perusahaan sawit yang luasnya terhampar hingga wilayah Provinsi Jambi. Dengan dikelilingi oleh perusahaan, telekomunikasi menjadi

tidak masalah karena beberapa perusahaan mempunyai *tower* sendiri untuk dapat memancarkan sinyal bagi kepentingan perusahaan itu sendiri. Secara tidak langsung warga sekitar juga mendapatkan keuntungan memperoleh sinyal walaupun tetap harus mencarinya. Selain itu dengan adanya perusahaan di sekitar jorong, masyarakat dapat menanam cabe, ketela dan sayuran lainnya untuk langsung dijual ke karyawan yang bekerja di perusahaan. Pembukaan jalan dilakukan oleh pihak kabupaten dan perusahaan agar dapat membantu mobilitas keluar masuk kendaraan operasional perusahaan.

Walaupun terdapat beberapa keuntungan dengan keadaan kondisi daerah tersebut, namun menurut masyarakat masalah akses, fasilitas dan hama pertanian yang menjadi permasalahan atau tantangan. Hama tidak hanya wereng saja, namun babi hutan, burung dan monyet. Selain hama tersebut, masalah akses juga menjadi suatu kendala tersendiri. Kondisi jalan yang "hidup" bila musim hujan mengakibatkan harga yang tinggi bila akan membeli pupuk untuk pertanian yang tersedia di ibu kota kabupaten. Masalah tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi petani di Jorong Tandai Bukik Bulek.

Nagari Lubuk Gadang Timur di mana Jorong Tandai Bukik Bulek berada termasuk dalam daerah administratif Kecamatan Sangir. Secara geografis Kecamatan Sangir terletak antara 01° 32' 00" dan 01° 46' 45" Lintang Selatan dan 101° 04' 55" dan 101° 26' 27" Bujur Timur. Kecamatan Sangir memiliki iklim yang sejuk dengan ketinggian 453 meter dari permukaan laut dengan curah hujan 20.23 mm. Jenis tanah atau lahan yang ada di Jorong Tandai Bukik Bulek berupa tanah lempung, di mana ketika hujan atau terkena air langsung menempel dan licin.



Gambar 7 Peta Lokasi Sasaran program yang ditampilkan dengan wilayah DAS Batang Hari menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Wilayah Nagari Lubuk Gadang Timur merupakan lahan persawahan, tegalan/kebun/ladang/dll, berupa perkebunan lahan kering. Karena mata air kecil dan letaknya di bawah maka tidak banyak sawah di sana. Kebanyakan warga menanam jagung dan kopi. Mereka melakukan sistem pertanian dengan tumpangsari. Ketika ada lahan yang sudah ada ditanami kopi mereka dapat menanam jagung di sekitarnya. Dengan catatan bahwa tanaman kopi yang ditanam belum besar dan antar daun belum bersentuhan.

Wilayah Tandai Bukik Bulek masuk ke dalam zona Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Awalnya kawasan Tandai merupakan zona pendukung dari Kawasan Hutan Lindung Gunung Kerinci. Menurut pihak TNKS karena masyarakat sudah sejak lama tinggal di kawasan hutan lindung, maka pihak pemerintah daerah mengirimkan surat ke Kementerian

Kehutanan agar status wilayah dapat diturunkan menjadi zona khusus. Akhirnya untuk wilayah Tandai yang semula merupakan kawasan atau zona pendukung dapat diturunkan menjadi zona khusus. Zona khusus dalam arti bahwa masyarakat Tandai boleh menggarap lahan yang ada di sekitar mereka namun tidak boleh melebihi dari zona tersebut.

Permasalahan yang kini terjadi adalah tidak adanya sosialisasi yang jelas terkait lahan mana yang tidak boleh dikerjakan oleh masyarakat. Selain sosialisasi juga tidak ada batas yang jelas lahan yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh masyarakat. Menurut cerita beberapa warga dikarenakan tidak adanya batas yang jelas, maka kadang-kadang ketika ada masyarakat yang sedang mengerjakan suatu lahan tiba-tiba didatangi oleh beberapa petugas kehutanan.

Pihak TNKS sendiri tidak merasa akan mengusir masyarakat Tandai, dikarenakan masyarakat lebih dahulu tinggal di wilayah zona tersebut dibandingkan dengan keberadaan TNKS itu sendiri. Pihak TNKS saat ini mencoba meminimalisir penambahan luas lahan dari masyarakat untuk mencegah musibah seperti longsor, dan sebagainya. Pihak masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang sependapat dengan pihak TNKS dan kelompok yang masih belum sepaham. Salah seorang warga bercerita, bahwa terdapat beberapa orang atau warga yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai TNKS akan mengusir warga dari wilayah tempat tinggal mereka saat ini. Terjadinya konflik yang laten antara TNKS dan warga sebenarnya diakibatkan adanya miskomunikasi antara beberapa pihak.

Penetapan zona khusus yang ada di Tandai salah satunya Jorong Tandai Bukik Bulek, terdapat beberapa urutan kejadian. Masyarakat mulai merintis atau membuka lahan perkampungan di wilayah Tandai mulai tahun 1969. Pihak TNKS tidak akan mengusir atau meminta mereka pergi dengan lamanya waktu tersebut. Pihak TNKS melakukan pendataan kegiatan pengukuran/penataan batas kawasan didampingi oleh kepala Desa Sungai Aro bersama tokoh masyarakat setempat. Diketahui bahwa wilayah Tandai berada di dalam kawasan TNKS dari hasil pengukuran tersebut.

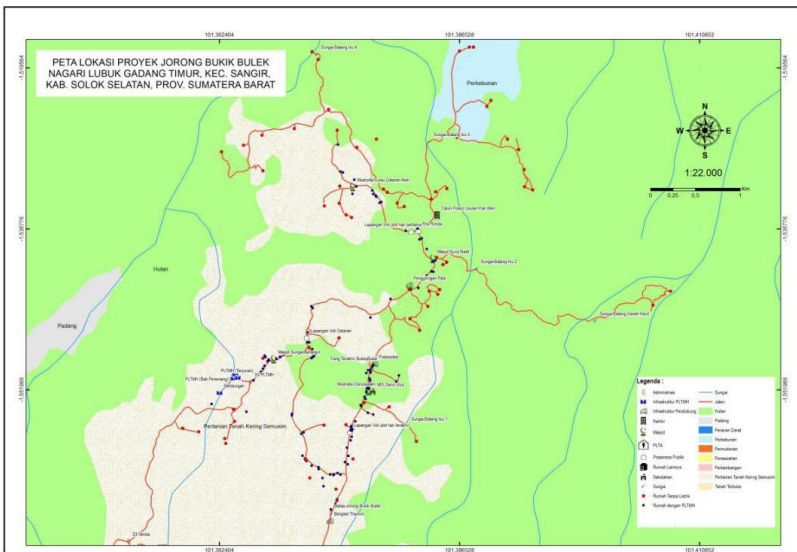
Setelah mengetahui hal tersebut, pihak TNKS bersama pemerintah daerah mengirimkan surat ke Kementerian Kehutanan mengenai keberadaan masyarakat Tandai yang berada di lingkungan TNKS. Dikarenakan agar masyarakat juga dapat mengolah lahan di lingkungan dan tidak menambah luas lahan garapan maka Kementerian Kehutanan menurunkan menjadi zona khusus pada tahun 2014 dengan SK Dirjen PHKA Nomor SK 124/IV_SET/2014 dengan luas 1.500 hektar. Walaupun sudah ada penurunan zonasi namun masyarakat tetap tidak dapat memiliki surat keterangan milik untuk lahannya. Secara hukum bila tidak mempunyai surat keterangan kepemilikan, tidak dapat dilakukan transaksi jual beli tanah. Namun yang terjadi di Jorong Tandai Bukik Bulek, sering terjadi transaksi jual beli tanah dengan harga tanah Rp 15.000.000 untuk 1 hektar yang berada di pinggir jalan. Mudahnya transaksi jual beli mengakibatkan semakin banyak warga luar yang membeli lahan di Tandai.

Penduduk dan Sumber Pendapatan Keluarga

Berdasarkan data dari Kantor Wali Nagari Lubuk Gadang Timur diketahui bahwa jumlah penduduk Nagari Lubuk Gadang Timur tahun 2015 Sebanyak 10.585 jiwa terdiri dari laki-laki 5.341 jiwa dan perempuan 5.244 Jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah penduduk 0.18 %. Kepadatan penduduk tahun 2016 yaitu 45,1 jiwa/km², dengan perbandingan dalam 100 orang laki-laki terdapat 92 orang perempuan.

Sementara itu jumlah penduduk di Jorong Tandai Bukik Bulek adalah 455 jiwa, yang terdiri dari 237 laki-laki dan 218 perempuan. Penduduk warga Jorong Tandai Bukik Bulek terdiri dari dua etnis, antara lain Minang dan Jawa. Etnis Minang yang tinggal di Bukik Bulek masih terbagi menjadi sub etnis atau mereka mengenalnya dengan istilah suku. Terdapat 5 sub etnis, antara lain; Chaniago, Tanjung, Kutianye, Melayu dan Panai. Terdapat ketua sub etnis atau yang sering disebut dengan istilah “mamak” dari masing-masing sub etnis tersebut. Mamak berfungsi sebagai mediator atau pelindung bila ada anggotanya memiliki permasalahan dengan sesama sub etnis atau berbeda. Selain mediator atau pelindung, Mamak juga berfungsi sebagai panutan karena setiap apa yang diucapkan akan selalu dilakukan oleh anggota sukunya. Seperti salah seorang warga yang juga berperan sebagai “Mamak”, beliau dijadikan panutan karena sukses dalam hal pertanian dan perekonomian. Sebagian kecil warga yang tinggal di Jorong Tandai Bukik Bulek merupakan pendatang yang biasanya Etnis Jawa walaupun sebagai eks transmigrasi (Lampung, Jambi) atau langsung dari Pulau Jawa.

Pola pemukiman penduduk di Jorong Tandai Bukik Bulek, secara umum berjauhan. Jarak rumah satu dengan lainnya kurang lebih 200 meter. Selain itu beberapa masyarakat juga tinggal atau membuat rumah di tengah ladang mereka atau di dalam hutan. Hal ini dikarenakan selain tempat tinggal mereka juga menjaga ladang jagung atau pertanian mereka. Selain menjaga ladang dari hama babi dan beruk, mereka kebanyakan juga masih numpang di ladang warga lain. Jarak korong satu dengan yang lainnya berjauhan 1 hingga 2 km.



Gambar 8 Peta Persebaran Rumah di Jorong Tandai Bukik Bulek

Hal yang penting untuk dibahas dalam bagian ini adalah distribusi atau persebaran penduduk berdasarkan tempat tinggal. Persebaran penduduk di Jorong Tandai Bukik Bulek berdasarkan tempat tinggal dapat dibagi menjadi tiga lokasi korong, yaitu Korong Pasar Lamo, Dataran dan Sungai Berangin. Akses paling dekat dengan pusat pemerintahan adalah Korong

Pasar Lamo dan Sungai Berangin. Sementara Korong Dataran lokasinya paling jauh jika diukur dari kedekatan dengan pusat pemerintahan atau Kantor Wali Nagari Lubuk Gadang Timur. Sebanyak 41 persen penduduk bermukim di Korong Pasar Lamo, 39 persen bermukim di Korong Dataran dan sisanya 20 persen bermukim di Korong Sungai Berangin.

Terdapat dua model bentuk rumah di Jorong Tandai Bukik Bulek, antara lain; rumah panggung yang terbuat dari kayu dan rumah permanen yang lantainya terbuat dari “cor” (semen dan pasir). Penggunaan cor, keramik, untuk semua bangunan rumah menjadi ukuran untuk memandang *prestise* seseorang. Masyarakat, beranggapan bahwa bila rumah menggunakan bahan baku tersebut dapat dikatakan bahwa rumah permanen dan tidak akan diubah, rehab atau pindah lagi.

Masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke atas membangun rumah dengan semen walaupun dinding rumah masih tetap memakai kayu. Bahan lantai biasanya memakai keramik dan semen. Tidak semua rumah menggunakan model tersebut karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Biaya tersebut meliputi dari bahan baku seperti pasir, semen, dan keramik. Penggunaan semen dan pasir di Jorong Tandai Bukik Bulek sangatlah mahal, dikarenakan ongkos transportasi dan tidak adanya sumber daya (pasir). Tidak ada toko atau warung di Bukik Bulek menjual keramik, sehingga harus membeli di ibu kota kabupaten dan membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Selain itu juga membutuhkan lokasi yang harus rata sehingga harus dipasang keramik.

Mayoritas warga Bukik Bulek menggunakan kayu untuk membangun rumah. Mereka memanfaatkan sumber daya alam

yang ada di sekeliling mereka. Model rumah panggung masih mendominasi dalam bentuk rumah warga Bukik Bulek. Alasan warga membangun rumah dengan model tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain; untuk menyiasati kontur tanah. Hal ini dikarenakan bentuk topografis yang berbukit-bukit. Sehingga meratakan tanah untuk dibangun rumah membutuhkan waktu dan biaya. Selain menyiasati kontur tanah, bentuk rumah panggung juga menghindari binatang untuk masuk ke dalam rumah.

Aktivitas mereka sehari-hari dihabiskan di ladang pertanian atau di lingkungan sekitar jorong. Jarak menuju ke ladang pertanian sekitar 1 km hingga 3 km. Kebanyakan warga menggunakan sepeda motor untuk ke ladang namun ada juga warga yang berjalan kaki jika jaraknya dekat. Mereka jarang melakukan perjalanan ke luar jorong jika bukan karena urusan penting seperti: mengurus surat ke luar nagari, berbelanja kebutuhan sehari-hari, atau mencari racun untuk keperluan pertanian. Warga biasanya menggunakan kendaraan sendiri atau ojek sebagai alat transportasi. Mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp100.000 pulang pergi untuk menuju ke pusat ibu kota kabupaten.

Penduduk Jorong Tandai Bukik Bulek 100% beragama Islam, jadi tidak heran bila di jorong dengan jumlah KK yang tidak banyak, namun luas wilayahnya terdapat beberapa masjid dan musholla atau surau. Dikarenakan terdapat tiga korong, maka masyarakat pada awalnya membangun 2 masjid yang terletak di Korong Sungai Berangin dan Dataran. Bagi masyarakat di Korong Pasar Lamo mereka akan pergi ke Korong Dataran atau Sungai Berangin untuk pergi ke masjid. Awalnya di Jorong

Tandai Bukik Bulek terdapat 2 musholla namun dengan perkembangan waktu, kini musholla yang terletak di Korong Pasar Lamo menaikkan statusnya menjadi masjid. Kini warga Pasar Lamo tidak perlu jauh-jauh ke korong lainnya untuk menunaikan shalat jum'at atau pengajian atau acara keagamaan lainnya dengan naiknya status tersebut.

Selain untuk shalat dan pengajian, fungsi masjid di Jorong Tandai Bukik Bulek juga dipergunakan untuk melakukan perkumpulan SPP atau perkumpulan perempuan simpan pinjam. Biasanya perkumpulan simpan pinjam tersebut merupakan perkumpulan majelis taa'lim seperti yang dilakukan oleh perkumpulan wanita simpan pinjam yang ada di Korong Dataran.

Sarana publik yang juga menjadi tempat kumpul warga adalah lapangan voli yang berada di tiga korong. Mereka biasa berkumpul selain olah raga juga melakukan kegiatan latihan piring dan seni bela diri. Latihan dilakukan seminggu sekali dan biasanya di malam hari.

Pertanian dan Perkebunan

Mayoritas warga Bukik Bulek bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas perkebunan yang diusahakan adalah jagung, kopi dan tanaman lainnya. Tanaman pangan lainnya seperti padi, mereka tidak menjual namun untuk disimpan sebagai makanan pokok mereka.

Terdapat 2 jenis padi yang mereka tanam, yaitu padi gogo atau yang dipanen selama 6 bulan ataupun padi yang dipanen selama 3 bulan. Terdapat perbedaan jenis padi dikarenakan terdapat beberapa lokasi yang bisa mendapatkan air dari sungai namun

ada juga lahan yang hanya mendapatkan air dari hujan. Warga jorong tidak menjual tanaman padi namun disimpan dan dikonsumsi. Harapan mereka padi dapat disimpan hingga musim tanam lagi.

Mereka menanam beberapa jenis tanaman perkebunan, antara lain; pinang, coklat, jagung, dan kopi. Namun dari beberapa tanaman tersebut daerah Bukik Bulek terkenal dengan jagung dan kopi. Setiap warga mempunyai lahan dengan luas 1 hektar yang ditanami jagung dan 1 hektar lainnya ditanami kopi. Namun tidak semua warga mempunyai lahan banyak, sehingga mereka melakukan cocok tanam dengan tumpang sari. Salah satunya adalah Pak PR yang menanam dengan sistem tumpang sari dengan lahan yang ditanami kopi dengan jarak 2x3 meter kemudian di sela-selanya ditanami padi atau jagung. Ketika musim hujan, beliau menanam padi dan ketika datang musim kemarau beliau menanam jagung.

Dengan luas 1 hektar warga Jorong Tandai Bukik Bulek memperoleh hasil yang beraneka macam. Beberapa warga bisa menghasilkan jagung sebanyak 1 ton ada juga yang bisa panen sampai 3 ton. Perbedaan ini dikarenakan jumlah pupuk yang diberikan berbeda. Dengan jenis pupuk yang sama, namun takaran pemberiannya yang berbeda. Pengetahuan masyarakat Bukik Bulek dengan melihat jenis tanah juga masih kurang. Mereka pada awalnya mencoba coba, agar hasilnya lebih banyak maka mereka akan memberikan dosis yang lebih banyak. Bagi masyarakat yang menanam padi mereka biasanya memberikan pupuk urea dengan takaran 1 hektar padi diberi pupuk urea sebanyak 50 kg. Bagi warga yang menanam jagung memberikan pupuk dengan jenis SP36, ZA, dan posca. Mereka jarang atau

bahkan sama sekali tidak menggunakan pupuk kandang atau organik. Pengetahuan mengenai dampak pupuk kimia belum diketahui sama sekali, karena sampai sekarang efek samping dari pupuk kimia belum terjadi.

Awalnya mereka menanam jagung manis dan padi, namun karena hasil jagung manis tidak menggembirakan kemudian pada tahun 2011 mereka beralih ke tanaman jagung hibrida atau *Pioner*. Awalnya bibit jagung beserta pupuk dan racun diberikan oleh dinas pertanian. Sejak tahun 2016, dinas pertanian hanya memberikan bibit saja tanpa adanya pupuk dan racun. Pemberian ini tidak cuma-cuma, karena mereka juga harus mengeluarkan ongkos untuk mengambil bibit dan segala perlengkapannya. Pengeluaran setiap orang berbeda-beda karena tergantung dari jumlah anggota kelompok. Mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp25.000 hingga Rp35.000 untuk mengambil bibit. Pihak dinas hanya mengantar bibit sampai di jalan depan masuk ke daerah Tandai yang berjarak sekitar 20 km dari Bukik Bulek.



Gambar 9 Ilustrasi Usaha Pemanfaatan Lahan Warga Bukik Bulek

Pendapatan dari tanaman jagung Rp2.700.000 s/d Rp5.400.000 selama empat bulan. Hasil yang diperoleh hasil panen kelihatan besar namun untuk memperoleh hasil tersebut harus menunggu selama 4 bulan. Padahal hasil wawancara dengan beberapa warga menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata setiap bulannya mencapai Rp 2.994.000. Jika hanya mengandalkan hasil pertanian, tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya. Oleh karena itu warga biasanya memiliki pekerjaan sampingan seperti: mencari buah rotan yang ada di hutan, membantu tetangga untuk menebas tanaman di hutan, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah perkiraan jumlah pengeluaran warga setiap bulannya, dirinci sesuai jenis kebutuhannya:

Kebutuhan makanan pokok:	Rp 1.020.000
Kebutuhan minuman:	Rp 234.000
Kebutuhan minyak	Rp 160.000
Non makanan:	Rp 1.580.000

Bagi warga Jorong Tandai Bukik Bulek, tidak ada larangan untuk wanita bekerja. Semakin banyaknya kebutuhan, beberapa warga tidak membedakan tanggung jawab. Beberapa ibu dan perempuan ikut serta menggarap lahan pertanian mereka terutama ketika musim tanam atau panen. Ketika sudah tidak ada pekerjaan lagi, biasanya ibu-ibu yang tidak mempunyai anak kecil membantu merebas hutan atau menebang semak belukar di ladang tetangganya untuk memperoleh tambahan penghasilan. Biasanya mereka memperoleh Rp 50.000 setiap harinya untuk pekerjaan itu. Ibu-ibu yang mempunyai balita biasanya hanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan lain sebagainya. Bila waktu sudah

menunjukkan siang hari biasanya berkumpul dengan tetangga lainnya untuk bersantai ria dan mengobrol.

Tanah atau lahan garapan merupakan aset berharga bagi warga Jorong Tandai Bukik Bulek. Hal ini dikarenakan mayoritas warga Jorong Tandai Bukik Bulek bergantung dengan hasil pertanian baik itu jagung maupun kopi. Meski hasil panen baru bisa diperoleh setelah menunggu selama 4 bulan, namun dari penghasilan hasil tanilah yang menjadi sumber pokok dari warga Jorong Tandai Bukik Bulek. Selain bertani mereka juga membantu tetangganya dengan mendapat upah Rp 50.000/hari. Selama seminggu mereka bekerja selama 4 hari dan biasanya dalam satu bulan 12 hingga 16 hari. Namun ketertarikan warga yang berusia muda atau pemuda kini sudah jarang untuk meneruskan atau mengerjakan lahan pertaniannya. Mereka lebih tertarik pindah atau bekerja di ibu kota kabupaten atau Kota Padang sebagai karyawan toko.

Kelembagaan Ekonomi Pertanian

Terdapat lima kelompok tani di Jorong Bulek di mana masing-masing mempunyai anggota sejumlah 20 hingga 25 orang. Namun dengan anggota sebanyak tersebut masih ada petani yang tidak masuk ke dalam kelompok. Pembentukan kelompok tani, awalnya hanya diikuti keluarga terdekat dulu setelah itu baru menambah anggota. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh kelompok tani adalah sebagai perantara dengan Dinas Pertanian dalam menyalurkan bibit tanaman.

Kelompok tani memberikan kebebasan kepada anggota untuk menjual hasil panennya ke mana saja. Usaha yang dilakukan selama ini, sebagai wadah atau perkumpulan untuk berbagi informasi mengenai permasalahan yang ada terutama usaha

pertanian yang mereka lakukan. Terdapat satu kelompok dari lima kelompok tani di Jorong Tandai Bukik Bulek yang mendapatkan bantuan mesin perontok jagung dari Dinas Pertanian. Selain untuk berbagi informasi, tujuan dari kelompok tani untuk bisa terbebas dari tengkulak. Namun sampai sekarang, mereka belum bisa memecahkan permasalahan tersebut.

Selain kelompok tani yang ada di Jorong Tandai Bukik Bulek, terdapat pula kelompok-kelompok lain yang beranggotakan ibu-ibu. Mereka berinisiatif membentuk suatu kelompok simpan pinjam di setiap korongnya. Terdapat 3 kelompok simpan pinjam perempuan di Jorong Tandai Bukik Bulek. Anggotanya bervariasi dalam kelompok simpan pinjam. Salah satunya kelompok SPP yang ada di Korong Dataran. Pembentukan kelompok dikarenakan ada kegiatan majelis ta' alim. Modal awal kelompok SPP diperoleh dari iuran wajib tiap anggota. Iuran wajib setiap kelompok berbeda-beda kisarnya dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000. Setelah menyerahkan iuran wajib tersebut, anggota mengeluarkan iuran mingguan/tabungan yang besarnya tidak ditentukan. Iuran mingguan tersebut ditarik setiap ada pertemuan rutin antar anggota.

Mereka meminjamkan kepada setiap anggota dari dua iuran ini dengan bunga atau istilahnya sedekah sebanyak 10%. Terdapat dua cara dalam menyerahkan bunga dan sedekah, yang pertama dengan potong diawal ketika pengurus menyerahkan uang pinjaman atau dibelakang ketika pinjaman sudah lunas (10 kali pertemuan). Kelompok SPP bertujuan akan membentuk kelompoknya seperti koperasi namun sampai saat ini belum bisa terwujud, dikarenakan pengurus dan anggota belum memahami

bagaimana cara dan fungsi dari koperasi. Mereka berencana membuat koperasi agar bisa terlepas dari tengkulak.

Pemasaran Hasil Panen

Pasar penjualan hasil panen jagung dan kopi selama ini dijual ke tengkulak. Hal ini dikarenakan untuk mencukupi modal penanaman terutama biaya pupuk biasanya petani pinjam uang dari “toke” (tengkulak). Mereka melunasi utang tersebut melalui hasil panennya. Jadi ketika panen, hasilnya harus diserahkan atau dijual ke tengkulak tersebut dengan perhitungan tertentu.

Sebagai ilustrasi ketika ada petani akan menanam jagung, beliau memperoleh bibitnya dari kelompok dengan membayar Rp 25.000 di kelompok untuk setiap kantong yang beratnya 5 kg. Biasanya memerlukan 2 hingga 3 kantong dalam 1 hektar. Setelah mendapat pasokan bibit, pupuk, dan racun gulma petani dapat memulai kegiatan tanam. Empat bulan setelah tanam, jagung dapat dipanen. Ketika panen secara normal 1 hektar menghasilkan 2 hingga 3 ton. Proses selanjutnya adalah jagung dikupas kulitnya kemudian dijemur bersama tongkolnya. Setelah kering kemudian dirontokkan menggunakan mesin dengan biaya 10% setiap 200 kg-nya. Biji jagung yang sudah kering dijual ke tengkulak yang memberi pinjaman modal pupuk.

Harga normal biji jagung adalah Rp 3.000/kg, namun kepada tengkulak dijual dengan harga Rp 2.700 hingga Rp 2.800 setiap kilogramnya. Setelah dipotong dengan utang biaya pupuk, hasil bersihnya masih dipotong Rp100/kg bila petani mengambil pupuknya saja, tapi jika petani mengambil bibit jagung maka dipotong Rp200/kg. Jadi tengkulak bisa mendapat bagian cukup besar dari hasil panen petani. Lingkaran “setan” inilah yang

sejak dulu dialami oleh petani di Bukik Bulek. ketika petani tidak mempunyai modal mereka pinjam ke tengkulak, kemudian menjual ke tengkulak sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Ketika akan tanam kurang modal dan mengambil utang lagi dari tengkulak.

Selain tengkulak, sebenarnya warga mengetahui pasar jagung di luar seperti di Kota Padang. Terdapat suatu pabrik yang berani membeli jagung sebesar Rp3.600/kg namun dengan catatan harus jagung kering dan dalam waktu 24 jam. Peluang tersebut sebenarnya bisa diambil bila tidak ada kendala dalam pengeringan jagung dan akses transportasi. Selama ini untuk mengeringkan jagung petani hanya memanfaatkan sinar matahari yang membutuhkan waktu beberapa hari. Bila terdapat mesin pengering, usaha untuk mengeringkan jagung dapat dipercepat dan dapat disetor pabrik yang ada di Padang. Jadi jika petani dapat meningkatkan kualitas jagungnya maka mereka akan mendapat nilai tambah dari penjualan hasil panen.

Treatment yang dilakukan untuk tanaman kopi berbeda dengan tanaman jagung. Ketika jagung harus memakai pupuk dan membutuhkan modal yang cukup besar, kopi tidak begitu besar modalnya. Bibitnya dapat dicari di kebun tetangga dan kemudian ditanam di lahan. Setelah tumbuh kemudian ada beberapa warga yang memberi pupuk urea di tanaman kopi. Kopi dapat dipanen setelah umur 2 atau 3 tahun di mana pada usia tersebut dinamakan dengan panen raya. Ketika panen raya dengan luas 1 hektar dapat menghasilkan sebanyak 3 ton sampai 4 ton. Warga dapat menjual secara bebas hasil kopinya ke manapun mereka suka. Hal ini dikarenakan ketika menanam kopi tidak terjerat dengan utang dari tengkulak. Kopi Jorong

Tandai Bukik Bulek satu kilogramnya dihargai Rp 18.000 hingga Rp 21.000 dalam bentuk biji beras (*green bean*) dan bisa langsung dijual ke kota. Beberapa jenis kopi yang ditanam oleh masyarakat Bukik Bulek, antara lain; Kopi Manak, Kopi Capari, dan Kopi Kampung. Perbedaan 3 kopi tersebut dari besar dan beratnya, untuk Kopi Manak berwujud besar-besar, sedangkan Kopi Kampung berwujud halus.

Kemiskinan dan Pengangguran

Berdasarkan Buku Profil Nagari Lubuk Timur, tingkat umur antara 15-56 tahun merupakan penduduk yang produktif untuk bekerja. Terdapat 3.696 penduduk usia kerja di Nagari Lubuk Gadang Timur. Namun dari jumlah tersebut sebanyak, 380 orang belum/tidak bekerja. Menurut warga Jorong Tandai Bukik Bulek sebenarnya tidak ada warga yang menganggur. Karena bila tidak ada pekerjaan, warga bisa menggarap lahan pertanian yang lumayan luas (1 - 2 hektar).

Angka kemiskinan diartikan sebagai suatu perbandingan antara persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu nagari. Menurut sumber dari kantor Wali Nagari Lubuk Gadang Timur, dari 131 KK di Bukik Bulek terdapat 50 KK yang tergolong miskin. Jadi persentase keluarga miskin di Bukik Bulek sebesar 38,16%. Angka kemiskinan ini ditentukan menggunakan suatu kriteria sesuai dengan standar pemerintah.

Berdasarkan hasil diskusi dengan warga, terdapat beberapa persepsi mengenai kemiskinan. Selain persepsi kemiskinan, wargapun dapat menyebut kapan seseorang masuk ke dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Menurut warga Jorong Tandai Bukik Bulek persepsi kemiskinan ketika seseorang tidak

bisa mencukupi kebutuhan primer mereka. Kebutuhan primer di sini tidak hanya makan. Menurut warga jorong, bila untuk makan tentu masih bisa, karena di lingkungan jorong masih banyak yang bisa dimakan. Namun untuk tambahan lain seperti lauk dan sebagainya belum tentu dapat dipenuhi.

Menurut warga indikator kemiskinan bukan dari memiliki apa. Ketika pemerintah melihat dari faktor kepemilikan, warga jorong melihat dari faktor tanggungan. Ketika beberapa warga sama-sama mempunyai sepeda motor, luas lahan yang sama, dan rumah yang sama namun jumlah tanggungan yang berbeda menjadi faktor penentu seseorang tersebut dikatakan miskin.

Menurut warga, faktor penyebab kemiskinan di Jorong Tandai Bukik Bulek, antara lain;

- Rendahnya SDM yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup seperti (pengolahan hasil tani)
- Jumlah tanggungan keluarga seperti jumlah anak dan pembatasan kelahiran anak
- Tidak memiliki akses mendistribusikan hasil panen untuk memperoleh harga yang lebih tinggi
- Ketergantungan dengan tengkulak
- Belum memiliki keberdayaan secara mandiri untuk mengelola sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kesejahteraan
- Rendahnya keinginan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik

Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Akses Jalan

Terdapat satu jalan yang bisa ditempuh untuk menuju Jorong Tandai Bukik Bulek dari ibu kota Kabupaten Solok Selatan. Bila dihitung jarak dari Padang Aro (ibu kota Kabupaten Solok Selatan) menuju ke Jorong Tandai Bukik Bulek \pm 30 km. Waktu tempuh perjalanan sekitar 1,5 jam saat musim kemarau, tapi di musim hujan mencapai 2 hingga 3 jam karena medan jalan yang berlumpur. Saat musim hujan sebaiknya menggunakan mobil bergardan ganda untuk mempersingkat waktu tempuh. Jika menggunakan sepeda motor dan mobil biasa juga bisa namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Kondisi jalan seperti itu menjadi tantangan tersendiri bagi warga sekitar dan pemerintah. Hal ini dikarenakan jalan menuju Jorong Tandai Bukik Bulek merupakan jalur alternatif untuk menuju Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu ketika kita masuk di jalan menuju Bukik Bulek terdapat pengerjaan pengerasan jalan dengan menggunakan batu. Rencana jalur tersebut akan diaspal karena sebagai jalan kabupaten, namun belum ada kejelasan sampai tahun berapa pengerjaan selesai.

Menurut cerita beberapa warga masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek, jalan menuju ke jorong dibuka pada waktu Orde Baru. Hal ini dikarenakan di sebelah daerah Jorong Tandai Bukik Bulek terdapat perkebunan sawit yang dimiliki oleh Keluarga Cendana. Adanya perusahaan tersebut maka pemerintah pusat lewat kabupaten membuka jalan menuju perusahaan sawit. Selain jalan yang menuju ke Tandai Bukik Bulek, terdapat pula beberapa jembatan yang terbuat dari cor beton dan terbuat dari kayu yang keras. Jembatan tersebut dengan lebar 2 hingga 3

meter agar truk atau mobil dapat melewatinya. Pembangunan jembatan tersebut menurut cerita dari warga Bukik Bulek dibangun pada tahun 1990-an dan direnovasi pada tahun 2000-an.

Energi Listrik Terbarukan dan Air Bersih

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) digunakan sebagian warga Jorong Tandai Bukik Bulek sebagai sumber listrik selain PLN. Terdapat 70 rumah warga yang memanfaatkan PLTMH, 3 rumah menggunakan listrik dari PLN dan \pm 70 rumah warga yang tidak menggunakan 2 metode tersebut. Bagi warga yang tidak menggunakan listrik, mereka menggunakan genset (diesel) atau memakai lampu lentera yang berbahan bakar minyak tanah sebagai alat penerangan. Dulu warga Bukik Bulek hanya menggunakan lampu lentera sebagai sumber penerangan. Namun pada tahun 2001 datang beberapa orang yang membantu pembuatan PLTMH atau sering disebut PLTA oleh warga. Mengingat kebutuhan listrik dan melihat potensi banyak air di daerah Jorong Tandai Bukik Bulek maka beberapa tahun kemudian dibuatlah PLTMH.



Gambar 10 Atas, bangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan Bawah, Generator PLTMH

PLTMH dioperasikan sejak tahun 2007 dan sudah pernah berganti generator sebanyak 3 kali, selain itu masih ada beberapa kerusakan yang sering terjadi, misalnya kerusakan pada *belt* dan *coil*. Menurut Kepala Jorong Tandai Bukik Bulek, pernah terjadi kekosongan listrik selama 2 tahunan karena tidak ada dana untuk memperbaikinya. Mereka harus menunggu dana PNPM untuk memperbaiki PLTMH tersebut. Pengelola PLTMH tidak pernah berganti sejak awal pembangunan. Tidak ada pula kenaikan tarif yang dilakukan. Jika terjadi kerusakan, pengelola berusaha untuk memperbaiki, jika pengelola sudah tidak mampu memperbaiki, akan dibawa ke Padang. Keluhan masyarakat terhadap listrik dari PLTMH ini adalah tegangan yang tidak stabil. PLTMH ini beroperasi sesuai dengan debit air yang melewatinya. Bulan Maret-Juli 2015, PLTMH tidak beroperasi karena debit air sangat kecil. Hal ini terjadi saat musim kemarau. Sungai yang melewati Jorong Tandai Bukik Bulek berasal dari jorong lain sehingga perlu penggunaan air sungai dari hulu sebelum tiba di Jorong Tandai Bukik Bulek, agar dapat ditelusuri penyebab keringnya sungai di musim kemarau.

Kondisi listrik masyarakat saat ini masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas 100 kW. PLTMH ini terkoneksi dengan keempat jorong dengan total rumah tangga yang tersalurkan sekitar 500 rumah. PLTMH beroperasi mulai dari jam enam sore sampai dengan jam lima pagi pada hari Senin, Selasa dan Kamis; sementara untuk hari Minggu, Rabu dan Jumat PLTMH beroperasi selama 24 jam. Penentuan hari ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: (1) pada hari Rabu, masyarakat biasa ke pasar Padang Aro yang dapat ditempuh selama 2 jam perjalanan dari Jorong

Tandai Bukik Bulek untuk berbelanja, sehingga masyarakat yang berada di desa tidak banyak, untuk itulah PLTMH dioperasikan selama 24 jam; (2) pada hari Jumat, masyarakat harus menggunakan masjid untuk shalat Jumat, yang juga membutuhkan *sound system*, untuk itulah PLTMH juga dioperasikan 24 jam; (3) Pada hari Minggu, anak-anak libur sekolah, sehingga mereka bisa melihat TV selama liburan. Masyarakat membayar iuran setiap bulan untuk menikmati listrik dari PLTMH yang besarnya tergantung dengan peralatan listrik yang ada di setiap rumah. Masyarakat harus membayar Rp 5.000 untuk satu lampu dan Rp 10.000 untuk 1 TV atau dispenser atau magic com. Rata-rata masyarakat membayar sebanyak Rp 25.000 sampai dengan Rp 40.000.

Selain PLTMH, 3 rumah yang ada di Jorong Tandai Bukik Bulek menggunakan listrik dari PLN. PLN masuk ke Jorong Tandai Bukik Bulek pada tahun 2014 dan mulai operasional pada tahun 2015. Saat ini pemasangan tiang listrik berhenti. Menurut informasi dari PLN kabupaten dalam 5 tahun mendatang belum ada target untuk pemasangan jaringan lagi di Bukik Bulek. Hal ini dikarenakan, masih terisolirnya kawasan Tandai khususnya Bukik Bulek dan jarak rumah dalam satu korong juga berjauhan. Jarak antar rumah 5 hingga 10 meter. Selain itu juga jarak antar korong atau RW juga sangat berjauhan. Jarak satu korong dengan lainnya sekitar 1 km atau lebih.

Permasalahan PLTMH yang ada di Jorong Bulek adalah letak dari PLTMH itu sendiri. PLTMH terletak di paling ujung Jorong Tandai Bukik Bulek dan tidak ada pembagian listrik menggunakan meteran, sehingga tiap rumah secara bebas menggunakan listrik. Bagi korong yang letaknya paling jauh

(Korong Dataran) dari sumber PLTMH hanya mendapatkan sedikit tegangan. Oleh karena itu, bagi rumah yang terletak di Korong Dataran lampu rumah sering seperti lampu “*disco*”. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka masyarakat Korong Dataran meminta agar program PLTS (dari program KEMALA) ditujukan saja ke warga yang berada di Korong Dataran. Hal ini dikarenakan banyak rumah warga di Korong Dataran yang belum mempunyai listrik baik dari PLN ataupun PLTMH. Namun permasalahan tersebut lewat kegiatan *need assessment* dapat terselesaikan dan menekankan ke warga bahwa program PLTS merupakan program satu jorong bukan korong.

Terkait pemenuhan kebutuhan air bersih, warga mengambil dari beberapa sumber mata air yang terletak di beberapa lokasi yang ada di jorong. Selain sumber mata air, warga juga memanfaatkan sungai yang mengalir untuk MCK. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum, mereka tetap mengambil dari sumber mata air yang letaknya tersebar di Jorong Tandai Bukik Bulek. Jarang sekali warga membangun sumur untuk keperluan rumah tangganya. Hal ini dikarenakan untuk mencapai air tanah yang tidak kering harus mencapai kedalam 20 hingga 25 meter dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu setiap pagi dan sore hari, berduyun duyun warga jorong mendatangi sumber mata air tersebut untuk MCK dan mengambil air menggunakan derigen agar dapat membawa pulang.

Namun sejak tahun 2012 dalam program sanitasi dengan menggunakan dana PNPM, masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek sudah bisa menikmati air bersih dalam program Pamsimas. Program air bersih ini mengambil air dari Gunung

Tujuh yang terletak di Tandai Tengah. Air dari sumber tersebut dialirkan menggunakan pipa sebesar 3 dim, kemudian dipecah masuk ke rumah menggunakan pipa ¾". Program Pamsimas tersebut sudah dapat mengalirkan air ke 83 rumah. Tahun 2016 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), program Pamsimas ini akan menambah 32 rumah yang dapat dialiri air bersih. Baru Korong Pasar Lamo dan Sungai Berangin yang sudah dapat memanfaatkan air Pamsimas dari tiga korong yang ada di Bukik Bulek. Sedangkan untuk Korong Dataran sama sekali belum dapat memanfaatkan air Pamsimas. Hal ini dikarenakan jarak yang jauh dan letaknya di perbukitan sehingga menyebabkan kesulitan pengaliran air ke atas.

"..untuk korong yang sudah dapat air dari PAMSIMAS sudah ada dua Bang, untuk pasar lamo sudah 100%, sedangkan untuk sungai berangin 80%, namun untuk dataran belum sama sekali. Soalnya jarak yang jauh dan juga letaknya di atas. Jadi selain faktor dana untuk menambah pipa juga cara menaikkan agar mampu sampai dataran. Namun kami ada rencana untuk mencari dan menambah sumber mata air lagi agar semua warga jorong dapat.." unkap bapak MG, 30 tahun.

Menurut salah seorang warga debit air yang dipakai untuk air bersih sekarang ini mencapai 3 m³ per detik. Banyaknya debit air tersebut, diperkirakan dapat untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Jorong Tandai Bukik Bulek. Kini warga masih tetap mencari sumber mata air lainnya untuk memenuhi kebutuhan air yang dapat digunakan dan dialirkan ke rumah.

Warga yang menggunakan aliran Pamsimas membayar sebesar Rp15.000 setiap rumah untuk sistem pengelolaan. Besarnya biaya ini dipukul rata bagi rumah yang menggunakan air bersih

ini. Tidak ada perhitungan berapa banyak air yang dipakai atau digunakan. Sistem ini akan diubah pada tahun 2016 atau 2017 dengan menggunakan meteran. Sehingga tiap rumah akan berbeda jumlah pembayarannya tergantung pemakaian air. Namun sampai sekarang belum ada ketetapan berapa besar rupiah yang harus dibayar untuk setiap meter kubiknya. Pembayaran Rp 15.000 digunakan untuk beberapa hal, antara sebagai biaya perawatan atau mengganti kerusakan saluran dan membayar pengurus atau pengelola. Pengelola saluran dipilih sendiri oleh masyarakat jorong berdasarkan hasil musyawarah warga.

Sementara itu untuk Korong Dataran pada tahun 2017 awal secara swadaya mereka mencari mata air dan membangun penampungan air seperti kolam. Kelompok swadaya ini mereka menyebutnya dengan Tim Tujuh. Hal ini dilatarbelakangi ada tujuh orang yang awalnya memiliki kesamaan ide untuk bangkit bersama memajukan daerah mereka.



Gambar 11 Penampungan Air Bersih hasil swadaya masyarakat di Korong Dataran, Jorong Tandai Bukik Bulek

Air bersih merupakan kebutuhan primer bagi manusia sehingga perlu didukung dengan infrastruktur air bersih yang baik.

Pengelolaan infrastruktur air bersih diberbagai tempat bermacam-macam jenisnya, ada yang dikelola secara komunal, oleh pemerintah, ataupun secara individu. Adapun tujuannya satu, yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih. Infrastruktur air bersih di Jorong Tandai Bukik Bulek berasal dari Pamsimas meski belum dapat menjangkau semua rumah.

Pemerintahan Nagari

Sistem pemeritahan di Nagari Lubuk Gadang Timur sama dengan daerah lain. Sistem pemerintahan paling bawah adalah RT namun dengan istilah yang berbeda. Istilah yang dipergunakan di Sumatera Barat menggunakan kearifan lokal. Masih terdapat pemerintahan dusun dan RT di bawah desa atau nagari. Daerah Sumatera Barat istilah dusun menggunakan istilah “jorong”, sedangkan RT menggunakan istilah “korong”. Ketika di daerah perkotaan terdapat balai pertemuan RW atau RT, namun hal sebaliknya terjadi di Jorong Tandai Bukik Bulek. Sistem pemerintahan yang difasilitasi dengan adanya kantor adalah nagari, sedangkan untuk Jorong Tandai Bukik Bulek tidak terdapat kantor ataupun balai pertemuan RW. Bila masyarakat atau warga akan mengadakan pertemuan menggunakan fasilitas publik lainnya (masjid, musholla, atau MIS) atau di rumah warga yang luas untuk dapat menampung semua warga.

Perencanaan pembangunan nagari adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/nagari dalam jangka dalam waktu tertentu.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Lubuk Gadang Timur didasarkan pada Penjaringan Penggalan Gagasan Usulan Pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan tingkat jorong, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nagari. RPJM Nagari Lubuk Gadang Timur tahun 2015 sampai tahun 2021 dalam mekanisme perencanaan mengintegrasikan program-program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun program-program hasil penjaringan aspirasi yang akan diformulasikan dalam Musrenbang Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuk Gadang Timur Tahun 2015 sampai 2021 disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh kegiatan bagi Nagari Lubuk Gadang Timur.

Partisipasi warga Bukik Bulek dalam perencanaan RPJM nagari, menurut kepala jorong sangatlah antusias. Sebelum dilakukan musyawarah warga di tingkat nagari pertama kali usulan dilakukan di jorong terlebih dahulu. Kepala jorong meminta semua warga masyarakat untuk datang dalam musyawarah warga di jorong agar dapat menyampaikan semua usulan baik itu laki-laki atau perempuan dan tokoh masyarakat ataupun warga biasa. Kebanyakan warga yang datang adalah laki-laki karena perempuan biasanya sibuk mengurus anak-anak. Namun menurut warga bila dalam satu KK sudah ada yang datang baik itu pihak laki-laki atau perempuan sudah dinyatakan dapat mewakili KK tersebut. Setelah dilakukan musyawarah warga di tingkat jorong, kemudian hasil ini kemudian diserahkan ke nagari untuk dibahas di tingkat atas. Setiap jorong diwakili oleh beberapa anggota masyarakat dalam

Musrenbangdes di nagari yang meliputi berbagai macam kelompok baik itu perempuan, petani, tokoh masyarakat dan pemuda. Skala prioritas program yang akan dilaksanakan dibuat dalam musyawarah di nagari.

Tahun 2016, Nagari Lubuk Gadang Timur mendapatkan dana sebesar Rp 810.442.536. Dana tersebut dibagi untuk 17 jorong yang ada di nagari, setiap jorong mendapatkan dana sekitar Rp 50.000.000. Dana tersebut terlalu kecil bila untuk pembangunan fisik, oleh karena itu dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan di 9 jorong terlebih dahulu. Jorong Tandai Bukik Bulek mendapatkan jatah pembangunan atau dana desa di tahun 2017 dengan adanya keputusan tersebut. Tahun 2017 sudah ada rencana berdasarkan hasil musyawarah warga Jorong Tandai Bukik Bulek akan membangun gedung pertemuan warga. Pembangunan gedung atau ruangan ini dianggap perlu oleh semua warga dikarenakan selama ini, ketika pertemuan jorong dilakukan di masjid. Pemanfaatan masjid untuk pertemuan warga dinilai tidak pas, kemudian diperlukan sebuah tempat untuk musyawarah warga.

Transparansi penggunaan dana desa, menurut sekretaris nagari sudah dilakukan semaksimal mungkin. Ketika mereka akan pelaporan, semua pelaporan penggunaan dana dibagikan secara umum terutama ke semua jorong.

Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Dulu banyak warga Bukik Bulek hanya mampu sekolah sebatas SD saja. Hal ini dikarenakan pada waktu itu masih sedikit sekolah yang ada. Namun kini banyak warga Bukik Bulek yang tamat SMP bahkan ada yang mampu lulus perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya ekonomi dan tuntutan

hidup. Menurut salah seorang warga, ada 10 orang yang kini sedang kuliah ataupun sudah lulus kuliah. Ketika mereka sudah lulus kuliah, memilih untuk bekerja di Bukik Bulek untuk menjadi guru di MIS, PAUD ataupun Sekolah Dasar.

Terdapat satu sekolah swasta di Jorong Tandai Bukik Bulek yaitu Madrasah Ibtidaiyah di bawah naungan Kementerian Agama yang dibangun dengan dana PNPM. Awalnya bangunan tersebut digunakan sebagai TPA (Taman pendidikan Al Quran), namun kemudian dialihfungsikan menjadi Sekolah Dasar karena saat itu belum ada sekolah di daerah ini.



Gambar 12 Gedung MIS Darul Ulya

Bangunan MIS tergolong cukup besar, namun sampai saat ini baru sampai kelas 3 dikarenakan keberadaan MIS baru tahun 2013. Sarana dan prasarana gedung MIS baru dilengkapi dengan buku yang alakadarnya, sedangkan untuk listrik saat ada sambungan kabel PLTMH. Tidak semua warga Bukik Bulek menyekolahkan anaknya ke MIS, namun menyekolahkan ke SD negeri yang ada di Tandai Tengah. Tidak ada alasan khusus mengapa menyekolahkan anaknya ke SD negeri atau MIS, ini lebih ketertarikan orang tua saja dalam menyekolahkan. Setelah lulus dari MIS, mereka baru menyekolahkan anaknya di SMP

yang berada di Tandai Tengah. Ketika ada keinginan untuk menyekolahkan ke yang lebih tinggi lagi dan kuat dalam perekonomian, mereka akan menyekolahkan anaknya ke SMA atau SMK yang ada di Padang Aro. Bagi mereka yang menyekolahkan ke Padang Aro akan mengekoskan anaknya di asrama. Selain SMA atau SMK, terdapat pula pondok pesantren di Padang Aro. Fasilitas kesehatan di Jorong Tandai Bukik Bulek berupa Poskesdes yang dilengkapi dengan prasarana minimalis dengan tujuan sebagai pertolongan pertama sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut.



Gambar 13 Poskesdes di Jorong Tandai Bukik Bulek

Bidan Desa menjadi tenaga kesehatan paling depan dalam melayani kesehatan warga Jorong Tandai Bukik Bulek. Bidan tersebut bertempat tinggal di Poskesdes namun setiap seminggu atau dua minggu sekali pulang ke rumahnya di Padang Aro. Dikarenakan hanya satu satunya fasilitas terdekat, maka warga Jorong Tandai Bukik Bulek ketika berobat memilih ke Poskesdes tersebut. Mereka berobat setelah mengkonsumsi obat-obat yang dijual di warung. Bila tidak sembuh, kemudian mereka baru berpindah ke Poskesdes. Bila bidan tersebut tidak berada di

tempat, warga masyarakat dapat mengakses ke Poskesdes yang ada di Tandai Simpang Tigo atau Tandai Tengah.

Selain itu juga terdapat dukun penyembuh yang dipercaya oleh warga sekitar dapat menyembuhkan penyakit. Cara menyembuhkannya dengan membaca doa dan memindahkan penyakit orang ke hewan salah satunya adalah ayam. Bila dirasa tidak sembuh-sembuh maka mereka akan dirujuk ke puskesmas yang berada di Kecamatan Sangir atau ke rumah sakit.

BAB VIII

PROFIL DESA SUNGAI RAMBUT

Rajib Khafif Arruzzi



Gambar 14 Pulau Sako: Sejarah Desa Sungai Rambut

Desa Sungai Rambut merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran program “Sekolah Hijau” yang menjadi kasus dalam buku ini. Desa yang berada di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan desa yang tergolong miskin dan terisolir. Jumlah penduduknya masih tergolong jarang, hanya sebanyak 276 keluarga atau 584 jiwa. Dibutuhkan waktu kira-kira empat hingga lima jam perjalanan darat dengan medan yang cukup sulit ditempuh dari Kota Jambi ke Desa Sungai Rambut dengan jarak sekitar 98 km. Jika menyusuri Sungai Batang Hari dengan pompong butuh waktu enam jam.

Sebelum menempati wilayahnya yang sekarang, dulu para leluhur masyarakat Sungai Rambut pernah bertempat tinggal di Pulau Sako, sebuah “pulau” kecil yang terletak di tengah Sungai Batang Hari. Nama daerahnya waktu itu dikenal dengan sebutan “Tanjung Putus”. Baru pada tahun 1970 masyarakat mulai berpindah dari Pulau Sako ke area baru saat ini. Ketua lembaga adat saat itu menamainya “Teluk Harimau” mungkin karena ada yang pernah bertemu harimau di wilayah itu.

Nama Desa Sungai Rambut baru resmi digunakan pada tahun 1980an setelah Kepala Adatnya Datuk Abu Bakar diangkat menjadi kepala desa. Sebutan Sungai Rambut diambil dari nama anak Sungai Batang Hari yang namanya Sungai Rambut, lokasinya tidak terlalu jauh Pulau Sako. Menelusuri sejarah desa, cikal bakal pemukiman desa (mungkin istilah tepatnya adalah kampung atau dusun) pertama kali diperkirakan adalah para pendatang dari Suku Melayu yang merantau ke wilayah itu sekitar tahun 1930-an. Karena penghidupan masyarakat di perairan sungai (berburu dan mencari ikan), maka mereka mendirikan pemukiman di daerah itu. Setelah masyarakat desa mulai berkembang berangsur-angsur mulai bercocok-tanam atau mengelola lahan pertanian sembari tetap berburu binatang atau ikan di sekitar perairan. Sejak 1981 desa yang secara resmi dinamai Sungai Rambut hingga sekarang telah mencatat pernah dipimpin oleh 6 orang kepala desa, termasuk yang saat ini sedang menjabat.

Berikut akan diuraikan tentang gambaran umum desa dan masyarakat Sungai Rambut, mulai dari kondisi fisik dan lingkungan mencakup kondisi tempat tinggal, sumber-sumber

pendapatan dan permasalahannya, serta berbagai layanan dasar berikut permasalahannya.

Kondisi Fisik Desa

Posisi Desa Sungai Rambut terletak di Pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi. Wilayah desa yang berada di pinggir Sungai Batang Hari masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa ini terdiri dari 8 RT dan 2 dusun. Dusun I bernama Teluk Bahagia, terdiri dari 3 RT. Sedangkan dusun II bernama Selat Jaya, terdiri dari 5 RT. Dengan luas wilayah 2.500 ha atau 5 Km², Sungai Rambut berbatasan dengan: sebelah Utara : Desa Rantau Rasa; sebelah Selatan: Desa Telago Limo; sebelah Barat: Desa Pematang Mayan, Kec. Rantau Rasau; sebelah Timur: batas Taman Nasional Berbak (TNB). Jarak antara desa dengan kantor pemerintahan: Kecamatan Berbak 17 km, dengan ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur 75 km, dan ibu kota Provinsi Jambi 98 km.

Daratan Desa Sungai Rambut secara umum berada di dataran rendah, yang terdiri dari rawa/gambut dengan ketinggian 0-2 m di atas permukaan laut. Ini ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air Sungai Batang Hari. Desa Sungai Rambut beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 500-1000 mililiter, suhu udara rata-rata 22-27⁰C. Berdasarkan catatan di arsip Desa Sungai Rambut, rincian tata guna lahan di desa yang penduduknya mayoritas dari Etnis Melayu ini adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Penggunaan Lahan di Desa Sungai Rambut

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	300	12
2	Perkebunan dan Sawah	1.300	52
3	Tanah Gembala	30	1,2
4	Tanah Bengkok	30	1,2
5	Badan Air/Sungai dan Jalan	837	33,48
6	Lainnya	3	0,12
Jumlah		2.500	100

Penduduk dan Sumber Pendapatan

Penduduk Desa Sungai Rambut berjumlah 584 jiwa atau 276 KK (Kepala Keluarga), penduduk laki-laki sebanyak 308 jiwa, dan penduduk perempuan sejumlah 276 jiwa. Penduduk Desa Sungai Rambut terbagi di dua dusun, Dusun Teluk Bahagia berjumlah 257 jiwa, sedangkan Dusun Selat Jaya 327 jiwa. Berdasarkan usia, penduduk Sungai Rambut didominasi oleh warga pada kisaran usia 13 sampai 50 tahun, yaitu sebanyak 64%. Selebihnya terdiri dari anak-anak 16%, balita 6%, dan orang tua 14%.

Bonus demografi juga terjadi di desa ini dilihat dari komposisi usia. Bonus demografi adalah saat di mana jumlah tenaga kerja produktif jauh lebih banyak daripada tenaga non produktif. Puncak bonus demografi dapat dilihat dari jumlah penduduk produktif (usia 15-55 tahun) akan jauh lebih besar dari pada usia non produktif (di bawah 15, dan di atas 55 tahun). Ini artinya peranan generasi muda di Desa Sungai Rambut saat ini sangatlah strategis. Maju mundurnya Desa Sungai Rambut berada di tangan generasi mudanya. Karena itu, jika ingin mendorong Desa Sungai Rambut ke arah yang lebih sejahtera,

mandiri, dan maju, maka generasi mudanya perlu dipersiapkan dan dididik dengan baik.

Pekerjaan utama penduduk Desa Sungai Rambut adalah petani (40%), pekebun (26%), dan nelayan (15%). Meski begitu, penduduk desa ini tidak bekerja pada satu bidang. Rata-rata mereka bekerja lintas sektoral, misalnya petani dan nelayan, petani dan pekebun, bahkan ada pula yang petani, pekebun, dan nelayan. Hal ini dikarenakan kegiatan bertani dan berkebun di desa sini tidaklah menyita waktu yang banyak. Warga tidak perlu datang ke lahan setiap hari. Karena itu, mereka punya banyak waktu melakukan pekerjaan yang lain, seperti menjadi buruh upah, atau nelayan.

Data kependudukan menunjukkan bahwa warga Sungai Rambut tidak ada yang menganggur, semuanya punya kesibukan, baik di ladang, sekolah, warung, atau mencari ikan di sungai. Jika pengangguran didefinisikan sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali, maka yang masuk kategori ini adalah anak usia sekolah dan orang lanjut usia.

Orang di desa ini, meski sudah usia lanjut, tapi fisik yang masih kuat, maka ia akan tetap beraktivitas di sawah atau ladang. Bagi anak-anak yang putus sekolah atau remaja, mereka kebanyakan bekerja membantu orang tuanya untuk bertani, berkebun, atau mencari ikan di sungai. Selebihnya mereka juga ada yang menjadi buruh upah: bangunan, gali parit, jasa ketek atau pompong.

Kebanyakan perempuan di desa ini tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga. Jamaknya, mereka juga bekerja di luar rumah. Misalnya bertani atau berkebun. Banyak juga yang bekerja sebagai guru, pedagang, dan buruh tani. Mereka

mengatakan, mengandalkan penghasilan suami saja tidak cukup, karena itu perempuan juga harus bekerja mencari nafkah.



Gambar 15 Ibu Nur Asiah, Pedagang Krupuk Ikan Desa Sungai Rambut

Dapat digambarkan bahwa warga Desa Sungai Rambut hidup dalam kondisi pas-pasan dari pendapatan rumah tangga secara umum. Pendapatan yang mereka peroleh cukup dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari makan, jajan anak, biaya transportasi, dan bayar penerangan. Selebihnya, mereka tidak punya uang simpanan untuk keperluan di luar itu. Karena itu, gaya hidup mereka sangat sederhana: rumah dari kayu, tidak makan daging dan minum susu, dan membeli pakaian setahun sekali.

Pendapatan yang mereka peroleh setiap bulan juga tidak banyak memenuhi kebutuhan sandangnya. Kemampuan mereka rata-rata hanya membeli baju sekali dalam setahun (77%). Namun masih ada warga Desa Sungai Rambut yang tidak mampu membeli pakaian meski setahun sekali (17%). Kondisi tersebut menunjukkan daya beli warga Sungai Rambut yang cukup

rendah. Berikut ini adalah jumlah pendapatan warga secara umum beserta sumbernya:

Tabel 10 Pendapatan Warga Desa Sungai Rambut dari Bidang Pertanian

USAHA PERTANIAN				
Jenis Usaha	Lahan	Produksi	Pendapatan/ Tahun	Pendapatan/ Bulanan
Padi	1 Ha	250 Kg beras/th	Rp. 2.500.000	Rp 208.333
Pinang	50 Pohon	15 Kg/bln	Rp. 1.440.000	Rp 120.000
Karet	½ Ha	100 Kg/bln	Rp. 6.000.000	Rp 500.000
Pisang	10 Pohon	5 Tandun/3 bln	Rp. 800.000	Rp 66.667
Sawit	¼ Ha	200 Kg/bln	Rp. 2.400.000	Rp 200.000

Sumber: Dokumen KSED Desa Sungai Rambut 2016

Tabel 11 Pendapatan Warga Desa Sungai Rambut dari Bidang Perikanan

USAHA PERIKANAN				
Jenis Ikan	Produksi		Pendapatan/ Tahun (Rp)	Pendapatan/ Bulanan
	Kering (Mei-Okt)	Banjir (Nov-Aprl)		
Baung	5 kg/hr/orang	1 kg/hr/orang	14.000.000	1.200.000
Patin	5 kg/hr/orang	1 kg/hr/orang	14.000.000	1.200.000
Culi	5 kg/hr/orang	1 kg/hr/orang	10.800.000	900.000
Betutu	2 kg/hr/org	-	12.000.000	1.000.000
Gabus	5 kg/hr/orang	1 kg/hr/orang	18.000.000	1.500.000
Udang	3 kg/hr/org	-	10.000.000	900.000
Aro Mata Merah	10-20 kg/hr/org	1-5 kg/hr/org	2.160.000	180.000

Sumber: Dokumen KSED Desa Sungai Rambut 2016

Tabel 12 Pendapatan Warga Desa Sungai Rambut dari Bidang Non Pertanian dan Perikanan

USAHA NON-PERTANIAN			
Jenis Usaha	Komoditi	Pendapatan Bulanan (Rp)	Pendapatan Tahunan (Rp)
Barang	Sembako, jajanan, dan BBM	400.000	4.800.000
Jasa	Angkutan Pompong	3.000.000	36.000.000
	Penggilingan padi	2.000.000	24.000.000
Krupuk Ikan	Krupuk Ikan Mentah	500.000	6.000.000

Sumber: Dokumen KSED Desa Sungai Rambut 2016

Usaha yang cukup banyak membantu perekonomian warga secara umum adalah penghasilan dari penangkapan ikan. Mereka bisa mengantongi uang sekitar Rp1.000.000/bulan dari hasil menangkap ikan. Ini cukup membantu kebutuhan warga dalam memenuhi kebutuhan. Sementara di sektor pertanian, ada karet dan sawit yang dapat dijadikan andalan warga. Tapi sayangnya, belakangan ini, harga karet terjun bebas di pasar

Bila dijumlahkan antara pengeluaran makanan dan non makanan, total rata-rata pengeluaran warga setiap bulan adalah sekitar Rp 1.718.000. Pengeluaran yang paling banyak dari kategori makanan adalah beras (Rp 270.000/bulan) dan rokok (Rp 240.000/bulan). Data ini menunjukkan, bagi warga Sungai Rambut, selain beras ada kebutuhan yang juga tidak kalah pentingnya yaitu rokok. Berarti, kebiasaan merokok turut serta menyumbang beban ekonomi yang menyebabkan kemiskinan di desa.

Warga Sungai Rambut rata-rata memiliki aset sendiri, baik kepemilikan lahan maupun rumah hanya sebagian kecil yang tidak memiliki lahan. Hanya ada 7% dari responden yang mengaku menggarap lahan orang dan bukan milik sendiri. Untuk rumah, semuanya merupakan milik sendiri.

Pertanian, Peternakan, Perikanan

Tanaman pangan di Desa Sungai Rambut adalah padi. Warga rata-rata mengelola lahan sawah untuk bercocok padi adalah 1 ha per orang. Biasanya warga desa menggunakannya hanya separuh bagian dari lahannya untuk menanam padi. Motivasi mereka menanam padi adalah untuk makan, bukan untuk dijual. Bahkan, kebanyakan dari mereka, dalam kurun waktu sekali panen (setahun), tidak mampu mencukupi seluruh

kebutuhan beras selama setahun. Akhirnya, mereka harus membeli beras.



Gambar 16 Sawah di Desa Sungai Rambut

Tanah di Sungai Rambut tergolong subur. Petani tidak perlu membajak sawah dan menggunakan pupuk. Selama pemeliharaan tanaman, petani hanya menggunakan pestisida untuk mengusir hama. Selain itu, petani tidak perlu merogoh kocek untuk pengairan, membeli bibit, pupuk, dan juga membajak sawah. Karena itu, tanah di daerah ini sangat cocok untuk digunakan model pertanian organik.

Ada empat jenis tanaman yang banyak ditanam di perkebunan Desa Sungai Rambut: pinang, sawit, pisang, dan karet. Selain bertani padi, warga juga mempunyai kebun. Ini bagian dari penopang ekonomi warga.

Menurut warga, dari beberapa jenis tanaman perkebunan tersebut, mereka merekomendasikan untuk pengembangan tanaman pisang. Terutama dari buahnya dapat dimanfaatkan sebagai komoditi yang dapat dijual di pasar sebagai bahan jajanan, seperti keripik pisang, sale pisang, pisang pasir, brownis kulit pisang, dan lain sebagainya.



Gambar 17 Perkebunan Pisang di Sungai Rambut

Desa Sungai Rambut memang berdekatan dengan hutan lindung Taman Nasional Berbak (TNB). Tapi kondisinya hubungan desa ini dengan TNB tidak harmonis karena sedang bersengketa soal batas wilayah. Hutan rakyat yang dipakai oleh warga ini bersinggungan langsung dengan TNB. Hutan rakyat yang kini disengketakan oleh warga Sungai Rambut dengan TNB sekitar 1.500 ha. Lahan warga yang masuk area konflik hingga kini tidak bisa digarap oleh warga. Sebenarnya, konflik hutan rakyat dengan TNB ini tidak hanya di Sungai Rambut, tapi melibatkan 4 desa yang lain di sekitar hutan yakni: Desa Sungai Cemara, Air Hitam, Rantau Bako Tua, dan Rantau Rasau.



Gambar 18 Lahan warga yang tidak bisa digarap karena diklaim TNB, masuk batas 80m dari Sungai Batang Hari

Peternakan di Sungai Rambut jumlahnya cukup terbatas. Berbagai jenis peternakan tersebut yang paling potensial secara ekonomi adalah peternakan burung walet. Ada 5 orang yang mempunyai sarang burung walet di desa ini. Rata-rata terdapat sekitar 500 burung/sarang. Desa ini cukup cocok dijadikan sebagai usaha ternak walet, karena lokasinya yang cukup mendukung: berdekatan dengan hutan, tidak ada bangunan tinggi, tempat perlintasan terbang burung walet setiap hari. Warga yang beternak walet di sini mempunyai kemampuan ekonomi di atas rata-rata warga desa. Sebab, butuh dana yang tidak sedikit untuk dapat mendirikan gedung yang dijadikan sebagai sarang walet. Hanya orang yang berkemampuan ekonomi lebih saja yang melakukannya.

Selain bertani dan berternak, mayoritas warga Sungai Rambut mencari ikan di Sungai Batang Hari. Warga yang bekerja sebagai nelayan, dia setiap hari pergi mencari ikan di sungai. Namun, bagi warga yang bertani dan juga nelayan, mereka biasanya mencari ikan tidak lebih dari 20 hari/bulan. Berikut ini adalah harga dan potensi ikan pada sepanjang Sungai Batang Hari di pinggiran Desa Sungai Rambut. Jenis ikan dari beberapa jenis yang dijadikan sebagai kerupuk ikan oleh warga Sungai Rambut adalah Ikan Aro Mata Merah. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai bakso ikan.



Gambar 19 Belat: Jaring Nelayan di Sungai Batang Hari

Pernah ada kelompok budi daya Ikan Keramba Apung di Desa Sungai Rambut. Program ini didanai oleh Pemprov Jambi dan Pemda Tanjung Jabung Timur. Jumlahnya hingga ratusan keramba. Tapi sayang, program ini tidak berlanjut karena beberapa alasan.

Pertama, pencemaran air sungai. Banyak yang mengeluhkan pencemaran air sungai akibat dari keramba-keramba ikan tersebut. Air Sungai Batang Hari tambah keruh dan agak bau ikan. Kedua, pakan ikan masih mengandalkan pelet. Sementara harga pelet mahal dan tidak terjangkau oleh warga. Akhirnya, warga hanya mengandalkan bantuan pelet dari pemerintah. Ketiga, tidak seimbang biaya pemeliharaan dengan harga jual. Ketika musim panen, ikan melimpah dan harganya murah. Keempat, warga hanya fokus pada pemeliharaan, sementara jaringan pemasaran ikan pasca panen, mereka tidak punya.

Adanya beberapa kendala tersebut, akhirnya warga tidak meneruskan budidaya ikan dengan keramba apung. Bukannya untung, masyarakat merasa rugi. Akhirnya, keramba apung dibiarkan merana di sungai. Akhirnya, satu per satu keramba

tenggelam dengan sendirinya. Kini yang tersisa hanya tiang-tiang keramba di tengah Sungai Batang Hari sebagai saksi bisu.

Industri skala rumah tangga secara khusus di desa ini tidak banyak. Hanya ada sebagian warga yang jualan kerupuk ikan. Jumlahnya hanya ada 2 orang perempuan. Mereka membuat kerupuk ikan dari Ikan Aro Mata Merah. Penghasilan dari penjualan kerupuk ikan cukup lumayan.

Skala industri ini masih kecil dan berjalan apa adanya. Penjualannya pun hanya di dalam desa, dari rumah ke rumah warga. Ini termasuk jenis usaha yang cukup menjanjikan. Terutama dari segi sumber daya ikan yang banyak dan keuntungan penjualan yang berlipat. Bila para pekerja dilatih secara profesional, industri ini berpotensi dapat berkembang dengan baik.



Gambar 20 Ikan Aro Mata Merah, Bahan untuk Kerupuk dan Bakso Ikan (kiri) dan Tiang Keramba Apung di Sungai Rambut (kanan)

Oleh karena itu, perlu ada pendampingan secara khusus, terutama kepada kelompok perempuan, agar dapat memanfaatkan potensi ikan sebagai bagian dari industri rumah tangga yang dapat menambah pundi-pundi ekonomi warga.

Kelembagaan Ekonomi

Kewirausahaan di desa ini cenderung bersifat individual. Karena itu, tidak punya efek sosial apapun di desa ini. Begitu pula dengan lembaga ekonomi juga belum begitu tampak. Kelompok-kelompok usaha yang ada di sini, seperti kelompok tani dan kelompok perikanan keramba, belum menampakkan hasil. Bahkan cenderung sebatas formalitas untuk kepentingan penerimaan bantuan dari pemerintah. Mereka tidak punya agenda strategis untuk belajar bersama dan mengembangkan diri untuk menggapai cita-cita yang diimpikan bersama, Desa Sungai Rambut yang makmur dan sejahtera.

Saat ini usaha kelompok di Sungai Rambut cukup banyak. Jumlah yang masih eksis hingga hari ini berjumlah 10 kelompok tani. Sekian banyak jumlah kelompok tersebut, mereka tidak lebih dari sekedar perkumpulan formalitas belaka. Nama dan datanya masuk dalam rekap pemerintah. Tetapi, aktivitas dalam kelompok tersebut belum berjalan secara optimal. Bahkan, tidak ada satu kelompok pun yang berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompoknya.

Supaya mereka dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan perekonomian warga dan keberhasilan dalam bercocok tanam, kelompok tani harus mampu menjalankan peran dan fungsi dalam beberapa hal. Pertama, sebagai komunitas belajar. Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.

Kedua, sebagai wahana kerjasama. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha lainnya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Ketiga, kesatuan unit produksi. Usaha tani yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Selain mengaktifkan kembali dan pendampingan terhadap kelompok tani, penting juga melirik potensi lain di luar sektor pertanian konvensional yang ada. Berdasarkan masukan dari masyarakat Sungai Rambut, ada beberapa alternatif potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya di desa.

Pemasaran

Ada dua usaha perdagangan (non pertanian) yang dilakukan warga Sungai Rambut yaitu perdagangan barang dan jasa. Perdagangan barang sembako dalam bentuk warung kelontong. Sedangkan di sektor jasa ada perdagangan jasa angkutan pompong dan jasa penggilingan padi.

Akses pemasaran produk-produk lokal masih menjadi problem di desa ini. Dibutuhkan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit untuk bisa sampai ke pasar terdekat, yaitu Pasar Pelita di Kecamatan Rantau Rasau. Itu kalau ditempuh pakai jalur air. Jika pakai jalur darat bisa membutuhkan waktu sekitar 60-90

menit. Karena jarak yang jauh, tidak ada hasil pertanian atau tangkapan ikan yang dijual langsung oleh warga di pasar. Semua dijual langsung ke warga di desa, atau dijual ke tengkulak.

Selain pasar yang jauh, warga juga tidak punya jaringan pemasaran. Mereka hanya bertani, beternak, dan mencari ikan, hasilnya bisa dijual dengan dua cara. Langsung dijual ke warga, atau dijual ke tengkulak. Biasanya, selisih harga jual ke warga lebih mahal daripada dibeli oleh tengkulak.



Gambar 21 Pompong Tengkulak Pengangkut Sawit

Kemiskinan

Menurut warga Sungai Rambut, mereka tidak merasa kesusahan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Nasi dari padi yang ditanam dan lauk dapat diambil dengan menjaring di sungai. Tapi, sebagai manusia mereka tidak cukup hanya mengukur hidup dari sisi pangan saja. Mereka merasa kurang atau tidak berdaya ketika dihadapkan pada realitas yang harus berbayar dengan uang, antara lain: menyekolahkan anak,

perbaikan rumah yang sudah rusak, tidak mempunyai cadangan uang, dan susah nya mencari biaya untuk berobat.

Berdasarkan perbincangan dengan masyarakat, baik melalui diskusi ataupun wawancara tidak terstruktur, maka terumuskan indikator kemiskinan menurut warga Sungai Rambut:

1. Tempat tinggal tidak layak (lantai dan dinding dari bahan kayu biasa/tanah)
2. Penghasilan yang pas-pasan
3. Berpendidikan rendah
4. Kemampuan berobat bayar
5. Ketersediaan air bersih
6. Sanitasi yang tidak layak
7. Ketersediaan penerangan
8. Penggunaan kayu untuk memasak



Gambar 22 Kondisi Rumah Salah Seorang Petani

Warga Desa Sungai Rambut banyak yang tinggal di rumah yang kurang layak. Mereka rata-rata menggunakan bahan kayu

sebagai rumah. Hanya sebagian kecil yang lantai tanah keramik/semen. Jadi, ada tiga model rumah warga Sungai Rambut. Pertama, lantai dan dindingnya terbuat dari kayu (77%). Kedua, lantainya dari tanah dan dindingnya terbuat dari kayu (17%). Ketiga, dinding dan lantainya sudah disemen (6%).

Sebanyak 48% warga Sungai Rambut pendidikan terakhirnya hanya sampai Sekolah Dasar. Ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Sungai Rambut relatif rendah jika dilihat dari tingkat pendidikan. Salah satu faktor penghambatnya adalah kemampuan untuk membayar iuran sekolah, terutama pada jenjang SMA yang harus berbayar. Karena itu, hanya ada 11% warga desa ini yang tamatan SMA.

Berobat juga bagian dari barang mewah bagi masyarakat Sungai Rambut. Tidak semua orang mampu membayar biaya pengobatan, terutama pengobatan yang butuh rawat inap. Hanya ada 6% warga yang menyatakan dirinya mampu menanggung biaya rawat inap pasien. Biasanya, mereka tidak akan pergi berobat jika tidak benar-benar sakit. Begitu sudah agak parah, mereka baru berobat. Untung saja, di desa ini sudah ada Puskesmas Pembantu (Pustu). Warga cukup tertolong dengan pelayanan Pustu yang gratis ini. Gratis jika pengobatan pada jam kerja namun menjadi bertarif jika pengobatan dilakukan setelah jam kerja.

Terkait sanitasi, hanya 17% warga di desa ini yang mempunyai fasilitas buang air besar (BAB) di rumah. Selebihnya, 50% mereka melakukannya di sungai, dan 33% di kebun. Ini juga menjadi perhatian bersama, bahwa persoalan sanitasi ini erat kaitannya dengan kemiskinan. Akibat langsung dari ketidakterediaan dan ketidakteraturan sanitasi adalah

munculnya berbagai wabah penyakit yang kapanpun dapat menjangkiti warga desa. Kegiatan BAB di sungai dan kebun di desa ini bukan perkara tabu. Bahkan mereka ber-BAB sambil bermain dan ngobrol. Kenyataan ini menjadi perhatian semua kalangan. Sebab, kelangkaan fasilitas sanitasi yang layak merupakan cerminan dari kemiskinan di desa-desa.

Selain masalah sanitasi, indikator kemiskinan desa juga tercermin dari kelangkaan air bersih. Rata-rata warga desa menggunakan air Sungai Batang Hari sebagai sumber air minum. Air sungai berwarna coklat dan keruh. Biasanya, air tersebut tidak langsung diminum atau dimasak. Sebab, kondisi air masih keruh. Caranya, warga mengambil air dari sungai, lalu mendiamkannya selama minimal 3 hari di rumah, supaya kotorannya turun dan menjadi jernih. Namun, sejak adanya air mineral kemasan isi ulang, banyak juga warga desa yang membelinya, meski tidak untuk memenuhi seluruh kebutuhan air bersih.

Kebutuhan air bersih warga desa dipenuhi dengan cara mengambil air dari sungai (43%). Sementara itu, sudah mulai banyak warga yang juga mengonsumsi air mineral kemasan (33%). Keduanya dikonsumsi, baik air sungai maupun kemasan isi ulang. Biasanya, air sungai untuk masak dan air galon untuk minum. Ada juga yang sudah membuat sumur untuk keperluan air bersih, sebanyak 17%. Warga lebih banyak mengambil air dari sungai, sebab jarak antara rumah warga dengan sungai sangat dekat antara 1 meter sampai 20 meter.

Warga menggunakan gas dan kayu untuk memasak. Kebutuhan gas setiap rumah tangga berkisar antara 1-2 tabung (5 Kg). Kebutuhannya tidak banyak, karena warga juga masih

menggunakan kayu sebagai bahan bakar memasak. Terdapat 67% warga Sungai Rambut yang menggunakan kayu bakar dan gas dalam memasak. Selebihnya, mereka menggunakan kayu (17%) dan sisanya (16%) mereka menggunakan gas. Ini juga bagian dari indikator cermin kemiskinan warga desa. Penggunaan kayu bakar didasari karena ketidakmampuan warga dalam membeli gas. Jika mereka punya uang, tentu mereka tidak perlu susah payah cari kayu sebagai bahan bakar memasak.

Kebutuhan listrik warga sudah terpenuhi dengan adanya PLTD. Sebelum ada PLTD, warga Sungai Rambut menggunakan lampu dari minyak tanah. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, warga sudah mengandalkan diesel sebagai pembangkit listrik rumah warga dikala matahari terbenam (93%). Meski begitu masih ada sebagian kecil warga yang masih setia dengan penerangan berbahan bakar minyak tanah (7%). Mereka melakukan ini karena faktor ekonomi (tidak mampu membayar iuran, juga karena jarak tiang kabel PLTD yang terlalu jauh dari rumahnya).



Gambar 23 Rumah Warga Tanpa Listrik

Hasil diskusi dengan warga dan juga pengamatan di lapangan menemukan beberapa penyebab utama kemiskinan masih menghinggapi desa yang potensi sumber daya alamnya besar ini diantara adalah:

1. Akses pendidikan yang bermasalah.

Ini adalah perkara penting yang harus diperhatikan. Peran pemerintah penting di sini. Pemerintah harusnya mempermudah akses, baik dari sisi keterjangkauan jarak maupun biaya. Pendidikan adalah jendela untuk menjelajah luasnya ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Tanpa pendidikan yang memadai, pola pikir warga tidak akan berkembang dan terbuka lebar. Misalnya, pertanian di desa masih dikelola secara tradisional. Padahal, pertanian di daerah lain sudah menggunakan berbagai jurus dan cara yang beraneka ragam dengan disertai banyak inovasi. Tapi apa yang terjadi di sini? Pertaniannya masih begitu-begitu saja. Jalan di tempat.

2. Lokasi desa yang susah diakses.

Kondisi jalan yang rusak dan masih tanah mempunyai andil besar atas keterisoliran desa ini dengan peradaban luar. Ini mengakibatkan hasil usaha mengalami kesulitan untuk dapat dijual di pasar. Akhirnya, perputaran komoditi hanya di dalam desa. Kalau pun bisa keluar, tapi harus melalui perantara tengkulak.

3. Keterampilan yang terbatas.

Karena tidak banyak bergaul dengan “dunia luar”, warga di desa ini tidak punya keterampilan lain selain

yang dilihat didesanya. Tidak ada inovasi yang dapat menginspirasi warga untuk melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan desa. Begitupula dengan pola-pola pengembangan ekonomi, mereka tidak punya bayangan sama sekali. Harus bagaimana dan mengapa harus melakukan terobosan-terobosan.

4. Tidak adanya akses ke permodalan.

Karena kemiskinan yang melilitnya, mereka termasuk kelompok yang tidak bankable di mata lembaga keuangan. Mereka selalu terkendala dengan terbatasnya modal yang digunakan untuk memajukan usahanya. Untuk itu, perlu adanya program inklusi keuangan yang menyasar kelompok-kelompok warga perdesaan seperti di Sungai Rambut ini.

5. Kurangnya pendampingan dan pemberdayaan.

Warga merasa bahwa selama ini mereka tidak pernah mendapatkan pendampingan dan penyuluhan usaha secara serius, baik dari pemerintah maupun NGO. Beberapa bantuan telah dikucurkan ke desa ini, tapi tidak dibarengi dengan upaya pendampingan teknis usaha dan pemberdayaan warga dalam pengorganisasian dan advokasi terhadap kepentingan yang menjadi hak-haknya.

Karena beberapa faktor itulah, kemiskinan masih saja tidak mau hengkang dari tanah urang Melayu di Sungai Rambut ini. Warga berharap ada angin perubahan dan kesejahteraan datang, tapi entah kapan berhembus ke desa ini.

Aspek Sosial Budaya

Desa ini dihuni oleh warga Suku Melayu (97%). Hanya sebagian kecil yang berasal dari non Melayu, antara lain: Bugis, Sunda, Batak, dan Jawa. Relasi antar suku di sini berjalan dengan harmonis, dan tidak pernah terjadi konflik yang disebabkan karena perbedaan suku. Karena mayoritasnya adalah Suku Melayu, maka adat di desa ini menggunakan Adat Melayu yang dipimpin oleh ketua adat.

Meskipun yang diberlakukan adalah Adat Melayu, tapi dari struktur kepengurusan organisasi adat ini terdiri dari campuran suku, ada juga dari etnis lain (Jawa) yang masuk dalam kepengurusan. Lembaga ini mengeluarkan peraturan yang harus ditaati oleh seluruh warga Sungai Rambut. Aturan adat ini mengatur tentang:

1. Perkawinan dan Perzinahan
2. Miras dan Narkoba
3. Tindakan Kekerasan Fisik

Warga Sungai Rambut semuanya memeluk Agama Islam. Kehidupan keberagamaa di desa ini cukup harmonis meski tidak ada pemimpin agama sentral (seperti kiai di Jawa) yang menonjol dan dijadikan panutan masyarakat. Urusan agama diserahkan kepada beberapa orang yang mempunyai kemampuan membaca al-Quran, memimpin Tahlil, dan pengurusan jenazah.

Kegiatan sosial di desa mempunyai peranan yang sangat penting. Ini bagian dari modal sosial di desa yang mampu merekatkan dan mempererat hubungan relasi sosial. Inilah salah satu penciri masyarakat desa dengan kota. Mereka terbiasa

melaukan kegiatan sosial di desa, tanpa melihat aspek materi. Sebab, aspek kebersamaan dan solidaritas itu jauh lebih penting. Ada beberapa kegiatan sosial yang dilakukan oleh warga Sungai Rambut seperti misalnya: gotong royong, pertemuan PKK, penyuluhan kesehatan, dan olahraga bersama.

Tidak banyak organisasi sosial yang berdiri di desa ini. Paling tidak ada dua: perkumpulan PKK untuk ibu-ibu dan Karang Taruna untuk para pemuda dan pemudi desa. Diantara kedua organisasi sosial tersebut, yang aktif hanya PKK. Karang taruna masih belum menunjukkan ada kegiatan rutin yang berjalan dengan baik.



Gambar 24 Suasana Pertemuan PKK di Kantor Desa

Warga Sungai Rambut mempunyai agenda kegiatan keagamaan cukup padat. Ada yang harian dan mingguan bahkan ada juga yang khusus untuk anak-anak. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: yasinan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, peringatan hari besar Islam, dan selamat sebelum masa tanam. Organisasi keagamaan di Sungai Rambut tidak

melibatkan perempuan dalam struktur. Perempuan hanya terlibat pada acara-acara keagamaan sebagai tim penyedia konsumsi.

Modal Sosial dan Kerentanan

Modal sosial di desa ini merupakan praktik-praktik sosial yang merujuk pada koneksitas antar individu, jaringan sosial, norma-norma kesalinghubungan dan kesalingpercayaan yang terbangun antar individu, sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial di sini juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh warga desa, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif.

Eksistensi modal sosial ini sangat vital. Sebab, keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh “sumber daya” yang dimiliki oleh desa. Secara umum dalam tataran praktis, sumber daya telah diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, sumber daya alam (*natural resources*, disebut juga *natural capital*). Kedua, sumber daya manusia (*human resources*, disebut juga *human capital*). Ketiga, sumber daya sosial (*social resources*, disebut juga modal sosial). Jadi, ketersediaan sumber daya alam dan manusia saja harus didukung modal sosial yang kuat untuk mencapai keberhasilan program pembangunan di desa.

Kepercayaan yang sudah terbangun antar warga menjadi modal sosial yang kuat di desa ini. Misalnya, apabila ada salah seorang nelayan yang sakit dan tidak bisa melaut, maka secara sukarela nelayan yang sakit tersebut akan meminjamkan perahunya kepada nelayan yang tidak mempunyai perahu. Setelah itu,

yang dipinjami perahu tersebut akan melaut dan membagi hasil tangkapannya kepada si pemilik perahu. Ini dilakukan meski tanpa diminta oleh si pemilik prahu. Hasil yang di berikan biasanya berupa uang hasil penjualan ikan, atau hasil laut yang berhasil di tangkap.

Secara umum, potensi kerentanan sosial antar warga di desa ini cukup kecil. Namun, tetap saja bisa terjadi. Terutama diakibatkan oleh pemantik baru. Misalnya, soal perebutan sumber daya ekonomi dan perebutan kepentingan politik. Tapi, itu semua baru asumsi dan belum pernah terjadi.

Posisi Perempuan dan Kelompok Rentan

Kelompok-kelompok rentan di Desa Sungai Rambut adalah perempuan, suku minoritas, dan kelompok difabel. Tapi, yang perlu mendapat perhatian di sini adalah kelompok difabel dan perempuan. Untuk suku minoritas tidak ada masalah, karena mereka sudah berbaur dengan warga dan tidak ada tindakan diskriminatif. Bahkan suku minoritas sudah duduk di kursi pemerintahan desa.

Kelompok difabel di Sungai Rambut jumlahnya tidak banyak. Ada 2 orang tuna rungu dan tuna wicara. Keduanya adalah perempuan usia 34 dan 36 tahun. Tampaknya hidupnya tersisih di masyarakat. Aktivitasnya hanya bergaul di sekitar rumah dan sesekali membantu orang tuanya di ladang. Selain itu, tidak ada. Bahkan keduanya tidak pernah mengenyam pendidikan dasar. Hingga kini, keduanya juga belum menikah. Padahal, perempuan di desa ini, menikah pada kisaran usia 16-20 tahun. Ada juga beberapa perempuan desa yang menikah di bawah usia 16 tahun. Ini adalah bagian dari “kekerasan” yang menimpa perempuan di desa.

Sedangkan posisi perempuan di Sungai Rambut secara umum adalah masih ter subordinasi. Maksudnya adalah peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Subordinasi perempuan berawal dari pembagian kerja berdasarkan gender dan dihubungkan dengan fungsi perempuan sebagai ibu. Kemampuan perempuan ini digunakan sebagai alasan untuk membatasi perannya hanya pada peran domestik dan pemeliharaan anak.

Hal ini lalu menimbulkan stereotip di masyarakat yaitu, prasangka bahwa perempuan hanya bertanggungjawab pada kewajiban domestik, perempuan harus patuh atau bahkan milik laki-laki, dan tidak memiliki kemampuan dalam urusan publik/politik masih melekat pada masyarakat di desa-desa lokasi program. Akibatnya, perempuan selalu dinomorduakan dalam forum-forum di desa. Kalau pun terlibat, mereka hanya menjadi peserta pelengkap dalam aktivitas politik dan juga forum-forum musyawarah di desa.

Meski begitu, perempuan di Sungai Rambut juga tidak sedikit yang berperan dengan menanggung beban kerja ganda. Selain mengerjakan urusan domestik (memasak, melayani suami dan merawat anak-anak), mereka juga punya tanggungjawab ekonomi seperti berdagang dan bertani. Jadi, mereka juga dilibatkan sebagai pencari nafkah. Tugas perempuan menjadi bertumpuk, sangat banyak. Bahkan, jika menghitung waktu, tugas perempuan dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Setelah itu, perempuan baru bisa beristirahat.

Kegiatan di luar rumah yang dapat menampung aspirasi perempuan di Desa Sungai Rambut adalah forum PKK

(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Forum ini cukup aktif di desa dengan berbagai macam kegiatannya, antara lain: arisan, yasinan, posyandu, dan kursus-kursus keterampilan.

Masalah Pendidikan Luar Sekolah

Meskipun banyak penduduk usia produktif, namun jika menilik kepada tingkat pendidikan mereka, menunjukkan kondisi desa yang kurang menggembirakan. Sebagian besar penduduk (48%) adalah tamatan Sekolah Dasar. Sebanyak 13% lulusan SMP, dan 11% lulusan SMA. Hanya 2% yang tamat D3 dan S1. Pendidikan bagi masyarakat Sungai Rambut cenderung kurang menjadi prioritas dalam kebutuhan masyarakat.

Pendidikan terutama pendidikan dasar merupakan hak yang seharusnya dipenuhi oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Beberapa daerah telah menetapkan pendidikan ditetapkan wajib untuk anak usia sekolah dasar, beberapa yang lain telah menetapkannya menjadi usia sampai dengan sekolah lanjutan. Bahkan banyak daerah di Indonesia yang kini menggeratiskan pada layanan pendidikan ini karena merupakan bagian jaminan sosial dasar bagi mereka yang miskin.

Dilihat dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Sungai Rambut, layanan pendidikan untuk pendidikan dasar telah tersedia. Jenjang sekolah yang ada di desa ini dari tingkat PAUD, SD, dan Madrasah Diniyah. Umumnya, layanan dasar untuk pendidikan telah tersedia, masalahnya adalah sejauh mana kualitas pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi yang mendukung terjadinya transformasi sosial di daerah itu kearah yang lebih baik.

Hasil survei menunjukkan bahwa banyak anak-anak lulusan SD yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, SMP, SMA, atau ke jenjang perguruan tinggi. Faktor jarak yang relatif sulit terjangkau menjadi kendala utama. Bagi anak Sungai Rambut yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMP dan SMA harus keluar dari desanya. Dengan kondisi alam seperti itu, maka biaya yang harus ditanggung untuk melanjutkan pendidikan menengah menjadi sulit terjangkau. Belum lagi jika hujan, mereka yang sekolahnya di luar Desa Sungai Rambut, akan kesulitan karena jalanan tanah dan berlumpur.

Guru yang lulus sarjana di desa itu hanya 3 orang, selebihnya adalah mereka lulusan SMA ke bawah. Meski kualifikasi pendidikan guru tidak selalu menjamin layanan pendidikan yang berkualitas, namun guru dengan kualifikasi pendidikan sarjana sering menjadi tolok ukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas guru di sini jauh dari nilai kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga kependidikan. Menurut peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mulai tahun 2016 guru yang belum berijazah S1 tidak berhak mengajar.

Ini menjadi catatan penting untuk perbaikan kualitas pendidikan di Desa Sungai Rambut. Anak-anak usia sekolah, harus terus didorong untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya hingga di bangku kuliah. Perlu ada peningkatan kesadaran kepada masyarakat, bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup warga di desa. Tanpa adanya sumber daya manusia yang terdidik, kemajuan desa akan terhambat.

Keberadaan sekolah tingkat lanjut (SMP dan SMA) di desa sebelah, Desa Rantau Rasau, harus dapat dimanfaatkan dengan baik karena jaraknya tidak begitu jauh dengan Sungai Rambut. Begitu pula dengan pendidikan tinggi, masyarakat juga harus diberikan akses informasi tentang peluang kuliah di berbagai tempat dengan peluang beasiswa yang terbuka lebar. Dengan begitu, bonus demografi di desa ini bukan menjadi petaka dan sumber masalah, tetapi akan mendatangkan berkah, kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan desa.

Perhatikan lokasi dan jarak tempuh dari Sungai Rambut ke sekolah SMP dan SMA terdekat. Ketika di tanya, mengapa tidak meneruskan selepas jenjang SD, mereka terkendala jarak tempuh sekolah dan soal biaya. Tenaga kependidikan di Sungai Rambut disisi lain juga sangat terbatas. Karena itu, terbilang masih kekurangan tenaga pengajar di sekolah.

Desa Sungai Rambut dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan saat ini telah tersedia lembaga pendidikan dan kesehatan berikut sarana dan prasarannya. Ada PAUD dan TK di tiga lokasi. Sekolah Dasar dan Madrasah juga tersedia di desa itu. Selain itu juga terdapat program Paket B dan C untuk yang membutuhkan.

Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Akses Jalan

Jalan di Desa Sungai Rambut terbentang kurang lebih 3 Km. Jalan di area perumahan warga sudah dibeton. Jadi, kondisi jalan sudah mulus dan tidak becek meski curah hujan tinggi. Jalan ini digunakan oleh warga sehari-hari untuk akses menuju sawah,

sekolah, kantor desa, puskesmas pembantu, lapangan olah raga, dan keperluan sehari-hari lainnya di sekitar perkampungan.



Gambar 25 Akses Jalan di Perkampungan

Untuk jalan desa yang di luar pemukiman warga, masih berupa tanah yang dipadatkan dengan batu dan pasir. Panjang jalan model ini kurang lebih 1 Km. Bila hujan, jalan ini masih bisa dilewati sepeda motor, tapi harus hati-hati karena agak licin. Jalan ini digunakan warga untuk akses ke area persawahan warga yang agak jauh dari pemukiman dan berbatasan dengan hutan Taman Nasional Berbak (TNB).



Gambar 26 Akses Jalan di Luar Pemukiman

Kondisi jalan Desa Sungai Rambut banyak diputus oleh anak Sungai Batang Hari, karena itu harus disambung dengan jembatan kecil untuk menghubungkan antar daratan. Jembatan di Sungai Rambut terdapat 8 buah. Semua jembatan dalam kondisi baik dan sudah dibeton, baik jembatan desa yang berada di dalam atau luar pemukiman warga.

Kondisi jalan dan jembatan di Desa Sungai Rambut sudah cukup bagus. Tetapi, yang perlu diperhatikan, dan jadi masalah, adalah kondisi jalan dan jembatan menuju Desa Sungai Rambut. Jalannya masih berupa tanah dan jembatannya dari kayu. Berarti, kalau musim hujan tiba, jalanan tidak dapat dilewati oleh kendaraan bermotor. Jalan tanah terbentang dari Kecamatan Berbak menuju Sungai Rambut, kurang lebih sepanjang 12 Km. Sedangkan dari Kecamatan Berbak ke kabupaten, kondisi jalan sudah beraspal, tapi kondisi jembatannya memperhatikan, karena masih berupa kayu dan banyak lubang.

Saat ini, di Desa Sungai Rambut juga tengah dibangun proyek jembatan sepanjang 700 m di atas Sungai Batang Hari yang menghubungkan antara Desa Sungai Rambut dengan Desa Telago Limo. Jembatan ini merupakan akses jalan besar menuju Pelabuhan Samudra Ujung Jabung di Desa Sungai Itik, Sadu, Tanjung Jabung Timur.



Gambar 27 Jalan Tanah Sungai Rambut – Berbak (kiri) dan Jembatan Kayu di Kecamatan Berbak (kanan)

Perjalanan dari Kota Jambi memakan waktu lebih kurang 5 jam (darat) dengan jarak sekitar 98 km. Sementara dari Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan menempuh jarak 75 km. Perjalanan tersebut dapat ditempuh menggunakan motor atau mobil. Bahkan untuk menuju ke Kota Jambi dapat menggunakan kapal/pompong melalui Sungai Batang Hari.

Akses Listrik dan Air Bersih

Penerangan di desa ini menggunakan tenaga diesel yang dinyalakan setiap hari pada pukul 18.00 sampai 23.00 untuk menerangi perumahan warga dan fasilitas umum. Khusus untuk masjid, diesel dinyalakan tiap masuk waktu shalat (shubuh, dhuhur, ashar, maghrib, dan isya). Listrik tenaga diesel hanya bisa dimanfaatkan di rumah-rumah warga untuk menyalakan lampu dan televisi. Warga yang menggunakan tenaga diesel dikenakan biaya Rp3000 - 6000/hari. Hampir semua rumah

warga teraliri listrik tenaga diesel ini, kecuali 4 rumah warga yang memilih untuk tetap menggunakan obor sebagai penerangan, karena jarak rumah yang terlalu jauh dengan gardu diesel.

Selain kebutuhan listrik, masalah yang dihadapi masyarakat Sungai Rambut adalah dalam hal pemenuhan air bersih. Selama ini mereka mengandalkan air sungai yang kalau dilihat tampilannya cenderung berwarna coklat dan terkesan kurang bersih. Mereka memanfaatkan air tersebut untuk MCK (mandi, cuci, kakus). Untuk air minum, mereka memperlakukan secara berbeda. Biasanya air diendapkan dulu dalam sebuah tempat khusus kurang lebih selama dua hingga tiga hari, baru setelah kelihatan bening, air digunakan untuk memasak atau diminum. Ada yang mengambil air langsung ke sungai atau Anak Sungai Batang Hari, ada pula yang menyedot dengan pompa. Masalah higienitas penggunaan air seperti ini yang mungkin perlu ditelusuri lebih jauh, apakah sehat atau tidak.

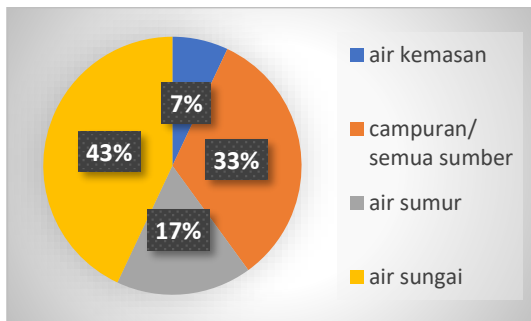


Gambar 28 MCK di Anak Sungai Batang Hari

Berdasarkan penelusuran lebih jauh permasalahan air bersih dan tingkat kesehatan masyarakat memang ada kaitannya. Hasil survei menunjukkan bahwa 43% warga desa menggunakan air sungai sebagai air masak dan minum. Air sungai yang berwarna

coklat dan keruh biasanya tidak langsung diminum atau dimasak. Air dari sungai harus ditampung dalam wadah selama minimal tiga hari di rumah agar kotorannya turun dan menjadi jernih. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, masyarakat cukup tertolong sejak adanya air mineral kemasan isi ulang. Melalui survei yang dilakukan, ditemukan sebanyak 33% warga mengkonsumsi air mineral kemasan. Sementara itu, untuk keperluan lain tetap menggunakan air sungai. Sebanyak 17% warga memenuhi kebutuhan air bersih dengan membuat sumur.

Masalah kesehatan ini tercermin dari hasil survei yang dilakukan di sana. Hanya 17% warga di desa ini yang mempunyai fasilitas Buang Air Besar (BAB) di dalam rumah. Selebihnya, 50% mereka melakukannya di sungai, dan 33% di kebun. Ini juga menjadi perhatian bersama, bahwa persoalan sanitasi ini erat kaitannya dengan kemiskinan. Akibat langsung dari ketidakterediaan dan ketidakteraturan sanitasi adalah munculnya berbagai wabah penyakit yang kapanpun dapat menjangkiti warga desa. Kegiatan BAB di sungai dan kebun di desa ini bukan perkara tabu. Kenyataan ini menjadi perhatian semua kalangan. Sebab, kelangkaan fasilitas sanitasi yang layak merupakan cerminan dari kemiskinan di desa-desa.



Gambar 29 Sumber Air Minum Warga

Meski sudah ada Puskesmas Desa dan Polindes, masalah yang juga penting adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, termasuk jika sakit harus berobat ke mana. Hasil survei menunjukkan bahwa berobat merupakan “barang mewah” dalam masyarakat Sungai Rambut, karena tidak semua orang mampu membayar biaya pengobatan. Terutama pengobatan yang butuh biaya inap pasien. Hanya ada 6% warga yang menyatakan dirinya mampu menanggung biaya rawat inap pasien. Biasanya, mereka tidak akan pergi berobat jika tidak benar-benar sakit. Begitu sudah agak parah, mereka baru berobat. Mereka agak tertolong dengan pelayanan puskesmas yang gratis selama jam kerja, namun di luar itu dikenakan biaya.

Kondisi sanitasi dan ketersediaan air bersih masih menjadi masalah di perdesaan, termasuk Desa Sungai Rambut. Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam sanitasi dasar, di mana setengah dari populasi masyarakat perdesaan tidak memiliki akses sanitasi layak, dan dari 57 juta orang yang melakukan buang air besar sembarangan, 40 juta diantaranya tinggal di perdesaan.

Layanan Pemerintah Desa

Kantor Desa Sungai Rambut terletak di tengah perkampungan warga dan berada di dekat Sungai Batang Hari, kurang lebih 25 meter dari bibir Sungai Batang Hari. Tidak jauh dari kantor desa, juga terdapat Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Baik kantor desa maupun Kantor BPD, terlihat sepi dan terkunci karena tidak ada aktivitas harian.



Gambar 30 Kantor Desa Sungai Rambut

Desa Sungai Rambut dipimpin oleh kepala desa bernama Ramli. Kepala desa menetapkan visi dan misi pada periode kepemimpinannya (2013-2019). Visinya adalah mewujudkan Sungai Rambut sebagai desa mandiri, nyaman, sehat dan sejahtera. Lebih jelas lagi, pemerintah desa juga menetapkan arah kebijakan pembangunan. Hal ini merupakan arah kebijakan pembangunan yang dijadikan petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan APBDes.

Pemerintah desa setempat menggunakan dua model pendekatan dalam menjalankan pembangunan yaitu pendekatan partisipatif dan pendekatan komprehensif. Pendekatan partisipatif mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera berdasarkan kebutuhan dan aspirasi warga, dengan mengedepankan prinsip demokratisasi, kesetaraan dan keberpihakan pada masyarakat. Pendekatan komprehensif membentuk struktur ruang desa yang strategis sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah/kawasan, secara berkeadilan,

ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kedua pendekatan tersebut diimplementasikan secara sinergis, terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan.

Sistem kelembagaan pemerintahan Desa Sungai Rambut menggunakan pola struktural pemerintahan, yakni terdiri dari 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Kepala Urusan (Kaur). Pemerintahan Desa Sungai Rambut juga diperkuat dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD di desa sangatlah penting. BPD harusnya mampu menjadi lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa. Tapi, sayangnya BPD di Sungai Rambut belum dapat berfungsi secara optimal.

Kepala desa sangat *powerfull* dalam pemerintahan Desa Sungai Rambut. Akibatnya, partisipasi warga tergolong lemah. Jangankan warga, lembaga desa (seperti BPD) pun tidak berkegiatan. Semua diatur dan dikendalikan oleh kepala desa. Deskripsi visi, misi dan strategi pembangunan desa di atas adalah dokumen desa, yang kalau dicermati, bisa jadi banyak catatan. Terutama, soal bagaimana dan sejauh mana hal tersebut sudah diimplementasikan di lapangan. Tapi nyatanya, tidak ada suara lantang yang berbeda. Yang ada hanyalah kasak-kusuk, yang bisa jadi, tidak sampai di telinga pemerintah desa.

Dikenal teori tangga partisipasi ala Sherry R. Arnstein dalam diskursus partisipasi. Bila melihat kenyataan di Sungai Rambut, level partisipasinya masih berada pada posisi tangga tokenisme (delusif). Tangga ini memiliki rentang dari *informing*, *consultation* dan *placation*. Dalam tokenisme, otoritas yang berkuasa menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik.

Kenyataannya berbeda. Benar partisipasi publik dibiarkan, namun mereka mengabaikannya. Mereka tetap mengeksekusi rencananya semula. Hal ini bisa terlihat dengan adanya pelaksanaan musyawarah desa, musyawarah warga, Musrenbangdes, tapi itu hanya sebatas formalitas belaka.

Contoh yang terjadi di desa adalah soal pembangunan gedung kantor desa yang baru. Ini juga bagian dari cermin transparansi di desa. Masyarakat hanya diinformasikan adanya pembangunan gedung, tapi publik tidak dapat memberikan umpan-balik. Masyarakat hanya mampu bergumam di forum-forum informal sesama warga. Misalnya mereka mempertanyakan mengapa harus membuat kantor desa yang baru, bukannya yang lama masih sangat layak? Bukankah masih ada banyak program pembangunan yang lebih penting dan mendesak daripada pembangunan kantor baru? Tetapi, desas-desus itu tidak mengubah kebijakan apapun, karena partisipasi yang lemah tersebut.

Jika partisipasi warga Sungai Rambut hanya dibatasi pada tingkat tokenisme, maka kecil kemungkinan ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Karena itu, masih ada kategori tangga teratas dalam tingkat kekuasaan di mana rakyat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Harusnya warga desa mampu berperan pada kategori level ini, *citizen power* (kekuatan warga). Ada tiga level tangga partisipasi pada tahap ini yaitu kemitraan (*partnership*), pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dan pengawasan masyarakat (*citizen control*).

Saat partisipasi publik telah mencapai *citizen power*, maka otoritas yang berkuasa sedang benar-benar mendahulukan

peran serta publik dalam berbagai hal. Saat tiba di *level partnership*, mereka memperlakukan publik selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik.

Naik ke level *delegated power*, mereka mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada publik. Contoh, publik punya hak veto dalam proses pengambilan keputusan. Level tertinggi yaitu *citizen control*. Publik yang lebih mendominasi daripada mereka. Bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka. Partisipasi publik yang ideal tercipta di level ini.

Namun, karena partisipasi warga di Sungai Rambut masih di level tokenisme, maka berimbas pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Warga hanya diinformasikan bahwa ada program ini dan itu, tanpa tahu penggunaan anggarannya. Laporan keuangan desa masih dianggap sebagai data rahasia, tidak semua orang dapat mengaksesnya. Belum ada mekanisme atau SOP pelayanan informasi di desa ini.

Soal transparansi, lembaga pendidikan SD di Sungai Rambut jauh lebih maju. Mereka sudah menyadari bahwa laporan keuangan sekolah adalah bagian dari data publik yang siapapun boleh mengaksesnya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk memberikan data laporan keuangan sekolah kepada siapapun yang menginginkan.

Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Tingkat pendidikan warga Desa Sungai Rambut relatif rendah. Sekitar 48% warga Sungai Rambut adalah tamatan Sekolah Dasar. Selebihnya, 13% lulusan SMP, 11% lulusan SMA, dan hanya 2% yang tamat D3 dan S1. Memang hanya ada jenjang

sekolah tingkat PAUD, SD, dan Madrasah Diniyah di desa ini. Untuk tingkat SMP dan SMA warga harus keluar desa. SMP terdekat berada di desa lain yang berjarak sekitar 2,5 km dengan waktu tempuh 20 menit menggunakan sepeda motor. Sementara itu SMA terdekat berada di kecamatan lain yang berjarak sekitar 22 km, dan harus ditempuh dalam waktu sekitar 75 menit. Jadi alasan utama warga tidak melanjutkan pendidikan selepas SD karena terkendala jarak tempuh sekolah dan soal biaya. Belum lagi jika hujan, mereka yang sekolahnya di luar Desa Sungai Rambut, akan kesulitan jika harus masuk sekolah, karena jalanan tanah dan berlumpur.

Tenaga pengajar di sekolah Sungai Rambut masih jauh dari harapan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Guru yang lulus sarjana hanya tiga orang. Selebihnya mereka lulusan SMA ke bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas guru di sini jauh dari nilai kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga kependidikan. Bahkan mulai tahun 2016, guru yang belum berijazah S1, menurut peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak berhak mengajar.

Agar kualitas pendidikan meningkat, anak-anak usia sekolah, harus didorong untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya hingga bangku kuliah. Perlu ada peningkatan kesadaran kepada masyarakat bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup warga. Tanpa adanya sumber daya manusia yang terdidik, kemajuan desa akan terhambat.

Ada empat jenis fasilitas pendidikan (formal) di Desa Sungai Rambut:

1. PAUD, terdiri dari 3 lokal. Kondisi fisik bangunan masih bagus. Tidak ada Taman Kanak-kanak (TK) di tempat ini, mereka menyebutnya sekolah PAUD selama 3 tahun.
2. SDN 56 Sungai Rambut, kondisi fisik bangunan masih bagus dan kapasitas ruang yang terdiri dari 6 lokal juga sudah mencukupi. Ruangan yang belum tersedia antara lain: ruang perpustakaan serta laboratorium IPA dan komputer.
3. Madrasah Diniyah dibangun dan dikelola oleh masyarakat. Bangunan sangat memprihatinkan. Bangunan sudah tua dan terbuat dari kayu. Begitu pula dengan kapasitas lokal kelas. Rasio jumlah murid tidak sesuai dengan jumlah kelas yang tersedia. Kelas yang tersedia hanya 2 lokal. Padahal, tingkatan kelasnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi, minimal ruangan yang harus tersedia adalah 6 lokal.
4. Paket B dan C, terdapat 1 kelompok yang diselenggarakan oleh tokoh masyarakat setempat, Bapak Harahap. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah Harahap. Program ini sempat berjalan dengan baik, namun kini sudah tidak jalan lagi karena minimnya minat masyarakat untuk mengikutinya.



Gambar 31 Gedung PAUD dan SD



Gambar 32 Gedung Madrasah Diniyah

Terdapat Puskesmas Desa (Puskesmasdes) di Desa Sungai Rambut yang dilayani seorang tenaga perawat. Bangunan semi permanen ini terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya dari bahan triplek. Jam buka Puskesmasdes 08.00-17.00, warga yang berobat tidak dipungut biaya. Namun bila di luar jam kerja, maka warga dikenakan tarif sekitar Rp25.000 - Rp50.000. Warga lebih memilih berobat di luar jam kerja karena obat gratis yang diberikan di Puskesmasdes tidak *ces pleng*. Menurut warga meski harus merogok kocek, yang penting cepat sembuh.



Gambar 33 Bangunan Puskesmas

Selain Puskesmas ada juga Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Baik Polindes maupun Posyandu berada di satu bangunan, yang juga menyatu dengan rumah dinas petugas Polindes, 1 orang bidan. Bangunan ini menyatu dengan rumah dinas bidan. Polindes ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk:

- a. Tempat pelayanan ibu dan anak, termasuk KB.
- b. Tempat pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.
- c. Tempat untuk konsultasi, penyuluhan, dan pendidikan kesehatan masyarakat terkait dengan kesehatan ibu dan anak.



Gambar 34 Bangunan Polindes

Berdasarkan pantauan di lapangan, masalah kesehatan yang masih perlu diperhatikan di desa ini antara lain:

- a. Masih membuang sampah sembarangan, seperti di sungai dan halaman rumah.
- b. Masih adanya masyarakat yang membuat jamban (WC) di sungai dan tepi jalan.

Seluruh warga Desa Sungai Rambut beragama Islam. Terdapat 1 masjid dan 2 surau (masing-masing dusun 1 surau) di desa. Surau hanya dimanfaatkan oleh warga untuk shalat lima waktu, sedangkan masjid, berfungsi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan warga desa seperti: peringatan hari besar Islam, shalat jumat, dan shalat hari raya.

Pengeras suara dan penerangan sarana keagamaan ini menggunakan tenaga diesel. Fasilitas masjid juga terlihat lebih lengkap dan besar. Luas bangunan masjid kurang lebih 400 m² yang mampu menampung sekitar 400 jamaah, sedangkan luas halamannya sekitar 300 m². Berbeda dengan surau yang terbuat dari kayu dan penutup dari plastik terpal dengan luas sekitar 4m x 3m.



Gambar 35 Masjid Desa Sungai Rambut

Fasilitas yang juga tersedia di desa ini adalah sarana balai warga dan olah raga. Balai warga digunakan oleh warga untuk berbagai pertemuan dan acara desa, misalnya pertemuan ibu-ibu PKK, musyawarah desa, pentas seni, dan juga acara-acara lain yang melibatkan orang banyak (di luar acara keagamaan). Balai warga ini juga dimanfaatkan oleh pemuda dan anak-anak untuk bermain bulu tangkis. Karena ruangan yang terbuka, maka permainan bulu tangkis segera bubar begitu hembusan angin kencang menerpa.



Gambar 36 Gedung Balai Warga

Selain itu, warga desa ini juga punya fasilitas umum yang cukup luas, 110 m x 75 m. Ini digunakan oleh warga sebagai lapangan sepak bola dan bola voli. Lapangan ini dapat digunakan oleh warga setiap hari. Jika hujan tiba, lapangan tidak dapat digunakan karena becek dan berlumpur.

BAB IX

DESA RAWASARI:

Rajib Khafif Arruzzi



Gambar 37 Dermaga Utama (Blok O) Desa Rawasari

Desa Rawasari adalah wilayah bekas pemukiman transmigrasi yang bernama Dendang III dengan penempatan tahun 1978/1979. Awalnya jumlah transmigran sebanyak 354 kepala keluarga atau 1.120 jiwa. Warga transmigran tersebut sebagian besar berasal dari Pulau Jawa yakni dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Namun seiring waktu banyak transmigran berpindah keluar desa dan sebagiannya kembali ke Pulau Jawa. Mereka menjual tanahnya kepada orang lain atau perantau yang ingin tinggal bermukim di Desa

Rawasari. Jumlah warga transmigran yang sejak semula menempati Desa Rawasari kini tinggal berkisar pada 30% saja.

Istilah “Rawasari” sebenarnya menggambarkan kondisi geografis desa yang sebagian besar merupakan daerah “Rawa Gambut”. Desa Rawasari terbagi menjadi 3 dusun atau sering disebut ‘Blok’ dan terdiri dari 7 RT. Sebutan ‘Blok’ ini digunakan sejak awal program transmigrasi dulu dan menjadi lazim dalam penyebutan wilayah oleh warga desa. Secara kawasan Desa Rawasari terbagi menjadi: Dusun 1 Karya Sari sering disebut Blok N terbagi menjadi RT.01, Dusun 2 Bangun Sari sering disebut Blok O terbagi menjadi RT.02 sampai RT.04 dan Dusun 3 adalah Pingi Rejo sering disebut Blok P terbagi menjadi RT.05 sampai RT.07.

Desa Rawasari juga mengalami perubahan penempatan administrasi wilayah kecamatan. Awalnya sejak program transmigrasi 1978/1979 masuk dalam Kecamatan Dendang, lalu kemudian menjadi Nipah Panjang, lalu berubah masuk dalam kawasan Kecamatan Rantau Rasau. Sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004, Desa Rawasari kini termasuk dalam Kecamatan Berbak.

Kondisi Fisik Wilayah

Desa Rawasari berada dekat tepi Sungai Batang Hari dan percabangannya dengan Sungai Berbak. Percabangan ini membentuk simpang 3 sungai dengan Sungai Berbak yang arahnya ke Selat Malaka melalui Kampung Laut dan Sungai Batang Hari yang menuju arah Jambi ibu kota provinsi dan arah laut lepas Selat Malaka melalui Nipah Panjang. Jalur lalu-lintas air ini seringkali digunakan untuk mengangkut hasil bumi antar provinsi dan antar pulau. Warga sudah terbiasa melihat kapal

besar melintas saja lewat membawa sawit, karet kayu, batubara, minyak bumi dan hasil bumi lainnya. Kapal-kapal ini tidak akan pernah bersandar ke Desa Rawasari, karena tidak ada dermaga besar dengan kedalaman yang baik untuk tersedia di desa.

Memasuki Desa Rawasari melihat kondisi bentang alam Desa Rawasari yang secara umum berupa pemukiman dengan areal persawahan yang luas. Kawasan desa berupa dataran yang berada pada ketinggian antara 1 meter s/d 1.5 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata berkisar antara 29° s/d 30° Celcius. Waktu tempuh dari ibu kota kecamatan sejauh 8,5 Km dengan waktu tempuh 30 menit, dan dari ibu kota kabupaten sejauh 75 Km dengan waktu tempuh 120 menit.

Kawasan Pedesaan Rawasari adalah dataran rawa yang dirancang berbentuk linear sejak semasa program transmigrasi 1978/1979 lalu. Bentuk desa memanjang mengikuti alur jalan dan jalur kanal sungai. Kawasan Desa Rawasari dialiri oleh kanal sungai buatan sejajar dengan jalur jalan sekunder. Seluruh rumah menghadap ke jalan atau jalur sekunder dan kanal sungai. Posisi pemukiman memanjang ini agar memudahkan warga mendekati prasarana transportasi.

Warga terbiasa untuk memanfaatkan jalan darat (jalan tersier dan sekunder) dan jalan air (kanal dan sungai). Jalan air biasanya digunakan saat pasang, dan sangat dibutuhkan pada saat banjir. Kondisi jalan banyak yang belum mendapat pengerasan berupa aspal ataupun rabat beton sehingga saat hujan dan banjir sangat rentan untuk dilalui.

Kondisi tanah di kawasan Desa Rawasari terbagi menjadi area tanah putih/tanah mineral dan area tanah gambut. Jika mengikuti alur Sungai Batang Hari, seluruh area pinggir di

alur Sungai Batang Hari adalah tanah putih/tanah mineral. Biasanya warga menanam padi pada area ini dan dulunya pernah di tanami palawija. Ada Sungai Klemak yang termasuk sebagian wilayah Blok N Karya Sari dan Blok O Bangun Sari semuanya tanah putih dan masih ditanami padi seluruhnya. Ada juga Sungai Hitam di kawasan Blok P Dusun Pingai Rejo yang arealnya banyak ditanami padi.

Jika melihat dari kawasan areal pemukiman Desa Rawasari bisa dibagi dalam wilayah 3 dusun dengan jarak kawasan jalan sekunder (SK). Termasuk area tanah putih di Blok N Dusun Karya Sari hanya SK-1. Selebihnya mulai area SK-2 sampai SK-4 dan seterusnya termasuk lahan gambut. Warga di SK-1 saat ini menanamnya masih dengan padi.

Blok O Dusun Bangun Sari yang termasuk area tanah putih/tanah mineral terdapat di SK1-SK3. Area ini juga masih ditanami padi oleh warga. Tapi mulai sebagian SK3 sudah ada yang ditanami pinang, karet, sawit dan ada juga jelutung, meski tidak skala besar di wilayah pekarangan dekat rumah atau sekitar jalan sekunder. Kawasan tanah putih/tanah mineral di Blok N-Dusun Karya Sari ada di sekitaran SK1-SK3 dan areal ini juga banyak ditanami padi oleh warga. Selebihnya di setiap dusun dengan lahan gambut saat ini warga menjadikannya tanaman perkebunan seperti karet dan lebih marak sawit.

Penduduk dan Sumber Pendapatan

Jumlah penduduk Desa Rawasari sebanyak 796 jiwa yang terdiri dari 413 laki-laki dan 383 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 231 KK. Jumlah penduduk terbanyak ada di Dusun Bangun Sari yaitu 422 jiwa, disusul kemudian Dusun

Pingai Rejo dengan 269 jiwa, dan Dusun Karya Sari yang berpenduduk 105 jiwa.

Awal mula transmigrasi di Desa Rawasari hampir semua warga memiliki perahu dayung. Moda transportasi air ini menjadi pilihan utama karena kondisi jalan darat masih buruk. Beberapa waktu kemudian warga memiliki perahu ukuran sedang bermesin diesel yang sering disebut “robin” karena mesinnya bermerk “Robin”. Selain itu ada juga kapal dengan bahan bakar bensin biasanya disebut pompong.



Gambar 38 Kanal Sungai Masih Menjadi Salah Satu Jalur Transportasi Utama Warga Desa

Sekarang hampir seluruh warga memiliki sepeda motor yang digunakan untuk perjalanan antar dusun. Sementara itu untuk ke ladang padi dan kebun, banyak warga yang lebih memilih berjalan kaki karena harus melalui lahan gambut yang sulit dilewati sepeda motor. Jika ingin ke luar desa warga harus menyeberang sungai menggunakan jasa penyeberangan “pompong” yang dilayani oleh 8 pemilik kapal (penambang). Mereka menjadi satu kelompok dalam mengelola giliran menambang/ menyeberangkan warga keluar masuk desa.

Pertanian & Perkebunan

Tanaman pangan utama adalah padi yang dipanen setahun sekali. Warga sulit menjalankan proses 2 kali tanam dalam setahun karena rawan dengan hama burung dan keterbatasan air. Jika telah dibuat dam air dengan tanggul buka tutup di jalur kanal sungai maka kemungkinan dapat dilakukan 2 kali tanam dalam setahun. Tapi masalah ini masih belum bisa diputuskan karena warga masih memanfaatkan kanal sungai sebagai jalur transportasi air.

Tanaman pangan padi ini sudah tidak lagi dirotasi warga menjadi palawija karena selain membutuhkan biaya dan resiko, warga mulai melihat kesempatan dan prospek pasar jika menanam sawit di areal perkebunannya. Penanaman sayur-mayur atau hortikultura biasanya hanya dilakukan disekitar pekarangan rumah dalam skala kecil untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam sesekali saja.



Gambar 39 Parit di Samping Lahan Pertanian

Pemerintah kabupaten mengeluarkan kebijakan untuk mempertahankan pertanian pangan melalui Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Bupati mengeluarkan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur No.18 Tahun 2013. Bagi warga yang memiliki lahan pertanian sawah padi dan pangan lainnya disepakati dalam perjanjian bermaterai tidak akan dialih fungsikan menjadi tanaman kebun ataupun fungsi lainnya. Mereka yang terlibat dalam kelompok tani akan mendapatkan bantuan. Tapi bagi sebagian warga menilai bahwa program ini kurang membantu karena mempertimbangkan hasil perkebunan sawit yang relatif lebih menarik dibanding padi. Banyak warga masih enggan menandatangani dan berpikir suatu saat kelak akan beralih menanam sawit. Beberapa warga juga berpendapat bahwa program ini hanya akan menguntungkan ketua kelompok taninya saja, biasanya anggotanya tidak mendapat apa-apa.

Masalah kelompok tani di Desa Rawasari memang juga cukup pelik. Ada 9 kelompok tani tapi tidak semuanya aktif berorganisasi dan berkumpul, apalagi untuk pertemuan rutin. Tapi ada juga ketua kelompok tani yang memang lebih rajin bergerak keluar desa membangun akses ke pihak pemerintah kabupaten dan lainnya untuk mendapatkan bantuan. Tapi menurut sebagian petani di kelompok lain akses itu biasanya hanya akan dipakai menguntungkan dirinya sendiri saja. Ada persepsi pola korup yang dianggap dilakoni oleh sebagian ketua kelompok tani di desa. Misalnya distribusi pupuk yang jika ada kelebihannya akan dijual atau dipakai sendiri. Selain itu ada kelompok tani yang juga aktif memanfaatkan kedekatan ke pihak desa untuk mengakses lahan tanah kas desa bagi kelompoknya. Pengerjaan tanah kas desa atas nama kelompok

ini pun dianggap hanya menguntungkan ketua kelompok dan beberapa orang anggotanya saja.

Tanaman perkebunan yang cukup berpengaruh adalah tanaman sawit. Bagi mereka yang sudah berhasil menumbuhkan sawitnya bisa memperoleh hasil 1-5 pikul/2 minggu. Banyak warga yang mulai menanam sawit sejak beberapa tahun lalu, tapi masih banyak yang gagal karena sebagian warga mengalami dampak terbakarnya lahan di wilayah perkebunan tahun 2015 lalu. Ada juga beberapa lahan warga yang merugi karena tanaman sawitnya dimakan babi. Banjir yang terjadi setiap tahunnya membuat sawit berumur 3-4 tahun masih terhambat pertumbuhannya dan sulit menjadi panen.

Selain sawit ada banyak warga dulunya menanam karet. Tapi tren penanaman karet ini sepetinya sudah hampir berhenti. Banyak warga tidak lagi mau/malas menyadap karetnya dan berencana akan menggantinya dengan sawit. Mereka lagi-lagi membandingkan karet yang harus disembah setiap hari, sementara pengerjaan perawatan dan panen sawit tidak terlalu berat. Padahal ada total sekitar 50-an Ha tanaman karet milik warga di areal kebun mereka. Sekitar 220-an KK memiliki areal kebun dengan rata-rata dibawah 5 Ha.

Tumbuhan jelutung yang dulu sempat berjaya pada tahun 2010-2014 kini tidak lagi ditanam. Dulu biasanya setelah disemai dalam media tanam dan ditumbuhkan sampai 6 bulan lebih mulai bisa dijual batang tumbuhannya ke pihak terkait. Jelutung biasanya dibeli oleh para subkontraktor/pemborong yang kemudian disalurkan ke Perhutani. Dulu harga jelutung Rp2.000/batang jika dibayar secara berkala, dan Rp1.300 - Rp1.500/batang jika dibayar lunas. Namun sejak 2015 warga

berhenti mengusahakan jelutung karena tidak ada yang membeli lagi.



Gambar 40 Pembibitan Jelutung yang Belum Terjual

Terdapat areal hutan di Rawasari yang bagi warga dianggap sebagai hutan negara dan sebagian masuk hutan konservasi. Dulu warga terbiasa mengakses wilayah ini untuk mengambil kayunya dan menyadap jelutung. Sebagian warga juga dulunya diperbolehkan oleh HTI untuk menanam jelutung tapi hanya kemudian diperbolehkan mengambil getahnya dan tidak boleh ditebang pohonnya. Sebagian warga Desa Rawasari menanam jelutung di kawasan hutan ini.

Menurut informasi yang didapatkan warga, dulunya akan diadakan beberapa program pemerintah di wilayah ini. Salah satu informasi bahwa akan ditambahkannya lagi areal transmigrasi dengan tambahan sekitar 2 desa ke depannya. Warga pun juga berharap akan ada pertumbuhan desa jika memiliki tetangga desa sedaratan. Ada juga yang berharap mendapat bagian alokasi tanah dari program transmigrasi ini. Tapi sepertinya semuanya menjadi pupus karena wilayah hutan

gambut itu ternyata bukan merupakan wilayah Desa Rawasari dan kini sudah dikelola izinnnya oleh PT ATGA (Agro Tumbuh Gemilang Abadi).

Situasi inilah yang membuat desa memanas. Pernah beberapa kali warga melakukan protes demonstrasi ke kantor perusahaan yang sudah berdiri di sana. Warga juga melayangkan surat ke DPR RI Komisi 3. Tapi proses ini bercampur menjadi polemik horisontal karena diduga ada keterlibatan kades yang turut menandatangani kesepakatan yang menyetujui kawasan itu termasuk wilayah Kelurahan Simpang bukan bagian Desa Rawasari. Warga pun protes ke kades dan melakukan demonstrasi ke Kantor Desa Rawasari. Sampai akhirnya demonstrasi warga yang terus berlanjut ini pernah membuat amuk massa di wilayah PT ATGA. Saat itu seorang warga yang juga ketua karang taruna desa dikriminalisasi dan divonis 8 bulan masa tahanan. Saat kejadian itu menjadi seperti titik balik protes warga atas persoalan tanpa batas ini.

Peternakan dan Perikanan

Banyak warga yang memiliki ternak ayam kampung untuk dikonsumsi dan sebagian dijual ke warga lain. Diperkirakan total ada sekitar 2.300-an ekor ayam kampung yang ditenakkan secara liar di pekarangan rumah. Sementara itu ternak sapi hanya ada sebanyak 16 ekor saja yang dikelola 7 orang. Ternak sapi ini merupakan bantuan pemerintah yang tujuannya adalah program pengembangan induk yang dibiakkan dan kemudian akan digilirkan. Tapi bantuan ini membuat warga lainnya menjadi iri karena hanya 1 kelompok tani saja yang mendapatkannya, dan pembiakannya hanya terbatas untuk anggota kelompok tani itu saja. Peternakan kambing juga

berkembang di Rawasari, ada sekitar 31 peternak yang memelihara sekitar 155 ekor kambing. Usaha peternakan sapi dan kambing di desa ini sangat didukung oleh ketersediaan pakan ternak yang melimpah.

Warga yang berada di kawasan rawa dan tepi sungai ini memang seringkali mencari ikan untuk kebutuhan sehari-harinya jarang ada yang menjualnya. Ikan biasanya ditangkap dengan cara memancing dan menjala.

Sebenarnya ada potensi untuk budidaya ikan di desa ini. Ada beberapa warga yang mulai membuat kolam dan mengambil bibit ikannya seperti ikan nila dari Sungai Batang Hari. Tapi banyak warga yang juga ragu karena pernah mencoba dan kolamnya malah tenggelam saat banjir.



Gambar 41 Udang Hasil Pancingan dari Sungai Batang Hari

Budidaya ikan dengan membuat kolam pun ternyata rentan dengan kondisi banjir. Karena itulah kegiatan usaha ini tidak terlalu diseriusi oleh warga, walau banyak warga selain membuat kolam tetap ada juga banyak warga yang membuat

kolam pasang surut di pekarangannya, dengan jalur parit ke sungai atau kanal. Itupun dilakukan dengan tujuan kebutuhan hasilnya untuk dikonsumsi. Selain itu warga juga terbiasa membuat ikan asin dari hasil tangkapannya untuk menjaga ketersediaan konsumsi lauk dalam rumah tangga.

Selain pertanian, peternakan, dan perikanan, ada warga yang berusaha di bidang perdagangan serta industri rumah tangga. Terdapat beberapa toko (klontong) di Rawasari yang diusahakan oleh warga. Usaha industri rumah tangga hanya pengolahan tempe yang dikerjakan sekitar 4 rumah tangga (RT), 2 di Blok O dan 2 di Blok P. Hasil tempe ini diedarkan keliling ke rumah warga dan sebagian dititipkan di toko. Tempe biasanya dijual dengan harga Rp 1000/ikat. Usaha industri rumah tangga lainnya adalah pembuatan alat perabot atau kapal berbahan kayu. Usaha inipun belum berkembang karena kurangnya alat dan sumber energi. Biasanya warga mengerjakannya berdasarkan pesanan borongan saja sehingga tidak beroperasi setiap harinya.

Pemasaran

Tidak ada pasar yang terkelola di desa. Dulu pernah ada pasar pekan yang coba dikelola di dalam Desa Rawasari. Biasanya pasar berlangsung pada hari Selasa di Dusun 2 Bangun Sari Blok O. Tapi aktivitas pasar ini tidak berlangsung lama, tidak sampai 1 tahun dari sekitar 2013-2014 saja. Pasar ini tidak terlalu berkembang karena memang hanya memanfaatkan lapak apa adanya dan tidak permanen. Seiring waktu, pedagang yang masuk dari luar juga semakin berkurang karena mereka merasa kesulitan masuk ke dalam desa dengan cara harus menyeberang sungai.

Kemiskinan dan Pengangguran

Warga Desa Rawasari berpendapat jika masih harus mencari nafkah dengan cara kerja upahan kepada orang lain adalah bagian dari kurangnya ekonomi di desa. Bagi warga penghasilan dari sektor pertanian dan perkebunan tidak cukup. Warga merasa belum ada penghasilan yang stabil/tetap. Menurut warga kesempatan menjadi pekerja upahan atau buruh tani sangat kecil, sehingga tidak jarang ditemui warga yang menganggur.

Pola kerja upahan bertani padi dan berkebun dilakukan satu-sama lain bersama warga Desa Rawasari. Beberapa warga terbiasa akan mencari pekerja upahan dari warga tetangganya pada saat menanam, perawatan dan panen padi. Kemudian setelah selesai atau hari berbeda mereka juga menjadi pekerja upahan (buruh tani) untuk pengerjaan lahan warga lainnya.



Gambar 42 Rumah Warga Dusun 1 Bangun Sari yang Sejak Masa Transmigrasi Masih Belum Berubah

Tidak jarang ada warga yang lebih giat mencari hasil tambahan dengan menjadi buruh tani di lahan warga lainnya. Warga yang

memiliki lahan tidak terlalu besar, dibawah 2 Ha, biasanya akan mencari pekerjaan tambahan menjadi buruh tani. Ukuran tingkat ekonomi rendah/ miskin bagi warga terlihat pada warga yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri, mereka warga yang tidak memiliki aset tanah biasanya akan melakukan pekerjaan upahan dan menyewa lahan.

Beberapa warga juga enggan dikatakan miskin. Sebab untuk kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari semua sebenarnya bisa tercukupi. Tapi mereka mengakui bahwa penghasilan warga masih dianggap di bawah rata-rata dan kurang mampu. Saat musim paceklik hampir semua warga mengeluh dan terbiasa harus bersiasat, ada warga menyebutnya harus mutar otak. Bagi sebagian warga yang masih memiliki kesempatan untuk keluar desa seperti anak muda biasanya memilih bekerja atau lazim disebut merantau. Kegiatan merantau mencari nafkah keluar desa biasanya dilakukan selama 1-3 bulan. Setelahnya akan kembali lagi ke desa, jika sampai tidak ada pekerjaan bertani, berkebun dan kerja upahan lainnya, mereka pergi lagi merantau ke luar desa.

Sebagian warga juga tidak memiliki tanah sendiri untuk tempat tinggal. Mereka menyewa lahan tanah desa sebesar Rp20.000/tahun sebagai biaya administrasi. Kepemilikan tanah desa ini tidak bersifat tetap karena peruntukannya bisa saja sewaktu-waktu dibutuhkan, dan warga yang mendirikan bangunan di atasnya harus bersiap untuk berpindah.

Situasi kemiskinan di Desa Rawasari didorong oleh kurangnya sumber pendapatan yang masuk ke dalam Desa Rawasari. Sementara konsumsi warga banyak beralih keluar desa. Kemiskinan di Desa Rawasari cukup terkait kemiskinan

struktural soal banyaknya batasan yang dialami. Peningkatan produksi di Desa Rawasari terkendala pada batasan aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi dan demografi.

Letak dan posisi Desa Rawasari memang menjadi satu desa terpencil dengan akses jalan yang rusak parah kemudian juga harus menggunakan perahu besar (pompong) untuk menyeberang masuk ke dalam desa. Tidak adanya akses listrik sebagai sumber energi pemanfaatan teknologi membuat desa ini juga kesulitan untuk menggerakkan perekonomiannya. Kondisi pasang surut Sungai Batang Hari dan keadaan krisis ekologis dengan bentuk banjir salah satunya adalah faktor penghambat bertumbuhnya Desa Rawasari.

Jumlah pengangguran di Desa Rawasari akan menjadi banyak pada saat musim paceklik bersamaan musim banjir. Saat itu tidak ada yang bisa dikerjakan oleh pekerja upahan di dalam desa. Tidak semua warga juga mendapat akses dan kesempatan untuk bekerja upahan di luar desa karena terbatasnya ketrampilan yang dimiliki. Jumlah buruh tani/kebun yang rentan kondisi sulit mendapatkan pekerjaan pada waktu tertentu ini sebesar 134 orang. Mereka adalah buruh tani yang sebagiannya memiliki lahan sangat kecil dan ada juga yang berusaha dengan menyewa lahan. Tapi lahan yang mereka garap biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras saja, sementara penghasilan dari kerja upahan sebagai buruh tani ini adalah penyokong hidup harian mereka.

Mengacu pada pendapatan rumah tangga, seluruhnya mengandalkan penghasilan padi dari sekitar $\frac{1}{4}$ Ha – 3 Ha lahan yang digarap. Penghasilan warga pun beragam mulai dari sekitar hanya 15 karung gabah (625 Kg beras: netto) sampai 100

karung gabah (2.500 Kg beras: netto) dengan harga beras sebesar Rp 8.500/kg – Rp 9.500/kg. Selain tergantung pada luas lahan yang digarap juga sangat tergantung pada modal warga menggunakan pupuk, perawatan dan areal yang rentan terkena hama. Ada juga beberapa responden yang gagal panen tahun 2015 lalu ini, jadi perolehannya sangat sedikit sekitar 4 karung gabah dalam lahan garapan 1 Ha.

Sebagian warga mendapatkan tambahan penghasilan dengan bekerja upahan. Rata-rata dengan bekerja upahan warga mendapatkan Rp80.000/hari. Biasanya mendapatkan kesempatan bekerja upahan hanya sekitar 10 – 15 hari dalam 1 bulan. Tapi terkadang juga tidak mendapat kesempatan bekerja dalam 1 – 2 bulan sama sekali, karena tidak ada pekerjaan di dalam desa terutama saat musim banjir yang bersamaan pada musim paceklik. Musim kondisi paling rentan ini dialami warga biasanya pada sekitar bulan November sampai Februari di saat seperti itu biasanya warga akan memutuskan merantau sementara keluar desa.

Penghasilan tambahan lainnya didapatkan dari berkebun sawit. Beberapa responden yang ditemui dan memiliki kebun sawit mereka bisa mendapatkan 2 – 5 pikul (1 pikul=50 Kg) dalam setiap 2 minggu sekali. Dengan harga rata-rata Rp90.000/pikul atau ada yang dihargai Rp 950/kg - Rp1.000/kg.

Jelutung adalah penghasilan fenomenal yang pernah didapatkan oleh warga Desa Rawasari beberapa tahun lalu (2010-2014). Ada warga yang mendapatkan Rp10 juta – Rp100 juta dalam beberapa pengakuan warga. Jumlah penghasilan warga dari jelutung ini tergantung jumlah bibit yang

disemainya. Tapi kemudian pasar jelutung ini tidak ada lagi terjual sama sekali sejak tahun 2015 – 2016 ini.

Beberapa warga yang dulunya memiliki karet sekarang sudah jarang difungsikan lagi. Hampir umum warga yang memiliki pohon karet tidak lagi menyadapnya, dikarenakan harga jual murah dan setiap hari harus 'disembah', istilah warga untuk bekerja menyadap karet setiap harinya.

Dibenak warga pekerjaan ideal adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau mendapat kesempatan bekerja di PT (sebutan warga untuk perusahaan, biasanya usaha perkebunan sawit). Karena dengan bekerja di PT misalnya mereka akan memperoleh penghasilan tetap dengan kisaran 3 juta-an perbulannya. Bagi kebanyakan warga ternyata menginginkan mencari lapangan pekerjaan, bertani adalah pilihan terakhir, setidaknya inilah yang dianjurkan ke anak-anak mereka yang sedang bersekolah

Aset rumah tangga paling umum yang dimiliki hampir seluruh warga adalah ayam ternak. Jika punya kelebihan uang warga biasanya akan membeli ayam sepasang atau sampai beberapa pasang ayam untuk ditenakkan. Ternak ayam dimiliki hampir seluruh rumah tangga, biasanya untuk dikonsumsi dagingnya, sambil sesekali ada yang dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tertentu seperti biaya acara khitanan anak. Rata-rata warga memiliki 5-30 ekor anak ayam. Biasanya setiap rumah tangga tidak akan menjual ayam seluruhnya, induknya terus dikembangbiakkan. Untuk aset ternak lainnya seperti kambing dan sapi hanya dimiliki oleh beberapa rumah tangga saja.

Aset lainnya adalah tanah garapan pertanian dan perkebunan. Sebagian warga yang mampu membeli tanah sebagai aset tambahan karena hasil dari jelutung di kisaran tahun 2010-2014

lalu. Tanah yang dibeli adalah tanah warga desa sendiri, biasanya warga menjual karena ada kebutuhan mendesak terutama membayar hutang atau memang menjual sebagian kelebihan tanahnya. Seperti dalam penuturan seorang ibu di Blok O, orang tuanya akhirnya menjual semua tanahnya demi membayar biaya pengobatan sekitar tahun 2000-an lalu. Keluarganya tidak lagi memiliki tanah garapan pertanian yang diperoleh sejak transmigrasi dulu, yakni sebesar 2 Ha.

Aset tanah yang diperoleh sejak transmigrasi awal sebesar 2 Ha dan penambahannya setelah membeli dari warga lainnya, biasanya akan diwariskan ke anaknya (anak KK sebutan warga). Oleh orang tua mereka dibagikan secara merata ke tiap anak KK dan diperuntukkan sebagai lahan garapan pertanian. Tidak jarang warga hanya memiliki $\frac{1}{4}$ Ha lahan pertanian padi sebagai hasil pembagian bersama saudaranya. Meskipun telah dibagi merata, beberapa keluarga juga terbiasa saling meminjamkan lahannya untuk digarap lahan pertanian ataupun didirikan rumah tinggal oleh sanak saudaranya. Kebiasaan warga berbagi pemanfaatan aset tanah memperlihatkan belum pernah ada konflik sengketa tanah antar sanak saudara/keluarga di Desa Rawasari.

Kelembagaan Ekonomi

Kewirausahaan desa belum banyak berkembang. Usaha di desa adalah perdagangan eceran yang disebut toko (klontong) oleh warga. Biasanya toko ini menjual barang-barang kebutuhan pokok yang semuanya diperoleh dari luar desa. Belum ada hasil desa yang signifikan diperdagangkan di dalam toko (klontong) ini. Bahkan kue dan sayur-mayur saja masih harus dipasok dari luar desa. Ada pun sekitar 1 rumah tangga di Blok O dan 2

rumah tangga di Blok P membuat pengolahan tempe dan diedarkan di 8 toko di desa.

Ada 2 lembaga ekonomi yang dibuat melalui pemerintahan desa: Usaha Ekonomi Desa (UED) dan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga). UED ini awal mulanya dibentuk tahun 2009 dengan kepengurusan pengelolaan sampai pada tingkat dusun. UED ini awalnya ditujukan sebagai simpan pinjam warga Desa Rawasari, dan diperuntukkan bagi warga yang ingin menambah modal usaha rumah tangga. Targetnya menjadi suntikan modal unit-unit usaha di desa. Tapi pada tataran praktiknya karena ternyata tidak banyak unit usaha di desa dan warga akhirnya diberikan akses meminjam untuk tujuan lainnya. Menurut Ketua UED Ibu Jumiati, akhirnya siapapun diperbolehkan meminjam dengan tidak lagi harus sesuai target semula. Pinjaman seharusnya diberikan untuk peningkatan produksi unit usaha, di mana yang meminjam adalah warga yang memiliki usaha kecil atau rumah tangga apapun bentuknya, tapi kemudian pinjaman akhirnya boleh dipakai untuk pemenuhan kebutuhan/konsumsi rumah tangga. Jika aturan kebijakan peminjaman ini terlalu ketat maka malahan tidak ada sama sekali warga yang mau meminjam/memanfaatkan modal yang ada di UED, menurut Ibu Jumiati. Sekarang aset UED sudah mencapai 23 juta.

UP2K juga telah dibentuk sejak tahun 2007. Menurut Ibu Parmini mantan istri kades periode sebelumnya dan pernah juga mencalonkan diri pada periode lalu, UP2K ini kelanjutan dari program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dari program PNPM. UP2K sejak awal diperuntukkan sebagai pengelola simpan pinjam warga desa dengan modal awal

sebesar 5 juta terbagi untuk masing-masing dusun: Blok N Dusun Karya Sari sebesar 2 juta; Blok O Dusun Bangun Sari sebesar 1,5 juta; dan Blok P Dusun Pingai Rejo sebesar 1 juta. Menurut Ibu Parmini persoalannya sama dengan UED, warga yang terlibat aktif di desa juga masih sangat sedikit. Warga juga lebih sering meminjam daripada menabung. Tabungan di UP2K juga jadi tidak berjalan sama sekali. Akhirnya kebijakannya pun diberi kelonggaran siapapun anggota tanpa harus memiliki tabungan diperbolehkan untuk meminjam.

Program Pemerintah

Pemerintah memberikan program bantuan Raskin yang didistribusi ke semua rumah tangga. Sebagian warga merasa masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok, mereka merasa sebaiknya diserahkan saja pada orang lain yang lebih membutuhkan. Tapi program ini memang akhirnya masih bergulir dan tetap ada distribusi Raskin ke setiap rumah tangga di Desa Rawasari.

Awalnya pemberian Raskin ini memang disalurkan berdasarkan data informasi rumah tangga di desa, tapi kemudian seringkali penyaluran bantuan menciptakan kecemburuan, walau memang pada akhirnya warga selalu menganggap yang salah memberikan data adalah pihak pengurus desa. Pokja Raskin ini memang mengamankan pada 3 kadus dan juga 7 ketua RT dari masing-masing dusun/blok. Selain pemerintah desa, mereka para pengurus tingkat dusun dan RT ini sering dinilai salah dalam menentukan siapa yang patut mendapatkan bantuan.

Program pemerintah yang menyalurkan (Kartu Perlindungan Sosial) KPS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga dinilai warga tidak adil dalam penyalurannya.

Banyak warga mengeluh merasa tidak mampu tapi tidak mendapatkannya. Bagi warga lainnya di sekitar Blok O Dusun Bangun Sari salah satu ketua RT-nya dipersepsikan negatif terkait perolehan penyaluran bantuan dari pemerintah. Kondisi ini disadari dan diakui oleh Ketua RT.04 di Blok O Dusun Bangun Sari M Roil, dia sudah memperbarui data warganya dan melalui pihak desa juga sudah melaporkannya sampai tingkat kecamatan, tapi yang menerima bantuan juga masih saja warga tertentu saja dari data lama. Sebenarnya Pak Roil sendiri merasa kartu-kartu seperti KPS, KIS dan KIP yang didapatkan keluarganya juga patutnya didapatkan juga oleh warga lain yang lebih kurang mampu. Tapi bagi Abdul Rokib mantan Ketua BPD yang sedang mencalonkan diri menjadi kepala desa, tetap memandang miring usaha yang dilakukan oleh Ketua RT tersebut. Baginya kenapa para perangkat desa memberikan data yang salah/tidak benar sejak semula.

Apapun bantuan yang diturunkan pemerintah dari penuturan warga jika terkait bantuan langsung ke rumah tangga masih hanya menyentuh orang-orang tertentu saja. Persoalan bantuan di Desa Rawasari memang menjadi isu yang sangat pelik dan sensitif diantara warga. Sering kali persoalan tersebut menjadi sumber awal melebarnya persepsi antar warga, antar kelompok dan sampai juga antar dusun.

Perempuan Bekerja

Hampir seluruh perempuan dewasa yang ada di Desa Rawasari bekerja dalam usaha pertanian desa. Waktu yang dipakai perempuan bekerja memang cukup banyak disamping mengerjakan tugas domestik. Setiap harinya perempuan di desa pasti mengurus kebutuhan anak dan suami seperti memasak,

mencuci, mengurus anak, hingga bersih-bersih rumah. Untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga, para ibu biasanya mengumpulkan sayuran yang tumbuh liar di sekitar ladang dan kadang juga memancing ikan di sungai. Sementara itu untuk urusan cuci mencuci, mereka biasanya memanfaatkan air kanal sungai. Selain bertugas sebagai ibu rumah tangga, ada sekitar 17 orang perempuan di Rawasari yang juga menjadi kepala rumah tangga menghidupi keluarganya.



Gambar 43 Ibu-Ibu Istirahat Setelah Gotong Royong Ngicir Padi (Tanam Padi Metode Tugal) di Sawah

Pekerjaan perempuan semakin bertambah saat pembibitan jelutung sangat marak dalam 1-4 tahun lalu. Biasanya perempuan akan banyak bekerja pada masa pembibitan awal jelutung. Mereka biasa menjadi pekerja upahan untuk memasukkan ke dalam polybag (wadah tanam). Selain itu biasanya juga anak-anak terlibat dipekerjakan bersama teman-temannya. Memang saat itu biasa mereka saling beramai-ramai menikmati bekerja sama.

Sosial Budaya

Stereotype antar etnis kerap muncul dalam interaksi antar warga dalam kesehariannya. Warga Bugis yang datang ke Dusun 1 Karya Sari Blok N ini memang menjadi warga yang menggantikan para transmigran yang bermukim pertama kali. Warga transmigran dari Jawa Barat dan Jawa Tengah di Dusun 1 banyak tidak mampu bertahan karena kondisi geografis yang sulit dan sering dilanda banjir. Banyak di antara mereka yang pindah dan menjual tanahnya ke warga luar desa yang ingin bermukim dan bertani di Rawasari. Berpindahnya Suku Bugis ke Dusun 1 ini kadang ada persepsi kurang baik dari warga dari dusun lainnya. Sewaktu dulu persepsi warga lainnya bahwa Suku Bugis dianggap jarang berinteraksi, hanya suka berkumpul sesama rumpun sendiri dan tinggal menyendiri dekat laut atau daerah tertentu. Sepertinya *stereotype* lama itu masih bertahan di benak warga. Ini dikarenakan dengan kondisi warga Bugis yang memang bermukim di Dusun 1 jauh dari dusun lainnya dan kondisi geografis jalan antar dusun membuat terbatasnya aktivitas warga antar dusun.

Stereotype atas warga Jawa Timur yang berada di Dusun 3 Pingai Rejo Blok P juga terkadang muncul dengan mengatakan watak warga yang cukup keras. Kondisi warga antar dusun jarang bertemu memang bahkan membuat warga banyak yang tidak saling kenal. Kurangnya interaksi bersama dalam satu desa memang *stereotype* masih kadang muncul saat ada persoalan tertentu. *Stereotype* terhadap kawasan Blok O sering juga dilontarkan warga dari Dusun 1 Blok N Karya Sari dan Dusun 3 Blok Pingai Rejo. Warga dari kedua dusun ini kadang menganggap pihak desa hanya memperhatikan warga yang ada

di Dusun Blok O saja. Motif soal kecemburuan sosial antar dusun ini memang muncul karena imbas dari bantuan pemerintah yang terdakang tidak didapatkan secara merata.

Seluruh warga dari setiap dusun menganut Agama Islam. Jadi mereka cukup sering berinteraksi dalam acara keagamaan. Hanya saja muncul anggapan bahwa warga di Dusun 3 Pingai Rejo Blok P warga Islam Abangan yang tidak terlalu aktif menjalankan ritual keagamaan sehari-harinya.

Kegiatan keagamaan di Desa Rawasari ada setiap minggunya. Kelompok Yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu dilaksanakan setiap minggunya. Ada yasinan dusun yang dilaksanakan malam Jum'at, setelah Jum'atan dan Jum'at malamnya. Selain itu acara peringtan hari besar seperti Maulid Nabi Muhammad SAW juga dilaksanakan setiap tahunnya. Ada juga acara MTQ yang pernah digelar oleh desa, tapi memang belum menjadi aktivitas setiap tahunnya. Untuk pelebagaan keagamaan desa mengatur dan membuatkan SK pada para guru ngaji dan pengurus masjid.

Kegiatan Sosial, Modal Sosial, dan Kerentanan

Kegiatan sosial di desa biasanya terjadi berdasarkan kebutuhan. Acara sosial paling sering dikerjakan warga secara bergotong-royong adalah saat menjelang acara pernikahan warga. Sebagian besar warga sekitar rumah akan membantu menjadi panitia penyelenggaraan pernikahan. Mulai dari penerima tamu, urusan dapur dan kebutuhan penyelenggaraan acara lamaran, akad nikah sampai resepsi pernikahan dikerjakan secara bergotong-royong dengan kepanitian yang sifatnya temporer.

Organisasi sosial yang terbentuk seperti Gapoktan dan 9 kelompok tani memang anggotanya semua masih laki-laki. Kepala keluarga yang laki-laki menjadi anggotanya, belum terlihat keterlibatan perempuan sebagai anggota kelompok tani. Peran perempuan dalam organisasi ada di PKK, Posyandu, UP2K dan UEB dan Kelompok Yasin Perempuan per dusun.

Modal sosial yang ada di Desa Rawasari adalah usaha gotong-royong yang masih hidup diantara warga. Kegiatan gotong-royong ini terjadi pada beberapa kegiatan warga. Saat warga akan ada acara menikah atau acara khitanan. Juga saat warga memproduksi menghasilkan tanaman produktif pangan padi, di mana warga masih terbiasa gotong royong satu sama lain saat menyemai padi. Warga menjadikannya sebagai giliran berkerja satu-sama lain. Warga menyebutnya *royongan* atau *giliran* atau *larian*. Selain itu aktivitas gotong royong ini mereka lakukan saat akan mendirikan rumah. Biasanya tetangga sekitar rumah akan terlibat membangunnya bersama, meskipun kadang warga sudah mengajak 1-2 tukang/mandor yang dibayar sebagai tenaga ahlinya.

Namun kebiasaan gotong royong ini menjadi terkikis jika adanya bantuan yang masuk dan diterima tidak merata atau seluruh warga. Keadaan itu biasanya malah menciptakan rasa iri, walau memang sasaran ketidaksukaan warga berujung pada pemerintah desa atau perangkat desa yang mengaturnya. Tapi kadang juga timbul bahwa warga atau dusun tertentu memang sengaja membangun kedekatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapatkan bantuan. Keadaan peduli di desa yang serba banyak hal harus diketahui dari tetangganya

karena sosialitas yang tinggi kadang membuat suasana saling menceritakan orang lain itu sudah menjadi kebiasaan.

Kerentanan paling mungkin terjadi di desa ini adalah pada masa Pilkades. Jika melihat pengalaman yang sudah lampau memang antar warga biasanya perbedaan pilihan sudah dianggap biasa saja. Tapi bagi mereka yang menjadi Tim Sukses Pilkades biasanya menjadi pemicu melebarnya persepsi dan kecurigaan yang dibangun dari bermacam cerita negatif antar warga atau pendukung. Jika Pilkades ini menghasilkan hanya 2 calon yang akan dipilih saja kerentanan sosial pasca Pilkades di Desa Rawasari akan lebih tinggi. Tapi akan berbeda jika nanti bakal calon diputuskan lolos ketiganya, warga memiliki suara yang tidak saling menandingi dengan tajam.

Posisi Perempuan dan Kelompok Rentan

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan di desa lebih mengarahkan perannya melalui jalur kelembagaan saja. Seperti diundangnya pihak PKK ataupun Posyandu untuk hadir pada acara rapat/musyawarah terkait. Walau memang dalam proses pemberdayaan ekonomi di desa telah dibentuk UP2K dan UED yang seluruhnya dikelola dan beranggotakan para perempuan di desa. Perempuan desa yang sudah terbiasa sebagai pengelola ekonomi rumah tangga memang potensial pengalamannya diberi peningkatan kapasitas.

Peran kelompok rentan paling terakomodasi oleh warga yang memang secara kebetulan menjadi buruh tani dan juga aktif di salah satu kelembagaan misal karang taruna desa atau dusun. Belum ada keterlibatan khusus kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan di desa. Misal kelompok difabel atau

lansia yang masih belum diperhatikan. Banyak lansia di Rawasari yang tinggal di desa dan anak-anaknya merantau semua keluar desa/luar daerah. Menurut beberapa warga, anak-anak/cucu mereka yang jauh juga jarang memperhatikan dan berkomunikasi langsung ataupun melalui tetangga. Jadi kadang kebutuhan sehari-hari mereka harus dibantu oleh tetangga.

Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan di dalam desa masih banyak yang rusak. Jalan semakin sulit ditempuh saat terjadi hujan, karena selain jalan rusak banyak juga yang melalui jalur tanah gambut. Jika banjir warga lebih memanfaatkan jalur kanal dan sungai dengan perahu dayung. Namun kemudian pernah ada usaha pembangunan dari pemerintah. Dulu menurut cerita mantan Sekdes Muchlis, sebagian jalan sekunder pernah dijalankan proyek pengerasan dan lalu juga pengaspalan, di zaman Soeharto tapi kemudian malah hancur/rusak disaat banjir. Demikian juga jalan yang dibangun dengan proyek PNPM tahun 2011 dan 2012 akhirnya juga sekarang kondisi jalan rusak setelah banjir besar saat Februari 2013. Kondisi rawa di mana jalan sekunder tepat di samping kanal sungai, yang setiap harinya mengalami pasang surut, ternyata rentan sekali untuk rusak akibat kondisi banjir parah.

Warga Rawasari sangat membutuhkan jalan-jalan sekunder ini sebagai prasarana utama menempuh tiap rumah dan bekerja ke ladang dan kebunnya. Jalan ini mereka gunakan setiap harinya meski dalam rusak. Jembatan antar batas SK juga banyak yang masih parah, masih terbuat dari kayu. Sebagian jembatan sudah dibangun melalui ADD. Jembatan di jalur sekunder saat

menyeberang ke sisi satunya pemukiman warga juga masih menggunakan jembatan kayu. Jembatan ini dibangun warga dengan dana sendiri oleh beberapa warga yang rumahnya berdekatan. Tapi tidak jarang juga ada yang membangunnya sendiri. Seperti cerita Mang Didi, hanya dia seorang saja yang membiayai dan membuat jembatan penyeberangan ke arah rumahnya.



Gambar 44 Jembatan Penghubung Antara Jalan Sekunder dengan Perumahan Warga

Menurut data RKP-Desa tahun 2015 kebijakan pembangunan di desa banyak mengarah pada pemenuhan infrastruktur jalan dan jembatan. Terutama pada jalur utama, jalan sekunder di setiap dusun dan jembatan perlintasan kanal sungai dan sebagian jembatan antar dusun menjadi prioritas pembangunan dari ADD (Alokasi Dana Desa).

Warga merasakan ada perbedaan pembangunan yang dikerjakan pemerintah daerah/kabupaten dengan menyerahkannya pada kontraktor. Selama ini jalan yang mereka dapatkan dari pengerjaan kontraktor dengan dana besar manfaatnya hanya bisa jadi sedikit saja. Berbeda saat pengerjaan

proyek pembangunan diserahkan pengelolaannya ke desa. Tim proyek ini biasanya hampir seluruhnya dari warga Desa Rawasari, dan mereka bisa berkesempatan bekerja dan memperluas proyek pengerjaan dengan dana yang tersedia. Pak Arwani, tokoh agama dan Ketua LMD mengatakan bahwa dengan mengelola besaran dana seperti di ADD seharusnya hanya 1 jembatan jika dibangun kontraktor, warga bisa membangunnya jadi 2 jembatan.

Penerangan dan Air Bersih

Energi listrik dari PLN di dalam desa belum tersedia. Warga Desa Rawasari sudah pernah menggunakan beberapa jenis pembangkit listrik. Warga pernah mendapatkan bantuan pemasangan PLTS di setiap rumah tangga, tapi kemudian hampir semuanya mengalami kerusakan baterai aki dan tidak bisa dipakai lagi. Sebagian warga ada yang memperbaikinya dengan cara membeli aki lebih murah sekitar Rp400.000 sampai Rp800.000. Bagi warga lainnya ada yang menggunakan listrik melalui genset (mesin diesel) yang dipunyai sendiri dan ada juga ikut mendapat saluran dari tetangga rumahnya. Jumlah genset (mesin diesel) milik pribadi ini sekitar 137 unit. Selain itu beberapa warga di Dusun 2 Bangun Sari Blok O itu ada juga yang ikut terlibat urunan penggunaan listrik PLTD kolektif.

Pemanfaatan listrik diesel yang dibayar cukup mahal perbulannya Rp55.000 – Rp105.000 ini lebih diperuntukkan saat malam hari. Malam hari kebiasaan warga ternyata lebih banyak dimanfaatkan untuk menonton televisi. Belum ada prasarana energi listrik yang dimanfaatkan sebagai penunjang untuk industri rumah tangga.



Gambar 45 Genset (mesin diesel) yang Dimanfaatkan Warga

Seluruh rumah tangga memiliki bak penampungan air hujan sebagai sumber air minumannya. Warga memanfaatkan air hujan yang ditampung dengan drum plastik. Awal program transmigrasi 1978/1979 penduduk juga disediakan drum kaleng besar disamping rumahnya. Drum ini lama kelamaan akan berkarat karena digunakan untuk menampung air hujan. Kemudian sejak tahun 1980-an pernah dihibahkan drum plastik, masih dalam program transmigrasi. Drum-drum ini masih banyak yang bertahan hingga sekarang, namun ada juga warga yang membeli lagi karena sudah lapuk/rusak.



Gambar 46 Salah Satu Cara Penampungan Air Hujan Menggunakan Talang Air

Sumber air minum lainnya adalah dari Sungai Batang Hari. Air sungai diendapkan, kemudian diambil air paling permukaan untuk dimasak sebagai pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari. Saat paling baik mengambil air adalah pada saat pasang. Sore sampai malam hari biasanya dipakai menjadi kesempatan mengambil air dengan ember atau drum. Pola mengambil air seperti ini memang tidak lagi semua melakukannya, tapi masih sebagian warga menyediakan air bersih dengan cara demikian terutama pada saat musim kemarau/kering. Menurut seorang warga dulunya sebelum ada perusahaan sawit membuka perkebunan di kawasan SK 8, SK 9 seterusnya, bagi sebagian warga kondisi air di kanal sungai masih bisa diendapkan dan diminum oleh warga. Sekarang air warnanya mulai berubah menghitam dan tidak lagi enak untuk diminum. Menurut warga air dari kawasan PT atau perusahaan sana yang kanal airnya juga sejalur ke Desa Rawasari telah mengubah kondisi lingkungan mereka.

Selain dari air hujan dan sungai, sebagian warga menggunakan air minum isi ulang dalam galon-galon yang diperoleh dari luar desa. Biasanya warga Dusun 2 Bangun Sari Blok O akan membelinya di toko (klontong). Ada 3 pedagang air kemasan di Dusun 2 ini. Galon isi air didapatkan dengan cara membeli menyeberang dengan pompong atau robin yang dimiliki pedagang sendiri dari Desa Simpang. Jika membeli di toko (klontong) harganya Rp 8.000/galon. Sementara di Dusun 1 Karya Sari Blok N, jika warga ingin membeli air kemasan langsung saja menyeberang dengan perahu dayungnya atau robinnya ke Desa Punding, karena lebih dekat daripada jalur darat ke Dusun 2. Selain itu harganya juga lebih murah sebesar Rp 3.000/galon. Sementara Dusun 3 Pingai Rejo yang juga jika

harus menempuh jalur darat ke Dusun 2, biasanya mereka juga membeli air isi ulang ke Desa Simpang dengan jalur air atau ada toko (klontong) juga di dusunnya. Ketiga pola warga mendapatkan air minum ini hampir semua menjalankannya. Saat musim kering warga akhirnya banyak membeli air isi ulang yang dipasok dari luar desa.

MCK umum juga tidak ada di setiap dusun yang sebenarnya sangat dibutuhkan, karena banyak warga masih menggunakan kanal sungai sebagai tempat mandi dan mencuci secara langsung. Warga terbiasa akan mencuci dan mandi saat sore hari terutama saat kondisi air sedang pasang, ini biasa dijadikan saat terbaik untuk memanfaatkan air di sepanjang sungai kanal.

Layanan Pemerintahan Desa

Menurut sebagian warga Kades Rawasari cukup mengakomodasi berbagai pihak terlibat di dalam pengurusan desa. Kades juga dianggap tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan keuangan desa. Tapi dinilai kurang aktif dalam kegiatan keagamaan seperti Jum'atan dan Yasinan. Padahal aktivitas keagamaan cukup sering diikuti hampir seluruh warga. .

Regulasi dalam bentuk Perdes yang pernah dikeluarkan desa hanya soal iuran desa. Pengakuan Abdul Rokib mantan Ketua BPD memang belum ada Perdes yang selama ini dibuat berdasar hasil rapat BPD bersama masyarakat. Selebihnya perdes-perdes yang ada seperti larangan penyetruman air telah dibuat sejak kepala desa sebelumnya. Adapun regulasi pembangunan desa yang dibuat adalah RKP-Desa sebagai kelanjutan dari RPJMDesa. Isi dari RKPDesa adalah rencana pembangunan desa yang isinya lebih banyak berprioritas pada pembangunan fisik di desa seperti bangunan, jalan dan jembatan di desa.

Pemerintah desa berusaha menciptakan partisipasi warga desa dalam setiap acara rapat-rapat desa. Walau keterlibatan ini masih seperti keterwakilan kelompok dari setiap pihak semisal Karang Taruna, Ibu PKK, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Pemuda. Antara Musedes, Musrenbangdes dan Rembug desa masih belum terlalu jelas dipahami oleh seluruh warga. Pemahaman terkait peruntukan soal musyawarah ini hanya dipahami oleh beberapa perangkat desa saja. Bahkan ketua dan anggota BPD pun belum terlalu memahami penting dan strategis musyawarah desa.

Informasi terkait pembangunan masih secara formal saja tercatat dikantor desa. Belum ada pola komunikasi atau media informasi yang didistribusikan di tengah warga. Padahal tempat berkumpul warga seperti masjid dan musholla yang dipakai setiap minggunya sangat potensial dijadikan titik penyebaran informasi dari desa. Terkadang informasi ataupun kebutuhan terkait untuk mengkomunikasikan dari pemerintah desa hanya menyampaikan ke ketua RT saja, yang diharap kemudian para ketua RT lah yang akan menyampaikan ke warganya. Bagi warga pola seperti ini masih dirasa banyak kekurangannya dan banyak juga informasi tidak terkomunikasikan dengan baik antara warga dan pemerintah desa secara langsung.

Kantor desa berada di tengah desa tepatnya di Blok O Dusun Bangun Sari. Kantor desa ini juga sering digunakan untuk rapat pertemuan tingkat desa. Beberapa informasi hanya terdapat di papan pengumuman yang ada di dalam kantor desa. Ada 3 ruangan yang difungsikan sebagai kantor layanan untuk kepala desa dan perangkatnya (kaur). Ada 1 ruang tengah yang biasa difungsikan untuk menggelar pertemuan. Menurut penuturan

beberapa anak muda mereka terkadang ingin suasana kantor yang tidak terlalu serius seperti kantor desa. Tidak semua warga juga sering ke kantor desa untuk melihat informasi di papan pengumuman desa. Biasanya warga yang hanya berkepentingan untuk urusan surat-menyurat dan kebutuhan khusus saja datang ke kantor desa.

Selain itu di kantor desa terdapat perpustakaan kecil yang disediakan di dalam salah satu sudut bilik dalam ruang. Tapi jarang sekali warga sekitar desa datang untuk membacanya. Belum ada juga ruang seperti pendopo publik yang bisa dijadikan semacam balai pertemuan warga di setiap dusun Desa Rawasari.

Sarana sosial lainnya seperti lapangan tidak semua dusun memilikinya. Karena keterbatasan ini biasanya warga berinisiatif secara mandiri. Blok N Dusun Karya Sari misalnya halaman pekarangan samping rumah Pak Jumadi kadus yang juga ketua gapoktan dibangun menjadi lapangan badminton yang bisa dimanfaatkan warga setempat. Lapangan sekolah juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti latihan olahraga. Lapangan desa sekaligus lapangan sekolah yang apa adanya inilah dipakai untuk bermain sepak bola dan bola voli oleh warga. Selain itu untuk acara keagamaan seperti MTQ yang biasanya antusias disambut oleh warga desa juga menggunakan lapangan yang sama.

Sarana penunjang keagamaan di Desa Rawasari masih seadanya. Selain untuk Sholat Jum'at, Musholla Nurul Hidayah biasa digunakan untuk yasinan ibu-ibu se usai pelaksanaan Sholat Jum'at bagi warga sekitar RT 3 dan RT 4 Blok O Dusun Bangun Sari. Selain itu, karena belum ada ruang khusus TPQ

(Taman Pendidikan Al Qur'an) semua masjid di setiap dusun juga difungsikan sebagai tempat anak-anak belajar mengaji yakni: TPA Al-Ikhlas di Blok N Dusun Karya Sari; TPA Al-Huda di Blok O Dusun Bangun Sari; TPA Nurul Hidayah di Blok O Dusun Bangun Sari; dan TPA Nurul Iman di Blok P Dusun Pingai Rejo.

Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Awal keberadaan Desa Rawasari ini, akses pendidikan sangat sulit. Banyak warga yang tidak dapat menyelesaikan Sekolah Dasar. Keadaan geografis dan keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama warga sulit mengakses pendidikan saat itu. Meski sejak 1983 sudah ada sekolah dasar di desa namun generasi anak KK pertama paling tinggi bersekolah hanya sampai SD saja. Namun sekarang sudah banyak anak Desa Rawasari yang menamatkan SMA dan ada juga yang menempuh sekolah hingga jenjang D2 dan sarjana dengan mengikuti UT (Universitas Terbuka).

Sekarang sejak ada fasilitas penyeberangan anak sekolah lebih dimudahkan menyeberang keluar desa. Ada kebijakan tidak tertulis antar penambang dan warga bahwa anak sekolah yang menyeberang tidak perlu dikutip biaya meski biasanya warga tetap memberikan uang terima kasih ke pemilik pompong sekali seminggu. Namun jika mereka membawa motor dikenakan biaya sebesar Rp7.000 untuk setiap motor. Ongkos khusus untuk anak sekolah itu masih jauh lebih murah dibandingkan ongkos umum yaitu sebesar Rp15.000 (motor dan orang). Untuk memudahkan akses ke sekolah banyak juga anak yang dikoskan.

Dulu kesadaran warga terhadap pendidikan dirasa masih kurang. Warga saat itu beranggapan bahwa percuma sekolah

tinggi-tinggi karena nanti juga jadi petani. Tapi menurut Abdul Rokib mantan Ketua BPD sekarang malah sebaliknya, anak muda yang tidak sekolah sudah mulai ada rasa malu. Saat ini di Desa Rawasari ada sekitar 11 orang anak yang berumur 13-15 tahun tidak bersekolah di jenjang SMP dan ada sekitar 93 anak yang berumur 15-18 tahun tidak menempuh sekolah di jenjang SMA.

Terdapat 2 TK/PAUD, 2 SD, dan 1 SMP di Desa Rawasari yang tersebar di Dusun Bangun Sari (Blok O) serta Dusun Pingai Rejo (Blok P). Terdapat SDN 198/X dan SMP SATAP 10 TJT di Blok O, sedangkan di Blok P terdapat SDN 197/X. Selain itu, di Blok O dan P masing-masing terdapat 1 TK/PAUD.

Meski sudah tersedia bangunan sekolah, namun warga merasa masih perlu ada perbaikan untuk mendukung proses belajar mengajar. Seperti misalnya di SDN 197/X perlu diadakan ruang perpustakaan dan tambahan ruang kelas untuk menampung siswa yang semakin banyak. Selain itu SDN 197/X sebenarnya sudah lama memiliki bangunan rumah guru, namun saat ini dinilai perlu direnovasi. Sementara itu untuk fasilitas rumah guru SMP SATAP 10 TJT belum dibangun.

Terdapat puskesmas pembantu di Rawasari yang terletak di Blok O Dusun Bangun Sari, tapi memang jarang buka. Terdapat 2 Posyandu aktif dikelola oleh ibu PKK dan seorang perawat desa yang tinggal di Desa Rawasari. Ada 1 Posyandu di Blok O Dusun Bangun Sari dan 1 Posyandu di Blok P Dusun Pingai Rejo. Setiap minggunya, mereka mengadakan pertemuan mengkonsultasikan kesehatan bersama ibu-ibu dan anak kecilnya. Balita kerap ditimbang di Posyandu untuk dipantau pertumbuhannya.

Warga lebih mempercayakan pada dukun bayi untuk kebutuhan kesehatan bayi dan ibu hamil yang hanya tinggal 1 orang di Desa Rawasari. Dukun bayi ini sepertinya lebih dipercaya oleh warga, karena selain tidak pernah ada masalah dalam kelahiran warga di sana, bidan juga ternyata tinggal di luar desa. Menurut warga biasanya jika ada persoalan kesehatan pada ibu hamil dan memang harus ditangani oleh medis, sering diminta untuk berobat lebih lanjut ke puskesmas di kecamatan atau rumah sakit. Awam juga bagi warga bahwa biaya perawatan ibu hamil hingga kelahiran juga dianggap lebih murah ditangani oleh dukun bayi daripada kelahiran yang ditangani bidan. Tapi ini dikeluhkan oleh penyuluh kesehatan dari kecamatan yang menjalankan tugas program kesehatan ibu dan anak. Situasi bahwa dalam setiap tahunnya tidak ada satupun bayi yang dilahirkan melalui penanganan medis oleh bidan setempat.

Untuk penanganan penyakit umum seperti batuk, flu, demam, sakit gigi dan lainnya oleh warga langsung menggunakan obat-obatan yang dibeli di toko (klontong) desa. Tapi untuk sebagian warga yang memiliki penyakit yang lebih serius, akhirnya harus berangkat menyeberang keluar desa. Menurut sekdes, kesadaran warga tentang pentingnya kesehatan masih kurang. Kondisi sanitasi desa masih belum tertata rapi dan rawan menjadi sumber penyakit. Hanya ada sekitar 55 KK saja yang memiliki jamban keluarga di rumahnya.

BAGIAN KETIGA



Sekolah Hijau

Sampai di sini alur pembahasan dalam buku ini telah sampai pada upaya memberikan gambaran mulai gambaran tentang latar belakang konseptual yang mendasari pengembangan gagasan penyusunan buku ini sebagaimana tergambar dalam bagian pertama. Selanjutnya pada bagian kedua yang berisi tiga bab, telah diuraikan panjang lebar mengenai profil tiga desa, Jorong Tandai Bukek Bulik, Desa Sungai Rambut, dan Desa Rawasari. Profil yang berisi gambaran tentang kondisi fisik wilayah, gambaran tentang penduduk dan sumber pendapatan berikut permasalahan yang dihadapi, serta berbagai gambaran tentang minimnya dukungan layanan publik yang tersedia di masing-masing lokasi.

Bagian ketiga buku ini, uraian pembahasan akan menitikberatkan kepada pelaksanaan program “Sekolah Hijau” yang dijalankan pada tiga desa.

Tema

1. Pengembangan Manusia
2. Pengembangan Kelembagaan
3. Pengembangan Jejaring

BAB X

PEMBANGUNAN MANUSIA

Aminatun Zubaedah
Satriyantono Hidayat
Rajib Khafif Arruzzi
Dwi Novitasari

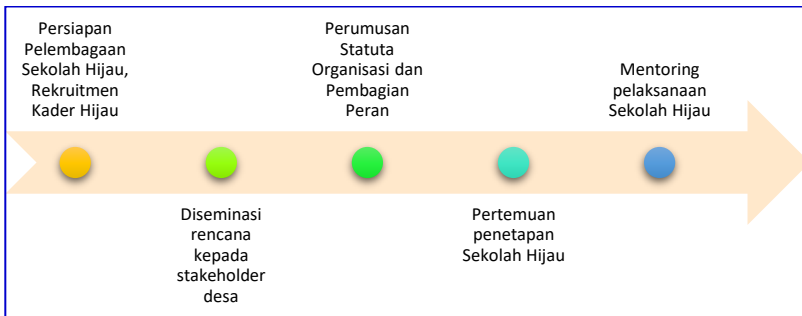
Penyiapan Sekolah Hijau.

Sekolah Hijau dilaksanakan dalam satu kesatuan rangkaian kegiatan yang secara umum terbagi dalam beberapa tema. Sekolah Hijau adalah pendidikan kerakyatan terbuka untuk umum berdasarkan kompetensi yang diperlukan. Fokus dari Sekolah Hijau adalah manusia yang menjadi sasaran sekaligus subyek dari pendidikan kerakyatan yang dilakukan. **Sekolah Hijau** juga dapat dipahami sebagai lembaga masyarakat mandiri yang bergiat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan teknis, produktivitas & kesejahteraan para anggota & pegiatnya. Ini artinya bahwa **pengelolaan pengetahuan, pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis** masyarakat desa adalah inti dari Sekolah Hijau yang digagas oleh Konsorsium KEMALA.

Visi Sekolah Hijau ada 3, yaitu: (1) Mewujudkan kemandirian ekonomi desa; (2) Menumbuhkan kembali kesetiakawanan sosial dan semangat gotong-royong warga; (3) Meningkatkan kepedulian warga terhadap kelestarian lingkungan. Sekolah Hijau adalah wahana bagi masyarakat untuk: (a) saling belajar-

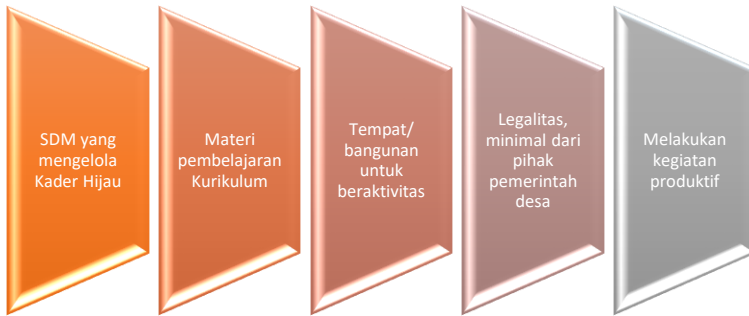
mengajar; (b) berkemampuan mengidentifikasi masalah dan pengambilan keputusan bersama; (c) mobilisasi sumber daya; dan (d) mengembangkan komunikasi dengan pihak lain.

Proses pelebagaan Sekolah Hijau dilakukan dalam beberapa tahapan, sebagaimana terlihat pada diagram berikut



Gambar 47 Tahapan Pelebagaan Sekolah Hijau

Persiapan pelebagaan Sekolah Hijau juga dilakukan dalam beberapa tahap yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Langkah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengelola Sekolah Hijau dan rekrutmen kader hijau dilakukan secara simultan dengan penyusunan materi pembelajaran Sekolah Hijau. Kader hijau adalah mereka yang akan menjadi penerima manfaat langsung sekaligus sebagai lembaga yang akan menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan dan distribusi pengetahuan terkait Sekolah Hijau,



Gambar 48 Tahap persiapan pelebagaan Sekolah Hijau

Terdapat tiga pelatihan utama yang dilakukan di Sekolah Hijau, yaitu Pelatihan Dasar, Pelatihan Menengah, dan Pelatihan Lanjut.

- *Pelatihan Dasar*: Pelatihan dasar dilakukan dengan penekanan pada aspek pengembangan wawasan hijau, perubahan pola pikir (*mindset*) serta pembentukan karakter individu dan keluarga yang lebih peduli kepada pelestarian lingkungan.
- *Pelatihan Menengah*: Pelatihan menengah selanjutnya akan dikembangkan pada level komunitas dan kelembagaan dengan mengembangkan skema-skema kelembagaan hijau melalui pengembangan kewirausahaan hijau, ketrampilan hijau, dan investasi hijau desa di level mikro
- *Pelatihan Lanjut*: Pelatihan lanjut akan dikembangkan jejaring hijau di mana dapat dijalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan pengetahuan dan bisnis hijau yang berlanjut, berkesinambungan, memakmurkan dan memandirikan warga

Rekrutmen Kader Hijau

Kader hijau adalah pemuda-pemudi dari desa atau jorong⁴ yang dipersiapkan untuk menjadi motor lembaga Sekolah Hijau yang diinisiasi oleh Konsorsium KEMALA. Mereka adalah kader yang secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang diselenggarakan hingga menjaga keberlanjutannya. Melalui Sekolah Hijau, kader-kader hijau akan melaksanakan fasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan di desa.

Rekrutmen kader hijau dilakukan oleh asesor Kajian Sosial Ekonomi Desa (KSED) di awal Konsorsium KEMALA masuk ke desa. Awalnya hanya akan ditentukan 10 orang kader hijau di setiap desa. Meskipun Konsorsium KEMALA telah menetapkan kriteria calon kader hijau, namun memilih 10 orang dari sekian banyak penduduk yang masing-masing memiliki kapasitas dan tentu saja kepentingan, bukanlah hal yang mudah dilakukan. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan kader hijau antara lain yaitu:

1. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi.
2. Kesiediaan untuk menjalankan berbagai aktivitas baik di dalam maupun di luar desa terkait dengan kegiatan kader hijau.

⁴Di Sumatera Barat, selain desa yang merupakan kelembagaan dinas juga berlaku “sistem pemerintahan adat” di mana penyebutan desa dan kampung mengikuti penyebutan dalam sistem pemerintahan adat seperti nagari, jorong dan korong.

3. Kemampuan memproduksi gagasan, menyampaikan pendapat dan berargumentasi.
4. Keaktifan dalam forum bersama dan diskusi kelompok.
5. Pemahaman tentang isu energi terbarukan dan pengembangan ekonomi warga

Proses rekrutmen kader di setiap desa dilakukan dengan mekanisme yang sama, meski antara satu desa dengan desa yang lain dinamikanya tentu saja berbeda. Dengan mengedepankan prinsip partisipatif, keterbukaan, aksesibilitas bagi semua orang proses rekrutmen dilakukan dalam beberapa tahapan. Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas data dan informasi dalam proses seleksi ini yang dikumpulkan oleh asesor KSED. Bila digambarkan dalam bagan, maka alur rekrutment kader hijau digambarkan sebagaimana contoh dalam bagan di bawah adalah alur rekrutmen kader hijau di Desa Sungai Rambut.



Gambar 49 Proses Rekrutmen Calon Kader Hijau di Sungai Rambut

Sebagaimana dalam gambar di atas proses rekrutmen di Desa Sungai Rambut dilakukan melalui dua kali pertemuan dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD). Diskusi terfokus ini melibatkan pemerintah desa, BPD, karang taruna, PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama. FGD pertama, dilakukan pada 11 September 2016 dengan agenda: perkenalan semua peserta diskusi baik dari warga maupun dari Konsorsium KEMALA. Selanjutnya disampaikan sosialisasi program yang rencananya akan dilaksanakan di Desa Sungai Rambut. Dialog dan diskusi tentang pentingnya partisipasi warga juga makna desa bagi warga menjadi proses yang tentu menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Sekolah Hijau di Desa Sungai Rambut. Diskusi terfokus kedua, dilakukan pada 17 September 2016 dengan agenda: diskusi kelompok tentang Desa Sungai Rambut yang ideal, lalu dilanjutkan dengan presentasi. Untuk menentukan siapa saja kader hijau desa, dilakukan dengan meminta pertimbangan kepada beberapa pemangku kepentingan. Awal pembentukan, 7 laki-laki dan 3 perempuan sebagai kader hijau. Perkembangannya, kader hijau Desa Sungai Rambut tidak hanya berjumlah 10 orang. Antusias masyarakat dalam menjalankan Sekolah Hijau, sejalan dengan harapan percepatan distribusi pengetahuan, Sekolah Hijau di desa membutuhkan lebih banyak kader hijau. Akhirnya di Desa Sungai Rambut ditetapkan 24 orang kader hijau yang bahu membahu mendorong dan melaksanakan pembangunan hijau di desa.



Gambar 50 Kader Hijau Desa Sungai Rambut

Proses rekrutmen kader hijau di Desa Rawasari dilakukan sedikit berbeda. Awalnya tim rekrutment mempresentasikan program dan visi Sekolah Hijau yang digagas oleh Konsorsium KEMALA. Pertemuan dilakukan dengan calon kader hijau di beberapa dusun, antara lain Dusun 3 Pingai Rejo Blok P, Dusun 1 Karya Sari Blok N dan pertemuan beberapa orang calon kader di Dusun 2 Bangun Sari Blok O. Salah satu strategi yang dipilih untuk melakukan *screening* awal adalah dengan meminta kader hijau untuk menuliskan biografi singkat mereka dan motivasi mereka di dalam formulir yang telah disiapkan oleh panitia.

Pasca pertemuan di tingkat dusun, seluruh calon kader hijau berkumpul di kantor desa untuk proses penggalian potensi, motivasi serta ide pemikiran dan gagasan mereka terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Desa Rawasari. Methodologi yang digunakan adalah dengan calon kader hijau harus membuat tulisan atau gambar tentang Desa Rawasari yang mereka mimpikan serta apa gagasan untuk mewujudkannya. Selain mimpi personal tentang Desa Rawasari mereka juga didorong saling mendiskusikan ide dan gagasan dalam forum FGD ini. Walau saat itu memang ada banyak calon kader yang

berani bicara tapi tidak jarang juga mereka ragu berpendapat di tengah forum. Beberapa tokoh masyarakat seperti tokoh agama, ketua kelompok tani, ketua pemuda dan kepala desa (kades) terlibat dalam proses ini dan memberikan motivasi kepada calon kader hijau untuk aktif dalam proses diskusi. Selanjutnya, proses triangulasi dilakukan dengan meminta tanggapan para pihak terkait aktifitas keseharian dan keaktifan para calon kader hijau dalam bermasyarakat dan keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan desa. Menariknya, mereka juga memberikan usulan nama-nama yang dicalonkan sebagai koordinator di setiap dusun. Koordinator dusun inilah yang menggerakkan anggota kader hijau lainnya. Terpilihlah 10 orang calon kader hijau di Desa Rawasari dari hasil proses rekrutmen itu, di mana 4 diantaranya adalah perempuan.



Gambar 51 Kader Hijau Desa Rawasari Mendiskusikan Ide dan Gagasan Membangun Desa

Perkembangannya, kader hijau di Desa Rawasari tidak hanya berjumlah 10 orang. Rawasari yang terbagi dalam 3 blok memerlukan lebih banyak orang yang menjadi penggerak di

masyarakat. Warga Desa Rawasari pun memperlihatkan antusiasme dan semangat yang luar biasa dalam menjalankan Sekolah Hijau di desa. Saat ini tercatat sebanyak 24 orang telah menjadi kader hijau Desa Rawasari

Proses rekrutmen calon kader hijau di Jorong Tandai Bukik Bulek, memperlihatkan proses dengan dinamika berbeda dari 2 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jorong Tandai Bukik Bulek sendiri awalnya bukanlah merupakan lokasi wilayah yang diusulkan. Mulanya program diusulkan di wilayah Jorong Tandai Tengah dan Jorong Tandai Ateh. Kedua Jorong tersebut dipilih berdasarkan informasi awal bahwa PLN belum masuk ke lokasi. Saat *assessment* dilakukan, diketahui bahwa kedua jorong tersebut telah dialiri oleh PLN. Program mendiskusikan dengan Ninik Mamak setempat untuk memindah lokasi ke Jorong Tandai Bukik Bulek, wilayah yang belum mendapatkan aliran PLN. Jorong Tandai Bukik Bulek merupakan zona khusus Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang sampai saat ini pembangunan di wilayah tersebut sangat dibatasi melalui perijinan yang sangat ketat. Seperti halnya di wilayah taman nasional lainnya, relasi antara masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional sangat dinamis. Tarik ulur kepentingan mewarnai setiap dinamika perkembangan penghidupan masyarakat di sekitar wilayah taman nasional. Hal yang sama terjadi di wilayah zona khusus di mana sebagian warga Jorong Tandai Bukik Bulek bermukim, selama belasan tahun.

Hasil *assessment* awal terkait potensi, peluang pengembangan kegiatan, kebutuhan dan juga bentang alam fisik maupun bentang kehidupan masyarakat. Konsorsium KEMALA bersama kader hijau merumuskan rencana kegiatan dan menawarkan

kepada masyarakat melalui kader hijau. Pemerintah kabupaten juga menjadi pihak yang diharapkan mendukung program, baik melalui perijinan juga program-program lain yang dapat diintegrasikan ke lokasi program.



Gambar 52 Kader Hijau Jorong Tandai Bukik Bulek

Kader hijau yang berjumlah awal sepuluh orang dilatih dan mendapatkan pengembangan kapasitas agar dapat mengembangkan inisiatif kegiatan yang dapat mendorong peningkatan pengetahuan warga terkait pembangunan, usaha produktif dan juga pengembangan pasar melalui dukungan energi tenaga surya. Proses rekrutmen kader hijau di Jorong Tandai Bukik Bulek ini sedikit berbeda dengan rekrutment kader hijau di 2 desa sebelumnya. Pemilihan calon kader hijau dilakukan oleh koordinator area dengan mendiskusikan bersama warga untuk menentukan nama-nama 10 orang kader hijau di mana 3 diantaranya adalah perempuan yang merupakan keterwakilan dari beberapa kelembagaan dan merepresentasikan berbagai kelompok sosial kemasyarakatan di Jorong Tandai Bukik Bulek. Nama-nama 10 orang calon kader hijau tersebut

yang diterima oleh asesor KSED. Perkembangannya jumlah kader hijau meningkat menjadi lebih dari 20 orang dan diharapkan terus meningkat seiring dengan ketertarikan warga dalam pelaksanaan program.

Green Visioning

Salah satu kurikulum yang terdapat di dalam Sekolah Hijau adalah Pelatihan Dasar Terpadu Kader Hijau (*Green Visioning*). Kegiatan *Green Visioning* ini menjadi kegiatan awal dari proses panjang pembelajaran Sekolah Hijau yang terdiri dari tiga tahap, yaitu pembelajaran dasar, pembelajaran menengah dan pembelajaran lanjut. Melalui kegiatan *Green Visioning* ini diharapkan dapat membangun visi bersama, membuka wawasan dan mengembangkan pemahaman baru kepada kader hijau tentang pembangunan hijau dan pembangunan desa yang memanfaatkan potensi energi terbarukan dengan pengelolaannya yang berbasis komunitas dan sumber daya setempat. *Green Visioning* adalah langkah penting dalam membangun persepsi pembangunan hijau, pembangunan yang berkelanjutan yang diusung oleh Konsorsium KEMALA. Membangun visi bersama tentang pembangunan di desa yang akan dilaksanakan bersama menjadi prasyarat bagi proses *sustainability project*. Ketika seluruh pihak yang bekerja untuk melaksanakan program berada dalam satu koridor visi yang sama, maka diharapkan tidak akan muncul perbedaan mendasar dalam menjalankan program. Dinamika perbedaan pandangan tentu saja ditemukan, namun lebih pada aspek teknis dalam implementasi program.

Tujuan dari kegiatan *Green Visioning* Sekolah Hijau adalah

1. Membangun visi bersama, mengembangkan wawasan dan mengembangkan pemahaman baru kader hijau tentang pembangunan hijau dan pembangunan desa yang memanfaatkan potensi energi terbarukan dengan pengelolaan berbasis komunitas dan sumber daya setempat untuk mengurangi kemiskinan.
2. Membangun ketrampilan dasar berorganisasi dan kemampuan dasar melakukan fasilitasi kepada warga desa untuk kegiatan-kegiatan peningkatan produktifitas
3. Mengangkat motivasi kader hijau untuk membangun desa melalui kegiatan diskusi, diskusi kelompok, studi banding dan pengamatan, seminar nasional yang dapat membuka wawasan mereka terhadap pembangunan desa di luar wilayah mereka dan bagaimana membangun kemandirian berbasis sumberdaya dan kemampuan sendiri

Adapun output atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan *Green Visioning* ini ada 3 hal, yaitu: *pertama*, terbukanya wawasan dan pemahaman peserta terhadap tujuan program Konsorsium KEMALA pada khususnya dan konsep pembangunan hijau pada umumnya, *kedua*, terbentuknya ketrampilan dan kemampuan dasar peserta dalam strategi pengorganisasian dan bagaimana melakukan fasilitasi kepada warga desa dalam mengikuti program-program peningkatan produktifitas yang akan dilaksanakan, dan *ketiga*, terangkatnya motivasi peserta untuk membangun desanya menjadi desa yang mandiri energi dengan warganya yang berdaulat melalui penerapan ilmu,

pengetahuan dan hasil pengamatan yang diperoleh selama proses pelatihan dasar

Selain fasilitator desa, kepala desa atau wali nagari, sebanyak 30 orang kader hijau yang berasal dari tiga desa/jorong mengikuti kegiatan *Green Visioning*. Untuk memastikan informasi tentang apa dan bagaimana Sekolah Hijau ini dilaksanakan dapat terdistribusi dengan cepat kepada pemerintah daerah, Konsorsium KEMALA juga melibatkan perwakilan dari Bappeda masing-masing kabupaten dalam kegiatan *Green Visioning* yang dilaksanakan dalam waktu sekitar 5 hari di Yogyakarta dan sekitarnya. *Green Visioning* sendiri mengambil lokasi di Kampus UGM dan desa percontohan sosial-ekonomi-budaya di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk dan desa percontohan pemanfaatan PLTS/energi terbarukan di Dusun Banyumeneng, Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6-11 November 2016. Seluruh peserta menginap di Wisma MM UGM dan Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul.

Tanggal 7 November 2016, peserta mengunjungi Desa Nglanggeran, suatu desa wisata di Gunungkidul yang berhasil dikenal luas karena inisiasi pemuda desa setempat dalam melakukan pembangunan hijau. Pemilihan Desa Nglanggeran sebagai lokasi studi banding dilakukan dengan pertimbangan bahwa pembangunan di Desa Nglanggeran telah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan hijau serta menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi seluruh komponen masyarakat. Profil Desa Nglanggeran secara singkat terlihat dalam *box* profil desa berikut ini.

Profil Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul



- *Terletak di kawasan sekitar hutan*
- *Kelompok masyarakat (karang taruna, kelompok sadar wisata, kelompok tani, kelompok ternak, PKK) berjalan aktif.*
- *Forum musyawarah sebagai wadah pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan berjalan dengan rutin.*
- *Pengelolaan sumber daya (khususnya wisata) dilaksanakan secara kolektif.*
- *Perkembangan pesat wisata dari sisi jumlah tempat wisata, jumlah wisatawan, paket wisata, dan pengetahuan (kesadaran) wisata berbasis lingkungan hidup dari masyarakat.*
- *Keterkaitan antar sektor usaha di desa dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku kegiatan pariwisata :*
 - *Kelompok Tani sebagai narasumber workshop pertanian*
 - *Kelompok PKK sbg penyedia kuliner/paket belajar olahan kuliner*
 - *Kelompok Homestay sebagai penyedia penginapan*
 - *Kelompok Kesenian sebagai penyambut tamu dan paket belajar kesenian*
 - *Pemuda sebagai pemandu wisata dan manajemen Desa Wisata*
 - *Rintisan koperasi seluruh insan Desa Wisata Nglanggeran.*
 - *Kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, BUMN, dan perguruan tinggi.*
- *Berbagai prestasi telah diraih:*
 - *Juara II Nasional dari Telkom dan Blogdetik Festival Blog 2010*
 - *Penghargaan CIPTA AWARD dari Kemenbudpar - 2011*
 - *Juara I Social Entrepreneur Pariwisata kat. Semi Established-2012*
 - *Juara MBM Challenge Bank Mandiri*
 - *Kader Konservasi Tingkat Nasional Kementerian Kehutanan - 2013*
 - *Juara II Desa Wisata Tingkat Nasional - 2013*
 - *Juara II Tingkat Nasional Kelompok Sadar Wisata - 2013*
 - *Juara II Lomba Menulis 1001 Jejak PNPM - 2014*
 - *Pemenang Lomba Wirausaha Inovatif Berbasis Sosial Lingkungan*
 - *Website: gunungapirba.com*



Gambar 53 Penyampaian Materi Pembangunan Hijau Oleh Awan Santosa

Selama menginap 2 malam di desa ini, ada tiga materi yang disampaikan oleh narasumber yaitu (1) Pembangunan Hijau, disampaikan oleh Awan Santosa dan Yuli Nugroho; (2) Peran Pemuda Membangun Desa, disampaikan oleh Rachmawan Budiarto, Dosen Universitas Gadjah Mada dan Sugeng Handoko, Ketua Pemuda Desa Nglanggeran; dan (3) Membangun Organisasi dan Kerjasama, disampaikan oleh Ahmad Iftah Sidik dan Marzuki Wahid.

Selain penyampaian materi di atas, peserta juga melakukan kunjungan/ studi banding ke beberapa kelompok seperti kelompok usaha perempuan (pengolahan coklat), PAM desa, kelompok tani integrasi ternak-kakao, pemerintah desa, serta kunjungan ke pengelola PLTS untuk mengangkat air di Desa Giriharjo, Panggang. Selain materi dasar tentang pembangunan hijau dan kunjungan kelompok, peserta *Green Visioning* dijamu pemuda setempat dengan suguhan musik tradisional, hal yang menumbuhkan harapan bagi terjadinya pertukaran seni budaya yang menguatkan persatuan dalam keberagaman.



Gambar 54 Kader Hijau Jorong Tandai Bukik Bulek Menyampaikan Visi Pembangunan Hijau di Desanya

Selesai kunjungan, peserta kembali ke Wisma MM UGM untuk mendapatkan materi dari Imam Prakoso tentang visi desa ke depan. Metode dan pendekatan yang digunakan adalah dengan *appreciative inquiry* (AI) melalui fasilitasi proses yang menggunakan pendekatan 4D (*Discovery, Dream, Design and Destiny*).

Rangkaian kegiatan pelatihan *Green Visioning* ditutup dengan malam renungan dan pengukuhan kader hijau. Pengukuhan ini merupakan simbol bahwa kader hijau sudah melewati proses *visioning* dan resmi untuk mengikuti proses pendidikan dan menjalankan program KEMALA bersama dengan masyarakat. Prosesi malam renungan dan pengukuhan kader hijau dilakukan dengan memberikan unsur islam dan nasionalis yaitu dengan pembacaan shalawat, wejangan agama, doa secara islam, prosesi cium simbol negara yaitu bendera merah putih, serta penyematan ID card Kader Hijau KEMALA diiringi lagu wajib nasional "Syukur". Mengambil waktu malam hari

menjelang tengah malam, ruangan yang dibuat minim cahaya merupakan salah satu metode yang digunakan pada sesi ini agar suasana menjadi lebih khidmat dan harapannya memberikan kesan yang mendalam kepada para kader hijau khususnya.

Brain storming, permainan, bermain peran, diskusi kelompok, kunjungan lapangan, *horisontal learning* menjadi pilihan metode membangun visi kader hijau. Pilihan metodologi ini terbukti mampu membangun visi peserta dan menguatkan optimisme kader hijau dalam membangun desa kedepan. “Kami merasa mereka sangat gembira, kader hijau sangat termotivasi dan optimis. Setelah kegiatan ini terlihat optimisme terbangun dan terpancar di wajah mereka, beda sekali saat bertemu di desa”, ungkap Satriyantono Hidayat, manager M&E KEMALA pasca *green visioning*.

Kesan kader hijau setelah mengikuti Green Visioning:

“Kegiatan ini sangat membuka hati saya untuk bermimpi membangun desa saya. Saya sangat bangga menjadi kader hijau karena dengan proses belajar di dalamnya dapat membuka peluang membangun desa saya menjadi lebih baik. Dengan ilmu yang saya dapat dari kegiatan ini saya ingin membuat perubahan di desa saya agar lebih maju”

(Trisna Mulyana, Kader Hijau Desa Rawasari)

“Selama mengikuti Green Visioning, saya bisa datang di Desa Nglanggeran dan bisa melihat apa saja kegiatan di desa ini. Insyaaallah akan diterapkan di desa saya. Saya di sini bisa menambah ilmu, wawasan, dan apa yang sebelumnya saya tidak tahu. Ternyata Desa Nglanggeran ini benar desa maju, pelayanan sangat baik, masyarakat sangat ramah. Saya sangat bersyukur bisa ikut kegiatan ini”.

(Amiruddin, Kader Hijau Desa Rawasari)

Semangat dan optimisme kader hijau tercermin nyata dalam Mars Kader Hijau yang diluncurkan pertama pada saat *Green Visioning*. Mars Kader Hijau ini selanjutnya selalu dinyanyikan pada setiap kegiatan Sekolah Hijau di desa, untuk membangkitkan semangat dan kekompakan kader hijau dalam menjalankan peran sebagai motor penggerak pembangunan hijau di desa masing-masing.

Mars Kader Hijau:

*Aku Kader, Kader Hijau...
Aku Bangga Di Desa...
Mandiri, Cerdas, Lestari...
Itulah Desa Kami...*

Yel-Yel Kader Hijau:

*Siapa Kita...? Kader Hijau...! (2x)
Desaku...? Mandiri, Cerdas, Lestari...!*

Seminar nasional yang diadakan oleh KEMALA berjudul Globalisasi, Demokrasi, Agama dan Lingkungan: Pendekatan Multidisiplin untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan adalah penutup dari rangkaian kegiatan *Green Visioning*. Acara Seminar yang dilaksanakan di Hotel Sahid Rich Yogyakarta pada tanggal 10 November 2016, mengundang tokoh nasional dari unsur PBNU Jakarta, pihak universitas yaitu UGM dan pemateri yang berpengalaman mulai dari bidang demokrasi desa, Dr. Arie Sudjito (Dosen Sosiologi FISIPOL UGM); Dr. Marzuki Wahid (Sekretaris Lakpesdam PBNU) pemateri pemberdayaan perempuan dan pembangunan desa inklusif), pengelolaan SDA berbasis masyarakat oleh Dr. Asep Suntana (Direktur Program PSDABM Yayasan Kehati-MCA Indonesia), dan pengembangan ekonomi hijau untuk kemandirian desa yang disampaikan oleh

Drs. Dumairy (Wakil Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM). Tamu undangan mencakup lapisan masyarakat dari kalangan PWNU, PCNU, LAKPESDAM, PW Muslimat, Akademisi, Jurnalis, dan Umum.



Gambar 55 Kader Hijau Ketiga Desa dan Manajemen KEMALA Usai Mengikuti Seminar Nasional “Globalisasi, Demokrasi, Agama dan Lingkungan: Pendekatan Multidisiplin untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan”

Pelatihan Dasar

Salah satu kegiatan dalam kurikulum Sekolah Hijau adalah Pelatihan Dasar Sekolah Hijau. Pelatihan dasar ini merupakan kegiatan pengembangan kapasitas dengan penekanan pada aspek pengembangan wawasan hijau, perubahan pola pikir (*mindset*) serta pembentukan karakter individu dan keluarga yang lebih peduli kepada kelestarian lingkungan. Sepuluh orang kader hijau yang telah mengikuti pelatihan *Green Visioning* (pelatihan dasar terpadu di Yogyakarta) dan ditambah empat belas kader tambahan yang terpilih dan mewakili beberapa kelompok warga dan kelompok profesi di masyarakat di setiap

desa ataupun jorong, mengikuti kegiatan ToT (*training of trainers*) dengan enam buah materi/modul yang telah disiapkan. Keenam materi menyentuh aspek-aspek pengetahuan dasar ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai bagian pengenalan dasar pengetahuan hijau. Dua puluh empat (24) kader hijau kemudian melakukan sosialisasi materi pelatihan kepada setidaknya 56 warga lain melalui forum-forum warga yang ada, misalnya forum yasinan, kelompok arisan bapak-bapak dan ibu-ibu, karang taruna, dan lain-lain. Telah dirancang untuk melibatkan setidaknya 30% kelompok perempuan, kelompok rentan dan warga miskin dalam setiap kegiatan.

Terdapat enam (6) pelatihan dasar yang dilakukan di setiap desa atau jorong. Keenam pelatihan tersebut adalah :



Gambar 56 Materi Pelatihan Dasar Sekolah Hijau

Pelaksanaan Pelatihan Dasar

Pelatihan dasar dilaksanakan secara berurutan di tiga desa/jorong lokasi program, dengan menggunakan modul pelatihan dasar yang telah disusun sebelumnya. Modul pelatihan dasar sendiri, disusun kolaboratif dan partisipatif yang memungkinkan setiap peserta bisa mengembangkan kemampuan baik itu pengetahuan maupun ketrampilan sesuai dengan tujuan modul. Komunikasi dan koordinasi pelaksanaan

dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelatihan dasar sejalan dengan kegiatan di masyarakat, dan diharapkan tidak mengganggu aktivitas produktif maupun sosial kemasyarakatan di desa.

Jadwal pelaksanaan pelatihan dasar dilakukan dalam bulan Januari - Februari 2017. Rangkuman pelaksanaan kegiatan dari enam materi pelatihan dasar dan fasilitator atau nara sumber yang memandu pelatihan di setiap desa sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Pelaksanaan Pelatihan Dasar di 3desa lokasi Sekolah Hijau

Desa Sungai Rambut		Desa Rawasari		Jorong Tandai Bukik Bulek	
Pelaksanaan	Narasumber	Pelaksanaan	Narasumber	Pelaksanaan	Narasumber
Pelatihan Energi Berkelanjutan					
15 Jan 2017	Dwi Novitasari	14 Jan 2017	Dwi Novitasari	21 Jan 2017	Rachmawan Budiarto
Pelatihan Penghidupan Berkelanjutan					
22 Jan 2017	Suwartanti N.	21 Jan 2017	Suwartanti N.	04 Feb 2017	Yuli Nugroho
Pelatihan Strategi Organisasi dan Perubahan Sosial					
5 Feb 2017	Ahmad Iftah S.	4 Feb 2017	Ahmad Iftah S.	17 Jan 2017	Abdullah Ubaid
Pelatihan Demokrasi dan Politik Desa					
12 Feb 2017	Imam Prakoso	11 Feb 2017	Imam Prakoso	11 Feb 2017	Suci Handayani
Pelatihan Pertanian Berkelanjutan					
19 Feb 2017	Dimas D. P.	23 Feb 2017	Dimas D. P.	28 Jan 2017	Andreas WK
Pelatihan Pengelolaan Usaha Bersama					
26 Feb 2017	Satriyantono H	25 Feb 2017	Satriyantono H	28 Feb 2017	Awan Santosa

Modul pelatihan dasar disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan pelatihan di tiga lokasi Sekolah Hijau, namun konteks wilayah tentu membuat setiap pelatihan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Berikut ini adalah catatan proses pelatihan dasar di 3 lokasi Sekolah Hijau.

Pelatihan energi berkelanjutan menjadi pintu masuk penting pelembagaan Sekolah Hijau. Tujuan pelatihan ini adalah untuk:

Tabel 14 Pelatihan Energi Berkelanjutan

Pelatihan	Energi Berkelanjutan
<p>Proses</p>	<p>Rangkaian proses pelatihan di Desa Sungai Rambut, Desa Rawasari maupun Jorong Tandai Bukik Bulek dilakukan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>pre-test</i>. <i>Pre test</i> dilakukan untuk mengukur pengetahuan awal peserta terkait dengan materi yang akan disampaikan • Presentasi narasumber tentang isu Energi Terbarukan. • Materi dilanjutkan dengan pembagian kelompok dan menjawab pertanyaan terkait materi dan presentasi jawaban masing-masing kelompok. • Game penutup diikuti antusias oleh peserta. Sebelum ToT berakhir, peserta menjawab pertanyaan dalam <i>post-tes</i>. • <i>Post test</i>, dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta setelah pelatihan
<p>Isu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Isu energi terbarukan yang dibahas di Desa Sungai Rambut maupun Desa Rawasari adalah pemanasan global, dan pencegahannya. Selain itu juga dibahas isu lokal di dua desa yakni kebakaran hutan. • Sementara di Jorong Tandai Bukik Bulek, isu yang banyak dikupas selama pelatihan adalah isu tentang PLTS dan pengelolaannya

Peghidupan berkelanjutan, menjadi materi dasar yang membangun persepsi masyarakat tentang bagaimana masyarakat memilih dan mengelola sumberdaya di desa dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan.

Tabel 15 Pelatihan Penghidupan Berkelanjutan

Pelatihan	Penghidupan Berkelanjutan
Proses	Susunan kegiatan ToT ini adalah <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembagian kelompok. 2) Tiap kelompok membuat gambar desa terkait ekonomi dan lingkungan. 3) Identifikasi hasil pertanian yang ada di desa dan evaluasi hasil pertanian setiap panen 4) Pembahasan berlandaskan modul. 5) Pasca istirahat, peserta kembali per kelompok untuk membahas isu tertentu di modul dan mempresentasikan hasil untuk selanjutnya dibahas bersama. 6) Identifikasi hasil pertanian masyarakat yang ada dan mengevaluasi hasil pertanian pada setiap kali panen 7) Indentifikasi perkembangan petani dalam pengolahan hasil tani 8) Game penutup tidak jadi dilaksanakan karena kondisi hujan lebat sepanjang hari. 9) Sesi ini diawali <i>pre-test</i> dan diakhiri <i>post-test</i>
Isu	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Sungai Rambut isu yang dibahas ToT ini antara lain, jamban pinggir sungai, MCK yang tidak teratur, isu air bersih yang diambil di Sungai Batang Hari, tips kesehatan lingkungan untuk masyarakat • Desa Rawasari Isu yang dibahas ToT ini antara lain, jamban pinggir sungai, MCK yang tidak teratur, isu air bersih yang diambil di Sungai Batang Hari, tips kesehatan lingkungan untuk masyarakat. • Jorong Tandai Bukik Bulek isu yang dibahas sistem pertanian di jorong (individu atau kelompok)

Pelatihan startegi organisasi dan perubahan sosial yang dilakukan bertujuan untuk membangun pengetahuan dan kesadaran kader hijau tentang agenda perubahan sosial. Selain itu juga tentang bagaimana membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan.

Tabel 16 Pelatihan Strategi Organisasi dan Perubahan Sosial

Pelatihan	Strategi Organisasi dan Perubahan Sosial
<p>Proses</p>	<p>ToT disampaikan melalui beberapa cara, yaitu permainan, curah pendapat, diskusi kelompok. Susunan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan (<i>Ummul Quran</i>, Lagu Indonesia Raya, Yel-yel dan Mars Kader Hijau) 2. Game “Lingkaran Konsentrasi” 3. Kelompok yang kalah dan menang dibahas dan diarahkan ke analisis faktor (alam, lingkungan, manusia) 4. Peserta diarahkan menggeser cara pandang dari mistis, naif, dan kritis ke analisis sosial (apa masalah dan gejalanya) 5. Dibuat tiga kelompok untuk analisis masalah, masing-masing kelompok membuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Peta potensi dan masalah desa b. Pohon masalah (dikerucutkan satu masalah yang paling krusial) c. Tabel analisis akar masalah 6. Rencana tindak lanjut: menentukan arah perubahan dan strateginya. <p>Cara pendekatan fasilitasi kader terhadap masyarakat dan cara komunikasi yang baik di masyarakat</p> <p>Catatan proses: Seluruh materi tuntas meskipun di sesi <i>closing</i> tidak maksimal karena pemutaran video terhambat oleh listrik yang bermasalah</p>
<p>Isu</p>	<p>Desa Sungai Rambut. Permasalahan yang banyak dibahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gagal panen. Akar masalahnya yakni penebangan liar yang menyebabkan banjir dan kurangnya penyuluhan pertanian. 2. Kesehatan buruk. Akar masalahnya adalah kualitas fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan keterbatasan tenaga kesehatan, penyebabnya ditengarai karena eksekusi proses politik di Sungai Rambut. 3. Akses jalan yang tidak memadai

Pelatihan	Strategi Organisasi dan Perubahan Sosial
	Desa Rawasari. Permasalahan yang banyak dibahas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gagal panen. Akar masalahnya yakni penebangan liar yang menyebabkan banjir dan kurangnya penyuluhan pertanian. 2. Kesehatan buruk. Akar masalahnya adalah kualitas fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan keterbatasan tenaga kesehatan, penyebabnya ditengarai karena ekses proses politik di Rawasari. 3. Akses jalan yang tidak memadai
RTL	Desa Sungai Rambut <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penebangan liar dan menggalakkan kampanye pertanian yang benar dengan berkoordinasi dengan pihak desa. 2. Mendekati pemerintah dan partai politik serta kepala desa untuk perbaikan infrastruktur jalan dan kesehatan. Desa Rawasari <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penebangan liar dan menggalakkan kampanye pertanian yang benar dengan berkoordinasi dengan pihak desa. 2. Mendekati pemerintah dan partai politik serta kepala desa untuk perbaikan infrastruktur jalan dan kesehatan

Tabel 17 Pelatihan Demokrasi dan Politik Desa

Pelatihan	Demokrasi dan Politik Desa
Proses	ToT disampaikan dengan: permainan karaoke, curah pendapat, <i>role play</i> dan diskusi kelompok. Tahapan: <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan (Ummul Quran, Lagu Indonesia Raya, Yel-yel dan Mars Kader Hijau). • Evaluasi dan curah pendapat tentang ToT dan pelatihan warga • Analisis Peta Stakeholder Desa • Dibuat empat kelompok untuk analisis masalah, dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> a) Kelompok yang memiliki dampak langsung

Pelatihan	Demokrasi dan Politik Desa
	<ul style="list-style-type: none"> b) Kelompok yang memiliki wewenang melakukan perubahan c) Kelompok yang peduli pada permasalahan warga d) Kelompok yang berada di luar desa tapi mempunyai kepentingan/ kepedulian/ sumberdaya yang bisa memobilisasi di desa. • <i>Role play</i>, bermain peran melaksanakan musyawarah desa (Musdes), yang menghasilkan poin-poin gagasan: <ul style="list-style-type: none"> a) Perbaikan infrastruktur jembatan dan jalan b) Pembentukan koperasi nelayan desa c) Pendirian KUB nelayan perempuan d) Pembangunan gedung PAUD • Curah gagasan untuk menentukan arah perubahan dan strateginya. <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh materi tuntas meskipun selesai hampir maghrib. • Proses <i>role play</i> di Jorong Tandai Bukik Bulek tidak dapat dimainkan, karena keterbatasan waktu di mana pada saat pelatihan dilakukan, bersamaan dengan prosesi pemakaman salah satu warga
Isu	<ul style="list-style-type: none"> • Paling banyak di bahas dalam diskusi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah desa 2. Infrastruktur yang tidak memadai 3. Terbatasnya program pemberdayaan

Tabel 18 Tabel Pertanian Berkelanjutan

Pelatihan	Pertanian Berkelanjutan
Proses	<p>Metodologi : curah pendapat dan diskusi kelompok.</p> <p>Susunan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan (Ummul Quran, Lagu Indonesia Raya, Yel-yel dan Mars Kader Hijau). 2. Curah Pendapat tentang potensi pertanian di Sungai Rambut

Pelatihan	Pertanian Berkelanjutan
	<p>3. Dibuat dua kelompok untuk analisis masalah, berdasarkan dua dusun, masing-masing kelompok membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Peta Pontensi Pertanian di Desa b) Tabel Analisis Usaha Pertanian c) Tabel Perhitungan Pertanian Berkelanjutan <p>4. Presentasi dan pembahasan masing-masing kelompok</p> <p>5. Melihat video dan mempelajari teknik pertanian efektif, diantaranya tentang budidaya pisang dan pembuatan pupuk kompos.</p> <p>Ketercapaian Materi: seluruh materi tuntas disampaikan.</p>
Isu	<p>Paling banyak di bahas dalam diskusi di Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi padi dan sawit 2. Budidaya pisang 3. Banjir dan kendala pertanian lainnya <p>Jorong Tandai Bukik Bulek</p> <p>Petani diharapkan menggunakan pupuk organik dalam budidaya tanaman karena penggunaan pupuk kimia membutuhkan biaya yang cukup besar dibandingkan pupuk organik.</p>

Tabel 19Pelatihan Pengelolaan Usaha Bersama

Pelatihan	Pengelolaan Usaha Bersama
Proses	<p>Metodologi : curah pendapat dan diskusi kelompok.</p> <p>Susunan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan (Ummul Quran, Lagu Indonesia Raya, Yel-yel dan Mars Kader Hijau). 2. Curah pendapat tentang usaha di Sungai Rambut 3. Dibuat tiga kelompok untuk identifikasi masalah ekonomi dan analisis usaha, dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Ekonomi kreatif ibu-ibu b) Kelompok pertanian c) Kelompok Karang Taruna

Pelatihan	Pengelolaan Usaha Bersama
	<p>4. Presentasi dan pembahasan masing-masing kelompok</p> <p>5. Melihat video dan mempelajari tentang ekonomi kreatif bersama dan koperasi.</p> <p>Ketercapaian materi: seluruh materi tuntas disampaikan.</p>
Isu	<p>Paling banyak di bahas dalam diskusi di Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ekonomi dan usaha bersama: koperasi warga 2. Potensi Sungai Rambut yang bisa dibuat usaha bersama 4. Membuat usaha dengan pinjam dana bank 5. Peningkatan produksi padi dan sawit <p>Desa Rawasari yang paling banyak di bahas dalam diskusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ekonomi dan usaha bersama: koperasi warga 2. Potensi Desa Rawasari yang bisa dibuat usaha bersama 6. Membuat usaha dengan pinjam dana bank 7. Peningkatan produksi padi dan sawit <p>Jorong Tandai Bukik Bulek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam sebuah kegiatan usaha bersama, sebaiknya dimulai dengan swadaya secara bersama-sama dan gotong royong untuk kesuksesan usaha • Salah satu bentuk usaha bersama yang akan dilakukan oleh Kader Hijau Bukik Bulek adalah mendirikan Koperasi Kopi dan Kelompok Usaha Emping Jengkol oleh para perempuan di jorong. • Sebelum mendirikan koperasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kepemilikan, keputusan dan tanggung jawab • Prinsip koperasi yang perlu diketahui adalah keanggotaan, kontrol, partisipasi, kemandirian, pendidikan, kerjasama dan kepedulian

Kampanye Hijau

Desa Sungai Rambut

Kamis, 29 Maret 2017, warga Desa Sungai Rambut menyelenggarakan kegiatan Kampanye Hijau dengan tema "Ayo.. Gotong Royong..!". Acara berlangsung sebagai puncak dari rangkaian acara yang diselenggarakan selama dua hari berisi aneka lomba seperti lomba balap perahu dan lomba panjat pinang untuk pemuda, lomba tarik tambang dan balap engkang untuk ibu-ibu, lomba adzan dan tartil Qur'an untuk anak-anak, serta lomba kebersihan antar RT.

Slogan "Ayo.. Gotong Royong..!" diambil sebagai tema kegiatan Kampanye Hijau sebagai harapan kader hijau untuk memupuk kembali semangat gotong royong segenap warga Desa Sungai Rambut dalam membangun ekonomi, sosial dan lingkungan desa. Al Amin, ketua kader hijau desa mengungkapkan, *"Semangat gotong royong warga desa selama beberapa tahun terakhir dirasa semakin luntur, seiring kehidupan ekonomi yang juga dirasa semakin sulit. Warga cenderung lebih memikirkan kepentingan individu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya."* Lebih lanjut dia menjelaskan, "Untuk itulah tema ini kami angkat untuk mengingatkan kembali warga terhadap tradisi gotong royong desa yang sudah turun temurun. Kader hijau siap menjadi motor penggerak untuk perubahan sosial yang diharapkan."



Gambar 57 Warga Perempuan Mengacungkan Jari Untuk Mengajukan Penawaran Lelang Kompos Saat Kampanye Hijau Desa Sungai Rambut

Bapak MG Harahap, pembina kader hijau Desa Sungai Rambut mengatakan, "Kader hijau desa kami siap dibina untuk dapat lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna serta bagaimana menerapkannya untuk kemajuan desa. Hari ini kami meluncurkan produk pertama kompos hasil olahan limbah ternak dan pertanian yang ada di desa. Kedepannya kelompok-kelompok tani desa kami diharapkan menjadi pembeli utama produk pupuk kompos yang dibuat oleh kader hijau." Uang hasil lelang pupuk kompos akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan kader hijau. Proses lelang mendapat sambutan yang antusias dari warga, harga yang dibuka dari Rp 25.000 ditutup dengan harga Rp 200.000 untuk karung pertama dan Rp 220.000 untuk karung yang kedua. Lelang pada acara merupakan salah satu metode pemasaran produk kader hijau yang cukup efektif



Gambar 58 Senandung Bajolo, Seni Tradisi Melayu di Desa Sungai Rambut

Sebagai puncak acara Kampanye Hijau dibacakan "Deklarasi Hijau" dengan dipimpin langsung oleh Kepala Desa Sungai Rambut, berisi pernyataan tekad warga untuk memelihara kebersamaan sosial, memupuk semangat gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu acara juga diisi pentas seni tradisi melayu yang masih bertahan di Desa Sungai Rambut, yaitu Senandung Bajolo dan Kompangan

Desa Rawasari

Ratusan warga Desa Rawasari Kecamatan Berbak Tanjabtim menggelar Kampanye Hijau, Senin 27/3/2017. Dipimpin oleh Kepala Desa Rawasari, A Rokib, dibacakan deklarasi peduli lingkungan yang mereka sebut dengan Deklarasi Hijau. Deklarasi berisi pernyataan kepedulian warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, banjir yang terjadi sebelum acara tidak menyurutkan semangat warga untuk

menggelar acara Kampanye Hijau yang bertemakan Bersih itu Sehat, Hijau itu Indah. Masyarakat dalam kondisi banjir, tetap semangat menghisasi jalan desa dengan pagar, dan membuat gapura pada masing-masing RT. “Warga masyarakat melakukan usaha tersebut dikarenakan dorongan untuk memeriahkan Kampanye Hijau” (Sutisna 33 th).



Gambar 59 Kampanye Hijau Desa Sungai Rambut

Rangkaian acara Kampanye Hijau diawali dengan beragam lomba seni, lomba ibu-ibu dan anak-anak, serta lomba kebersihan lingkungan tingkat RT yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Warga menghias jalan lingkungan, memperindah gapura tiap RT, dan membuat tong sampah di setiap sudut dengan beragam kategori, seperti sampah plastik, sampah kertas dan sampah organik. Kondisi ini memperlihatkan antusiasme warga yang besar dalam menerapkan prinsip pembangunan hijau,

Warga mengawali kegiatan dengan kirab warga desa sembari meneriakkan yel-yel tentang kebersihan dan kelestarian

lingkungan pada hari puncak pelaksanaan Kampanye Hijau. Masyarakat lintas generasi sangat antusias mengikuti kirab kampanye, yaitu dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, lansia, pemuda dan pemudi, hingga anak-anak SD dan SMP setempat. Kirab yang dibagi masing-masing RT. Yel yel yang diteriakkan selama kirab tersebut merupakan cerminan semangat dari warga Desa Rawasari. Kesuksesan acara diperkuat dengan hadirnya masyarakat Blok N yang jaraknya jauh, termasuk warga yang umur lanjut yang mana sudah bertahun-tahun tidak pernah datang ke pusat desa di Blok O. Anak-anak dan kelompok ibu-ibu juga tidak ketinggalan untuk tampil dalam beragam pentas seni yang digelar, termasuk seni tradisi yang ada di Desa Rawasari yakni jaipong.



Gambar 60 Panggung Utama Kegiatan Kampanye Hijau di Desa Rawasari

Dr. Dumairy dari PSEK UGM yang turut hadir dan mendukung acara ini menyampaikan pentingnya pengelolaan lingkungan yang sehat. "Setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang bersih dan sehat. Maka hal itu harus kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil, seperti mulai peduli pada sampah di

sekitar kita," jelas Dumairy. Sementara itu Erni Zulaika, salah satu kader hijau perempuan dengan sangat bersemangat menyambut baik acara ini. "Dengan semangat warga mengikuti acara ini. Kami optimis desa ini akan berubah menjadi lebih baik. Setelah ini semoga semangat kami untuk berubah dari sisi ekonomi juga kian meningkat" ujarnya.



*Gambar 61 Kirab Kampanye Hijau yang Melibatkan Peserta Lintas Generasi
(Kampanye Hijau Desa Rawasari, Tgl. 27 Maret 2017)*

"Masyarakat kami sangat antusias mengikuti acara Kampanye Hijau yang digagas kader hijau desa kami. Hal ini karena warga memang ingin agar momentum ini dapat dijadikan tonggak masyarakat untuk berubah kearah yang lebih baik dalam menjaga kebersihan lingkungannya" ungkap Abdul Roqib, Kepala Desa Rawasari. "beberapa minggu terakhir, desa kami terendam banjir hingga hampir 1 meter, namun hal ini tidak mengurangi semangat warga untuk bersuka cita menyambut acara ini" tambahnya.

Kampanye Hijau dengan tema "Bersih itu Sehat, Hijau itu Indah" ini digagas para pemuda yang tergabung dalam kader hijau Desa Rawasari dan didukung oleh Konsorsium KEMALA, Rangkaian kegiatan *Green Campaign* sesungguhnya mulai dilaksanakan pada 9 April 2017. Kader hijau membuat acara perlombaan yang dimeriahkan oleh masyarakat di Jorong Tandai Bukik Bulek. Perlombaan diadakan untuk anak-anak hingga orang dewasa, mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung hingga lomba volly untuk beregu putra dan beregu putri. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh semua lapisan masyarakat. Kekompakan untuk memeriahkan dan mensukseskan Kampanye Hijau oleh warga terlihat pada bagian kirab ini. Kampanye Hijau dengan puncak acara menggunakan model kirab dengan yel-yel semacam ini menjadi menarik karena bagi warga desa merupakan hal yang baru dan berbeda seperti di Rawasari yang jauh di pedalaman muara Sungai Batang Hari.

Jorong Tandai Bukik Bulek, Nagari Lubuk Gadang Timur

Tidak kalah meriahnya adalah Kampanye Hijau yang dilaksanakan di Jorong Tandai Bukik Bulek. Acara puncak *Green Campaign* di Jorong Tandai Bukik Bulek dilaksanakan pada 10 April 2017. Melalui Kampanye Hijau, dengan dimotori oleh 80 warga (termasuk 24 kader hijau) yang telah mendapat pelatihan dan sosialisasi materi dasar pengetahuan hijau, masyarakat desa dapat mengadakan gerakan bersama di mana melibatkan sebagian besar warga desa untuk melakukan perubahan sosial ke arah kemajuan desa. Kampanye Hijau dilaksanakan dengan mengangkat isu yang dinilai pas untuk disebarluaskan ke segenap warga sebagai slogan dan ajakan untuk bergerak

bersama ke arah yang lebih baik. Slogan "**Ayo Bangkit, Jorongku Mandiri dan Lestari!**" diangkat sebagai tema acara Kampanye Hijau. Menurut M. Yusuf, Kepala Jorong Tandai Bukik Bulek, tema ini sangat bagus untuk diangkat karena masyarakat Jorong Tandai Bukik Bulek harus bisa mandiri secara ekonomi mengingat tanah yang subur untuk pertanian. "*Selain itu, kelestarian alam harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti,*" terangnya.



Gambar 62 Kampanye Hijau Jorong Tandai Bukik Bulek

Acara Kampanye Hijau berlangsung sebagai puncak dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari dengan melibatkan kelompok petani, perempuan, pemuda hingga anak-anak. Berbagai lomba telah dilakukan, mulai dari lomba makan kerupuk, tarik tambang, bola voli hingga menghias tempat sampah. Acara ini juga dihadiri oleh Bapak Yudedi, perwakilan BAPPEDA Kabupaten Solok Selatan; Bapak David dari Balai Taman Nasional Kerinci Seblat, perwakilan BLH, serta ibu-ibu PKK Nagari Lubuk Gadang Timur.

Pemkab Solok Selatan melalui BAPPEDA memberikan dukungan penuh atas program yang dilaksanakan oleh Konsorsium. Melalui program ini, harapannya bisa menjadi batu loncatan atau *pilot project* pemberdayaan masyarakat dipinggir kawasan hutan di lokasi yang lain. Mengingat wilayah jorong termasuk dalam zona khusus di bawah otoritas Taman Nasional Kerinci Seblat, program yang dijalankan Konsorsium telah diperoleh izin dari TNKS. Dukungan dari pihak TNKS disampaikan juga dalam Kampanye Hijau, "*Harapan kami, hal ini tidak hanya dilakukan di Jorong Tandai Bukik Bulek, tetapi juga dilakukan di jorong-jorong lainnya yang berbatasan dengan wilayah TNKS,*" ujarnya. Turut hadir dalam acara KH Ahmad Iftah Sidik dari Lakpesdam PBNU dan berkenan memberikan tausiah kepada hadirin.

Antusiasme masyarakat dan dukungan dari pemerintah dan pihak lain terkait di Kabupaten Solok Selatan pada acara ini merupakan hal yang positif untuk keberlangsungan program. Hal ini juga menjadikan sinyal positif untuk keberlangsungan program terkait pemberdayaan masyarakat dengan tema energi terbarukan di Jorong Tandai Bukik Bulek.

Pelatihan Menengah

Sebagai kelanjutan dari tahap pendidikan dasar adalah pendidikan menengah. Bila pelatihan dasar dimaksudkan untuk membangun karakter individu, maka pada tahap pelatihan menengah ini, pendidikan dikembangkan pada level komunitas. Pelatihan dilakukan untuk mengembangkan skema-skema kelembagaan hijau melalui pelatihan kewirausahaan hijau, ketrampilan hijau dan investasi hijau. Harapannya tentu agar karakter individu-individu yang telah terbangun pada pelatihan

dasar berkembang menjadi kultur masyarakat melalui pelebagaan pembangunan hijau. Modul materi pendidikan menengah disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa. Pemateri modul pelatihan akan diisi oleh narasumber dari tingkat nasional dan lokal, dari daerah Tanjung Jabung Timur atau Solok Selatan dan sekitarnya. Modul pendidikan menengah direncanakan disusun sebanyak 12 judul dengan materi yang merupakan kebutuhan dari masyarakat desa setempat, sehingga dengan demikian modul yang akan disampaikan di setiap desa dapat berbeda satu dengan lainnya. Peserta pendidikan menengah lebih diutamakan kepada perwakilan kelompok-kelompok minat yang memang memiliki hubungan langsung dengan materi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis yang disampaikan. Harapannya tentu melalui pendidikan ini mereka dapat banyak mengambil manfaat untuk meningkatkan pendapatan serta menyebarkanluaskannya kepada kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Tujuan dilakukan pendidikan menengah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan praktis dan ketrampilan kepada peserta pelatihan
2. Membentuk unit usaha kelompok di desa yang berada dalam payung kelembagaan koperasi
3. Memperkuat kelompok usaha ekonomi produktif yang ada di desa
4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat melalui model perencanaan program secara terintegrasi dengan program pembangunan desa
5. Membentuk wadah forum pemberdayaan masyarakat lokal di level akar rumput untuk

- menciptakan sinergi antar program demi menghindari duplikasi program dan bantuan
6. Strategi distribusi kemanfaatan program kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya pemberian program atau bantuan hanya kepada kelompok tertentu

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dengan keilmuan profesi masing-masing
2. Terbentuk 3 kelompok usaha di mana masing-masing dikelola oleh (1) kelompok tani, (2) kelompok ibu-ibu, dan (3) kelompok pemuda/kader hijau, di mana ketiganya merupakan unit usaha di bawah payung lembaga koperasi/BUMDes.
3. Terbentuk 1 kelompok pengelola PLTS yang dikelola oleh kader hijau atau kelompok warga yang telah dilatih khusus baik dalam hal teknis maupun manajemen pengelolaan PLTS berbasis komunitas.
4. Tersusun rencana tindak lanjut pelaksanaan pelatihan menengah oleh para peserta untuk menerapkan atau mempraktikkan ilmu yang diperoleh serta menyebarkan kepada masyarakat lainnya untuk keperluan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Minimal 30% adalah peserta perempuan, perwakilan kelompok rentan dan warga miskin sebagai peserta pelatihan menengah ini.

Bila pelatihan dasar diberikan kepada kader hijau, maka pelatihan menengah ini diberikan kepada bukan hanya kader

hijau tetapi juga kepada kelompok-kelompok yang ada di desa/ jorong dengan melihat kesesuaiannya dengan materi pelatihan, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mewakili kelompok-kelompok warga di wilayah-wilayah yang ada di desa termasuk memastikan keterlibatan kelompok perempuan, kelompok usia muda dan warga miskin.
2. Memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat untuk memajukan masyarakat desanya.
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang akan digunakan untuk menyebarkan materi yang diperoleh kepada warga yang lain.
4. Memiliki minat terhadap materi yang disampaikan dan mengembangkannya untuk kemajuan jorong
5. Sebanyak minimal 30% peserta adalah perwakilan dari kelompok perempuan, kelompok rentan dan warga miskin
6. Bersedia mengisi dan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan pilihannya

Metodologi yang digunakan dalam pelatihan menengah ini memadukan peningkatan kapasitas pengetahuan dalam kelas juga praktik lapangan. Kombinasi metode pertemuan kelas, tanya jawab ahli, observasi lapangan, praktik lapangan dan studi banding. Materi disampaikan oleh pembicara/ tenaga ahli dari Yogyakarta, Jakarta atau tenaga ahli lokal. Pemahaman peserta diukur melalui *pre-test* dan *post-test* kepada peserta berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait pemahaman materi.

Materi *post tes* dan *pre-test* disusun oleh pemateri dan diberikan kepada minimal 50% jumlah peserta.

Pelaksanaan Pelatihan Menengah

Berdasarkan diskusi dengan fasilitator desa dan kader hijau di Desa Sungai Rambut, pemilihan peserta untuk pelatihan menengah terlebih dahulu didiskusikan internal kader hijau dengan memilih 20 orang yang memiliki profesi sesuai dengan tema pelatihan. Selanjutnya, undangan diberikan kepada satu per satu calon peserta ke rumah masing-masing oleh kader hijau. Jika calon peserta bersedia ikut pelatihan, undangan akan diberikan, tetapi jika tidak, undangan akan diberikan kepada orang lain.

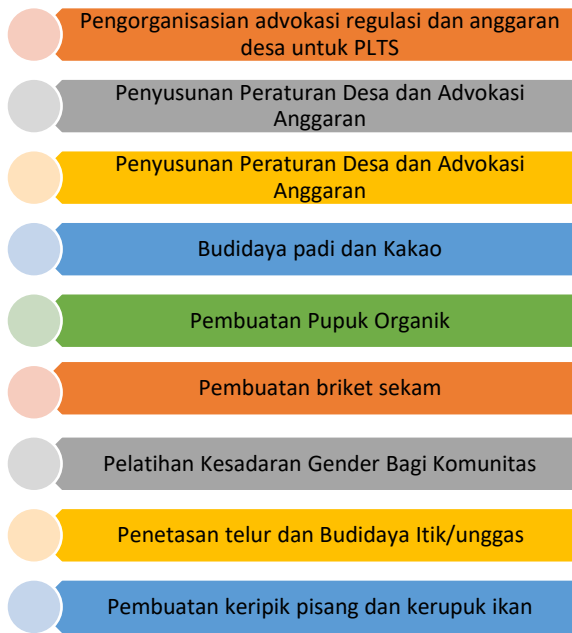


Gambar 63 Fasilitator Menyampaikan Materi Pelatihan Menengah Sekolah Hijau

Pemilihan peserta ini dilakukan empat hari sebelum pelaksanaan acara. Menurut mereka hal ini untuk memastikan bahwa peserta hadir dalam pelatihan. Jika setelah berkeliling masih ada undangan yang tersisa di mana calon peserta tidak dapat hadir dalam pelatihan, kader hijau dan fasilitator akan

berdiskusi kembali siapa yang akan mengikuti pelatihan dan sesuai dengan tema pelatihan.

Kemiripan konteks penghidupan masyarakat Desa Sungai Rambut dan Rawasari terlihat dari materi pendidikan menengah yang dikembangkan dari hasil diskusi kader hijau dengan masyarakat dengan difasilitasi oleh fasilitator desa. Materi pelatihan menengah di Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari adalah sebagai berikut:



Gambar 64 Kurikulum Pendidikan Menengah

Jorong Tandai Bukik Bulek, dengan profil penghidupan yang berbeda dengan Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari, memperlihatkan kebutuhan pelatihan menengah yang berbeda. Diskusi bersama antara kader hijau, masyarakat Jorong Tandai

Bukik Bulek dan difasilitasi Konsorsium KEMALA mengerucut pada kebutuhan pelatihan sebagai berikut :



Gambar 65 Kurikulum Pendidikan Menengah di Jorong Tandai Bukik Bulek

Pelaksanaan pelatihan di Jorong Tandai Bukik Bulek, dalam perkembangannya tidak hanya diikuti oleh perwakilan warga dari Jorong Tandai Bukik Bulek saja, namun melibatkan warga dari 2 jorong lain yang direkomendasikan pasca diskusi dengan Ninik Mamak, dan juga wali nagari dan warga. Beberapa persyaratan bagi calon peserta pelatihan menengah nampak dalam tabel berikut

Tabel 20 Jenis Pelatihan dan Peserta

No.	Pelatihan	Peserta
1.	Manajemen dan perencanaan usaha	Diutamakan: <ul style="list-style-type: none"> - calon pengurus kelompok usaha di JTBB - pengelola usaha kelompok di bawah BUMNag di 3 jorong lainnya - pengelola BUMNag
2.	Pelatihan budidaya dan pascapanen jagung	Diutamakan: <ul style="list-style-type: none"> - pengelola lahan jagung - memiliki lahan jagung - tertarik pada pascapanen jagung - pengelola BUMNag

No.	Pelatihan	Peserta
3.	Pelatihan keripik jengkol	Diutamakan: <ul style="list-style-type: none"> - sudah memiliki usaha pengolahan jengkol - kelompok usaha yang berencana memiliki usaha keripik jengkol - kelompok perempuan di jorong
4.	Pelatihan budidaya kopi	Diutamakan: <ul style="list-style-type: none"> - pengelola lahan kopi - memiliki lahan kopi - tertarik pada budidaya kopi
5.	Pelatihan pasca panen kopi	Diutamakan: <ul style="list-style-type: none"> - pengelola lahan kopi - memiliki lahan kopi - tertarik pada pascapanen kopi - pengelola BUMNag

Pelatihan menengah di Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2017, sementara di Jorong Tandai Bukik Bulek dilaksanakan pada bulan Oktober - November 2017. Hal ini dikarenakan silang sengkabut implementasi program yang terjadi di Jorong Tandai Bukik Bulek. Namun pasca proses membangun kesepahaman dengan para pihak yang berbeda cara pandang bersepakat untuk melanjutkan Sekolah Hijau, maka pelatihan menengah di Jorong Tandai Bukik Bulek, dengan perluasan sasaran partisipan dapat dilaksanakan, meski mundur cukup lama dari rencana awal.

Pelaksanaan pelatihan menengah di Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21 Jadwal Pelatihan Menengah di Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari

No.	Pelatihan	Waktu	Lokasi
1.	Pengorganisasian advokasi regulasi dan anggaran desa untuk PLTS	20 - 21 Mei 2017	Desa Sungai Rambut dan Rawasari
2.	Penyusunan peraturan desa dan advokasi anggaran	22 - 24 Mei 2017	Desa Sungai Rambut Desa Rawasari
3.	Pengelolaan koperasi dan wirausaha hijau	13-14 Juli 2017	Sungai Rambut
		15-16 Juli 2017	Rawasari
4.	Budidaya padi dan kakao	20-21 Juli 2017	Sungai Rambut
		22-23 Juli 2017	Rawasari
5.	Pembuatan pupuk organik	27-28 Juli 2017	Sungai Rambut
		29-30 Juli 2017	Rawasari
6.	Pembuatan briket sekam	3-4 Agustus 2017	Sungai Rambut
		5-6 Agustus 2017	Rawasari
7.	Pelatihan kesadaran gender bagi komunitas pedesaan	22-23 Agustus 2017	Sungai Rambut Rawasari
8.	Penetasan telur dan budidaya unggas	24-25 Agustus 2017	Sungai Rambut
		26-27 Agustus 2017	Rawasari
9.	Pembuatan keripik pisang dan kerupuk ikan	10-11 September 2017	Sungai Rambut Rawasari



Gambar 66 Proses Pelatihan yang Partisipatif dan Implementatif

Sebelum pelatihan menengah dilaksanakan, terlebih dahulu disusun modul⁵ pelatihan sebagai panduan pelaksanaan. Improvisasi metodologi sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaannya, tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Modul-modul pelatihan disusun oleh para tenaga ahli dengan penyelarasan untuk memastikan keselarasan isi modul dengan tujuan pelatihan serta memastikan metodologi & proses pelatihan yang dirancang merupakan pelatihan partisipatif dan implementatif.

⁵ Modul bisa diunduh melalui web konsorsiumkemala.org

Regulasi dan Anggaran Desa untuk Keberlanjutan PLTS

Pelatihan diawali dengan menggali pengalaman peserta tentang berbagai produk hukum desa dengan memperlihatkan beberapa dokumen produk hukum seperti Undang-Undang Desa, PP, Permendagri, Perda, Perdes. Hanya ada satu orang peserta yang mengaku sudah pernah melihat UU Desa, peserta lainnya yang hadir mengaku belum pernah melihat.



Gambar 67 Peserta Pelatihan Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok

Proses berikutnya mendiskusikan tentang produk hukum tersebut, pokok-pokok penting tentang produk hukum dan produk hukum di desa dan hirarki produk hukum dari UU sampai Perdes. Guna memahami produk hukum desa dan teknik penyusunan peraturan desa dengan alat bantu Perdes peserta berkelompok mendiskusikan tentang beberapa hal seperti produk hukum desa, tujuan di susunnya produk hukum, materi muatan, batang tubuh, dll.

Dilanjutkan dengan mengidentifikasi kegiatan di desa dan proses partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut serta

melakukan simulasi Musrenbangdes. Peserta di ajak menginventaris strategi yang efektif dari proses Musrenbangdes dan pengalaman dalam mengusulkan usulan dalam Musrenbangdes yang bisa dilakukan agar partisipasi menguat dan usulan bisa terealisasi. Strategi yang diusulkan peserta adalah agar menguasai data, terlibat aktif dalam proses musyawarah dari tingkat bawah sampai desa, mempunyai perwakilan warga (peserta) yang solid dan menguasai masalah, mempunyai kapasitas yang memadai sehingga bisa mempengaruhi/ dipercaya masyarakat.

Peserta juga melakukan uji coba pada pelatihan ini untuk menyusun peraturan desa seperti Perdes tentang Larangan Mencari Ikan dengan Meracuni Sungai, Perdes tentang Kawasan Merokok, Perdes tentang Menjaga Lingkungan, Perdes tentang BUMDesa.

Pembuatan Pupuk Organik

Pelatihan pembuatan pupuk organik di Desa Sungai Rambut dan Rawasari memanfaatkan bahan baku yang banyak tersedia di dua desa, yaitu eceng gondok, kotoran ternak (sapi/ kambing) dan urin ternak (sapi/ kambing). Eceng gondok banyak ditemui di tepian Sungai Batang Hari serta parit-parit di Desa Sungai Rambut dan Rawasari. Penggunaan pupuk dari kotoran ternak sendiri belum dilakukan pengolahan dengan optimal. Selama ini para petani lebih memilih membeli pupuk karena merasa tidak ada potensi yang bisa dimanfaatkan di desa mereka.

Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah metode kombinasi antara teori dan praktik (40 % berbanding 60%). Pemateri pada kesempatan ini adalah Parli (Desa Sukamaju, Geragai, Tanjabtim). Beliau adalah praktisi lokal yang sudah

berpengalaman dalam proses pembuatan pupuk organik dan sekaligus dalam praktik menggunakan pupuk tersebut untuk pertanian. Selama teori maupun praktik peserta bebas untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi pupuk organik, dari pembuatan pemanfaatan, hingga pemasarannya. Akhir pelatihan, peserta merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh warga dan peserta pelatihan dengan memanfaatkan ilmu yang sudah didapatkan selama pelatihan pembuatan pupuk organik ini. Peserta juga diberikan kemampuan tambahan pada pelatihan ini untuk pengemasan dengan keterampilan sablon untuk karung pupuk yang akan dipasarkan.

Peserta pelatihan adalah masyarakat yang tertarik pada bidang pertanian serta kelompok-kelompok tani. Komposisi peserta juga berasal dari kelompok petani perempuan. Pelatihan di Sungai Rambut diikuti oleh 20 peserta, dengan peserta perempuan sebanyak 3 orang, sementara di Desa Rawasari jumlah peserta adalah 20 orang dengan peserta perempuan sebanyak 8 orang.

Keaktifan dari peserta dalam pelatihan ini cukup tinggi. Saat penyampaian dalam kelas. Awalnya tidak terlalu banyak pertanyaan yang diajukan. Namun setelah melakukan praktik di lapangan, peserta banyak bertanya tanpa sungkan kepada narasumber. Kunci keaktifan peserta di dua desa selama pelatihan adalah pada saat praktik. Suasana pelatihan tanya jawab dan diskusi terasa lebih hidup. Pelatihan pupuk ini didesain agar peserta dapat melakukan perencanaan dari awal sampai pengemasan di akhir pelatihan.

Proses pembuatan sampai pengemasan membutuhkan waktu selama tiga minggu. Hal tersebut merupakan salah satu rencana

tindak lanjut yang menjadi sasaran pelatihan. Pasca pelatihan peserta diberikan tugas untuk melakukan proses pengecekan, pengadukan, sampai pada pengemasan. Proses tersebut selalu dilaporkan menggunakan dokumentasi kamera handphone kemudian diunggah di grup whatsapp Sekolah Hijau. Hal tersebut akan menjadi laporan dan tindakan nyata bahwa pasca pelatihan para peserta tetap melanjutkan diskusi dan menjalankan rencana tindak lanjut. Catatan lain, pembuatan pupuk tahap kedua yang diinisiasi oleh warga masing-masing desa.

Tambahan pelatihan untuk kedua desa demi mendukung pelatihan pupuk organik adalah pelatihan sablon karung plastik. Hal ini diberikan untuk mendukung pengemasan produk nantinya. Keterampilan ini diberikan agar peserta terampil menyablon yang dapat berguna dalam pengemasan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil pupuk organik nantinya. Selain itu dampak yang lain adalah produk lain semisal makanan, briket dan hasil pertanian lainnya bisa juga dilakukan hal yang sama, yaitu pembuatan pengemasan dengan peralatan, dan keterampilan yang sudah diperoleh.

Sebagian lahan di Desa Sungai Rambut dan Rawasari merupakan lahan padi, bahkan di Rawasari luas lahan padi lebih dari 50 persen wilayah desa. Umumnya warga memanen padi sekali dalam setahun, namun beberapa warga di Rawasari dapat memanen sebanyak dua kali. Setiap kali panen, beras yang dihasilkan disimpan untuk konsumsi selama enam bulan ke depan. Kadang-kadang simpanan beras ini masih kurang, sehingga mereka harus membeli beras di luar desa. Konsorsium melihat terdapat potensi yang dapat dikembangkan selain hasil

padinya yakni pemanfaatan sekam padi yang jumlahnya cukup banyak. Untuk itu, pelatihan pembuatan briket padi dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan sekam yang belum dimanfaatkan.



Gambar 67 Pelatihan Pembuatan Briket Sekam Padi

Pelatihan di Desa Sungai Rambut dilakukan pada tanggal 3-4 Agustus 2017 dan di Desa Rawasari pada tanggal 5-6 Agustus 2017. Pelatihan disampaikan oleh Andreas W Kristianto dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Metode pelatihan yang digunakan adalah kombinasi antara teori di kelas dan praktik lapangan. Hari pertama, narasumber menjelaskan pemanfaatan sekam padi. Beberapa video ditampilkan agar peserta lebih mudah memahami proses penyampaian materi. Siang hari, peserta langsung diminta untuk praktik pembuatan briket. Peserta pelatihan yang didominasi perempuan cukup aktif dalam mempraktikkan pembuatan briket. Menurut mereka,

penggunaan briket dapat mengurangi biaya membeli LPG untuk memasak.

Hari kedua, materi tambahan berupa penyaringan air dengan menggunakan arang/ briket disampaikan. Selain itu, narasumber menjelaskan pula kesulitan dan perbedaan briket yang terbuat dari sekam, batok kelapa dan bahan-bahan yang lain. Seperti halnya pada hari pertama, di hari kedua peserta juga langsung praktik memasak menggunakan kompor briket yang telah disediakan oleh Konsorsium.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari pelatihan ini adalah peserta pelatihan dapat mencoba sendiri proses pembuatan briket dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Briket yang telah dibuat di Desa Sungai Rambut akan digunakan untuk memasak saat Idul Adha, dan hal ini sudah dilaksanakan. Peserta pelatihan telah membuat briket sekam padi sendiri pada Bulan Agustus.

Pelatihan Penetasan Telur dan Budidaya Unggas (Ayam/Itik)

Tanggal 24-25 Agustus 2017 dilakukan pelatihan penetasan telur dan budidaya ayam di Desa Sungai Rambut. Pelatihan dilakukan selama dua hari. Hari pertama, Irawan Eko Prabowo dari Pusat Studi Energi UGM mulai memasang mesin penetas telur menggunakan PLTS serta menjelaskan kepada peserta cara penggunaannya. Sementara di hari kedua, Dimas Deworo Puruhito dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM menjelaskan teori tentang penetasan telur, peneropongan telur serta bagaimana mengkondisikan telur ayam agar menetas dengan baik di mesin tetas. Peserta yang mayoritas peternak ayam, kelompok tani serta kelompok tani perempuan cukup antusias mengikuti pelatihan.

Pelatihan di Desa Rawasari dilakukan pada tanggal 26-27 Agustus 2017. Peserta didominasi perempuan. Tema yang dibawakan kali ini adalah penetasan telur itik dan budidayanya. Saat pelatihan, peserta diminta untuk menyiapkan telur yang telah dibuahi. Praktik uji coba dilakukan. Telur dimasukkan ke mesin tetas selama 21 hari dengan dikondisikan pada temperature yang telah ditentukan. Penanggungjawab diminta untuk mencatat temperature dan kelembapan setiap hari pada jam 8 pagi dan 8 malam.



Gambar 68 Fasilitator Menjelaskan Cara Penggunaan Mesin Penetas Telur dengan Sumber Listrik PLTS

Sampai dengan bulan September 2017, telur ayam di Desa Sungai Rambut diperlakukan seperti yang diajarkan dalam pelatihan. Penanggungjawab juga dengan telaten menulis kondisi mesin tetas setiap hari pada jam 8 pagi dan 8 malam. Akan tetapi setelah 21 hari, telur ayam belum juga menetas. Padahal kondisi telur telah gelap yang menunjukkan embrio telah terbentuk. Melihat hal ini, alat mesin tetas perlu diperiksa kembali. Komponen dalam satu paket mesin tetas telur tenaga

surya di Desa Rawasari ada yang rusak. Hal ini dikarenakan adanya pengecekan dan *bypass* kabel dari *solar charge controller* ke baterai yang dilakukan oleh penanggungjawab. Baterai yang seharusnya dapat dikontrol penggunaannya menjadi tidak terkontrol. Selain itu, pemasangan arus plus dan minus baterai setelah alat dibuka tidak sesuai, sehingga *solar charge controller* terbakar. Hal ini terjadi sekitar seminggu setelah pelatihan. Inisiatif dilakukan salah seorang kader untuk membuka alat karena alat tidak berfungsi optimal, padahal kemungkinan hanya karena cuaca yang sedang hujan dan mendung. Persoalan di atas juga memberikan pelajaran bahwa pengetahuan dan ketrampilan pemeliharaan dan pemahaman akan peralatan PLTS merupakan hal penting yang harus diketahui warga.

Pelatihan Budidaya Padi dan Kakao

Usaha peningkatan produktifitas petani menjadi salah satu tujuan pelatihan Sekolah Hijau. Pelatihan budidaya padi dan kakao bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam kegiatan olah tani, terutama pertanian padi dan kakao, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktifitas petani baik dalam hal efisiensi dan efektifitas proses produksi maupun peningkatan volume panen. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juli 2017 di Desa Sungai Rambut dan tanggal 22-23 Juli 2017 di Desa Rawasari. Kedua desa berada di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Jumlah peserta pelatihan di Desa Sungai Rambut ada 21 peserta (14 laki-laki, 7 perempuan), Desa Rawasari ada 21 peserta (13 laki-laki, 8 perempuan), di mana mayoritas adalah anggota kelompok tani maupun keluarga petani setempat.

Kegiatan pelatihan diawali dengan pemetaan masalah budidaya padi, dan kakao yang dihadapi oleh masyarakat. Peserta bercerita tentang pengalaman mereka menanam padi dan kakao di daerah pasang surut berikut permasalahan dan penyelesaian masalah yang telah mereka lakukan selama ini. Hasil penggalian informasi peserta di kedua desa diketahui bahwa selama ini mereka telah lama menanam (hampir 40 tahun) berbagai varietas padi lokal dengan berbagai alasan dan pertimbangan.



Gambar 69 Pelatihan Budidaya Padi dan Kakao

Menurut peserta, beberapa varietas padi lokal telah hilang tidak berbekas, akibat belum adanya langkah-langkah konservasi benih lokal dan seiring derasnya usaha berbagai pihak memasukkan benih "unggul" ke desa-desa tersebut. Padahal setelah dilakukan penggalian masalah, para peserta mulai menyadari, bahwa sesungguhnya varietas-varietas lokal yang telah lama mereka usahakan, selain ada kekurangannya, ternyata memiliki banyak kelebihan yaitu terutama dalam hal kemampuan adaptasi yang lebih tinggi dan telah teruji sejak

lama dibanding padi "unggul" dari luar Desa Rawasari dan Sungai Rambut. Saat ini masih terdapat sekitar 16 varietas padi lokal yang ada di kedua desa tersebut, yakni: Lembu Sereh, Pontianak, Semut, Botol, Sanapi, Temon, Ramos, Ringgit, Muaro, Bemban, Mentik, Welut, Melati, Karya, PN Merah, PN putih. Saat ini dari keenambelas varietas padi lokal tersebut varietas PN Merah, PN Putih dan Ringgit sudah tidak ditemukan lagi.

Berdasarkan pengalaman tersebut para peserta menyadari perlunya memelihara dan melestarikan keragaman benih lokal, dimulai dengan cara yang sederhana dahulu, seperti menyimpan hasil panen dari varietas yang dimaksud dengan memilih dari rumpun padi yang sehat, dijemur sampai dengan kadar air tertentu, dan dikemas serta disimpan dengan baik. Masuknya benih unggul dari luar, belum tentu adaptif dengan lingkungan yang ada. Varietas padi unggul, seperti IR 64 dan Ciherang, yang dikenalkan meski berumur pendek namun tidak tahan terhadap genangan, serta selain itu tekstur nasinya terlalu pulen/ lengket bagi masyarakat setempat.

Peserta juga menanyakan penggunaan obat-obatan pemberantas hama dan penyakit tanaman. Hampir semua peserta pelatihan menyatakan bahwa alasan mereka membeli pestisida adalah untuk membunuh hama tanaman dengan dosis yang biasa mereka gunakan, yaitu satu gelas "ale ale" (merk minuman) obat dicampur dengan 1 tangki (15 liter) air, apapun jenis pestidanya. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi konsumen hasil pertanian serta tidak ramah lingkungan. Sales produk pestisida sering berkeliling ke desa-desa untuk menjual produk tanpa bisa dipertanggungjawabkan kebenaran produk dan hasilnya. Oleh karena itu pula, pada kesempatan pelatihan ini juga

dipraktikkan cara membaca label pada kemasan pestisida dan metode aplikasi pestisida oleh peserta. Penggunaan pestisida harus mencakup 5 tepat, yakni tepat sasaran, tepat jenis, tepat waktu, tepat takaran dan tepat aplikasi. Petani di kedua desa juga sering mengoplos pestisida secara asal-asalan, hal mana justru malah dapat membuat penggunaan pestisida semakin tidak efektif dan efisien.

Khusus di Desa Sungai Rambut, karena seluruh peserta belum mengetahui cara menyeleksi benih sebelum disemai dengan cara sederhana, maka pelatihan seleksi benih menggunakan perendaman dalam wadah berisi air diberikan kepada mereka. Benih yang mengambang dipisahkan dari benih yang tenggelam, selanjutnya benih yang tenggelam digunakan untuk persemaian.

Untuk pelatihan budidaya kakao, peserta diajak melakukan pengamatan kondisi tanaman kakao di kebun yang ada dan melakukan praktik perawatan tanaman dan perbanyak tanaman secara vegetatif (sambung pucuk, sambung samping dan okulasi). Secara umum tanaman kakao di Desa Sungai Rambut masih belum ada perawatan dari pemiliknya, tanaman dibiarkan tumbuh tinggi tanpa pangkasan bentuk, sedangkan di Desa Rawasari hal ini sudah dilakukan, sehingga pembentukan tajuknya lebih baik. Tanaman kakao di Desa Sungai Rambut tidak dilakukan pangkas bentuk, dari batang utama/pokok dibiarkan tumbuh 5-6 cabang primer, pangkasan tunas air dan cabang non produktif belum dilakukan sehingga tanaman terkesan rimbun oleh daun sedangkan bunga/buah sedikit. Sedangkan tanaman kakao di Desa Rawasari telah dilakukan pangkasan bentuk, sehingga pohon tidak terkesan rimbun, sinar

matahari dapat terpapar merata, sirkulasi udara lancar serta kelembaban tidak terlalu tinggi. Hal ini akan melancarkan proses fotosintesa yang selanjutnya akan memacu tumbuhnya bunga yang kelak akan menjadi buah kakao. Sama halnya di Desa Sungai Rambut, petani kakao di Desa Rawasari juga belum melakukan pangkasan tunas air, serta cabang non produktif. Tunas air yang dibiarkan dalam waktu lama akan mengurangi produksi kakao, sehingga harus dipangkas.

Selanjutnya dilakukan pelatihan perbanyakan vegetatif (sambung pucuk, sambung samping dan okulasi). Terlebih dahulu peserta diajak untuk memahami perbanyakan tanaman kakao secara vegetatif dan fungsinya. Dilanjutkan dengan pemilihan tanaman yang akan disambung/ diokulasi, serta memilih bahan sambungan (entres). Ada dua peserta pelatihan di Desa Rawasari yang sebelas tahun lalu pernah mengikuti pelatihan perbanyakan vegetatif peningkatan produksi kakao, yakni Bapak Jumadi dan Ibu Euis. Adanya beberapa orang yang pernah mendapat pelatihan inilah yang memungkinkan sentuhan teknologi budidaya kakao telah mewarnai di Desa Rawasari, seperti telah dilakukannya pangkasan bentuk.

Selain kurangnya perawatan kebun kakao, petani juga belum memberikan naungan di kebun kakaonya, naungan dapat berupa pohon pisang, pohon kelapa ataupun pinang yang tumbuh bagus di kedua desa tersebut. Tanaman naungan mutlak diberikan mengingat tanaman kakao merupakan tanaman yang tidak tahan panas yang membuat batangnya mengering. Jika batang mengering dan tidak dilakukan pangkasan, maka bunga dan buah tidak akan muncul di batang tersebut.

Warga baik di Sungai Rambut maupun di Rawasari peserta bersepakat akan melakukan kegiatan pelestarian benih padi varietas lokal yang sudah terbukti adaptif di lingkungan pasang surut. Hal ini dapat dijadikan embrio dari terwujudnya bank benih desa, yang akan mampu menjaga keragaman hayati, khususnya padi lokal dari desa masing-masing.

Pelatihan Pengolahan Keripik Pisang dan Kerupuk Ikan

Dua desa di lokasi program ini memiliki kesamaan potensi sumber daya ikan dan pisang yang cukup melimpah. Pengolahan potensi pertanian dan perikanan menjadi keripik dan kerupuk diharapkan mampu meningkatkan harga jual untuk meningkatkan pendapatan usaha rumah tangga yang telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari.



Gambar 70 Pelatihan Pembuatan Produk Pangan Hasil Olahan Pisang dan Ikan

Pelatihan dilakukan selama dua hari, yaitu pada tanggal 10 dan 11 September 2017. Pemateri kerupuk ikan adalah Ibu Aminah, pengusaha kerupuk ikan gabus dari Kota Jambi, sementara narasumber untuk keripik pisang adalah Ibu Nurdiana dari Desa Pematang Rahim, Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur. Peserta pelatihan sangat antusias dalam melihat dan mempraktikkan proses pengolahan pisang dan ikan. Peralatan pelatihan yang disediakan Konsorsium KEMALA bermanfaat dalam pelatihan ini. Sementara bahan baku pelatihan disediakan secara swadaya oleh peserta pelatihan. Pelatihan diikuti oleh sekitar 30 ibu rumah tangga di setiap desa, baik yang sudah memiliki usaha rumah tangga mengolah pisang dan ikan maupun ibu rumah tangga yang nantinya akan mengelola usaha ini di bawah payung unit usaha kelompok wanita di setiap desa.

Kreasi yang dilakukan pada dua desa ini berbeda pada pengolahan pisang. Jika di Sungai Rambut, keripik pisang yang diolah terdapat empat rasa yang divariasikan, yaitu original, asin, manis dan balado; di Rawasari membuat keripik pisang dengan dua rasa, asin dan manis. Tidak hanya mengajarkan cara membuat keripik pisang, pelatih juga mengajarkan cara membuat brownies dan bolu pisang di kedua desa. Selain itu, beliau juga bercerita tentang bagaimana awal mendirikan usaha hingga memperluas usahanya sampai saat ini.

Untuk pengolahan kerupuk ikan, bahan baku yang digunakan saat pelatihan adalah ikan gabus. Namun Bu Aminah menegaskan bahwa ikan apapun bisa digunakan, tetapi semua harus ada takarannya agar rasa tidak berubah. Ibu Aminah mengajarkan beberapa bentuk kerupuk, mulai dari bentuk biasa yang dipotong bulat, bentuk kipas dan keping. Kerupuk juga

diberi warna merah dan hijau yang cukup menarik pada bentuk kipas dan keping. Adanya variasi produk diharapkan dapat meningkatkan produksi kerupuk ikan dengan bahan baku sama.

Pengemasan produk juga diajarkan pada pelatihan ini. Selama ini, ibu rumah tangga di kedua desa hanya menjual keripik pisang atau kerupuk ikan di dalam desa dengan kemasan plastik seadanya dan tidak ditimbang. Pendapatan, keuntungan dan kerugian tidak pernah dihitung. Maka pada pelatihan ini, narasumber menjelaskan bagaimana menghitung keuntungan dari penjualan produk.

Materi Gender dan Inklusi Sosial



Gambar 71 Pelatihan Gender dan Inklusi Sosial

Tanggal 22-23 Agustus, dilaksanakan kegiatan pelatihan gender dengan tema “Gender, Agama dan Budaya”. Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk dua desa secara bersamaan. Pelatihan dihadiri oleh sekitar 26 peserta perempuan dan 12 peserta laki-laki, diantaranya terdapat 4 kelompok rentan dari dua desa.

Pelatihan berlangsung selama dua hari menggunakan metode *brainstorming*, eksplorasi partisipatif yang sangat efektif untuk mengajak semua peserta termasuk perempuan dan kelompok rentan untuk terlibat aktif bersuara dan menyatakan pendapatnya terkait soal dinamika gender di desa

Beberapa isu ketimpangan gender dan terjadinya eksklusi sosial dalam pelatihan yang muncul antara lain:

- Persoalan domestik merupakan salah satu masalah yang sering muncul di dalam forum. Perempuan dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan domestik. Sementara laki-laki dianggap kuat karena sebagai subyek yang mencari nafkah keluarga. Pembagian kerja tersebut berlangsung secara ketat dan dianggap sebagai sebuah peran yang tidak bisa dipertukarkan. Akibatnya, kebiasaan laki-laki dan perempuan untuk saling membantu dalam pekerjaan domestik masih sangat minim. Sementara semua pekerjaan rumah tangga yang dibebankan sepenuhnya kepada perempuan tidak dibantu dengan peralatan rumah tangga misalnya rice cooker, mesin cuci karena belum tersedia aliran listrik yang memadai.
- Beban ganda (*double burden*) disandang perempuan juga menjadi hambatan, selain mengurus rumah tangga juga bekerja di sawah atau ladang. Waktu diladang pagi hingga sore hari. Kondisi tersebut tidak memungkinkan perempuan menghadiri forum-forum warga desa yang biasanya dilakukan pada malam hari. Soal tafsir teks al-Quran dan pandangan keliru soal agama juga turut mempengaruhi relasi laki-laki dan perempuan. Peserta

laki-laki menganggap bahwa perempuan menjadi pemimpin akan mendatangkan malapetaka dan masih dianggap sebuah hal yang tidak pantas.

- Sementara program pembangunan yang menyangkut bantuan modal, pembangunan infrastruktur desa belum dirasakan manfaatnya bagi perempuan dan kelompok rentan. Keterlibatan perempuan dalam PKK, arisan dan koperasi lebih cenderung pada kegiatan seremonial saja, sehingga keberadaan organisasi perempuan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan strategis perempuan baik di Desa Rawasari maupun Sungai Rambut. Sementara bantuan didesa seringkali tidak tepat sasaran, karena pemerintah desa tidak memiliki data tentang kelompok rentan didesa.
- Relasi pemahaman dalam perspektif agama dengan gender juga menjadi materi bahasan. Pemahaman yang keliru tentang tafsir al Quran soal relasi laki-laki dan perempuan dalam Agama Islam juga turut mempengaruhi relasi laki-laki dan perempuan. Peserta laki-laki menganggap bahwa perempuan menjadi pemimpin akan mendatangkan malapetaka dan masih dianggap sebuah hal yang tidak pantas. Pelurusan atas pemahaman ini masih belum tuntas dipahami, terutama bagi peserta laki-laki. Masih butuh waktu dan diskusi yang panjang mengenai hal ini, karena pemahaman ini sudah menjadi *stereotip* di masyarakat, terutama warga di pedesaan seperti lokasi program.

Setelah memetakan akar penyebab lahirnya ketimpangan gender, kemudian peserta belajar memahami bagaimana akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan kelompok

rentan dalam pembangunan dan program PLTS. Empat indikator tersebut sekaligus menjadi panduan bagi fasilitator untuk memonitoring secara partisipatif rencana tindak lanjut kegiatan. Tindak lanjut yang diputuskan adalah semua peserta pelatihan baik laki-laki dan perempuan berperan aktif untuk mengurangi ketimpangan gender dan terjadinya eksklusi bagi kelompok rentan, baik dalam kegiatan program maupun non program.

Secara umum proses pelatihan menengah yang dilakukan di Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari memperlihatkan antusiasme peserta dalam menerima materi maupun praktik. Misalnya pada pelatihan pembuatan pupuk organik, antusiasme warga nampak dari peserta Sungai Rambut yang sudah lanjut usia dan tidak bisa baca tulis karena penglihatan yang terganggu. Kerjasama juga ditunjukkan bagaimana peserta lain membantu menuliskan jawaban dalam *pre test-postes* maupun evaluasi. Selain itu agar tidak kehilangan kesempatan mengikuti pelatihan, sekaligus dapat tetap menemani anaknya, beberapa peserta perempuan baik di Sungai Rambut maupun di Rawasari membawa serta anak mereka dan tetap mengikuti pelatihan selama dua hari. Begitupun karena takut kehilangan peluang terlibat dalam pelatihan, beberapa peserta yang tidak bisa mengikuti pelatihan secara penuh karena ada kegiatan lain di desa, mewakilkan kehadirannya kepada isteri untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Manajemen dan Perencanaan Usaha

Tanggal 13-14 Juli di Desa Sungai Rambut dan 15-16 Juli di Desa Rawasari diselenggarakan pelatihan bertajuk "Kewirausahaan, Perencanaan Usaha dan Manajemen Usaha Koperasi/BUMDes." Materi pelatihan yang disampaikan adalah: (1) Dasar-Dasar Kewirausahaan; (2) Analisis Perencanaan Usaha Menggunakan Bisnis Kanvas Model; (3) Struktur Organisasi untuk Manajemen Usaha; (4) Pembentukan Koperasi dan BUMDes. Pelatihan dilaksanakan dengan metode "*action training*" berupa presentasi materi, diskusi dan presentasi kelompok, sharing, permainan, serta penyusunan rencana tindak lanjut dan penunjukan penanggungjawab kelompok.

Adapun khusus di Desa Rawasari, telah ditetapkan pembentukan BUMDes berdasarkan Peraturan Kepala Desa No. 04/2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, serta SK Kepala Desa 12/DS-RS/6/2017 tentang Pengangkatan Pengurus BUMDes Desa Rawasari. Sedangkan di Desa Sungai Rambut, hingga saat ini pembentukan BUMDes masih dalam proses rintisan dan pembicaraan antara perangkat desa dengan masyarakat, sehingga pembentukan lembaga usaha ekonomi bersama yang diinginkan warga dirintis melalui pembentukan koperasi di mana diharapkan nantinya dapat menjadi embrio berkembangnya BUMDes di Desa Sungai Rambut.

Kepada peserta pelatihan, disampaikan nilai-nilai serta kunci sukses untuk menjadi seorang wirausaha. Tidak hanya menjadi seorang pengusaha, maka untuk menjadi seorang wirausaha haruslah pandai mencari peluang usaha, mengembangkan organisasi dan strategi perencanaan usaha, serta berani mengambil resiko ataupun tantangan yang akan dihadapi di

depan. Seorang wirausaha juga harus memiliki keteguhan dan konsistensi dalam menjalankan usaha tanpa khawatir menghadapi ujian dan kegagalan yang akan ditemui di tengah perjalanan.

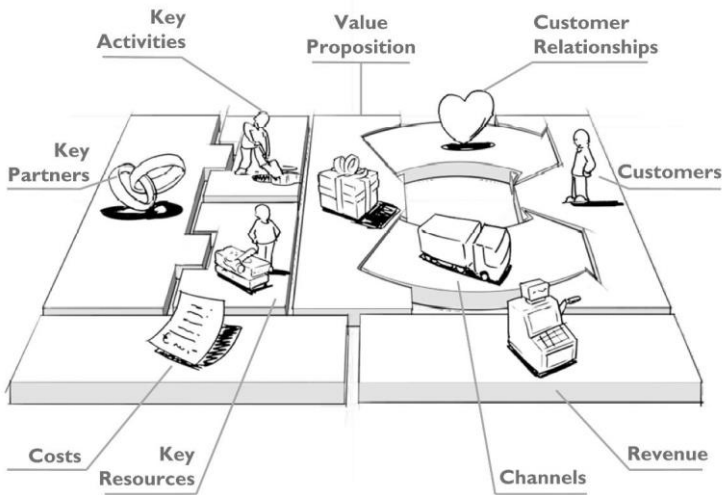
Selain hal di atas, kepada peserta, juga disampaikan nilai-nilai dalam menjalankan bisnis/ usaha bersama yang dilakukan dengan prinsip-prinsip koperasi, yaitu (1) Keanggotaan sukarela dan terbuka; (2) Pengendalian oleh anggota secara demokratis; (3) Partisipasi ekonomi anggota; (4) Otonomi dan kebebasan; (5) Pendidikan, pelatihan dan informasi; (6) Kerjasama diantara koperasi; (7) Kepedulian terhadap komunitas. Selain itu koperasi juga harus bercirikan kepada tiga fondasi berikut ini yaitu (1) *Co-ownership* (kepemilikan bersama); (2) *Co-determinant* (pengambilan keputusan bersama); (3) *Co-responsibility* (tanggung jawab bersama).



Gambar 72 Fasilitator mengajak peserta melakukan analisis kelayakan usaha

Selanjutnya peserta diajak untuk melakukan analisis dan perhitungan kelayakan usaha sebelum menjalankan usahanya. Analisis kelayakan usaha dilakukan dengan metode “bisnis model canvas” mempertimbangkan aspek-aspek berikut: (1)

produk, (2) target pasar/konsumen, (3) distribusi dan logistik, (4) strategi pemasaran, (5) mitra, (6) kegiatan utama, (7) ketersediaan sumber daya (sumber daya manusia, bahan baku, peralatan), (8) rencana pengeluaran, (9) rencana pendapatan. Analisis untung rugi dilakukan melalui pembuatan rencana detail pengeluaran dan pendapatan selama periode tertentu. Selain itu peserta juga didorong melakukan analisis SWOT terhadap usaha yang akan dilakukan, yaitu memperhitungkan kekuatan dari usaha yang akan dilakukan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman yang bisa menggagalkan usaha (*thread*).



Gambar 73 Bisnis Model Canvas

Berikut ini beberapa rencana tindak lanjut yang disusun usai acara pelatihan:

- (1) Disepakati hal-hal berikut di Desa Sungai Rambut: akan dikembangkan 4 unit lembaga usaha di desa, yaitu: (a) unit usaha produksi keripik pisang dan kerupuk ikan,

penanggungjawab Ibu Eko; (b) unit usaha produksi penetasan dan budi daya telur ayam, pupuk organik dan briket sekam, penanggungjawab Bapak Tumijo; (c) unit usaha produksi air bersih/ minum, penanggungjawab Al Amin; (d) unit usaha pengelolaan PLTS, penanggungjawab Arifin. Selain itu dibentuk pokja pembentukan koperasi yang bertugas mempersiapkan tahapan-tahapan pembentukan koperasi (RAT, AD/ART, dll), dipimpin oleh Safriadi, Eka Triani dan Irwansyah.

- (2) Disepakati pula dikembangkan 4 unit usaha di Desa Rawasari, yaitu: (a) unit usaha keripik pisang dan kerupuk ikan, penanggungjawab Ibu Parini; (b) unit usaha produksi penetasan dan budi daya telur bebek, penanggungjawab Bapak Dadang; (c) unit usaha produksi air bersih, penanggungjawab Trisna Mulyana; (d) unit usaha pengelolaan PLTS, penanggungjawab Dedi. Pengurus BUMDes yang telah ditetapkan (Ketua: Purwaningsih, Sekretaris: Erni, Bendahara: Hermansyah) akan bertugas mengkoordinir dan memantau perkembangan keempat usaha yang dijalankan tersebut. Manajemen KEMALA akan juga melakukan monitoring perkembangan usaha yang dijalankan serta evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Budidaya Kopi

Para petani kopi robusta di Jorong Tandai Bukik Bulek, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kabupaten Solok Selatan selama ini tidak pernah tahu bahwa kualitas kopi mereka adalah salah satu yang terbaik.

Tanggal 30-31 Oktober yang lalu, para petani di Jorong Tandai Bukik Bulek mendapatkan ilmu baru tentang budidaya kopi dari Solok Radjo. Narasumber dan peserta berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang cara pembibitan kopi yang baik, pemupukan dan pemangkasan yang benar serta pemilihan buah kopi yang akan dipanen. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama di salah satu kebun masyarakat.



Gambar 74 Pelatihan Pemangkasan Pohon Kopi dari Koperasi Solok Rajo

Secara mengejutkan, setelah dilakukan pengecekan kadar glukosa pada buah kopi di Jorong Tandai Bukik Bulek oleh Solok Rajo, diketahui bahwa kadar glukosa pada kopi robusta (yang biasa masyarakat sebut sebagai kopi kampung) memiliki kadar glukosa yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari kadar glukosa pada kopi arabika. Selama dua hari, para petani dengan penuh semangat menceritakan pengalaman dan kendala yang dihadapi selama budidaya kopi. Para petani akhirnya dapat tersenyum puas setelah mendengar jawaban serta tips dan trik dalam budidaya kopi yang disampaikan oleh narasumber. Harapannya tentu semangat ini masih terus bertahan dan bahkan bertambah agar para petani kopi di Jorong Tandai Bukik Bulek ini dapat hidup dengan sejahtera dari tanaman kopi mereka sendiri.

Antara Motif Ekonomi dan Kepentingan Bersama #1

Jorong Tandai Bukit Bulek mempunyai wilayah yang didominasi oleh topografi bergelombang dan dengan kondisi agroklimat yang sangat sesuai untuk pengusahaan tanaman berbukit perkebunan dan tanaman pangan. Tanahnya subur secara alami dan umumnya petani masih mengandalkan pada alam dalam bercocok tanam. Petani sudah mempunyai orientasi ekonomi dalam memilih tanaman yang diusahakan. Jagung hibrida, kelapa sawit, kopi unggul lokal dan beberapa tanaman pangan (terutama untuk kebutuhan keluarga) menjadi andalan penduduk setempat.

Orientasi petani dalam mengusahakan jagung, kelapa sawit, dan kopi tersebut sudah sesuai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Umumnya hasilnya dijual dalam bentuk primer, yaitu jagung pipilan, kopi beras, dan tandan buah kelapa sawit. Keuntungan usaha tani sangat tergantung pada pemasaran yang umumnya menjadi kendala utama dalam pembangunan pertanian di Indonesia, termasuk di Jorong Tandai. Ketidakberdayaan petani dalam menentukan harga sudah menjadi fenomena umum, petani tidak mempunyai posisi tawar dalam menentukan harga komoditi primer usahatannya.

Bersambung

Antara Motif Ekonomi dan Kepentingan Bersama #2

Ketergantungan petani sangat besar kepada pembeli (tengkulak) di pihak lain. Isolasi daerah Jorong Tandai akibat prasarana transportasi (jalan) yang buruk menyebabkan petani tidak mempunyai akses yang memadai untuk memperdagangkan hasil usaha taninya. Kondisi ini menjadi peluang bagi tengkulak. Segelintir elit lokal telah bermetamorfosa menjadi tengkulak yang berperilaku membatasi akses petani terhadap pasar atau jaringan pemasaran yang bisa memperpendek rantai pemasarannya. Keuntungan ekonomi ini berusaha dipertahankan dengan perilaku politis yang berusaha membatasi atau mencegah upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan konflik yang memanfaatkan lembaga adat setempat. Akibatnya masyarakat tetap tinggal dalam ketergantungan yang diterima dengan sikap pasrah.

Terobosan staregis diperlukan untuk memutus rantai ketergantungan, dimulai dengan membangun kesadaran komunal yang diinisiasi oleh tokoh yang tergabung dalam Kelompok Tujuh. Kelompok ini memelopori usaha bersama berbasis pertanian yang secara bertahap melibatkan anggota masyarakat. Upaya untuk membangun kesadaran bersama ini melalui teladan yang berupaya dibangun secara tulus untuk kepentingan bersama. Dimulai dari pengolahan buah kopi mempergunakan mesin milik Pak Joko yang terkadang membeli biji kopinya. Memang akses terhadap pedagang (eksportir) kopi telah dibangun tanpa melalui tengkulak lokal dan ini telah dimanfaatkan oleh petani lokal namun terindikasi adanya usaha untuk memutus jaringan pemasaran yang telah terinisiasi tersebut. Namun kesadaran bersama yang telah terbangun niscaya mampu menyadarkan tengkulak lokal untuk secara bersama dan smart membangun Jorong Tandai untuk lebih baik dan membawa kemanfaatan bagi anggota masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh KEMALA. (Herry Wirianta)

Pembuatan Kripik Jengkol

Rangkaian pelatihan menengah Sekolah Hijau di Jorong Tandai Bukik Bulek, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kabupaten Solok Selatan diakhiri dengan pelatihan pembuatan keripik jengkol dengan narasumber dari UMKM Bhayangkari.

Pemilihan keripik jengkol sebagai produk olahan dari Jorong Tandai Bukik Bulek didasarkan pada melimpahnya jengkol di jorong ini. Selama ini, para petani hanya menjual jengkol dalam bentuk mentah dengan harga per karung (sekitar 20 kg) dengan harga Rp 200.000 - Rp 250.000 kepada pembeli yang datang ke

orong. Adanya proses pengolahan jengkol menjadi keripik diharapkan dapat meningkatkan harga jual produk.



Gambar 75 Pelatihan Pembuatan Kripik Jengkol untuk Ibu-Ibu PKK Jorong Tandai Bukik Bulek oleh UMKM Bhayangkari Solok Selatan

Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2017 di Sekretariat KEMALA, Solok Selatan ini diikuti oleh 28 peserta perempuan dari Jorong Tandai Bukik Bulek. Peserta tampak antusias mendengarkan cerita pendirian UMKM dan mengamati dengan baik proses pembuatan keripik jengkol dari narasumber. Setelah diberikan contoh cara pembuatannya, peserta langsung praktik membuat adonan keripik hingga pengemasannya.

Akhir kegiatan pelatihan, peserta sepakat untuk membuat unit usaha keripik jengkol dengan peralatan yang telah diberikan oleh Konsorsium KEMALA. Unit usaha ini masih akan mendapatkan pendampingan untuk proses pendaftaran PIRT produk keripik jengkol Jorong Tandai Bukik Bulek.

Sampai saat ini usaha keripik jengkol belum dapat dilaksanakan kaena terkendala bahan baku yang belum tersedia. Saat ini

warga belum panen jengkol karena memang belum ada jengkol matang yang siap dipetik. Setelah musim panen jengkol tiba, ibu-ibu akan memulai usaha membuat kripik jengkol sebagai salah satu upaya peningkatan sumber pendapatan.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan bagian yang tidak kalah penting untuk memastikan pengetahuan yang diperoleh dapat diimplementasikan. Berikut adalah RTL Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari.

Tabel 22 Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa dan Advokasi Anggaran

Pelatihan	Penyusunan Peraturan Desa dan Advokasi Anggaran	
	Desa	Sungai Rambut
Deskripsi RTL	Penyusunan Peraturan Desa terkait Koperasi di Desa Sungai Rambut oleh peserta. 1. Menyusun rancangan perdes, 2. Melakukan advokasi kepada masyarakat dan kepala desa serta diberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober 2017 untuk 3. Pengesahan dan penandatanganan perdes dimaksud oleh kepala desa.	Penyusunan Peraturan Desa BUMDes Rawasari. 1. Menyusun rancangan perdes, 2. Melakukan advokasi kepada masyarakat dan kepala desa serta diberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober 2017 untuk 3. Pengesahan dan penandatanganan perdes dimaksud oleh kepala desa
Indikator Monitoring	Jumlah Perdes (Regulasi Desa) yang ditetapkan dan mencantumkan materi terkait tujuan proyek (PLTS, pengarus-utamaan gender, Sekolah	Jumlah Perdes (Regulasi Desa) yang ditetapkan dan mencantumkan materi terkait tujuan proyek (PLTS, pengarus-utamaan gender,

Pelatihan	Penyusunan Peraturan Desa dan Advokasi Anggaran	
	Desa	Sungai Rambut
	Hijau, usaha ekonomi produktif)	Sekolah Hijau, usaha ekonomi produktif)
Target Akhir	1 peraturan desa	1 peraturan desa
Tahapan Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> • Jul-2017: penyusunan draft; • Ags-2017: advokasi ke kepala desa; • Sep-2017: Sosialisasi kepada masyarakat; • Okt-2017: Penetapan Perdes 	<ul style="list-style-type: none"> • Jul-2017: penyusunan draft; • Ags-2017: advokasi ke kepala desa; • Sep-2017: Sosialisasi kepada masyarakat; • Okt-2017: Penetapan Perdes

RTL pelatihan ini dilakukan dengan segera di Desa Rasawari. Peraturan desa tentang pembentukan BUMDes, telah disusun dan disahkan. Proses penyusunan Perdes BUMDes lebih lanjut terdapat pada sub bab pembentukan kelembagaan. Sementara di Sungai Rambut Koperasi yang menjadi pilihan telah memasuki tahapan pengurusan legalitas. Lebih jauh tentang BUMDes dan koperasi ini terdapat pada BAB IX.

Tabel 23 Kewirausahaan, Perencanaan Usaha dan Manajemen Koperasi/BUMDes

Desa	Kewirausahaan, Perencanaan Usaha dan Manajemen Koperasi/BUMDes	
	Sungai Rambut	Rawasari
Deskripsi RTL	Sungai Rambut: pembentukan 4 unit usaha, yaitu: (a) unit usaha produksi keripik pisang dan kerupuk ikan, penanggungjawab Ibu Eko; (b) unit usaha produksi penetasan dan budidaya	Pembentukan 4 unit usaha, yaitu: (a) unit usaha keripik pisang dan kerupuk ikan, penanggungjawab Ibu Parini; (b) unit usaha produksi penetasan dan budi daya telur bebek,

Desa	Kewirausahaan, Perencanaan Usaha dan Manajemen Koperasi/BUMDes	
	Sungai Rambut	Rawasari
	<p>telur ayam, pupuk organik dan briket sekam, penanggungjawab Bapak Tumijo; (c) unit usaha produksi air bersih/ minum, penanggungjawab Al Amin; (d) unit usaha pengelolaan PLTS, penanggungjawab Arifin. Selain itu dibentuk pokja pembentukan koperasi yang bertugas mempersiapkan tahapan-tahapan pembentukan koperasi (RAT, AD/ART, dll.), dipimpin oleh Safriadi, Eka Triani dan Irwansyah</p>	<p>penanggungjawab Bapak Dadang; (c) unit usaha produksi air bersih, penanggungjawab Trisna Mulyana; (d) unit usaha pengelolaan PLTS, penanggungjawab Dedi. Pengurus BUMDes yang telah ditetapkan (Ketua: Purwaningsih, Sekretaris: Erni, Bendahara: Hermansyah) akan bertugas mengkoordinir dan memantau perkembangan keempat usaha yang dijalankan tersebut.</p>
Indikator Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah rencana bisnis yang disusun; 2) Jumlah unit usaha ekonomi produktif yang berjalan; 3) Jumlah usaha ekonomi yang sudah berbadan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah rencana bisnis yang disusun; 2) Jumlah unit usaha ekonomi produktif yang berjalan; 3) Jumlah usaha ekonomi yang sudah berbadan hokum
Target Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1) 4 rencana bisnis per desa; 2) 4 unit usaha ekonomi produktif per desa; 3) 1 lembaga ekonomi per desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 4 rencana bisnis per desa; 2) 4 unit usaha ekonomi produktif per desa; 3) 1 lembaga ekonomi per desa

Desa	Kewirausahaan, Perencanaan Usaha dan Manajemen Koperasi/BUMDes	
	Sungai Rambut	Rawasari
Tahapan Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> • Jul/ Ags-2017: (1)Pelatihan menengah (ketrampilan teknis) Sekolah Hijau, (2) RAT Koperasi (penetapan pengurus, AD/ART), • Sep-2017: (1) pelatihan lanjut, (2) pengurusan badan hukum koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jul/ Ags-2017: (1) Pelatihan menengah (ketrampilan teknis) Sekolah Hijau, (2) RAT Koperasi (penetapan pengurus, AD/ART), • Sep-2017: (1) pelatihan lanjut, (2) pengurusan badan hukum koperasi

Tabel 24 Pelatihan Budidaya Padi di Desa Sungai Rambut dan Rawasari

Desa	Budidaya Padi
	Sungai Rambut dan Rawasari
Deskripsi RTL	<p>Budidaya padi: Akan dilakukan seleksi benih secara sederhana. Pembibitan dengan 2 cara: disamir dan ditugal. Akan dilakukan perbandingan antara 2 cara tersebut pada saat pembibitan (mulai bulan Agustus-September). Caranya benih hasil seleksi dengan jumlah yang sama disemai dengan 2 cara. Setelah 25 sampai 30 hari bibit akan dipindah/ditanam ke sawah. Pemindahan 2 cara pesemaian tadi akan dilihat bibit dengan cara mana yang bisa ditanam lebih luas yang mana. Cara pesemaian yang bisa ditanam lebih luas akan menjadi metode yang diterapkan di kemudian hari.</p>
Indikator Monitoring	Luas lahan yang bisa ditanam dengan berbagai model persemaian
Target Akhir	Efisiensi penggunaan benih padi. Efisiensi penghematan biaya dari pembelian benih 10%
Tahapan Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> • 1 bulan pengamatan setelah proses persemaian. • Ags/sep - 2017 : seleksi benih, pembibitan/ persemaian;

Desa	Budidaya Padi
	Sungai Rambut dan Rawasari
	<ul style="list-style-type: none"> Okt-2017 : penanaman bibit ke sawah, pengamatan luasan hasil pembibitan dan penghitungan efisiensi biaya

Tabel 25 Pelatihan Budidaya Kakao Desa Sungai Rambut dan Rawasari

Desa	Budidaya Kakao
	Sungai Rambut dan Rawasari
Deskripsi RTL	Budidaya kakao: Perawatan perbanyakkan produksi/hasil dengan pemangkasan, okulasi sanitasi kebun, pemupukan menggunakan pupuk NPK, serta perbanyakkan/ peremajaan tanaman dengan cara okulasi, sambung samping, sambung pucuk.
	Akan dibandingkan kebun kakao yang diterapkan perlakuan perawatan (sekitar 1 ha lahan dengan 400 pohon kakao) dengan kebun yang tidak dilakukan perawatan (luas dan jumlah pohon kurang lebih sama). Dalam 2 bulan diharapkan akan terlihat hasil perbandingan berupa buah kakao yang sehat dengan yang tidak
Indikator Monitoring	Jumlah buah kakao yang sehat di kebun yang dilakukan perawatan dengan yang tidak
Target Akhir	Peningkatan produksi kakao sebanyak 20%
Tahapan Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> 2 bulan pengamatan. Juli/ Agt-2017: Perlakuan perawatan; Sept/Okt-2017: Perbandingan dan perhitungan efisiensi produksi

Tabel 26 Pelatihan Pembuatan Kompos Enceng Gondok, Pupuk Organik Padat/Cair

Desa	Pelatihan Pembuatan Kompos Enceng Gondok, Pupuk Organik Padat/ Cair
	Sungai Rambut dan Rawasari
Deskripsi RTL	Jangka waktu dekat adalah setelah pelatihan yaitu selama tiga minggu. Pertimbangan ini adalah proses pembuatan pupuk dari awal hingga menjadi pupuk.

	Jangka panjang adalah bagaimana membentuk kelompok untuk produksi pupuk skala besar yang dikoordinasi oleh Bpk Tumijo.
Indikator Monitoring	Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan cek pupuk yang sudah dibuat, rencana kerja kelompok pupuk, jumlah produksi pupuk
Target Akhir	Produksi pupuk enceng gondok, dan terbentuknya kelompok produksi pupuk
Tahapan Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadukan pada Agustus minggu ke 1 dan 2, • Pemanenan pupuk pada minggu ke 3, • Terbentuknya kelompok dan rencana kerja kelompok pada bulan September

Tabel 27Pelatihan Pembuatan Briket Arang Sekam di Desa Sungai Rambut dan Rawasari

Pelatihan Desa	Pembuatan Briket Arang Sekam Sungai rambut dan Rawasari
Deskripsi RTL	Pembuatan briket dengan membentuk kelompok kerja ibu-ibu PKK. Rencana penggunaan dalam waktu dekat adalah untuk pemenuhan kebutuhan pelatihan pembuatan kripik pisang dan kerupuk ikan pada 7-8 September 2017. Penggunaan lain adalah untuk pemenuhan kebutuhan energi selama Idul Adha.
Indikator Monitoring	Jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan pembuatan briket, Rencana kerja kelompok pupuk, jumlah produksi briket, penggunaan briket untuk pelatihan keripik dan kerupuk
Target Akhir	Produksi briket, terbentuknya kelompok produksi briket, penggunaan briket untuk usaha produktif
Tahapan Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1) akhir Agustus untuk produksi lagi, 2) pemanfaatan pada bulan September awal untuk Idul Adha, 3) Pemanfaatan untuk pelatihan keripik dan kerupuk ikan pada bulan September minggu ke-2

Tabel 28 Pelatihan Penetasan Telur Ayam

Pelatihan	Penetasan Telur Ayam
Desa	Sungai Rambut dan Rawasari
Deskripsi RTL	Dibentuk kelompok usaha bersama peternakan terpadu (ayam di Sungai Rambut dan itik di Rawasari) yang mayoritas dikerjakan oleh kelompok perempuan desa. Usaha ternak terpadu terdiri dari 3 unit usaha yaitu penetasan telur, ternak pembesaran dan ternak indukan menghasilkan telur. KUB di Sungai Rambut dipimpin Ibu Dewi, KUB di Rawasari dipimpin Ibu Wangsih.
Indikator Monitoring	Berjalannya usaha yang didirikan, modal yang terkumpul, jumlah orang yang terlibat
Target Akhir	Peningkatan pendapatan anggota KUB melalui usaha yang ternak terpadu yang menguntungkan
Tahapan Monitoring	1) Awal Oktober berjalannya usaha (modal dan anggota) 2) Awal November mesin penetas telur berhasil menghasilkan anakan

Tabel 29 Pelatihan Pembuatan Keripik Pisang dan Kerupuk Udang

Pelatihan	Pembuatan Keripik Pisang dan Kerupuk Ikan
Desa	Sungai Rambut dan Rawasari
Deskripsi RTL	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan sampel untuk dibawa ke Dinas Kesehatan dalam rangka mendapat PIRT - Produksi dimulai, pemasaran ke desa sekitar (1000 rupiah) dan Pasar Pelita - Persiapan produk untuk pameran di kabupaten - Pembuatan logo untuk label kemasan
Indikator Monitoring	Produksi berjalan
Target Akhir	produk keripik pisang dan kerupuk ikan dapat terjual, usaha produksi berjalan lancar
Tahapan Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1) w3 -w4 sept: label sudah dibuat 2) w3 sept - w2 okt: PIRT didapatkan 3) w3 sept: mulai produksi rutin 4) w2-w4: persiapan pameran

Rencana Tindak Lanjut dari pelatihan ini adalah memperoleh ijin usaha dari Dinas Kesehatan (PIRT) serta produksi mulai berjalan. Promosi dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari dijual di dalam desa dan desa sekitar, menjual di Pasar Pelita yang merupakan pasar terdekat dan terbesar di kecamatan, hingga menitipkan produk untuk dijual di toko kelontong serta aparat desa yang akan berkegiatan di luar desa. Bulan Oktober nanti, akan diadakan beberapa pameran di Kecamatan Berbak maupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diharapkan pada kegiatan ini produk dari kedua desa bisa ditampilkan agar dikenal oleh daerah lain.



Gambar 76 Sinta Karmila, Kader Hijau Desa Rawasari, dengan Produk Keripik Pisang "Sari Rasa"

Sampai dengan bulan September 2017, label kemasan telah dibuat dan diproduksi. Masyarakat di kedua desa juga sudah memproduksi keripik pisang dan kerupuk ikan untuk dijual di beberapa acara di Kecamatan Rantau Rasau.

Penggalan cerita yang menarik adalah bagaimana perempuan desa menggalang dana untuk modal usaha. Perempuan desa Sungai Rambut, melakukan lelang produk hasil pelatihan kepada peserta maupun kepada ibu kepala desa. Hasil lelang tersebut yang digunakan sebagai modal usaha kelompok perempuan ini dalam menjalankan usaha kedepan.. Keterbatasan modal ataupun *capital individu* dan pengalaman perempuan dalam mengelola modal menjadikan perempuan-perempuan ini piawai dalam memanfaatkan peluang dan melakukan inovasi pemasaran.

Tabel 30 RTL Pelatihan Menengah di Jorong Tandai Bukik Bulek

Pelatihan	RTL
Manajemen dan Perencanaan Usaha	Pemantapan BUMNag sebagai induk dari unit usaha yang telah terbentuk, Penanggungjawab Robby Syahwar
Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Kopi dan Jagung	Praktik budidaya kopi dan jagung di lahan percontohan. Pembentukan unit usaha pengolahan kopi dan jagung, dan tindak lanjut kerjasama dengan Koperasi Petani Kopi Solok Radjo
Pelatihan Pembuatan Keripik Jengkol	Praktik pembuatan dan pengemasan keripik. Pembentukan unit usaha keripik jengkol di JTBB.

Rencana tindak lanjut dari pelatihan ini adalah peserta yang telah mengikuti pelatihan akan mencoba teknik yang telah diajarkan di lahan mereka. Tidak untuk semua pohon, tetapi sebagai percontohan peserta akan mencoba 50-100 batang dari ratusan pohon kopi yang mereka miliki. Berdasarkan perlakuan yang berbeda ini, diharapkan produksi kopi para petani kopi di Jorong Tandai Bukik Bulek dapat meningkat.

Pelatihan Lanjut

Telah dibuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada setiap pelatihan menengah yang bertujuan agar peserta melakukan praktik dari ilmu yang telah disampaikan saat pelatihan. RTL ini dibuat secara bersama oleh narasumber dan peserta pelatihan. Pelaksanaan RTL akan didampingi oleh TA pendamping kelompok usaha serta fasilitator.

Sebagai kelanjutan dari pelatihan menengah, akan dilakukan pelatihan lanjut yang mencakup pada materi (1) Pertanian terpadu dan (2) Pemasaran produk dan jejaring usaha. Kedua tema ini dipilih karena berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat di desa. Akan dijelaskan pada masyarakat pada pelatihan pertanian terpadu bahwa pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan di pelatihan menengah dengan tema pertanian dan peternakan merupakan materi yang berkesinambungan. Aplikasi pertanian terpadu menjadi salah satu hal yang penting untuk mewujudkan desa yang mandiri. Sementara pemasaran produk, selama ini terus menjadi masalah yang dikeluhkan oleh warga desa. Untuk itu, terbukanya jejaring usaha, pengemasan produk yang layak serta proses izin usaha yang rumah tangga menjadi beberapa syarat untuk mengurai permasalahan terkait pemasaran.

Diharapkan pada pelatihan lanjut, dinas terkait dapat ikut menjadi narasumber atau mendampingi saat pelatihan dengan tujuan agar proses pendampingan kegiatan di masyarakat tidak berhenti setelah kegiatan KEMALA selesai dilakukan. Adanya pelatihan lanjut yang menjadi penutup dari serangkaian Sekolah Hijau diharapkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat di desa.

Tujuan diadakannya pelatihan lanjut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan lanjut dari rangkaian Sekolah Hijau
2. Memberikan pengetahuan teori dan praktis mengenai pertanian terpadu dan pemasaran produk serta jejaring usaha kepada kelompok warga yang ada di desa
3. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah setempat sebagai salah satu cara pendampingan kegiatan di masyarakat

Keluaran dari pelatihan lanjut diharapkan adalah:

1. Setidaknya terdapat dua kali kelas penyampaian modul dengan peserta sebanyak 10-20 orang yang diseleksi dari warga masyarakat berdasar kelompok minat dan kelompok profesi serta yang telah mengikuti dan menjalankan RTL di pelatihan menengah
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat ditandai dengan evaluasi melalui *pretest* dan *posttest*
3. Kelompok usaha yang telah terbentuk pada pelatihan menengah sudah mulai aktif dan memiliki rencana strategis dalam 1-5 tahun ke depan
4. Setidaknya terdapat minimal 30% adalah peserta perempuan, perwakilan kelompok rentan dan warga miskin sebagai peserta pelatihan. Peserta pelatihan lanjut adalah:
 - a. Perwakilan kelompok-kelompok minat yang memang memiliki hubungan langsung dengan materi yang disampaikan (terutama kelompok profesi tertentu)

- b. Memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat untuk memajukan masyarakat desanya.
- c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang akan digunakan untuk menyebarluaskan materi yang diperoleh kepada warga yang lain.
- d. Telah mengikuti pelatihan menengah, dan diutamakan telah melakuakn RTL dari pelatihan menengah
- e. Sebanyak minimal 30% peserta adalah dari perwakilan kelompok perempuan, kelompok rentan dan warga miskin
- f. Pemilihan peserta untuk setiap modul pelatihan dilakukan dengan metode seleksi di tingkat kader hijau
- g. Peserta mengisi dan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan pilihannya

Metode pelaksanaan dan penyampaian materi pelatihan

1. Pelatihan lanjut akan diberikan langsung oleh tenaga ahli dari Jakarta/Yogyakarta ataupun tenaga ahli lokal, dilaksanakan dengan kombinasi metode pertemuan kelas, tanya jawab ahli, observasi lapangan, serta praktik lapangan
2. *Assessment* dilakukan dengan melakukan *pre-test* dan *post-test* kepada peserta berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait pemahaman materi. Materi *post test* dan *pre-test* disusun oleh pemateri dan diberikan kepada minimal 50% jumlah peserta.

Jadwal Pelatihan Lanjut

Saat buku ini disusun, pelatihan lanjut dalam proses persiapan pelaksanaan. Berikut adalah jadwal pelatihan lanjut yang telah disusun untuk Desa Sungai Rambut, Desa Rawasari dan Jorong Tandai Bukik Bulek.

Tabel 31 Jadwal Pelatihan Lanjut Desa Sungai Rambut

No.	Waktu	Tema	Tenaga ahli/ narasumber	Lokasi
1.	Kamis - Jumat, 9-10 November 2017	Pertanian Terpadu	Dimas Deworo, Herry Wirianata, Andreas WK	Sungai Rambut
2.	Kamis - Jumat, 16-17 November 2017	Pemasaran Produk dan Jejaring Usaha	Satriyantono Hidayat, Awan Santosa, Nurdiana	Sungai Rambut
3.	Senin - Selasa, 20-21 November 2017	Studi banding pemasaran dan kerjasama usaha	Satriyantono Hidayat, Dwi Novitasari	Pematang Rahim Kuala Tungkal (Tanjung Jabung Barat)

Tabel 32 Jadwal Pelatihan Lanjut Desa Rawasari

No.	Waktu	Tema	Tenaga ahli/ narasumber	Lokasi
1.	Sabtu- Minggu 11-12 November 2017	Pertanian Terpadu	Dimas Deworo, Herry Wirianata, Andreas WK	Rawasari
2.	Sabtu- Minggu, 18-19 November 2017	Pemasaran Produk dan Jejaring Usaha	Satriyantono Hidayat, Awan Santosa, Nurdiana	Rawasari

No.	Waktu	Tema	Tenaga ahli/ narasumber	Lokasi
3.	Senin - Selasa, 20-21 November 2017	Studi banding pemasaran dan kerjasama usaha	Satriyantono Hidayat, Dwi Novitasari	Pematang Rahim Kuala Tungkal (Tanjung Jabung Barat)

Bagaimana dengan Jorong Tandai Bukik Bulek? Resistensi yang terjadi di pertengahan program menjadikan pelatihan tingkat lanjut tidak dapat dilaksanakan di Jorong Tandai Bukik Bulek. Jorong Tandai Bukik Bulek lebih fokus pada pembangunan instalasi PLTS selama durasi waktu program yang tersisa, sambil mendorong *sustainability* program .

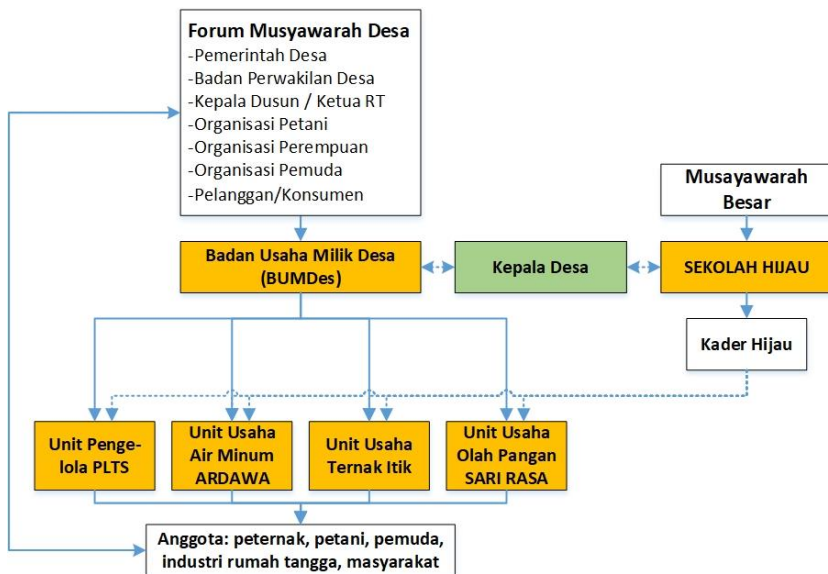
BAB XI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN

Satriyantono Hidayat
Aminatun Zubaedah
Fitrotun Aliyah

Sekolah Hijau dan Kader Hijau

Sekolah Hijau adalah lembaga yang menjadi payung kegiatan pengelolaan pengetahuan hijau di Desa Rawasari. Kader Hijau adalah pegiat Sekolah Hijau yang akan menjadi motor kegiatan-kegiatan Sekolah Hijau.



Gambar 77 Kedudukan Sekolah Hijau dan Kader Hijau di Struktur Desa (Rawasari)

Arah fungsi lembaga Sekolah Hijau adalah lembaga yang menjadi wadah pengelolaan pengetahuan dan wadah saling

belajar-mengajar, lembaga pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan desa, lembaga *think-tank* dan wadah para stakeholder desa membuat keputusan bersama terkait kemajuan desa, lembaga untuk memobilisasi sumber daya desa, lembaga tempat menjalin komunikasi/kerjasama dengan pihak lain di luar desa.

Sebagaimana gambar struktur di atas, Sekolah Hijau sebagai lembaga yang dikukuhkan melalui SK Kepala Desa, pada dasarnya merupakan lembaga yang mandiri/independen dan tidak bertanggungjawab kepada siapapun. Walau demikian Sekolah Hijau memiliki garis hubungan fungsional dengan kepala desa untuk komunikasi-komunikasi dan koordinasi yang sifatnya informal. Selain itu Sekolah Hijau juga memiliki garis fungsional lain di lembaga-lembaga usaha yang menjadi rintisannya dan menjadi unit usaha di bawah payung BUMDes, yaitu garis yang menunjukkan bahwa Sekolah Hijau menempatkan kader hijau untuk menjadi pimpinan atau penanggungjawab di lembaga-lembaga usaha tersebut. Sebagai organisasi pembinaan kader hijau, Sekolah Hijau akan berfungsi menjadi lembaga perencanaan pengembangan usaha maupun perencanaan pembangunan yang terkait kemajuan desa lainnya tempat kader hijau berkiprah.

Demikian, maka kader hijau akan selalu menjadi motor penggerak pembangunan di desa, yaitu pembangunan berkelanjutan yang selain mengutamakan diperolehnya keuntungan ekonomi, juga memperhatikan aspek-aspek pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan. Kader hijau akan menjadi sosok *socioecopreneur* di desa, yaitu kader yang senantiasa berani mengambil resiko, cerdas dalam mencari

berbagai peluang usaha, efektif dalam mendayagunakan sumber daya desa, mampu memberi dampak sosial kepada masyarakat, serta berorientasi kepada lingkungan di sekitarnya.

Pengukuhan kader hijau yang dilaksanakan pada rangkaian kegiatan *Green Visioning*, tidak akan bermakna apapun tanpa adanya kegiatan di desa. *Green Visioning* adalah pembuka kotak pandora tentang bagaimana kader hijau akan membangun desa dengan lebih mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang partisipatif di desa. Sesungguhnya, kiprah kader hijau di desa yang menjadi bukti suksesnya *Green Visioning*, setidaknya melalui Sekolah Hijau di desa.

Peresmian Sekolah Hijau dilaksanakan di 3 desa lokasi program. Desa Sungai Rambut, peresmian Sekolah Hijau dilakukan pada hari Jum'at, 13 Januari 2017. Kegiatan dilakukan di Gedung Serbaguna Desa Sungai Rambut dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang yang terdiri dari 15 laki-laki dan 40 orang perempuan. Peserta kegiatan memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari kelompok tani, majelis taklim, kelompok pemuda, guru, bidan desa, kelompok yasinan, tokoh agama, serta perangkat desa.



Gambar 78 Sambutan Kepala Desa Sungai Rambut, 13 Januari 2017

Keterwakilan masyarakat dalam peresmian Sekolah Hijau diharapkan merupakan representasi dari organisasi sosial kemasyarakatan di desa. Harapannya tentu distribusi informasi tentang Sekolah Hijau dan segala aktivitas maupun atribut yang melekat dengan Sekolah Hijau dapat diterima oleh seluruh masyarakat, setidaknya pada kelompok masyarakat yang diwakili oleh para undangan.

Tujuan dari peresmian Sekolah Hijau antara lain *pertama* untuk memperkenalkan lembaga Sekolah Hijau kepada segenap warga desa, baik kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga dari berbagai kelompok dan lapisan masyarakat lainnya. Sekolah Hijau yang menjadi motor kegiatan KEMALA di desa. Tujuan *kedua* adalah memperkenalkan pengurus Sekolah Hijau yang terdiri dari kader hijau desa sebagai motor pelaksana kegiatan-kegiatan Sekolah Hijau dan *ketiga* memperkuat struktur organisasi dan memilih susunan pengurus Sekolah Hijau serta pengukuhan struktur kelembagaan Sekolah Hijau di hadapan warga pada saat peluncuran lembaga Sekolah Hijau

Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Kader Hijau, sambutan manajemen KEMALA yang diwakili oleh Satriyantono Hidayat serta sambutan Kepala Desa Sungai Rambut. Bapak Ramli selaku Kepala Desa Sungai Rambut dalam sambutan peresmian mengatakan menyambut baik program prakarsa KEMALA dan MCA-Indonesia dan berharap program yang diselenggarakan dapat memberi dampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Peresmian Sekolah Hijau secara simbolis dengan membuka tirai dengan tulisan Sekolah Hijau Desa Sungai Rambut. Kemudian

acara dilanjutkan dengan ceramah umum tentang Sistem Energi Berkelanjutan Berbasis Komunitas Masyarakat Desa oleh Rachmawan Budiarto, Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.



Gambar 79 Ceramah Umum Tentang Sistem Energi Berkelanjutan Berbasis Komunitas Masyarakat Desa oleh Rachmawan Budiarto, dosen UGM



Gambar 80 Peresmian dan peluncuran secara simbolis Sekolah Hijau oleh Kepala Desa Rawasari, didampingi ketua kader hijau dan manajemen KEMALA

Peresmian Sekolah Hijau juga dilakukan di Desa Rawasari pada hari Sabtu, 14 Januari 2017. Kegiatan dilakukan di Kantor Desa Rawasari dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang yang terdiri dari 47 laki-laki dan 23 orang perempuan. Peserta kegiatan memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari kelompok tani, majelis taklim, kelompok pemuda, guru, bidan desa, kelompok yasinan, tokoh agama, serta perangkat desa. Sebagaimana di Desa Sungai Rambut, peresmian Sekolah Hijau juga mengandung maksud dan tujuan yang sama.

Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Kader Hijau, sambutan manajemen KEMALA yang diwakili oleh Satriyantono Hidayat serta sambutan Kepala Desa Rawasari. Kepala Desa Rawasari, Abdul Roqib dalam sambutannya berjanji untuk membantu dan mendukung penuh demi kelancaran program KEMALA di Desa Rawasari. Peresmian Sekolah Hijau dilakukan secara simbolis dengan membuka tirai dengan tulisan Sekolah Hijau Desa Rawasari serta pemotongan tumpeng. Kemudian acara dilanjutkan dengan ceramah umum tentang Sistem Energi Berkelanjutan Berbasis Komunitas Masyarakat Desa oleh Rachmawan Budiarto, dosen Universitas Gadjah Mada.

Sementara itu, di Kabupaten Solok Selatan, Konsorsium KEMALA juga memperkenalkan Sekolah Hijau kepada masyarakat di Jorong Tandai Bukik Bulek. Peresmian Sekolah Hijau dilakukan pada hari Selasa, 17 Januari 2017. Kegiatan dilakukan di Sekretariat Sekolah Hijau dengan jumlah peserta sebanyak 32 orang yang terdiri dari kelompok tani, majelis taklim, kelompok pemuda, guru, bidan desa, kelompok yasinan,

Ninik Mamak, tokoh agama, perangkat nagari dan pemuda desa.



Gambar 81 Peresmian Sekolah Hijau oleh Wali Nagari Lubuk Gadang Timur di Jorong Tandai Bukik Bulek



Gambar 82 Masyarakat, Kader Hijau, Kelompok Ibu-Ibu dan Perempuan menghadiri Peluncuran Sekolah Hijau di Jorong Tandai Bukik Bulek.

Wali nagari pada kegiatan ini bersedia untuk membuka serta meresmikan Sekolah Hijau di Jorong Tandai Bukik Bulek.

Sebagaimana di Desa Sungai Rambut maupun di Desa Rawasari, Konsorsium KEMALA juga memperkuat struktur kepengurusan Sekoah Hijau dan mengukuhkan di depan masyarakat. Tentu harapannya agar masyarakat mengenal dan bisa bersama sama bekerja untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jorong Tandai Bukik Bulek khususnya dan secara umum, bisa menjadi tempat belajar bersama terkait pemberdayaan masyarakat di pinggir hutan.

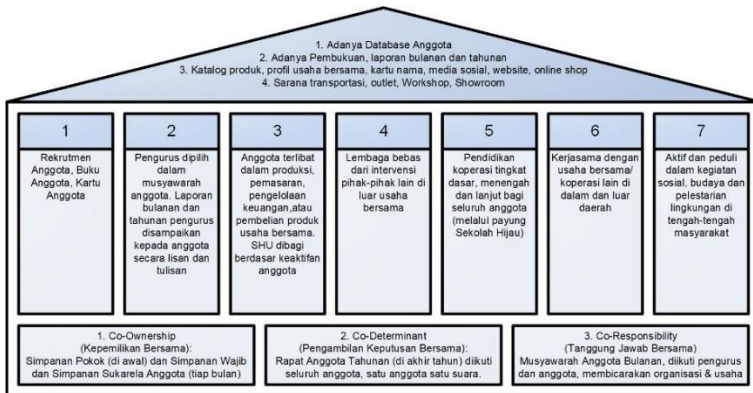
Peluncuran Sekolah Hijau di 3 desa wilayah program, memperlihatkan dinamika yang berbeda di setiap desa. Meski jumlah laki -laki dan perempuan yang hadir berbeda, namun memperlihatkan bahwa secara umum kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kegiatan di desa telah terpenuhi. Kesetaraan gender diharapkan terus dapat terwujud selama Sekolah Hijau masih terus berkegiatan di desa.

Pendirian Koperasi di Desa Sungai Rambut

Usaha bersama yang dijalankan sekelompok warga masih merupakan hal yang langka di Desa Sungai Rambut. Usaha rumah tangga yang dijalankan saat ini masih bersifat perorangan dengan pengelolaan keluarga yang seadanya. Usaha rumah tangga yang ada antara lain usaha kerupuk ikan, keripik pisang, pembuatan tikar anyaman, pembuatan bubu perangkap ikan, kerajinan gelas bekas, warung kopi, usaha air minum, serta usaha di bidang perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Usaha berkelompok yang sudah jalan hanyalah kelompok ibu-ibu PKK yang melakukan arisan dan usaha simpan-pinjam kecil-kecilan. Kelompok tani ada sekitar 7 kelompok, dan itupun tidak bisa optimal dijalankan, karena

lebih difungsikan untuk syarat penerimaan bantuan bibit, pestisida dan peralatan dari pemerintah.

Pengenalan koperasi kepada masyarakat dan ibu-ibu dilakukan melalui pelatihan, praktik, diskusi, dan simulasi permainan tentang pentingnya kerjasama diantara warga dalam menjalankan usaha. Koperasi menjadi lembaga yang paling cocok diadopsi untuk mewadahi usaha yang dijalankan secara bersama dan sesuai dengan karakter gotong-royong bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip koperasi yang dijalankan untuk usaha bersama dikenalkan kepada warga dengan ibarat sebuah gedung yang memiliki fondasi, pilar dan atap sebagai berikut:



Gambar 83 Prinsip-Prinsip Koperasi yang Wajib Diterapkan pada Pengelolaan Usaha Bersama yang Dibangun Oleh Warga di Desa

Setelah serial pelatihan Sekolah Hijau dilakukan, para peserta secara eksplisit bertekad untuk segera mendirikan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang akan dijalankan. Namun demikian, sebagai lembaga usaha (lembaga bisnis), pendirian koperasi harus didasari perencanaan usaha yang matang, yaitu berbagai pertimbangan dan perhitungan terkait hal-hal berikut: (1) produk, (2) target konsumen, (3) distribusi, (4) strategi

pemasaran, (5) mitra, (6) kegiatan utama, (7) ketersediaan sumber daya (SDM, bahan baku, peralatan), (8) rencana pengeluaran, (9) rencana pendapatan. Perencanaan usaha berkait hal-hal di atas disusun dengan skema model bisnis canvas ditambah analisis untung-rugi (*profit-loss*).

Setelah melalui berbagai diskusi terkait peluang usaha desa yang melibatkan kader hijau dan pelaku usaha utama yang ada di desa, maka dipilih empat usaha utama yang akan dijalankan sebagai unit usaha koperasi sebagai berikut: (1) usaha olah pangan (keripik pisang dan kerupuk ikan), (2) usaha pengolahan air minum, (3) usaha peternakan ayam terpadu (penetasan, ternak indukan, ternak pembesaran), dan (4) pengelolaan PLTS. Keempat usaha di atas akan dijalankan di bawah payung usaha lembaga koperasi yang akan dibentuk dan didukung program KEMALA melalui pengadaan beberapa modal aset dan peralatan pendukung usaha. Koperasi dan keempat unit usaha juga akan dijalankan bersama kader hijau sebagai motor penggerak utama organisasi.



Gambar 84 Rapat Pembentukan Koperasi Tunas Muda Nusantara, Desa Sungai Rambut, dihadiri Kabid Pembinaan Koperasi, Dinkop Kab. Tanjung Jabung Timur.

Hadir para calon anggota, perangkat desa, pejabat Dinas Koperasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama desa setempat pada rapat pembentukan koperasi. Peserta pada saat pertemuan mendengarkan pengarahan dari pejabat Dinas Koperasi serta selanjutnya bermusyawarah menentukan pengurus koperasi, nama koperasi dan besaran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Akhirnya disepakati 5 orang pengurus inti (Ketua: Al Amin, Wakil Ketua: Syafriadi, Sekretaris 1: Irwansyah, Sekretaris 2: Arisa, dan Bendahara: Sukmawati), 3 anggota dewan pembina, dan 3 anggota dewan pengawas, nama koperasi "Tunas Muda Nusantara", serta besaran simpanan pokok Rp 100.000 dan simpanan wajib Rp 10.000 per bulan.

Namun demikian, untuk menumbuhkan kesadaran kepada para calon anggota untuk bergabung menjadi anggota koperasi sangat tidak mudah. Mereka ini pada dasarnya bersedia bergabung namun untuk membayar kewajiban simpanan pokok masih sulit, mengingat besaran uang yang harus dibayarkan cukup memberatkan. Menghadapi situasi sulit di awal pembentukan koperasi demikian, kepada para pengurus inti koperasi yang merupakan kader-kader hijau tetap diharapkan selalu menjadi motor penggerak organisasi yang siap dan berani mengambil resiko, cerdas dan cermat dalam berbagai peluang usaha, serta mampu secara efektif mendayagunakan segenap sumberdaya. Kepada mereka selalu diingatkan untuk mengelola koperasi dengan prinsip-prinsip *tripel-co*, yaitu *co-ownership* (kepemilikan bersama), *co-determination* (pengambilan keputusan bersama) dan *co-responsibility* (tanggungjawab bersama).

Hal yang paling penting diperoleh ketika melakukan studi banding ke KUD Suka Makmur, Desa Purwodadi, Kab. Tanjung Jabung Barat, untuk memupuk kepercayaan masyarakat kepada koperasi diperlukan usaha-usaha ekstra sebagai berikut: (1) membuktikan keberhasilan usaha kepada masyarakat, (2) memupuk sifat jujur kepada segenap pengurus koperasi dan pengelola unit usaha, serta (3) mempertahankan iklim transparansi dan keterbukaan pada pengelolaan manajemen koperasi yang dijalankan, (4) menciptakan kondisi keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk menjadi bagian dari keanggotaan koperasi, serta (5) memberikan jaminan kepada anggota terhadap modal masyarakat yang terkumpul dan dikelola untuk kesejahteraan anggota.

Koperasi Tunas Muda Nusantara pada akhirnya berdiri dengan modal hibah dari KEMALA antara lain berupa: PLTS 19.900 watt, gedung Sekolah Hijau (10x10 meter persegi), sumur, tower air dan peralatan penyaringan air minum, kandang ayam terpadu, mesin penetas telur, peralatan pengolah limbah pertanian, peralatan untuk olah pangan, buku-buku perpustakaan, peralatan elektronik untuk administrasi dan keuangan (laptop, printer, handycam, voice recorder) dll. Peralatan tersebut diharapkan menjadi penunjang kegiatan operasional sehari-hari dalam menjalankan usaha. Kepada mereka selain diberikan pelatihan ketrampilan menggunakan dan merawat alat-alat tersebut, ketrampilan manajemen organisasi, administrasi dan keuangan, serta tidak lupa ketrampilan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar desa. Dengan demikian kepada mereka di masa-masa selanjutnya diharapkan dapat secara mandiri menjalankan roda manajemen dan operasional usaha secara

optimal, memperluas jaringan kerjasama dan pemasaran, memupuk modal tambahan, mengoptimalkan laba usaha, serta tidak lupa menjalankan peran sosial di desa yaitu memberdayakan keluarga-keluarga miskin, memberdayakan kelompok-kelompok perempuan dan difabel, serta melakukan program pelestarian lingkungan.

Sinergi Usaha dengan BUMDes Di Desa Rawasari

Sebagaimana kondisi di Desa Sungai Rambut, di Desa Rawasari juga masih langka adanya usaha yang dijalankan secara berkelompok. Usaha dan industri rumah tangga masih dijalankan secara perorangan dengan manajemen keluarga seadanya. Ada beberapa usaha rumah tangga yang cukup maju dan dikenal, yaitu usaha mengolah produk-produk pertanian menjadi olahan pangan seperti keripik pisang, keripik kacang, keripik teri, keripik ubi. Namun demikian usaha masih dijalankan sendiri-sendiri oleh ibu-ibu dan bersaing satu sama lain.

BUMDes di Desa Rawasari didirikan atas inisiatif kepala desa pada tanggal 30 Mei 2017, merespon anjuran dan ambisi Bupati Tanjung Jabung Timur terkait program pendirian BUMDes di seluruh desa (73 desa) di Tanjung Jabung Timur hingga tahun 2019. BUMDes didirikan dasar Peraturan Desa No. 4/ 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Unit usaha di bawah BUMDes yang ditetapkan adalah: (1) Toko Tani, (2) Pengolahan Air Minum, dan (3) Peternakan Bebek.

Seiring dengan pelatihan-pelatihan Sekolah Hijau yang diselenggarakan, serta keinginan kuat dari kader hijau peserta pelatihan yang ingin membentuk usaha bersama, maka sesuai dengan diskusi peluang usaha di Desa Rawasari serta

bagaimana melakukan perencanaan usaha, ditentukan usaha-usaha berikut untuk ditindaklanjuti dan disinergikan dengan inisiatif yang sudah dilakukan oleh BUMDes: (1) Peternakan Bebek terpadu (penetasan, ternak indukan, ternak pembesaran), (2) Olah Pangan (keripik pisang, keripik teri, keripik ubi, keripik kacang, dan kerupuk ikan), (3) Pengolahan Air Minum, (4) Pengelolaan PLTS. Kepada masing-masing unit usaha dibentuk pengurus yang terdiri dari kader hijau yang selama ini aktif, yaitu (1) Ketua unit usaha peternakan bebek terpadu: Ibu Parini, (2) Ketua unit usaha olah pangan: Ibu Wangsi, (3) Ketua unit usaha pengolahan air minum: Roziqie, (4) Ketua unit pengelola PLTS: Trisna Mulyana. Usaha-usaha ini didukung oleh KEMALA melalui modal hibah yang diberikan, yaitu berupa peralatan-peralatan pendukung operasional usaha, seperti: PLTS 6000 watt untuk rumah produksi di Dusun O, PLTS 2000 watt untuk rumah produksi di Dusun P dan PLTS 2000 watt untuk rumah produksi di Dusun N, paket sumur, tower air, dan peralatan penyaringan air minum, kandang bebek indukan, kandang bebek pembesaran, mesin penetas telur bebek, peralatan pengolah limbah pertanian, peralatan untuk olah pangan, buku-buku perpustakaan, peralatan elektronik untuk administrasi dan keuangan (laptop, printer, handycam, voice recorder) dll.

Keputusan-keputusan di atas selalu dikomunikasikan kepada kepala desa dan Direktur BUMDes, dengan harapan dapat memupuk kesepahaman dan sinergi usaha yang dirintis kader hijau dengan BUMDes, tidak justru menciptakan persaingan antara keduanya. Harapan lain agar unit-unit usaha ini dapat bersinergi dengan BUMDes adalah dapat diperolehnya alokasi

dana desa untuk pemeliharaan aset dan modal usaha selanjutnya.

KEMALA bersama kepala desa kemudian menyelenggarakan inisiatif musyawarah desa yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, kepala dusun dan RT, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kader hijau. Diskusi dan perdebatan yang cukup hangat terjadi pada pertemuan tersebut, terutama menyangkut kepentingan kepala desa, kepentingan kader hijau, dan keinginan KEMALA untuk menjamin keberlanjutan programnya di desa setelah pendampingan berakhir. Berikut ini beberapa kesimpulan dan kesepakatan dalam musyawarah tersebut:

1. Peralatan PLTS akan dihibahkan kepada desa dan dikelola oleh lembaga pengelola PLTS di bawah BUMDes. Peralatan lainnya akan dihibahkan kepada desa dan dikelola oleh lembaga-lembaga usaha terkait
2. Akan disusun dan ditetapkan SK Kepala Desa terkait lembaga Sekolah Hijau sebagai payung kegiatan kader hijau di desa
3. Iuran sebesar Rp 25.000 per bulan per rumah penerima PLTS SHS
4. Subsidi pembelian baterai kepada keluarga miskin dan fasilitas umum dimungkinkan melalui penyisihan keuntungan usaha BUMDes dan alokasi dana desa
5. Lembaga-lembaga usaha bersama yang dijalankan kader hijau akan dibuatkan SK Kepala Desa termasuk organisasi kepengurusannya. Melalui keputusan musyawarah desa pada saat BUMDes dan lembaga usaha tersebut telah siap, lembaga-lembaga tersebut

bisa bersinergi dan menggabungkan aset dan operasional usahanya.

KEMALA pada dasarnya menyadari perbedaan mendasar pengelolaan usaha menggunakan lembaga BUMDes dan usaha bersama yang dijalankan dengan prinsip koperasi, sebagai berikut:

Tabel 33 Perbedaan antara BUMDES dan KOPERASI

Keterangan	BUMDes	Koperasi
Pembagian laba	Pendapatan Asli Desa, Pemilik Modal, Komisaris, Manajemen BUMDes, Modal Usaha, Dana Sosial	SHU Anggota, Modal Usaha, Pengurus, Dana Sosial
Pemegang keputusan tertinggi	Musyawarah Desa, Kepala Desa sebagai Komisaris Utama	Rapat Anggota Tahunan
Permodalan	Dana Desa, Dana Hibah	Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Modal Penyertaan, Dana Hibah
Keanggotaan	Tidak ada anggota	Anggota Koperasi
Badan Hukum	Ditetapkan oleh Perdes	Ditetapkan oleh Notaris dan Kemenhukham

Namun demikian, dirintisnya sinergi dengan BUMDes memberi peluang keberlanjutan usaha yang akan dijalankan di kelak kemudian hari. Lebih lanjut kader hijau, melalui lembaganya Sekolah Hijau, akan terus berdiskusi dengan kepala desa agar ditetapkan menjadi pemilik modal dan pemegang saham serta mendapat hak dalam pembagian laba keuntungan usaha BUMDes.

Pengelolaan PLTS Berbasis Masyarakat

Sejak dijanjikan kehadirannya di masyarakat pada masa awal-awal program, PLTS menjadi tumpuan harapan baru warga masyarakat desa terhadap keberadaan listrik yang mampu menerangi ruang-ruang di dalam rumah dan di lingkungan mereka di saat malam hari. Masyarakat Desa Rawasari dan Desa Sungai Rambut adalah 2 dari 3 desa di Kecamatan Berbak yang akses menuju ke lokasi mereka harus menggunakan perahu penyeberangan melintasi Sungai Batang Hari dan Sungai Berbak. Sedangkan Jorong Tandai Bukik Bulek (JTBB) adalah lokasi paling jauh dari area Tandai di Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Sampai dengan buku ini disusun di ketiga lokasi ini, belum terdapat akses listrik PLN sama sekali. Namun demikian, di beberapa komunitas warga sudah terdapat inisiatif mengadakan listrik diesel komunal serta PLTMH di JTBB.

Salah satu program KEMALA adalah pembangunan PLTS di ketiga lokasi ini. Lebih dari itu, pembangunan PLTS di ketiga lokasi ini adalah yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, artinya PLTS yang mampu mendukung kegiatan produktif warga serta dikelola oleh komunitas masyarakat secara berkelanjutan. KEMALA menerjemahkan pesan ini melalui beberapa kegiatan terkait, yaitu:

1. Pemasangan PLTS SHS (*Solar Home System*) diprioritaskan kepada keluarga yang sama sekali belum memiliki akses listrik, baik PLN, diesel komunal maupun PLTMH. Prioritas pemasangan lain adalah kepada fasilitas-fasilitas UMKM yang dikelola oleh kelompok warga, serta berbagai fasilitas umum warga

seperti masjid, kantor desa, sekolah, PAUD, posyandu, dan dermaga

2. Seluruh fasilitas PLTS adalah milik desa yang dikelola oleh pengelola PLTS yang ditunjuk, ditandai dengan surat hibah peralatan kepada desa dan klausul pengelolaan oleh lembaga pengelola PLTS yang ditunjuk. Dengan demikian warga penerima manfaat adalah pemilik hak pinjam pakai PLTS yang ditunjukkan melalui surat kesepakatan yang ditandatangani sebelum bantuan PLTS diberikan dan dipasang. Kepada fasilitas-fasilitas umum, PLTS diterimakan kepada penanggungjawab lokasi (takmir masjid, kepala sekolah, kepala posyandu, atau kepala dusun). Setiap keluarga memiliki tanggungjawab memelihara fasilitas PLTS yang diterimanya dan dilarang memperjualbelikannya, sedangkan desa turut memiliki tanggung jawab untuk memelihara PLTS di fasilitas-fasilitas umum.
3. Kepada fasilitas PLTS yang sudah diberikan, akan dipungut iuran bulanan yang diberi nama "Tabungan Baterai". Besaran iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan (Rp 25.000 di Desa Rawasari), dan disetorkan kepada lembaga pengelola PLTS yang ditunjuk. Status uang iuran adalah tabungan warga untuk membeli baterai yang diperkirakan akan rusak/kadaluwarsa pada tahun ke 3 atau 4 pemakaian. Uang tabungan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo untuk mengganti baterai yang rusak tersebut. Warga akan menerima buku tabungan sebagai tanda pencatatan setoran iuran baterai yang telah dilakukan.

4. Terhadap iuran baterai yang telah disetorkan, lembaga pengelola PLTS mempunyai hak untuk mengelolanya, termasuk memanfaatkannya untuk menambah modal usaha yang produktif dan menguntungkan. Lembaga pengelola PLTS akan mempertanggungjawabkan secara rutin terhadap penggunaan dana tersebut kepada masyarakat.
5. Subsidi iuran kepada keluarga kurang mampu dimungkinkan melalui keuntungan usaha yang dihasilkan dengan memanfaatkan modal iuran tadi serta melalui alokasi dana desa.
6. Lembaga pengelola PLTS merupakan bagian dari unit usaha Koperasi Desa/ BUMDes/ BUMNag dan secara rutin menyusun laporan keuangan serta melaporkannya kepada pengurus lembaga payungnya, kepala desa dan masyarakat (melalui Rapat Anggota Tahunan atau Musyawarah Desa/ Nagari)

Pengelolaan PLTS demikian diharapkan menjadi metode yang tepat untuk model pengelolaan PLTS berbasis masyarakat yang mampu menjamin keberlanjutan fungsi dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan dan peningkatan produktifitas masyarakat.

Perakitan dan Pemasangan PLTS

Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk rumah tangga, fasilitas umum, dan unit usaha produktif merupakan salah satu kegiatan utama di dalam proyek “Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Melalui Usaha Hijau Didukung Energi Terbarukan” di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilakukan oleh Konsorsium KEMALA pada kegiatan hibah pemberdayaan

masyarakat MCAI *window-2*. Proses pemasangan PLTS diawali dengan kegiatan perakitan komponen PLTS yang dilakukan di Yogyakarta yaitu tepatnya di salah satu Gudang di Jl. Imogiri Barat Yogyakarta.

Perakitan komponen PLTS terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pengecekan kuantitas dan kualitas komponen PLTS, pemotongan dan pengguluangan kabel, pemasangan skun kabel, pengeboran panel box, pemasangan kabel di dalam panel box, dan pemasangan *Solar Charge Controller* (SCC) di dalam panel box. Perakitan komponen PLTS di Yogyakarta ini diawali dengan pengecekan seluruh komponen yang telah dikirim dari vendor PLTS untuk memastikan bahwa masing - masing komponen tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Pengecekan komponen tidak dilakukan dengan melakukan sampling, tetapi mengecek seluruh komponen satu demi satu yaitu terdiri dari komponen panel surya/ photovoltaic (PV), baterai, *solar charge controller*, inverter, dan lampu LED. Selama pengecekan komponen, terdapat beberapa barang yang tidak dapat bekerja dengan normal sesuai dengan fungsinya yaitu lampu LED. Karena masih dalam masa garansi, maka tim Konsorsium KEMALA mendapatkan barang pengganti dari pihak vendor PLTS yaitu PT. Surya Energi Indotama (SEI). Setelah semua komponen selesai dicek, maka dilanjutkan proses perakitan berikutnya yaitu pemotongan dan pengguluangan kabel, pemasangan skun kabel, pengeboran panel box, pemasangan kabel di dalam panel box, dan pemasangan *Solar Charge Controller* (SCC) di dalam panel box.

System *Solar Home System* (SHS) yang akan dipasang di rumah warga dan fasilitas umum merupakan sistem *stand alone* yang

artinya berdiri sendiri tidak terhubung dengan sistem di bangunan lainnya. Oleh karena itu, dapat diperkirakan panjang kebutuhan kabel untuk setiap paket SHS di rumah maupun fasilitas umum. Pemotongan kabel di Yogyakarta dilakukan untuk memudahkan tim instalasi dalam memasang sistem SHS di lapangan. Kabel yang telah dipotong sesuai dengan desain SHS di setiap desa akan digulung dan dimasukkan ke dalam *panel box* untuk memudahkan proses pengiriman serta pendistribusian paket PLTS kepada para warga.

Pemasangan skun kabel dilakukan setelah kabel dipotong sesuai dengan kebutuhan. Skun berfungsi untuk memudahkan penyambungan kabel antara komponen satu dengan komponen lainnya.

Dalam rangka menghemat spase pengiriman PLTS dari Yogyakarta ke lokasi pemasangan dan memudahkan serta mempercepat proses pemasangan di desa, beberapa komponen dirakit menjadi satu paket PLTS. Komponen yang dirakit ini adalah *solar charge controller* (SCC) dan kabel penghubung ke baterai. SCC akan dilekatkan didalam *panel box*. Proses tersebut dilakukan dengan mengebor *panel box* kemudian melekatkan SCC beserta kabel penghubung dengan beberapa mur baut. Proses bor dan pemasangan SCC dilakukan dengan hati hati dan sebaik mungkin agar komponen di dalam *panel box* tidak terlepas karena mengalami gundangan selama pengiriman barang.

Setelah semua komponen selesai dirakit, maka dilakukan tahap terakhir pre-instalasi yaitu pengujian fungsi PLTS. Setiap paket SHS diuji satu demi satu untuk memastikan sistem dapat bekerja dengan baik sebelum dikirim ke Desa Rawasari, Sungai Rambut, dan Jorong Tandai Bukik Bulek. Proses pengujian dilakukan

dengan menghubungkan semua komponen mulai dari panel surya, baterai, SCC yang ada di dalam *panel box*, dan lampu. Jika lampu menyala, artinya proses pengujian berhasil dan sistem dapat bekerja dengan normal.

Kegiatan perakitan di Yogyakarta ini dilakukan oleh tim khusus yang telah memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai mengenai teknologi PLTS. Tim perakitan terdiri dari teknisi profesional yang telah memiliki pengalaman dalam merakit dan memasang komponen PLTS, dan teknisi dari mahasiswa baik yang masih aktif di perkuliahan maupun sudah lulus sarjana. Keterlibatan mahasiswa ini sebagai bentuk komitmen Universitas Gadjah Mada yaitu Pusat Studi Energi (PSE) sebagai institusi pendidik yang tidak hanya memberikan bekal ilmu kepada mahasiswa melalui kegiatan perkuliahan di dalam kelas tetapi juga memberi kesempatan kepada mahasiswa dengan praktik langsung bagaimana mengaplikasikan ilmunya dengan merakit komponen PLTS. Jumlah mahasiswa yang terlibat di dalam tim perakitan sekitar 24 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang ilmu seperti Teknik Fisika, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Instrumentasi, Farmasi, Kimia, bahkan ada juga yang berasal dari Hubungan Internasional. Peran gender dalam kegiatan perakitan PLTS ini juga sangat bagus karena dari 24 jumlah total mahasiswa yang terlibat, terdapat sekitar 6 orang perempuan yang sangat aktif mengikuti kegiatan perakitan PLTS di Gudang Yogyakarta. Hal ini menjadi motivasi bagi generasi zaman sekarang bahwa pekerjaan fisik dan teknis tidak hanya dilakukan oleh kaum laki - laki saja tetapi juga dapat dilakukan dengan baik oleh kaum perempuan.

Proses pekerjaan perakitan PLTS dimulai sejak tanggal 2 November 2017 dan berakhir pada tanggal 17 November 2017. Waktu perakitan ini bergeser 2 hari dari target awal yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa komponen PLTS tidak dapat dikirim ke Yogyakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Setelah perakitan PLTS selesai, seluruh barang kemudian dibagi per desa sesuai dengan daftar penerima manfaat dan dipack untuk selanjutnya dikirim ke 3 lokasi yaitu Desa Rawasari dan Desa Sungai Rambut (Jambi), dan Jorong Tandai Bukik Bulek (Solok Selatan). Pengiriman PLTS dari Yogyakarta dilakukan pada hari Minggu malam, tanggal 19 November 2017.

Pengiriman PLTS dari Yogyakarta ke Daerah

Menanti kedatangan PLTS layaknya menanti saat buka puasa di bulan Ramadhan. Sosialisasi program pemasangan PLTS ini telah dilakukan sejak tahun silam, sekitar bulan September 2016 pada saat melakukan *survey assessment* warga penerima manfaat dan *ploting* lokasi pemasangan PLTS. Setahun lebih warga menunggu kepastian kapan PLTS itu akan dikirim dan tiba di desa mereka. Akhirnya, setelah menunggu sekitar 8 hari, PLTS itu pun tiba di Dermaga Desa Rawasari dan Sungai Rambut.

Tim kader hijau dan relawan dari warga setempat sudah bersiap beberapa hari untuk menyambut penerimaan PLTS. SOP dan aturan selama pengangkutan dan pendistribusian PLTS menuju ke bangunan Sekolah Hijau juga sudah disampaikan oleh

Manager Teknologi Hijau dan koordinator area kepada para kader hijau dan relawan warga.

Dengan semangat yang tinggi dan jiwa gotong royong yang masih kental, satu demi satu peti besar yang berisi komponen PLTS itu pun dapat dipindahkan dan disimpan dengan baik di dalam bangunan Sekolah Hijau. Proses ini berlangsung sangat mengharukan, karena kondisi infrastruktur di daerah sangat terbatas dan dibarengi dengan guyuran hujan sepanjang hari. Akhirnya semua komponen dapat dipindahkan ke bangunan Sekolah Hijau dengan selamat.



Gambar 85 Transportasi PLTS Menggunakan Perahu Kecil (Pompong) Menuju Desa Rawasari



Gambar 86 Warga Bergotong Royong Mengangkut Komponen PLTS

Instalasi PLTS

Proses instalasi PLTS dilakukan oleh tim dari Yogyakarta dengan dibantu oleh kader hijau dan relawan warga dari masing masing desa. Jumlah tim instalasi yang diberangkatkan dari Yogyakarta sebanyak 22 orang yang akan dibagi ke 3 lokasi. Proses instalasi di Desa Rawasari dan Sungai Rambut dilakukan sejak hari Minggu, 3 Desember 2017 dan instalasi di Jorong Tandai Bukik Bulek dilakukan mulai hari Selasa, 5 Desember 2017.



Gambar 87 Rumah Bapak Sabar yang Tuna Netra dan Istrinya Tuna Rungu, Sudah Terpasang Lampu PLTS Jorong Tandai Bukik Bulek.

Sebelum proses instalasi dilakukan, tim dari Yogyakarta memberikan pelatihan terkait pengetahuan umum komponen – komponen PLTS, operasional dan perawatan sistem PLTS , dan cara pemasangan. Pelatihan diberikan kepada kader hijau dan relawan warga bersamaan langsung dengan pemasangan SHS di rumah warga. Pelatihan ini melibatkan 10 orang relawan dari Rawasari dan 5 relawan Sungai Rambut. Sementara di Jorong Tandai Bukik Bulek dilakukan pelatihan yang sama kepada 5 relawan. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, warga yang menjadi relawan dapat melakukan pemasangan SHS di rumah dan mengetahui bagaimana cara mengoperasikan dan merawat sistem PLTS. Distribusi dilakukan setelah kelengkapan dokumen ditandatangani. Warga yang terlibat dalam pelatihan dan instalasi PLTS ini nantinya akan menjadi tim pengelola PLTS di desa. Sehingga ketika terjadi masalah pada sistem PLTS, warga dapat melakukan perbaikan secara mandiri. Ini tidak terlepas dari strategi *sustainability plan* yang telah dirancang oleh

tim Konsorsium KEMALA. Tim instalasi Yogyakarta tetap akan melakukan pengecekan terhadap SHS yang dipasang oleh kader hijau/ relawan warga untuk memastikan bahwa semuanya tersambung dengan benar agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.



Gambar 88 Pelatihan Pemasangan PLTS Kepada Kader Hijau dan Relawan Warga di Desa Rawasari

Proses instalasi ini dijadwalkan akan selesai selama 28 hari terhitung sejak pertama kali pemasangan. Harapannya, di minggu ketiga/ keempat Desember 2017, semua PLTS telah terpasang dan dapat beroperasi secara baik.

Kelompok Usaha dan Legalitas Usaha

Jumlah asosiasi/ kelompok kewirausahaan yang sudah berhasil terbentuk sebagai hasil dari program pengembangan kapasitas melalui Sekolah Hijau serta dokumen regulasi desa yang mengukuhkan kelompok usaha tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 34 Jumlah asosiasi/ kelompok kewirausahaan yang sudah berhasil terbentuk sebagai hasil dari program

Asosiasi Usaha	Status Dokumen Legal	Keterangan
1 Koperasi di Desa Sungai Rambut.	<ul style="list-style-type: none"> - Akta notaris dan SK Kemenkumham masih dalam proses review oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tanjabtim. - SK Kepala Desa Pembentukan Pengurus Koperasi - SK Kepala Desa Pembentukan Pengurus Organisasi Pengelola PLTS - SK Kepala Desa Pembentukan Organisasi dan Pengurus Sekolah Hijau 	<p>Koperasi di Sungai Rambut akan membawahi 4-unit usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan PLTS - Pengolahan Air Minum "ADESRAM" - Olah Pangan "Saliro Kito" - Penetasan Telur dan Peternakan Ayam Terpadu
1 BUMDes di Desa Rawasari	<ul style="list-style-type: none"> - Perdes Perubahan tentang Perubahan Unit Usaha BUMDes Desa Rawasari - SK Kepala Desa Pembentukan Pengurus Unit Usaha BUMDes - SK Kepala Desa Pembentukan Pengurus Organisasi Pengelola PLTS - SK Kepala Desa Pembentukan Organisasi dan Pengurus Sekolah Hijau 	<p>BUMDes termasuk akan membawahi 4 unit usaha yang dikelola kader hijau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan PLTS - Pengolahan Air Minum "ARDAWA" - Penetasan Telur dan Peternakan Itik Terpadu - Olah Pangan "Sari Rasa"
4 kelompok usaha bersama (KUBE) di Jorong Tandai Bukik Bulek	<ul style="list-style-type: none"> -SK Wali Nagari tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengelola PLTS JTBB - SK Wali Nagari tentang pembentukan pengurus Kelompok Petani Kopi - SK Wali Nagari tentang pembentukan pengurus Kelompok Petani Jagung - SK Wali Nagari tentang pembentukan pengurus Kelompok Usaha Keripik Jengkol 	<p>Kelompok Usaha yang terbentuk berada di bawah binaan BUMNag. Kelompok usaha tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok usaha pengelola PLTS - Kelompok Petani Kopi - Kelompok Petani Jagung - Kelompok Usaha Keripik Jengkol

BAB XII

ADVOKASI & MEMBANGUN JARINGAN

Satriyantono Hidayat
Aminatun Zubaedah

Sebagai wujud keberadaan organisasi sebagai bagian dari komunitas ekonomi dan sosial, maka kader hijau mendapat pendampingan untuk menjalin kerjasama dan membina hubungan jejaring dengan pemangku kepentingan di berbagai bidang, antara lain di bidang pemerintahan, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas usaha dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan yang dilakukan antara lain audiensi, studi banding dan kunjungan kerja. Komunikasi yang terjalin diharapkan dapat mewujudkan kerjasama saling menguntungkan diantara mereka di masa-masa yang akan datang.

Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten

Sebagai salah satu aspek dalam pengembangan jaringan, yaitu kerjasama dengan pemangku kebijakan, kader hijau melakukan kunjungan studi banding dan sekaligus audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kunjungan ini dilakukan sebagai rangkaian pelatihan penyusunan regulasi desa dan anggaran desa (Rabu, 24 Mei 2017), di mana kader hijau diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD, Bapak Safaruddin, beserta jajaran

terkait di bawahnya. Para peserta di sana memperoleh penjelasan langsung terkait tugas pokok Dinas PMD untuk pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta penjelasan terhadap berbagai pertanyaan kritis dari peserta terkait dasar dan metode pelaksanaan musrenbangdes di desa, politik dan pelaksanaan anggaran desa, legalitas pungutan administrasi pembuatan saprodik dan pungutan lainnya di desa, informasi terkait program BUMDes, pelatihan kepada pengurus BUMDes, program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat didanai anggaran desa, dukungan terhadap program posyandu dan PAUD, pembangunan jalan desa dan infrastruktur desa lainnya, serta program pembangunan pertanian di desa.



Gambar 89 Studi Banding dan Audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Point penting yang ditekankan oleh PMD kepada seluruh peserta adalah masyarakat harus pro aktif dalam mencari informasi. Apa pun yang dibutuhkan selama dari PMD berwenang untuk membantu akan diberikan sesuai dengan

prosedur. Keterbatasan informasi selama ini merupakan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Akses informasi penting untuk didapatkan dengan cara pro aktif. Dukungan yang akan diberikan dalam bentuk teknis dan akses informasi. Jika memungkinkan bisa juga akan diberikan dukungan dalam bentuk pengiriman SDM dari PMD untuk mendampingi masyarakat secara langsung. Selain itu informasi mengenai anggaran untuk BUMDES dapat diakses jika secara legal aspek BUMDES sudah berdiri. Secara praktis dapat dipahami bahwa jika legal aspek BUMDES dapat diusahakan ada pada tahun 2017, maka anggaran untuk BUMDES itu sendiri akan dapat diakses pada tahun 2018.

Kunjungan Studi Banding

Studi Banding 1: Studi Banding PAMDes, Kelompok Usaha Ibu-Ibu, Kelompok Tani, Pemerintah Desa di Desa Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul



Gambar 90 Studi Banding dengan PAM Desa

Studi banding pertama ini dilakukan pada masa pelaksanaan *Green Visioning*. Studi banding ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta dan menumbuhkan inisiatif yang sekiranya dapat diterapkan di desa asal peserta. Studi banding ke lokasi percontohan di desa meliputi lokasi PAMDes, Kelompok usaha ibu-ibu Purba Rasa, Kelompok ternak dan kunjungan ke pemerintah desa. Metode pelaksanaan dengan studi banding ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata usaha yang bisa dikembangkan di desa. Banyaknya usaha yang bisa dikembangkan pada saat studi banding bisa memberikan bagaimana masyarakat desa bisa berdaya dengan memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu kerjasama berbagai pihak semisal antara pemerintah desa dengan pihak masyarakat bisa mewujudkan usaha produktif yang menguntungkan. Lokasi pelaksanaan berada di Nglanggeran, Gunungkidul pada tanggal 8 November 2016.

Beberapa catatan penting dalam studi banding dengan kelompok usaha produktif perempuan antara lain tentang: sejarah dan asal mula ibu-ibu berkumpul dan berinisiatif melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, siapa atau kelompok ibu-ibu mana yang menjadi pelopor dari pembentukan pertamanya. Pengelolaan organisasinya baik tentang struktur pengurus, tugas dan fungsi pengurus, hak dan kewajiban anggota, hubungan dengan pemerintah desa juga merupakan poin penting untuk membekali peserta untuk mengembangkan dan mengelola usaha produktif yang sangat mungkin dikembangkan di desa. Tidak kalah penting adalah pembelajaran tentang pola rekrutmen anggota, pengembangan kegiatan, juga bagaimana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dilakukan. Kelompok perempuan ini juga berbagi

pengalaman dalam hal membangun relasi dan bekerjasama dengan pihak luar untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif mereka. Dalam mengembangkan kelompok perempuan Purba Rasa tentu bukan tanpa tantangan. Mereka berbagi tentang tantangan dan kendala-kendala yang ditemui selama berorganisasi, baik terkait tingkat kesadaran perempuan desa untuk turut bergabung, ijin dari suami/keluarga kepada istri, kesibukan rumah tangga ibu-ibu, pengelolaan keuangan/organisasi, dll. Ketika berbicara tentang kendala dan tantangan tentu penting untuk belajar bagaimana perempuan di Desa Nglanggeran ini merumuskan solusi atas kendala-kendala tersebut dan cara mengatasinya.

Studi Banding 2: Studi Banding ke lokasi percontohan di desa PLTS (Dusun Banyumeneng, Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul)

Kunjungan ke lokasi PLTS yang masih berjalan dengan baik. Kegiatan ini ingin memberikan gambaran pengelolaan PLTS yang baik. Metode pelaksanaan dengan studi banding ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata pengelolaan PLTS yang bisa dikembangkan di desa. Lokasi pelaksanaan berada di Dusun Banyumeneng, Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 9 November 2016. Desa Giriharjo adalah salah satu desa yang memanfaatkan tenaga surya untuk mengangkat air dari sumber air bawah tanah yang banyak ditemukan di Gunungkidul.

Pengelolaan yang dilakukan komunitas mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang sebelumnya seringkali harus bergantung pada air hujan dan *droping* air pada saat kemarau.



Gambar 91 Kunjungan Pada Sistem Pengangkatan Air dengan Tenaga Surya di Dusun Banyumeneng

Studi Banding 3: Studi Banding ke percontohan desa yang sukses melakukan kerjasama dengan perusahaan di wilayahnya.

Saat pelatihan penyusunan regulasi desa, peserta disamping mendapatkan materi tentang peraturan desa, juga melakukan studi banding pada salah satu desa yang berhasil melakukan advokasi kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat. Kunjungan dilakukan menyasar Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai. Tipikal desa ini adalah desa yang memiliki wilayah yang berdekatan dengan perusahaan-perusahaan yang cukup berkembang. Beberapa diantaranya adalah Petrochina perusahaan gas alam, dan PT WKS perusahaan perkebunan.

Saat kunjungan studi banding ke Desa Pandan Lagan, peserta diterima langsung oleh kepala desa setempat, Bpk. Winarno, beserta Kaur Perencanaan dan Ketua PKK. Peserta di sana mendapat penjelasan terkait hubungan aparat desa dengan BPD dan kelompok-kelompok masyarakat di desa, hubungan ekonomi dan sosial dengan perusahaan-perusahaan besar yang

beroperasi di desa setempat (Petrochina dan beberapa perusahaan pengolahan kelapa sawit), pelaksanaan forum-forum di masyarakat sebagai media penyampaian aspirasi warga, peranan kelompok ibu-ibu PKK, peranan pemuda, penyusunan perdes dan anggaran desa, serta peranan kepala desa dalam menyelesaikan beberapa isu sosial yang muncul di tengah warga desa.



Gambar 92 Suasana Studi Banding di Desa Percontohan di Pandan Lagan, Geragai

Point penting yang perlu digaris bawahi adalah advokasi pemerintah desa untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya baik secara materi maupun dalam bentuk non materi. Secara materi salah satu contohnya adalah pemerintah desa mengusahakan adanya MoU antara pihak desa dan perusahaan. MoU tersebut menekankan bahwa prioritas dari SDM tenaga kerja dari desa mendapatkan prioritas dibandingkan dari luar desa. Sementara itu kesejahteraan non material lebih pada kenyamanan hidup. Bentuk konkritnya

adalah upaya untuk menghidupkan kembali kegiatan kemasyarakatan baik pemuda, ibu-ibu PKK maupun kegiatan umum lainnya. Upaya yang perlu diapresiasi juga adalah proses pendirian BUMDes yang sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak pemerintah kabupaten. Usaha PEMDes Pandan Lagan mendapatkan kepastian bahwa pada tahun 2017 ini akan mendapatkan prioritas untuk mendirikan BUMDes.

Studi Banding 4: Studi Banding ke Koperasi Petani Kopi “Solok Radjo”, Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Setelah pelatihan budidaya kopi yang dilakukan di Jorong Tandai Bukik Bulek, pada tanggal 1-2 November 2017 peserta diajak untuk studi banding sekaligus belajar pengolahan pasca panen kopi di Koperasi Solok Radjo.



Gambar 93 Suasana Studi Banding Kopi di Solok Rajo

Peserta di hari pertama belajar unsur-unsur pupuk yang dibutuhkan tanaman, penjemuran kopi, memilih kopi yang akan dikupas, pengupasan kulit kopi hingga *grading* beras kopi berdasarkan kualitas. Peserta pelatihan juga diberikan pengetahuan tentang cacat pada beras kopi dan penyebab terjadinya cacat.

Hari kedua, para petani kopi dari Jorong Tandai Bukik Bulek belajar memberikan penilaian terhadap kopi. Terdapat empat kopi dari tempat berbeda, dua diantaranya dari Jorong Tandai Bukik Bulek yang disediakan untuk dinilai oleh para peserta dengan cara (1) membau kopi dalam bentuk bubuk (2) membau kopi yang telah diseduh, (3) merasakan kopi yang telah diseduh. Kepekaan lidah akan bau dan rasa kopi dilatih pada pelatihan pasca panen kopi hari kedua ini.

Koperasi Solok Radjo dan para peserta studi banding untuk selanjutnya akan melakukan penjajagan lebih jauh terkait kerjasama pembinaan petani kopi di Jorong Tandai Bukik Bulek. Petani kopi JTBB bermaksud mensuplai persediaan kopi untuk diolah bersama Koperasi Solok Radjo.

Studi Banding 5 : Studi Banding ke BUMDes "Karya Bersama", Desa Pematang Rahim, Kab. Tanjung Jabung Timur

BUMDes Karya Bersama adalah salah satu BUMDes yang cukup berhasil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keberhasilan adalah terutama dalam memanfaatkan sumberdaya lokal (manusia dan bahan baku), menggerakkan rodak ekonomi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat. BUMDes Karya Bersama didirikan tahun 2017 di Desa Pematang Rahim, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kunjungan studi banding kader hijau ke BUMDes ini ditandai dengan kunjungan ke kantor desa disertai penjelasan umum oleh kepala desa dan Direktur BUMDes. Selanjutnya dilakukan observasi langsung peserta ke beberapa unit usaha BUMDes yang menonjol yaitu: (1) Bank Sampah “Kartini”, yaitu kelompok ibu-ibu yang bergerak di bidang pengolahan limbah sampah rumah tangga dan mengubahnya menjadi barang-barang kerajinan seperti piring, topi, baju, tempat hidangan makanan dan minuman, dll.; (2) Unit Pengolahan Air Minum TELADAN, di mana menjadi lokasi percontohan penyaringan dan pengolahan air gambut menjadi air siap minum; (3) Olah Pangan “Merasa”, yang menghasilkan beberapa produk olahan pangan hasil pertanian setempat, seperti keripik pisang, bolu pisang kukus, kerupuk ikan, keripik kacang, dll.; (4) Kolam lele komunitas, yaitu usaha budidaya lele yang dikelola oleh komunitas/kelompok warga.



Gambar 94 Studi Banding ke Bank Sampah “Kartini”, Unit Usaha Mitra BUMDes “Karya Bersama”, Desa Pematang Rahim

Beberapa hal terkait praktik usaha yang dijalankan BUMDes dan kerjasama kemitraan yang dijalankan oleh BUMDes dengan unit-unit usahanya diharapkan dapat menjadi catatan dan pelajaran berharga kader hijau peserta studi banding dalam mengelola BUMDes ataupun usaha ekonomi produktif berbasis komunitas umum di desanya.



Gambar 95 Studi Banding ke Unit Pengolahan Air Minum TELADAN

Studi Banding 6 : Studi Banding ke KUD “Suka Makmur”, Desa Purwodadi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KUD Suka Makmur, Desa Purwodadi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan koperasi yang dikenal di skala nasional yang direkomendasikan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dijadikan lokasi kunjungan studi banding kader hijau. KUD Suka Makmur adalah koperasi yang beranggotakan sekitar 2.000 petani di mana sebagian besar adalah petani kelapa sawit. Aset koperasi saat ini adalah sekitar Rp 9 Milyar, di mana usaha yang dijalankan antara lain adalah

simpan pinjam petani kelapa sawit, toko tani dan toko serba ada. KUD juga bekerjasama dengan pemerintah desa dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk kas desa.

Kunjungan studi banding ditandai dengan penjelasan langsung oleh Ketua Koperasi Suka Makmur, Bpk. Redy. Beliau menjelaskan sejarah koperasi yang berdiri sejak tahun 1996, serta suka duka dan pasang surut perkembangan koperasi hingga menjadi sebesar sekarang.



Gambar 96 Studi Banding ke KUD Suka Makmur

Pelajaran berharga yang diperoleh kader hijau dari ketua koperasi adalah bahwa koperasi tidak akan serta merta menuai keberhasilan dan meraih kepercayaan anggota serta masyarakat setempat. Untuk menuju keberhasilan dan meraih kepercayaan masyarakat maka koperasi harus: (1) membuktikan keberhasilan usaha kepada masyarakat, (2) memupuk sifat jujur kepada segenap pengurus koperasi dan pengelola unit usaha, serta (3) mempertahankan iklim transparansi dan keterbukaan pada pengelolaan manajemen koperasi yang dijalankan, (4)

menciptakan kondisi keinginan dan kebutuhan masyarakat untuk menjadi bagian dari keanggotaan koperasi, serta (5) memberikan jaminan kepada anggota terhadap modal masyarakat yang terkumpul dan dikelola untuk kesejahteraan anggota.

Studi Banding 7 : Studi Banding ke Taman Teknologi Pertanian, KTM Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur



Gambar 97 Studi Banding ke Taman Teknologi Pertanian, KTM Geragai

Taman Teknologi Pertanian, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Geragai, adalah salah satu pusat pengembangan dan penerapan teknologi pertanian yang didirikan di berbagai lokasi di Indonesia atas kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian RI, dengan pemerintah daerah yang ditunjuk. TTP KTM Geragai ini didirikan sejak tahun 2015, dan berfokus mengembangkan peternakan pertanian terpadu ternak sapi dan kelapa sawit. Produk yang dikembangkan adalah sapi potong

dan anakan, pupuk organik padat dan cair, pakan ternak dari pelepah pohon kelapa sawit, dan listrik biogas.

Peserta studi banding diterima langsung oleh Kepala TTP KTM Geragai, dan menerima penjelasan langsung terkait kegiatan di TTP KTM Geragai. TTP KTM Geragai sangat terbuka untuk menjadi mitra petani dalam menerapkan teknologi-teknologi terapan untuk meningkatkan produk pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. TTP KTM Geragai juga siap mendampingi dan mengirim tenaga ahli untuk melatih petani-petani di desa.

Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan

Keberlanjutan program yang dijalankan KEMALA sangat tergantung dari kemandirian kader hijau dalam menjalankan usaha ke depannya. Kemampuan komunikasi dan hubungan baik yang terbina dengan para pemangku kepentingan di desa maupun daerah sekitarnya, sangat penting untuk dipupuk dan dirawat. Pemangku kepentingan tersebut termasuk: (1) tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda setempat, (2) pemerintah desa setempat, (3) pemerintah kecamatan, kabupaten, dan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait, (4) sekolah dan perguruan tinggi lokal, dan nasional, (5) tokoh-tokoh wirausaha dan kelompok-kelompok usaha lokal dan nasional, (6) LSM lokal dan nasional, (7) pusat-pusat pengembangan teknologi terapan untuk pertanian, peternakan dan perkebunan.

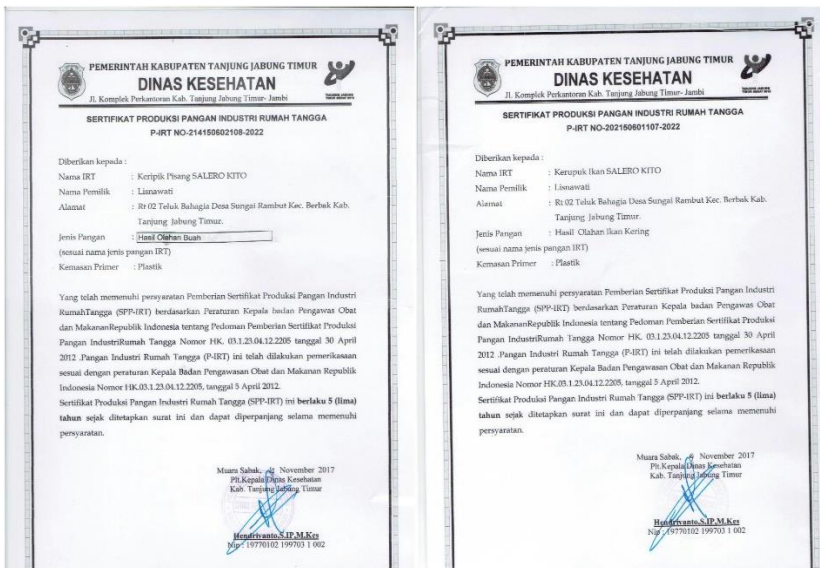
Bersama kader hijau, KEMALA melakukan peninjauan dengan para pemangku kepentingan tersebut dengan melakukan

komunikasi maupun pertemuan bersama. Beberapa komunikasi dan pertemuan yang berhasil dilakukan antara lain:

- Audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan jajarannya, membahas pengembangan BUMDes di Desa Rawasari dan Desa Sungai Rambut
- Musyawarah pembentukan koperasi di Desa Sungai Rambut yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan Koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Penandatanganan MoU antara Bupati Tanjung Jabung Timur dengan Rektor Universitas Gadjah Mada terkait pelaksanaan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Mahasiswa UGM di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di Desa Rawasari dan Desa Sungai Rambut
- Lokakarya penguatan kader Nahdlatul Ulama dan Lakpesdam PCNU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Solok Selatan
- Pengurusan akta notaris dan SK Kemenkumham tentang Pendirian Koperasi Tunas Muda Nusantara, Desa Sungai Rambut
- Pengurusan Sertifikat PIRT untuk produk olahan pangan keripik pisang dan kerupuk ikan Desa Sungai Rambut dan Desa Rawasari
- Musyawarah Desa di Desa Rawasari untuk perubahan Perdes tentang Pembentukan BUMDes dan pengelolaan unit-unit usaha di bawahnya, dihadiri Kepala Bidang Pembinaan BUMDes, Dinas PMD Kab. Tanjung Jabung Timur

- Pengurusan izin produk air minum untuk pengolahan air siap minum “ARDAWA” dan “ADESRAM”
- Partisipasi dalam pameran produk lokal di Kecamatan Berbak maupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Komunikasi dan pertemuan di atas dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif peran kader hijau di dalamnya, sehingga untuk ke depannya kader hijau sendiri yang diharapkan akan membina komunikasi lebih lanjut untuk kerjasama saling menguntungkan ke depannya. Kader hijau juga diberikan pelatihan metode komunikasi yang efektif serta penulisan proposal perencanaan usaha yang suatu saat dapat diajukan kepada pihak-pihak yang akan diajak kerjasama.



Gambar 98 Sertifikat PIRT untuk Produk Kripik Pisang dan Kerupuk Ikan Desa Sungai Rambut

Pusat Informasi

Pusat Informasi Pembangunan PLTS Desa Rawasari. Sebelum bangunan Sekolah Hijau dibangun, warga bersepakat menempatkan sekretariat informasi pembangunan PLTS di salah satu rumah kader. Di sinilah semua informasi tentang rencana pembangunan dan data-data terkait ditempatkan. Warga dapat menanyakan hal apa saja terkait rencana pembangunan PLTS



Gambar 99 Standing Banner di Pusat Informasi Pembangunan PLTS Desa Rawasari

Selesaiya pembangunan gedung Sekolah Hijau, maka gedung ini, selain sebagai lokasi belajar dan usaha bersama, juga menjadi pusat informasi pelayanan PLTS di desa. Pelayanan yang dilakukan termasuk jual beli komponen dan peralatan listrik, pelayanan iuran baterai, serta perawatan PLTS.

EPILOG



Sekolah Hijau

REFLEKSI SATU TAHUN SEKOLAH HIJAU

**Dumairy
Awan Santosa
Puthut Indroyono
Imam Prakoso
Satriyantono Hidayat**

Bila dihitung berdasarkan perjalanan waktu maka inisiasi Sekolah hijau yang telah dijalankan di tiga desa genap kurang lebih satu setengah tahun. Banyak pelajaran yang dapat diambil untuk praktik baik dan praktik buruk (*best and bad practices*) selama proses berlangsung. Mulai dari pengenalan awal kepada masyarakat di Jorong Tandai Bukik Bulek di Provinsi Sumatera Barat, Desa Rawasari dan Sungai Rambut di Provinsi Jambi. Masing-masing desa tentu memiliki karakteristik dan permasalahan lokalitas yang berbeda dan karenanya perkembangan masing-masing tentu juga mengalami perbedaan, meskipun tentu dapat pula dijumpai beberapa persamaan di antara ketiganya. Selain faktor-faktor internal yang ada di ketiga desa tersebut, faktor lain yang juga berpengaruh.

Waktu 1,5 tahun di Sekolah Hijau yang dilaksanakan di 3 desa/jorong, proses aksi refleksi adalah sebuah keniscayaan. Tantangan yang dihadapi selama proses memberikan pembelajaran yang semakin menguatkan gagasan model

Sekolah Hijau. Aksi-refleksi dilakukan melalui evaluasi proses dan menyandingkan dengan pengetahuan tentang konteks lokal yang sudah diinventarisir dan kemudian merumuskan solusi untuk menjawab tantangan melalui penggalian metodologi dan pendekatan proses untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih sesuai dengan konteks lokal masing-masing wilayah. Beberapa catatan pembelajaran selama Sekolah Hijau berjalan di Desa Rawasari- Desa Sungai Rambut di Kabupaten Tanjabtim dan di Jorong Tandai Bukik Bulek Kabupaten Solok Selatan terangkum dalam poin-poin berikut.

Pendekatan Project *versus* Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat, bukanlah hal baru. Proses belajar bersama masyarakat ini juga bukan proses yang pendek. Pemberdayaan harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat juga harus mempertimbangkan persoalan internal di masyarakat. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang padat.

Sekolah Hijau sendiri digagas sebagai bagian dari program “Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Melalui Praktik Usaha Hijau yang Didukung Oleh Energi Terbarukan” yang merupakan kerjasama antara Konsorsium KEMALA dengan MCA-I (*Milenium Challenge Account - Indonesia*) untuk *Green Prosperity Project*. Dalam implementasinya, Sekolah Hijau ini beririsan dengan pembangunan instalasi PLTS. PLTS menjadi bagian tidak terpisahkan dari misi Sekolah Hijau yang mengedepankan penggunaan energi terbarukan sebagai pilihan pemenuhan energi masyarakat. Meski terbatas kapasitasnya, setidaknya PLTS mampu untuk penerangan dan juga pemenuhan kebutuhan pangan seperti memasak misalnya.

Project, biasanya berdurasi pendek, sangat ketat dalam pengelolaan waktu dan sumberdaya. Hal ini sering berbenturan dengan aktivitas harian masyarakat ataupun aktivitas sosial kemasyarakatan warga yang menjadi sasaran program. Hal ini mau tidak mau, menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Kompromi waktu, pemadatan agenda kadang menjadi pilihan yang tidak terelakkan. Hal ini tentu menjadikan capaian kegiatan tidak bisa optimal. Pelatihan misalnya, target output dan implementasi mesti berkompromi dengan kegiatan sosial masyarakat. Pelatihan penghidupan berkelanjutan di desa misalnya, di Jorong Tandai Bukik Bulek tidak bisa optimal dilaksanakan. Waktu pelatihan sangat terbatas karena pada saat yang bersamaan ada warga yang mengalami musibah, sehingga peserta harus membagi waktu dan perhatian antara pelatihan dan aktivitas sosial. Pelaksanaan pelatihan tidak mungkin diundur karena jadwal dan keperluan pelatihan sudah disiapkan, sehingga solusi yang dipilih adalah tetap melaksanakan pelatihan dalam keterbatasan waktu yang tentu berkorelasi dengan capaian.

Misalnya di Desa Rawasari, pada pertengahan kegiatan, beberapa kegiatan yang dirancang harus dilakukan *reschedulling* agenda, kader harus pandai memilih dan mengelola waktu karena pada saat yang bersamaan, selain Sekolah Hijau, aktivitas sosial kemasyarakatan sangat tinggi, pembangunan desa dan *project* lain yang diimplementasikan di desa juga harus bisa berjalan. Hal ini tentu berdampak pada capaian program yang tidak sesuai target. Disisi lain, program pemberdayaan tidak bijaksana untuk “memaksa warga”, melaksanakan kegiatan demi capaian program semata. Kompromi harus dilakukan agar semua target pembangunan di desa dapat

tercapai. Hal ini juga sesungguhnya yang “menguatkan kapasitas kader” dalam ketrampilan bernegosiasi sekaligus terlibat dalam pengelolaan *project*.

Penguasaan Konteks Lokal

Indonesia, dengan keberagaman budaya masyarakat, tentu masing-masing daerah memiliki budaya dan adat istiadat yang khas. Begitupun di desa lokasi program berjalan. Desa Rawasari yang merupakan desa dengan sejarah transmigrasi dari Jawa dan sebagian Bugis merupakan desa dengan percampuran budaya Melayu-Jawa-Sunda dan sedikit kultur Bugis. Sementara Desa Sungai Rambut adalah desa dengan kultur Melayu sangat kuat, meski terjadi akulturasi Melayu-Jawa. Jorong Tandai Bukik Bulek sendiri meski terdapat pendatang dari berbagai wilayah terutama Jawa, sebagaimana wilayah di Sumatera Barat adalah wilayah yang menerapkan adat Minang dalam tata pemerintahan.

Sebagaimana masyarakat Bali, masyarakat Sumatera Barat dikenal sebagai masyarakat yang teguh memegang adat istiadat. Penguasaan budaya dan tradisi lokal pada masyarakat adat menjadi kunci masuk yang krusial, jika mengharapkan program dapat berjalan baik. Sejak awal pemilihan petugas lapangan sesungguhnya sudah mempertimbangkan soal pemahaman adat istiadat dengan merekrut warga dengan latar belakang adat yang sama. Meski terlambat, namun pembenahan program terus dilakukan untuk memastikan target program dapat tercapai.

Pembelajaran penting kasus penghentian program di Jorong Tandai Bukik Bulek adalah soal bagaimana proses “ketuk pintu” yang tidak cukup elegan dilakukan oleh pelaksana program ketika bertandang ke sebuah wilayah baru. Pelaksana program

di lapangan tidak cukup intens membangun komunikasi dengan Ninik Mamak setempat maupun aktor berpengaruh lainnya. Hal ini tentu merupakan penghinaan dan dianggap tidak menghormati adat istiadat yang selama ini dipegang oleh masyarakat. Begitupun dalam pengambilan keputusan terkait program, pelibatan Ninik Mamak juga kelembagaan adat menjadi langkah yang mestinya dilakukan untuk mendapat dukungan lembaga adat. Sayangnya proses ini juga tidak dilakukan. Dalam pelaksanaan program, tim juga tidak memberi informasi perkembangan kepada aktor berpengaruh maupun Ninik Mamak, termasuk dalam membangun kesepakatan. Akibatnya mereka jarang mendapat informasi akurat berkenaan dengan pelaksanaan program, sehingga mudah dipermainkan oleh sekelompok warga yang menolak keberadaan program. Begitupun saat hendak mengadakan Kampanye Hijau, tidak meminta "ijin" langsung kepada Ninik Mamak. Tim pelaksana lapangan mengabaikan komunikasi kepada Ninik Mamak saat hendak melaksanakan Kampanye Hijau. Sedari awal, di Jorong Tandai Bukik Bulek telah muncul kecurigaan yang berlebihan dari aktor lokal yang berpengaruh. Pengabaian tokoh adat semakin menguatkan syak wasangka dan menguatkan persepsi bahwa program didukung oleh TNKS. Kegiatan Kampanye Hijau makin memperkokoh kecurigaan tersebut. Sangkaan bahwa program Konsorsium merupakan bagian dari Taman Nasional (BB TNKS), sehingga menyebabkan berbagai lapisan masyarakat yang merasa trauma dengan keberadaan taman nasional serta merta menolak. Isu tersebut sengaja dihembuskan karena ada latar belakang politik lokal dan kepentingan ekonomi segelintir orang di luar Tandai yang khawatir bisnisnya akan terganggu dengan program KEMALA. Penolakan dengan latar

belakang di luar substansi program menimbulkan kesulitan yang cukup berarti.



Gambar 100 Forum Komunikasi Warga Tandai untuk Penjelasan Program KEMALA di JTBB yang melibatkan Tokoh Masyarakat, Ninik Mamak, Tokoh Pemuda, difasilitasi oleh Wali Nagari Lubuk Gadang Timur (7 April 2017)

Langkah mitigasi dan rekonsiliasi diambil untuk memastikan konflik tidak berlanjut dan memastikan program dapat berjalan dengan baik. Langkah mitigasi dan rekonsiliasi yang dilakukan antara lain melakukan penyusunan *roadmap* mitigasi dan rekonsiliasi melalui tahapan pertemuan dengan stakeholder nagari baik kerapatan adat nagari maupun pemerintahan nagari. Disamping itu juga dilakukan pertemuan dengan stakeholder kabupaten untuk memastikan dukungan dan keterlibatan mereka bagi upaya mitigasi dan rekonsiliasi. Pelaksana program juga melakukan pemetaan aktor sebagai basis perumusan *roadmap* mitigasi dan rekonsiliasi. Beberapa upaya yang sudah dilakukan, seperti mendekati Ninik Mamak, memberikan hasil adanya komitmen Ninik Mamak dari kerapatan adat nagari yang telah mengisyaratkan akan terus melakukan pendekatan

kepada *anak kemenakan* agar dapat memahami kepentingan pemberdayaan masyarakat meskipun program telah selesai. Konsultasi dengan pihak keamanan untuk memastikan berjalannya program sudah pula dilakukan. Pendekatan secara *incognito* telah dilakukan, beberapa aktor penolak telah didekati dan melunak, serta menyatakan penyesalan.

Setelah *roadmap* mitigasi berhasil disusun, upaya mitigasi dan rekonsiliasi dilakukan melalui beberapa pertemuan di tingkat jorong maupun di tingkat nagari untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang pelaksanaan program secara umum di Tandai Bukik Bulek termasuk program Sekolah Hijau. Disamping itu juga dilakukan ritual adat seperti Makan Bajamba, suatu kegiatan makan bersama secara adat yang bertujuan untuk membangun kebersamaan dan membangun koheisi sosial guna mempererat relasi sosial antar warga.

Pasca mitigasi dan rekonsiliasi, dipatikan bahwa program pembangunan PLTS maupun Sekolah Hijau akan tetap dilaksanakan dengan beberapa perubahan target sasaran. Pasca rekonsiliasi penerima manfaat Sekolah Hijau bukan hanya kader hijau dan warga Jorong Tandai Bukik Bulek

Asimetri Informasi

Asimetri informasi sangat jelas terlihat dari kasus penghentian program di Jorong Tandai Bukik Bulek. Saat program berjalan 6 bulan mulai muncul isu bahwa program yang dilaksanakan oleh Konsorsium KEMALA ini merupakan program yang berasal dari BB TNKS. Muncul rumor di masyarakat jika kader hijau yang merupakan kader warga untuk mengawal program PLTS ini adalah merupakan kader TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat). Rumor ini menyeruak di Jorong Tandai Bukik Bulek,

Nagari Lubuk Gadang Timur. Sementara di dua desa lokasi proyek yang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada kecurigaan warga tentang kader hijau. Tidak terlalu jelas rumor tersebut bersumber dari mana. Rumor tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa TNKS akan melakukan penataan, termasuk tanah-tanah yang selama ini diklaim warga sebagai tanah milik mereka yang ditanami oleh berbagai tanaman. Selama ini memang antara TNKS dan warga di beberapa jorong yang wilayahnya berhimpitan dengan taman nasional telah terjadi hubungan yang kurang baik. Isu semakin menguat dan pada puncaknya di awal bulan April 2017 atau pelaksanaan bulan ke sepuluh, saat Kampanye Hijau, sebagian warga menolak dilanjutkannya pelaksanaan program tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat acara, ada sesi sambutan dari Balai TNKS, masyarakat semakin menganggap bahwa KEMALA bagian dari TNKS. Semenjak April 2017 program dihentikan sementara untuk meredakan potensi konflik sosial yang semakin meningkat. Isu ini muncul disamping persoalan kepentingan yang terusik, dipicu juga oleh informasi sepotong yang diterima oleh masyarakat, atau kelompok masyarakat yang tingkat keterpaparan informasinya sangat rendah. Diluar itu, terbatasnya komunikasi dan sosialisasi program juga berkontribusi pada asimetri informasi yang dimiliki kader hijau dan masyarakat.

Durasi waktu yang pendek, kadangkala menjadikan sosialisasi program tidak bisa berjalan maksimal, sehingga asimetri informasi sering terjadi. Penerima manfaat langsung yang banyak terlibat dalam program, dalam hal ini kader hijau misalnya memiliki informasi yang sangat dalam, sementara masyarakat lain yang tidak terlibat menjadi kader hijau atau

menjadi peserta pelatihan, tingkat keterpaparan informasi bisa jadi sangat minim. Meski diseminasi informasi juga dilakukan, namun sekali lagi keterbatasan sumberdaya menjadikan proses distribusi informasi tidak optimal, begitupun yang terjadi di Jorong Tandai Bukik Bulek

Untuk meluruskan kekeliruan pemahaman yang dikuatirkan akan berdampak pada kerja Konsorsium ke depan didalam pengembangan PLTS di Jorong Tandai Bukik Bulek, maka koordinator area berinisiatif untuk mengundang pemerintah kabupaten, wali nagari, Pengurus PCNU Solok Selatan untuk bertemu dengan stakeholder di Jorong Tandai Bukik Bulek.

Undangan diumumkan melalui pengeras suara yang ada di masjid di masing-masing korong (dalam jorong tersebut terdapat tiga korong), mendatangai Ninik Mamak dari beberapa sub-suku Minang di sana, dan mengundang kelompok perempuan melalui majelis taklim. Tanggal 9 Desember 2017 bertemulah warga dengan stakeholder proyek. Jumlah warga yang hadir lebih dari 100 orang atau sekitar 107 orang dari seluruh Jorong Tandai Bukik Bulek. Pertemuan tersebut sekaligus menjelaskan keberadaan kader hijau. Akhirnya warga berhasil diyakinkan bahwa kader hijau bukanlah kader yang berada di bawah TNKS seperti dugaan atau rumor yang beredar sebelumnya. Bahkan dari pertemuan tersebut, warga memiliki komitmen mendukung proyek tersebut.

Komunikasi Yang Baik Kunci Kepercayaan

KEMALA melakukan kegiatan dengan basis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk pemberdayaan masyarakat di tiga lokasi yaitu di Desa Sungai Rambut, Desa Rawasari di Jambi dan Jorong Bukik Bulek di Sumatera Barat. Taman Nasional Berbak (TNB) memiliki batas wilayah dengan Desa Sungai Rambut. Saat ini TNB memiliki persoalan yang belum tuntas dengan pihak warga Desa Sungai Rambut. Persoalan tersebut terkait dengan sengketa batas yang saat ini pengurusannya sampai per Oktober 2016 masih menunggu kepastian dari Kementerian Kehutanan di Jakarta. KEMALA sejak penulisan proposal sudah menjalin komunikasi dengan pihak TNB yang intinya menyampaikan rencana kegiatan di dua desa tersebut di atas. Inisiatif KEMALA tersebut ternyata mendapatkan tanggapan yang positif dari TNB dengan diberikannya surat dukungan terhadap proyek KEMALA. Hingga saat program sudah berjalan pihak TNB masih memberikan tanggapan yang positif atas masuknya program dari KEMALA di wilayah penyangga TNB. Pimpinan TNB memberikan perhatian yang serius yaitu dengan mengundang staff kantor TNB untuk ikut serta dalam mencermati program yang dipaparkan oleh pihak KEMALA. Harapan dari pihak TNB ada sinkronisasi program antara KEMALA dan TNB terutama pada sektor pertanian yaitu program desa konservasi.

Program KEMALA di wilayah TNB ibarat gayung bersambut, di mana TNB yang memerlukan akses ke warga masyarakat bisa berjalan bersama dengan Konsorsium KEMALA sesuai dengan program yang dijalankan. Sementara itu KEMALA membutuhkan TNB karena Desa Sungai Rambut berbatasan langsung dengan TNB, dengan adanya dukungan dari TNB memberikan kepastian bahwa wilayah yang dijadikan program bukan merupakan lokasi dari TNB. Komunikasi baik ini merupakan hasil dari komunikasi semenjak awal mengenai rencana program, apalagi setiap adanya laporan dari hasil kegiatan lapangan pihak KEMALA selalu mengundang pihak TNB dalam rangka menyampaikan perkembangan kegiatan. Undangan tersebut mendapatkan apresiasi dari TNB dengan mengundang KEMALA secara khusus di kantor TNB. Harapan mereka pada proyek yang berjalan terjadi komunikasi yang intens dan koordinasi yang baik, pelaporan ringkas setidaknya dengan pertemuan sederhana. Informasi yang dikomunikasikan dengan adanya pertemuan sederhana akan meminimalisir adanya gesekan kepentingan, kesalahpahaman dan yang jelas adalah mereka ingin wilayah taman nasional tidak terganggu dengan adanya program yang dijalankan Konsorsium KEMALA. Pelajaran yang bisa diperoleh dari pengalaman di atas adalah menjalin komunikasi baik dengan stakeholder yang berkepentingan semenjak awal merupakan salah satu point penting guna mengurangi resiko kegagalan akibat persoalan sosial.

Lemahnya Penguasaan Perspektif Gender Bagi Staff Program.

Berbagai dokumen yang disusun termasuk panduan pelaksanaan kegiatan telah mempertimbangkan keterlibatan perempuan masih belum optimal dalam implementasi dilapangan. Meskipun pada berbagai laporan telah menunjukkan tercakupnya perempuan dalam berbagai aktivitas (pertemuan-pertemuan dalam rangka *assessment*, *green visioning*, dan sosialisasi), namun dalam perencanaan proses pelibatan perempuan masih belum secara optimal dilakukan. Kelemahan ini juga dikuatirkan tidak menjadi perspektif dalam implementasi dan berdampak pada tetap nihilnya pemahaman stakeholder desa akan pengarusutamaan gender di desa.



Gambar 101 Pelatihan melibatkan komunitas perempuan di desa Sungai Rambut

Dalam pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa capaian gender dan inklusi sosial masih terkendala pada lemahnya inisiasi pelaksana program di lapangan pada pemenuhan indikator gender dan inklusi sosial. Selain itu, kontrol untuk mendorong pencapaian target gender dan inklusi sosial ini belum cukup spesifik

dilakukan. Situasi ini mendorong pentingnya panduan yang jelas dan kontrol terhadap pelaksanaan untuk memastikan pelibatan kelompok rentan dan perempuan dalam aktivitas program.

Meski begitu, tidak berarti tidak ada upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam program. Pemahaman konteks lokal juga menjadi pembelajaran penting dalam menggali aspirasi dan partisipasi perempuan dalam program. Perempuan seringkali “tidak bisa” bersuara dalam forum-forum publik, forum di mana dominasi laki-laki masih sangat kuat, bahkan di wilayah di mana perempuan memiliki “kewenangan” atas aset karena penerapan sistem matrilineer dalam masyarakat Minang. Meski bila ditelusuri lebih jauh, kewenangan ini bukanlah kewenangan dalam arti sesungguhnya, karena pengambilan keputusan semua ada di tangan Ninik Mamak. Menggabungkan perempuan dan laki-laki dalam satu forum ternyata membungkam suara perempuan untuk mengemukakan pendapat, bahkan untuk sekedar bertanya atas informasi yang masih membingungkannya. Namun berjalannya proses, memberikan pembelajaran bagaimana mendapatkan informasi tentang apa kebutuhan perempuan, bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, termasuk dalam pelaksanaan program KEMALA.

Melalui Majelis Taklim, Makin Terbuka Ruang Sosial Perempuan di Jorong Tandai Bukik Bulek

Jorong Tandai Bukik Bulek memiliki adat khas Minang yang kuat, walaupun memiliki paham matrilinear, akan tetapi perempuan masih memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapat. Informasi tersebut muncul dari hasil assessment yang dilakukan pada bulan September 2016. Pertemuan yang diinisiasi oleh KEMALA mengalami kesulitan dalam menggali informasi dari masyarakat perempuan dalam forum FGD. Hal tersebut menjadi perhatian khusus. Aspirasi dan keterlibatan perempuan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan program.

Tindak lanjut temuan tersebut kemudian dilakukan pendekatan khusus pada kelompok perempuan di Jorong Tandai Bukik Bulek. Majelis Taklim ibu-ibu yang rutin dijalankan oleh kelompok perempuan menjadi prioritas utama. Fasilitator mengunjungi kegiatan rutin tersebut untuk menjelaskan undangan pertemuan yang pesertanya semua adalah perempuan dan isu yang hendak diangkat adalah isu terkait kepentingan perempuan yakni pembangunan PLTS. Penjelasan tersebut rupanya menarik perhatian mereka. Forum sosialisasi khusus untuk kelompok perempuan ini di fasilitasi oleh kader hijau, di mana pemberi materi, notulensi maupun moderatornya dipilih perempuan semuanya. Pada saat dibuka sesi tanya jawab peserta menunjukkan antusiasme yang ditunjukkan dengan aktifnya peserta tersebut bertanya kepada pemateri. Hal ini sangat berbeda saat bulan September pertemuan dalam rangka assessment laki-laki dan perempuan diundang bersamaan, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara di forum.

Aspirasi perempuan di Jorong Tandai Bukik Bulek bisa digali dengan baik saat mereka percaya diri di mana peserta adalah mayoritas perempuan dan pemateri perempuan. Forum yang khusus sosialisasi kepada kelompok perempuan dilakukan sebanyak dua kali, di mana hasilnya tidak jauh berbeda. Perempuan lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat dengan kondisi forum tersebut.

Perubahan Paling Nyata

Selama kurun waktu kurang lebih satu tahun Sekolah Hijau berjalan di 3 wilayah, terlihat perubahan yang signifikan baik kapasitas individu maupun kelembagaan di desa di mana Sekolah Hijau berjalan. Berikut hanyalah beberapa perubahan pada level individu maupun kelembagaan yang tentu saja tidak bisa di *claim* sebagai capaian Sekolah Hijau semata, namun kontribusi dari berbagai pihak yang pada akhirnya menghasilkan suatu perubahan yang nyata dari kondisi sebelum Sekolah Hijau dilaksanakan.

Kerelawanan dan Penguasaan Teknologi



Trisna Mulyana, atau Mang Entis, sapaan akrabnya, laki-laki 32 tahun, bapak dari seorang anak, yang saat ini menjabat Ketua Karang Taruna Desa Rawasari. Sejak awal program KEMALA hadir di Desa Rawasari, Mang Entis terlibat sangat intens dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan di desa. Mulai dari membantu

survey assessor sosial-ekonomi dan assessor energi terbarukan, mengikuti kegiatan *Green Visioning* di Yogyakarta, mendirikan dan menjadi salah satu pengurus organisasi Sekolah Hijau. Mang Entis juga mengikuti hampir seluruh pendidikan dan pelatihan yang diadakan, menjadi salah satu personil dalam proyek pembangunan gedung Sekolah Hijau. Kiprah Mang

Entis tidak hanya berhenti pada Sekolah Hijau, Mang Entis juga menjadi ketua pengurus lembaga pengelola PLTS yang bertugas memasang, merawat, dan mengelola listrik PLTS di Desa Rawasari.

Manfaat dan tantangan yang dirasakan Mang Entis ketika aktif menjadi kader hijau adalah terpupuknya sifat rela berkorban dan bertanggung jawab dalam dirinya saat membantu kelancaran program KEMALA serta mengerjakan tugas-tugas sebagai kader hijau yang dibebankan kepadanya. Program Sekolah Hijau yang digagas KEMALA dirasakannya sangat bermanfaat karena pelatihan yang dilakukan, selain memberikan materi berupa teori-teori yang membuka wawasan juga langsung memberikan materi praktik kepada peserta. Selain itu program Sekolah Hijau juga memberikan peluang kepada kader hijau bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif secara berkelompok untuk menambah pendapatan keluarga. Fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan produksi yang didukung PLTS disediakan oleh KEMALA sesuai dengan permintaan kader untuk mengolah sumber daya alam setempat. "Saya paling suka materi yang berhubungan dengan pertanian, pengolahan limbah pertanian dan merintis kelompok usaha. Materi-materi itu yang nanti akan jadi bekal saya melanjutkan program dan menambah pendapatan," kata Mang Entis.

Selain itu, melalui aktifitasnya sebagai kader hijau, Mang Entis juga mendapat ilmu baru yaitu pembuatan video dan editing video, di mana fasilitas handycam dan laptop termasuk salah satu yang disediakan oleh KEMALA. Selain mendapat tugas untuk meliput kegiatan-kegiatan kader hijau di Desa Rawasari,

Mang Entis juga melakukan liputan berbagai kegiatan dan peristiwa penting di desa dan mengeditnya langsung menjadi video-video singkat yang menarik yang siap diupload ke situs Youtube di channel Desa Rawasari yang sudah dibuat.

Kedepannya Mang Entis bertekad terus melanjutkan program Sekolah Hijau yang sudah dirintis dengan baik di desanya ini. "Kami akan tetap berjuang mempertahankan program yang selama ini telah diberikan KEMALA kepada kami, dan selanjutnya dapat menjadikan desa kami desa yang mandiri dan lestari," ujarnya.

Peran Perempuan di Ranah Produktif dan Publik



Sinta Karmila, 25 tahun, pada bulan Agustus 2017 lalu melangsungkan pernikahan, menjabat Sekretaris Desa Rawasari sejak bulan Februari 2017 lalu. Sinta yang merupakan sarjana IAIN Jambi, terlibat menjadi kader hijau sejak awal kehadiran program KEMALA di Desa Rawasari, yaitu mengikuti pelatihan dasar *Green Visioning* di Yogyakarta, menjadi pengurus Sekolah Hijau (Sekretaris Kader Hijau), mengikuti berbagai pelatihan dan aktif menyebarkan ilmu yang diperoleh terutama di forum-forum perempuan di desa. "Saya akan berusaha meningkatkan peran perempuan Desa Rawasari melalui kegiatan-kegiatan positif dan produktif. Perempuan Desa Rawasari harus maju dan mampu membuktikan tidak kalah dengan kemampuan laki-laki," demikian tekadnya pada saat rekrutmen kader hijau di awal-awal program. Sinta mengikuti beberapa pelatihan yang

diselenggarakan KEMALA di sela-sela kesibukan rutinnnya sebagai Sekretaris Desa. Materi yang disukainya adalah yang terkait ketrampilan pengolahan pangan dari hasil pertanian setempat, pengolahan limbah pertanian, kewirausahaan serta pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial.

Setelah program berjalan 1 tahun lebih, secara umum Sinta merasakan dampak sangat positif dari program KEMALA di Desa Rawasari, terutama di kalangan ibu-ibu dan perempuan desa. Ibu-ibu yang tadinya tidak memiliki kegiatan yang berarti dan lebih sering ngerumpi dan bergunjing, sekarang melalui program KEMALA menjadi memiliki kegiatan positif dan produktif, karena hampir setiap minggu berkumpul untuk memasak bersama atau mempraktikkan materi-materi pelatihan yang diperoleh. Lebih dari itu hasil dari usaha bersama ini dikelola secara rapi, baik dari segi administrasi, pencatatan penggunaan bahan, laporan pengeluaran keuangan dan hasil penjualan. Pengurus kelompok usaha bersama (KUBE) dibentuk untuk memperjelas pembagian tugas diantara ibu-ibu. Kesepakatan organisasi juga dibuat untuk menetapkan hak-hak dan kewajiban pengurus dan anggota kelompok. Hal-hal tersebut diperoleh dengan bimbingan dan pendampingan dari fasilitator KEMALA.

Namun demikian Sinta juga merasakan adanya tanggapan negatif dari sebagian warga lainnya yang menilai program KEMALA ini adalah program yang tidak jelas dan tidak berguna. Hal demikian justru menambah semangat Sinta untuk membuktikan bahwa anggapan mereka tidaklah benar. “Saya bangga sebagai kader hijau bisa membantu masyarakat desa untuk berkegiatan positif. Saya akan berjuang bersama kader

hijau untuk melanjutkan program ini dan akan membuat pengurus KEMALA bangga kepada kami karena telah hadir di Desa Rawasari”, demikian tekadnya saat ditanya jika program KEMALA sudah berakhir nanti.

Menguatnya Kepercayaan Diri dan Peran Sosial



Solihin, laki-laki lajang dari Desa Sungai Rambut kelahiran 30 tahun yang lalu dan menyelesaikan pendidikan jenjang SLTP. Sehari-hari Solihin bekerja sebagai petani. Anak bungsu dari mendiang Bapak Busman, dan diasuh oleh kepala keluarga tunggal seorang perempuan janda bernama Ibu Lama. Solihin tinggal di Dusun 2 Selat Jaya; Rt : 005. Solihin terlibat dalam kegiatan KEMALA sejak awal. Jika ada tamu yang datang dari KEMALA akan menuju Sungai Rambut, maka Solihin

sering menjadi andalan untuk menjemput menggunakan perahu kecilnya atau yang sering disebut dengan ketek. Karakter yang pendiam, namun aktif dan rajin menjadi saah satu ciri khas yang mudah dikenali dari seorang Solihin. Keikutsertaan dalam kegiatan KEMALA mulai dari *Green Visioning* di Yogyakarta pada bulan November 2016, dan rangkaian kegiatan KEMALA melalui Sekolah Hijau hampir tidak pernah absen.

Keterbatasan dalam komunikasi terutama berbicara di depan forum menjadi perhatian khusus dari KEMALA. Keterlibatan dalam kegiatan lebih banyak pada bagian perlengkapan, angkat peralatan dan mengirimkan undangan pelatihan. Hal lain yang menjadi perhatian utama adalah pada pemberian tugas yang

khusus dari fasilitator desa yaitu untuk menguasai ilmu penetasan telur dan merawat peralatan yang diberikan KEMALA.

Peralatan yang diletakkan di dekat rumah memberikan kemudahan dalam memeriksa secara rutin. Perlu diketahui bahwa program penetasan telur yang diberikan tanggungjawab kepada Solihin sudah dilakukan dengan baik, laporan rutin menggunakan forum whatsapp juga aktif dilakukan. Hal ini menjadi sebuah pencapaian bersama, bahwa tampil di depan forum maya menggunakan media whatsapp oleh seorang Solihin yang dari awal dikenal pendiam menjadi berani tampil adalah sebuah kepuasan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan positif dari seseorang yang kurang percaya diri menjadi lebih berani tampil bicara di depan forum walaupun bukan forum nyata.

Bulan Oktober 2017 atau sekitar 11 bulan setelah KEMALA efektif melakukan program langsung pasca *Green Visioning* dilakukan monitoring sekaligus *assessment* dampak program. Kesempatan kali ini dilakukan pertemuan anggota kader hijau Desa Sungai Rambut, termasuk hadir di forum tersebut adalah Solihin. Forum diskusi ini memberikan kesempatan bagi anggota kader hijau untuk berbicara. Tidak disangka bahwa pada kesempatan tersebut ditawarkan untuk memberikan komentar, kesan dan pesan, Solihin ikut berpendapat, "KEMALA memiliki kesan yang bagus di desa, banyak tantangan dari masyarakat yang masih memiliki pandangan negatif kepada kader hijau. Kami akan berusaha membuktikan bahwa apa saja yang kami janjikan adalah benar". Kondisi pada saat Solihin menyampaikan pendapat terlihat biasa oleh para

kader hijau yang lain, akan tetapi bagi pihak manajemen dan fasilitator setelah forum selesai menjadi pembicaraan yang menarik. Hal ini menjadi menarik karena seorang Solihin yang pendiam dan terkesan tidak mau dan tidak percaya diri saat di dalam forum, mau untuk berbicara dan apa yang dikatakan juga memiliki semangat yang tidak asal bicara begitu saja.

Fasilitator Desa Sungai Rambut mengatakan bahwa hal ini dikarenakan kegiatan KEMALA. Sadar atau tidak, apa yang telah dilakukan sudah menumbuhkan rasa percaya diri, dan kemampuan untuk menyampaikan pendapat di dalam sebuah forum. Akan tetapi hal ini perlu dijaga jangan sampai tingkat percaya diri menurun dan kembali sebagaimana semula, dengan karakter yang diam dan tidak ada kemauan untuk memberikan peran dan dampak positif untuk masyarakat.

Tanggung – Menghadapi Risiko & Ancaman



Perjalanan program di Jorong Tandai Bukik Bulek, Solok Selatan berlangsung tidak mulus. Sebagian kecil warga di jorong tersebut dan warga luar jorong menolak kehadiran program, karena dianggap sebagai kaki tangan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Meskipun demikian, tidak sedikit warga yang berusaha mempertahankan program agar tetap berjalan sampai akhir. Syafrizal, pria kelahiran 8 November 1982 yang dipercaya menjadi Ketua Kader Hijau di Jorong Tandai Bukik Bulek adalah salah satu yang

memperjuangkan hal tersebut. “Kami tahu manfaatnya, banyak warga kami yang belum punya listrik dan sangat berharap, itu yang membuat kami mencoba mempertahankan program”, ungkap Da Syaf panggilan akrab Syafrizal dengan logat Minang yang kental. Tiga orang dari 10 kader yang dilatih telah mengundurkan diri, karena desakan keluarga di jorong sebelah terkait penolakan tersebut. Muhammad Yusuf, Kepala Jorong Tandai Bukik Bulek menyampaikan hal senada. “Mengapa kami harus menyerah! keluhan warga soal belum adanya listrik sering mampir ke telinga kami. Kami tidak tahan mendengar keluhan mereka. Kini ada peluang program untuk membantu warga saya, kenapa saya harus kalah dengan penolakan dari tetangga sebelah”, tegas Yusuf sedikit emosi.



Syafrizal dan Yusuf dengan dibantu warga lain serta Wali Nagari sempat mengadu kepada Ninik Mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Gadang sebelum mempertimbangkan hal-hal lain agar penolakan kelompok warga lain mereda. “Kami akan upayakan terus agar penolakan ini berakhir”, tandas Yusuf.

Keberhasilan meyakinkan Ninik Mamak di sana yang membuat para datuk tersebut didukung Camat Sangir memediasi program dengan warga yang menolak. Kini setelah 2 bulan program berjalan kembali (Oktober dan November 2017) setelah sempat terhenti selama 5 bulan (Mei sampai September 2017), tenaga suryapun dapat dengan aman dipasang. Kinipun,

Syafrizal menjadi salah satu pengurus kelompok usaha kopi yang mana beberapa peralatannya dijalankan dengan menggunakan energi tenaga surya.

Inovasi Perempuan Desa dalam Produksi Makanan Olahan



Perempuan merupakan salah satu target dalam program yang dijalankan Konsorsium. Hampir semua pelatihan yang dilaksanakan melibatkan perempuan sebagai peserta di dalamnya. Namun ada juga yang seluruh pesertanya perempuan. Pelatihan ini antara lain peningkatan skill untuk produksi makanan olahan. Pilihan jenisnya adalah yang berbahan baku lokal dan sebagian peralatan produksinya didukung oleh listrik tenaga surya.

Pelatihan produk makanan olahan yang diberikan antara lain: produksi kerupuk ikan aro dan produksi keripik pisang. Termasuk dalam materi pelatihan adalah peningkatan kualitas produk dan perbaikan kemasannya. Dalam proses uji coba produksinya, kelompok perempuan justru banyak berinovasi terkait produk. Mereka di Sungai Rambut juga memproduksi rempeyek kacang dan teri serta kue bolu kecil. Kesemuanya kemudian dikemas dengan baik menggunakan sealer yang dihibahkan dari program. Dengan pelatihan yang sama di Rawasari diberikan kepada perempuan Desa Sungai Rambut, mereka kemudian

berinisiasi untuk memproduksi usaha tambahan yakni keripik ubi kayu balado dan jamu.

Untuk Desa Sungai Rambut produk yang dibuat telah dipasarkan hingga ke beberapa desa tetangga dan juga ibukota kecamatan sebelah. Sementara di Desa Rawasari, produk jamu dan keripik ubi kayu masih dipasarkan di dalam desa. Perempuan kedua desa sangat antusias untuk memproduksi produk olahan dan memasarkannya.

Kemajuan bagi perempuan di dua desa tersebut sangat signifikan. Sebelum program masuk, waktu pagi mereka umumnya tidak ada kegiatan selain pekerjaan domestik, kini pertemuan kelompok dan menjalankan produksi olahan makanan secara bersama di rumah produksi. Hampir seluruh peralatan produksi menggunakan energi tenaga surya, seperti dari mixer, cup sealer, sealer untuk kemasan, serta alat penggiling ikan.



Nur Asiah, 39 tahun warga Sungai Rambut merasa sangat senang bergabung dalam kelompok yang dibantu oleh program. Umumnya dipagi hari Nur hanya menyelesaikan urusan domestik dan kadang-kadang menjual cilok di sekolah. Kini

setelah bergabung dalam kelompok KUBE, hari-hari pagi banyak diisi dengan kegiatan kelompoknya. Nur merupakan pelopor pembuatan kerupuk ikan aro. Setelah mendapatkan

pelatihan, ia dan kelompoknya mulai memikirkan tampilan kerupuk yang lebih menarik. Pemikiran semacam ini didapatkan karena mengikuti diskusi yang dilaksanakan bersama tim pendamping dan teman-teman kelompok lainnya.

“Awalnya saya malu, tapi lama kelamaan terbiasa dan berani juga”, katanya. Cukup banyak perempuan di kedua desa seperti Nur Asiah yang merasa mendapat dukungan dalam melaksanakan kegiatan baru setelah mendapat pelatihan dari program. Tidak hanya itu, kini sebagian dari para perempuan tersebut telah memiliki keberanian dalam menyampaikan pendapat di dalam pertemuan, serta menjelaskan persoalan dengan runtut dan artikulasi lebih baik. Pendamping dari Konsorsium mengajarkan secara informal saat pertemuan kelompok dan produksi bersama di lakukan di rumah produksi. Nur Asiah termasuk yang mendapatkan kesempatan untuk bicara banyak di depan forum pertemuan-pertemuan

Belajar dari Kegiatan Penetasan Telur



Desa Rawasari dan Sungai Rambut mendapatkan pelatihan untuk usaha penetasan telur dengan menggunakan alat yang didukung energi tenaga

surya. Menetasakan telur dengan bantuan listrik merupakan hal baru bagi warga di kedua desa. Tidak mudah bagi peserta

mempraktekkan penetasan telur pasca pelatihan, namun karena antusiasme peserta yang tinggi mereka tidak mudah menyerah.

Mengenali alat penetas dengan dukungan tenaga suryapun bukan persoalan sederhana. Selama proses uji coba berlangsung, komunikasi warga berlangsung dengan pelatihnya melalui whatsapp group (WAG). Meskipun terkadang banyak hal teknis sulit dijelaskan. Beberapa kali kejadian akibat upaya *trial and error*, mesin penetas mengalami kerusakan. Tapi warga tidak patah semangat. Berkali-kali mereka mencoba memperbaiki alat tersebut. “Kami merasa penasaran dan harus menyelesaikan uji coba ini, karena jika berhasil menetas ini akan mempercepat waktu penetasan dan juga menjual itik merupakan usaha yang menjanjikan di sini”, ungkap Legiyem, perempuan 45 tahun warga Desa Rawasari dengan antusias. Legiyem dan kelompoknya baru saja memperbaiki alat yang rusak karena terjadi sambungan arus pendek pada alat PLTS nya. Dedi Kuswandi adalah warga yang secara otodidak belajar memperbaiki alat penetas saat beberapa kali rusak. Ia kini juga dikenal sebagai teknisi alat penetas telur tenaga surya.

Prestasi paling banyak diperoleh oleh Fadli, pemuda 30 tahun. Fadli berhasil paling cepat menetas 9 itik selama 28 hari. Meskipun kali ini yang paling cepat menetas adalah Fadli, semangat perempuan Rawasari tetap tidak menyerah bahkan kian meningkat. “Kami akan memasarkan dulu di desa kami, jika banyak permintaan dari desa tetangga akan kami tingkatkan produksi telurnya”, ungkap Legiyem sumringah. Terdapat 8 alat penetas telur itik di Desa Rawasari. Dua berada di Blok N, dua di Blok P dan sisanya 4 alat berada di Blok O. Jumlah yang sama juga dihibahkan di Desa Sungai Rambut

Dari “Memberi Ikan” ke “Memberi Kail”

Kerangka pikir (*framework of thinking*) pembangunan—yang pada galibnya bertujuan akhir memajukan masyarakat—telah lama bergeser, dari semula “memberi ikan” menjadi kemudian “memberi kail”. Awalnya disangka, dengan diadakannya berbagai proyek fisik di suatu daerah atau kawasan, maka masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan dan sekitarnya dengan sendirinya akan berkembang dan maju. Maka—sekadar menyebut contoh—disediakan dan dibangunlah berbagai proyek yang pada umumnya berupa sarana fisik seperti benih unggul, pupuk dan obat-obatan, serta waduk di kawasan pertanian, dengan harapan para petani menjadi maju. Disediakan mesin tempel dan tempat pelelangan ikan bagi masyarakat nelayan. Disediakan pompa-pompa air dan tandon-tandon air di daerah-daerah rawan kekeringan. Disediakan sarana produksi bersama, serta dibangun kawasan produksi dan/atau kawasan pajang bersama (lingkungan industri kecil) di sentra-sentra usaha-usaha kecil/kerajinan. Disediakan juga bantuan pendanaan berupa pinjaman lunak (bunga disubsidi) dan hibah.

Penyediaan sarana-sarana fisik semacam itu—termasuk fasilitas permodalan atau bantuan pendanaan—terbukti memang *sempat* menumbuhkan geliat kegiatan perekonomian, *sempat* memperbaiki kehidupan kalangan masyarakat yang disasar.

Namun sebagian besar hanya sempat tumbuh, tidak mampu bertahan apalagi berkembang. Berbagai sarana fisik yang disediakan dan fasilitas fisik yang dibangun menjadi mangkrak tidak lama setelah masa penyediaan dan pembangunannya (sebagai “proyek”) berakhir. Kemajuan yang sempat tercipta tidak berimbas dan tidak lestari.

Belajar dari ketidakberlanjutan program-program pembangunan yang bertumpu pada penyediaan sarana dan pembangunan fasilitas fisik, kerangka pikir pembangunan pun kemudian bergeser. Disadari bahwa pemanfaatan sarana dan fasilitas fisik yang disediakan tidak akan berumur panjang jika pengguna atau penerima manfaatnya tidak disiapkan lebih dahulu. Sejak itu, program-program pembangunan yang bertujuan memajukan masyarakat tidak lagi sekadar menyediakan sarana dan fasilitas fisik, tapi diiringi dengan berbagai pelatihan bagi para calon penerima manfaatnya. Maka, para calon penerima manfaat setiap program pembangunan atau proyek bantuan kemudian dilatih dengan berbagai ketrampilan; baik berupa ketrampilan teknis yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha, maupun ketrampilan administratif yang berhubungan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Karena tujuan akhir pembangunan ialah memajukan masyarakat, maka yang dibangun bukan lagi wilayah (perdesaan), tetapi masyarakat (perdesaan). Konsep pembangunan dengan pola “memberi ikan” beralih ke konsep “memberi kail”.

Kehadiran Konsorsium KEMALA di tiga desa yang menjadi “laboratorium” studi ini, berangkat dari konsep memberi kail. “KEMALA” datang ke tiga desa yang belum berlistrik tersebut –

bukan hanya sekadar menghadiahi perangkat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Tetapi bahkan mengawalinya dengan menyiapkan masyarakat yang akan menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) perangkat tersebut. Selaras dengan kerangka pikir memberi kail dan seirama dengan cita-cita *Sustainable Development Goals (SDGs)*, “KEMALA” berpendirian bahwa menyiapkan masyarakat sama pentingnya dengan menyediakan sarana fisik. Sebelum perangkat PLTS tiba, masyarakat di mana fasilitas PLTS akan dipasang lebih dahulu disiapkan. Sebelum fasilitas fisik dibangun, lebih dulu dibangun manusia-manusianya.

“KEMALA” dalam memberi kail selangkah lebih maju daripada praktik-praktik selama ini, setidaknya-tidaknya merasa demikian. Melalui konsep Sekolah Hijau, penyiapan masyarakat calon penerima PLTS, bukan sekadar dalam bentuk pelatihan-pelatihan teknis dan administratif. Akan tetapi termasuk juga – bahkan terutama – pembangunan karakter (*character building*). Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kelembagaan (*institutional building*), dan pembangunan jejaring (*networking*). Jadi, jika pembangunan masyarakat selama ini sebatas pada pelatihan teknis dan pelatihan administratif, pembangunan masyarakat yang ditempuh oleh “KEMALA” melalui Sekolah Hijau bertumpu pada “trilogi pembangunan masyarakat” yaitu pembangunan karakter manusia-manusia pembentuk masyarakat, pembangunan kelembagaan masyarakat setempat, dan pembangunan jejaring antara masyarakat setempat dengan pihak luar. Pelatihan teknis dan pelatihan administratif melekat di setiap aspek “trilogi pembangunan masyarakat” ala Sekolah Hijau ini.

Karakter – Kelembagaan – Jejaring

Pembangunan karakter yang dilakukan oleh Sekolah Hijau – pada diri manusia-manusia yang merupakan unsur pembentuk masyarakat – bukan semata-mata menyuntikkan “virus” keinginan untuk maju (dalam istilah David McClelland: “virus *n-Ach*”, *need for achievement*). Akan tetapi juga penanaman kesadaran akan kebersihan (dalam kaitan dengan kesehatan), penyadaran akan perlunya memelihara kelestarian alam (agar virus *n-Ach* tidak justru bersifat eksploitatif), pendayagunaan sumber daya dan kearifan lokal (agar mandiri), serta penghargaan lebih proporsional terhadap peran kaum perempuan dalam kehidupan (penanaman kesadaran gender). Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan karakter ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk: tutorial klasikal, simulasi, kampanye, percontohan dan praktik nyata di lapangan, serta pertemuan atau diskusi-diskusi evaluatif.

Unit-unit PLTS yang dipasang tentu saja harus mampu dioperasikan dan dirawat sendiri oleh masyarakat setempat. “KEMALA” tidak hanya memberikan pelatihan teknis untuk itu kepada beberapa orang warga. Akan tetapi juga melembagakan pengelolannya, sehingga menjadi jelas-tegas siapa berhak atas apa dan siapa bertanggung jawab dalam hal apa. Selain itu, dirancang juga pola kaderisasi atau estafet pengelolaan. Pelembagaan semacam ini dipandang penting agar tercegah dua hal: (i) manfaat suatu fasilitas atau sarana fisik hanya dinikmati

oleh segelintir pihak, dan (ii) keberlangsungan operasional fasilitas bergantung secara personal hanya pada satu-dua orang warga. Dengan pembangunan kelembagaan seperti itu diharapkan usia pemanfaatan unit-unit PLTS yang dipasang bisa lebih panjang.

Pembangunan kelembagaan – yang dilakukan oleh “KEMALA” melalui Sekolah Hijau – tidak hanya terhadap hal-hal yang berhubungan langsung dengan pengoperasian dan manfaat PLTS, yaitu sebagai sarana penerangan. Akan tetapi juga mencakup “penggugahan” tentang peluang-peluang manfaat tambahan/sampingan dari kehadiran PLTS. Dalam kaitan ini, Sekolah Hijau mengungkapkan berbagai manfaat tambahan dari keberadaan PLTS, berupa terciptanya atau meningkatnya berbagai kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan kegiatan keagamaan atau kegiatan adat. Dalam kaitan ini, Sekolah Hijau memantik masyarakat untuk merenda potensi lokal yang tersedia dengan fasilitas baru yang ada.

Dengan pembangunan kelembagaan yang komprehensif, bukan saja kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman – suasana keseharian menjadi lebih terang karena kehadiran PLTS – tapi juga berbagai kegiatan menjadi lebih marak. Di antara kegiatan-kegiatan yang akan lebih marak, salah satunya niscaya adalah kegiatan ekonomi, yakni kegiatan bekerja dan berusaha. Dengan pembangunan kelembagaan yang komprehensif, di antaranya pembangunan kelembagaan usaha-usaha produktif, niscaya pula keberadaan PLTS akan turut membuahkan perbaikan kesejahteraan melalui peningkatan penghasilan.

Keberlangsungan operasional PLTS, serta keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ditopang berkat keberadaan PLTS,

dalam jangka panjang tidak akan memadai jika hanya berpola “oleh dan untuk sendiri”. Suatu saat kelak diperlukan kerja sama dengan pihak lain, yaitu masyarakat di luar wilayah layanan PLTS dan kalangan di dalam wilayah layanan namun tidak menikmati langsung PLTS. “KEMALA” mengantisipasi hal itu dengan menanamkan kesadaran akan perlunya membangun jejaring (*networking*); termasuk tentang bagaimana menjalin jejaring, serta bentuk kelembagaan kerja sama dengan jejaring.

Dalam pelaksanaan Sekolah Hijau (trilogi pembangunan masyarakat yang terdiri atas pembangunan karakter dan pembangunan kelembagaan serta pembangunan jejaring), “KEMALA” melakukannya tidak dengan cara-cara “konvensional”, yaitu menempatkan stafnya di desa-desa yang menjadi laboratorium studi. Melainkan, “KEMALA” merekrut warga-warga setempat untuk menjadi “kader-kader hijau”. Sejumlah calon kader hijau dipilih berdasarkan rekam jejak pribadi dan pergaulan sosialnya. Kandidat yang terpilih kemudian “disekolah-hijaukan” dengan berbagai bentuk kegiatan pelatihan (*training for trainers*). Melalui kader-kader ini pula “KEMALA” memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang masyarakat di desa mereka masing-masing. Usai menjalani sekolah, barulah mereka diterjunkan untuk menjalankan Sekolah Hijau “KEMALA”. Pelaksanaan Sekolah Hijau bagi masyarakat di masing-masing desa—dengan demikian—bukan dikerjakan oleh jajaran staf “KEMALA” sendiri yang *nota bene* merupakan orang luar bagi masyarakat desa setempat, melainkan oleh kader-kader hijau yang memang merupakan bagian dari masyarakat setempat. Dengan merekrut warga setempat sendiri sebagai kader hijau dipercayai sosialisasi tentang Sekolah Hijau akan lebih cair, dan kecurigaan

institusional tentang siapa “KEMALA” pupus, sehingga Sekolah Hijau itu sendiri dan program kerja “KEMALA” secara utuh dapat berlangsung mulus.

Tidak semua kader hijau yang lulus pelatihan dan bahkan sudah terjun menjalankan Sekolah Hijau bertahan hingga batas-akhir kerja “KEMALA” di sana. Ada kader hijau yang mengundurkan diri dan ada juga yang harus diganti di tengah perjalanan program. Kader hijau yang mengundurkan diri karena menghadapi masalah internal-personal. Sedangkan kader hijau yang diganti bukan karena alasan kapasitasnya, melainkan lebih karena pertimbangan praktis.

Pelajaran yang Terpelajari

Pendekatan konseptual Sekolah Hijau diselenggarakan berlandaskan sejumlah premis yang secara teoritis dipaparkan di dalam Bagian Satu laporan ini. Konsepnya kemudian diterapkan di tiga desa yang menjadi “laboratorium” program “KEMALA”, berdasarkan fakta-fakta lapangan yang diuraikan di dalam Bagian Dua laporan. Hasil yang dicapai—setidaknya-tidaknya pelaksanaan konsep tersebut di lapangan—dilaporkan di dalam Bagian Tiga.

Untuk saat ini—dalam arti hanya sesampai laporan ini disusun—terlalu dini untuk menilai apakah Sekolah Hijau yang diselenggarakan oleh “KEMALA” berhasil ataukah tidak. Seiring dengan perjalanan waktu, keberhasilan itu akan ditentukan oleh tiga faktor:

1. Daya tahan dan daya lenting (*stamina and endurance*) para kader hijau
2. Sikap warga masyarakat yang tidak menikmati manfaat langsung program “KEMALA”, atau justru merasa “terusik”
3. Evaluasi konseptual Sekolah Hijau

Faktor pertama dan faktor kedua bertautan. Adapun faktor ketiga sepenuhnya terletak pada Konsorsium “KEMALA”.

Terkait dengan faktor daya tahan dan daya lenting para kader hijau, Konsorsium “KEMALA” telah memilih mereka secara

ketat di antara sejumlah kandidat. Mereka juga telah menjalani pelatihan berat. Mereka pun—kecuali beberapa yang mengundurkan diri atau diganti—telah terbukti cakap meneruskan konsep Sekolah Hijau di lingkungan masyarakat tempat mereka berada. Akan tetapi kader-kader hijau itu bukanlah insan-insan yang sepenuhnya individual-personal. Mereka semua adalah bagian dari keluarganya masing-masing. Adalah manusiawi manakala dihadapkan pada pertikaian kepentingan antara sebagai kader hijau dan sebagai bagian dari keluarga, mereka lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari keluarga. Keberlanjutan program “KEMALA” berpotensi terkendala apabila ketika situasi semacam itu muncul sang kader hijau belum selesai mengkader penerusnya.

Sebagaimana dapat diungkap dari bagian ketiga laporan ini, tidak dalam semua hal dan tidak di semua tempat, pekerjaan “KEMALA” berjalan mulus. Di sana-sini ada riak-riak kecil yang merintang atau menghadang. Kendati program pengadaan unit PLTS ditujukan untuk kenyamanan lingkungan yang masih gulita, hal itu tidak serta merta membuat program “KEMALA” diterima langsung. Walaupun “KEMALA” telah melakukan pendekatan persuasif-intensif terhadap tokoh-tokoh kunci masyarakat, juga terhadap jajaran formal pemerintahan, hal itu tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan secara tuntas.

Penentangan terselubung oleh sebagian warga masyarakat tentu saja berpotensi akan mengganggu keberlanjutan program kerja yang sudah dihasilkan. Entah itu dalam bentuk sabotase langsung, atau sikap acuh, atau intimidasi terhadap kader hijau. Seandainya hal yang terakhir ini terjadi, maka kader hijau yang

memiliki daya tahan dan daya lenting tangguh pun bisa menurun kegigihannya.

Faktor ketiga yang menentukan keberlanjutan program “KEMALA” terletak pada konsep Sekolah Hijau sendiri. Tanpa menurunkan harapan akan keberlanjutan program yang sudah terealisasi, pengalaman penerapan di tiga desa telah menyadarkan “KEMALA” akan tiga hal yang sebelumnya tidak terpikirkan ketika merancang konsep Sekolah Hijau.

Pertama, posisi awal ketika akan membangun masyarakat di suatu lingkungan atau kawasan tidak selalu bermula dari nol. Ada yang harus dimulai dengan posisi negatif atau minus. Situasi semacam itulah yang dihadapi oleh “KEMALA” di Jorong Tandai Bukit Bulek. “KEMALA” sempat dicurigai sebagai bagian dari lembaga TNKS, sebuah entitas yang tidak disenangi oleh sebagian warga masyarakat setempat karena dianggap telah menyerobot lahan nafkah mereka. Akibatnya program “KEMALA” di sana tersendat. Terhadap lingkungan masyarakat yang semacam ini, seharusnya terlebih dahulu dilakukan kerja ekstra mengubah dari posisi negatif menjadi posisi nol.

Kedua, cakupan “tokoh kunci” dalam konsep Sekolah Hijau dalam program “KEMALA” –dan juga program-program serupa yang bertema membangun masyarakat– ternyata harus diperluas. Selama ini yang digolongkan sebagai tokoh kunci hanyalah sebatas pemimpin formal dan pemimpin informal. Kedua lapisan ini merupakan “tokoh kunci putih”. Padahal di tiap-tiap lingkungan masyarakat biasanya terdapat “tokoh kunci hitam” dan “tokoh kunci abu-abu”. Tokoh kunci hitam ialah orang yang karena kepremanannya ditakuti (bukan disegani)

oleh masyarakat luas. Ia mungkin memang betul-betul preman, atau orang yang senantiasa *a priori* terhadap setiap program yang tidak turut menguntungkan dirinya. Sedangkan tokoh kunci abu-abu ialah orang yang kepentingannya akan terusik karena kehadiran sebuah program. Mereka adalah orang-orang lapisan atas di jajaran profesi tertentu. Petani atau pekebun yang luas lahannya jauh melebihi luas rata-rata lahan milik petani dan pekebun pada umumnya. Nelayan yang armada tangkapnya lebih banyak atau lebih besar dan modern dibandingkan nelayan sekitarnya. Begitu juga pengusaha atau pedagang setempat yang usahanya sudah jauh lebih mapan daripada yang ada di sekitarnya. Orang-orang semacam ini khawatir kehadiran program akan mengusik keamanan mereka.

Kedua tipe tokoh kunci yang tidak putih tersebut berpotensi menghambat kelancaran dan kelangsungan sebuah program, dengan cara dan gaya mereka masing-masing. Tatkala “KEMALA” mensosialisasikan programnya, dan mulai merekrut calon-calon kader hijau, kedua tipe tokoh kunci ini tidak turut didekati. Menganggap dirinya memiliki ketokohan tertentu, mereka merasa diabaikan apabila sebuah program baru dari luar datang tanpa melibatkan mereka. Program-program pembangunan masyarakat seharusnya turut mencantumkan kalangan tokoh-tokoh kunci yang tidak putih di dalam daftar tokoh kunci yang perlu didekati. Cakupan tokoh kunci tidak cukup hanya berunsurkan tokoh-tokoh kunci yang putih, melainkan seyogianya mencakup juga tokoh kunci hitam dan tokoh kunci abu-abu.

Hal ketiga yang menjadi “pelajaran yang terpelajari” (*lesson learnt*) adalah bahwa membangun masyarakat tidak cukup

hanya dengan membangun manusia, yaitu mem-prakondisikan orang-orang (warga masyarakat) yang akan menjadi sasaran langsung program, dan menyiapkan beberapa warga setempat yang akan turut dilibatkan dalam pelaksanaan program. Membangun masyarakat (*building a community*) harus diiringi dengan upaya membangunkan masyarakat (*waking-up the community*) secara keseluruhan sebagai satu kesatuan entitas. Bagian masyarakat yang tidak turut menikmati langsung sebuah program harus teryakinkan bahwa program yang akan dijalankan tidak akan mengusik keamanan mereka. Perlu diyakinkan bahwa program yang akan dijalankan justru berpeluang untuk secara tidak langsung turut mereka nikmati. Perlu ada upaya penyadaran bahwa bagian masyarakat yang akan menikmati langsung sebuah program, dan bagian lain yang tidak beroleh manfaat langsung, adalah sebuah kesatuan entitas. Jika sebuah program pembangunan masyarakat tidak berpotensi sekadar melahirkan lapisan elite baru di tengah-tengah masyarakat yang hendak dibangun, maka program itu akan lebih bisa berterima (*accepted*). Tentangan atau sikap acuh tak acuh akan dapat diminimalisasi.

Itulah tiga “pelajaran yang terpelajari” oleh “KEMALA” dari pengalamannya membangun masyarakat melalui pelaksanaan Sekolah Hijau. Tanpa harus menunggu saat yang tepat untuk menilai berhasil atau tidaknya program yang baru saja selesai dijalankan, penyempurnaan konsep Sekolah Hijau itu sendiri sudah dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeng, Hans J. Dr. 2000. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Fleischer, T. and Grunwald, A. (2002). *Technikgestaltung für mehr Nachhaltigkeit – Anforderungen an die Technikfolgenabschätzung*. In: Grunwald, A. (ed.): *Technikgestaltung für eine nachhaltige Entwicklung. Von der Konzeption zur Umsetzung*. Berlin
- Fleischman, Forrest D. “Evaluating the utility of common-pool resource theory for understanding forest governance and outcomes in Indonesia between 1965 and 2012”, *International Journal of the Commons*, Vol. 8, no 2 August 2014, pp. 304–336
- Grunwald, A. (2012). *Sustainability Assessment of Technologies – An Integrative Approach*. Sustainable Development - Energy, Engineering and Technologies - Manufacturing and Environment. Prof. Chaouki Ghenai (Ed.). ISBN: 978-953-51-0165-9
- Krisnamurthi, B. “Revitalisasi Pertanian” :1-31, dalam Soetanto, Yusuf (Ed.) (2006) *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Penerbit Kompas Gramedia, Jakarta.
- Ludwig, B. (1997). The Concept of Technology Assessment: An Entire Process to Sustainable Development. *Sustainable Development*, Vol. 5, 111-117 (1997)
- Mubyarto. 2002. *Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta, BPFE
- Murphy, H.M., McBean, E.A., Farahbakhsh, K. Appropriate technology – A comprehensive approach for water and sanitation in the developing world. *Technology in Society* 31 (2009) 158–167
- Nayono, S., Lehn, H., Lehmann, A. and Kopfmüller, J. (2016). Improving sustainability by technology assessment and systems analysis: The Case of IWRM Indonesia. *Applied Water Science* (2016) Vol. 6 Issues 19 Article 490 p. 1-14. DOI 10.1007/s13201-016-0427-y

- Nugroho, A., Mahbubah, Idda Q., et al, (2013). *Fostering Socioecopreneur Through Strategic Cooperation*. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.
- Ostrom D. Elinor, “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems”, Prize Lecture, December, 2009.
- Rachmad.K. 2014. *Sosiologi lingkungan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Rogers, E.M. (1995). *In: Diffusion of innovations. 4th ed*. London: The Free Press, Macmillan Publishers;
- Setiajie, Anugrah Iwan, Suryani Erma. (2007). *Pembangunan Pertanian dan Perdesaan dalam Perspektif Penanggulangan Kemiskinan Berkelanjutan*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Smits, S., Moriarty, P., Fonseca, C., and Schouten T. (2007). *Scaling up innovations through learning alliances: An introduction to the approach*. In: Smits S, Moriarty C, Sijbesma C, editors. Learning alliances: Scaling up innovations in water, sanitation and hygiene. Delft: IRC International Water and Sanitation Centre; 2007. p. 3–18.
- Sutamihardja, 2004, *Perubahan Lingkungan Global: Program studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*; IPB
- The World Bank. 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Ikhtisar. The World U.S. National Research Council. (1999). *Our common journey: A transition toward sustainability*. National Academy Press, Washington DC
- WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). *Our common future*. Oxford University Press. Oxford
- Weaver, P., Jansen, L., van Grootveld, G., van Spiegel, E., and Vergragt, P. (2000). *Sustainable technology development*. Sheffield: Greenleaf Publishing
- Wiryo, P. 2006. *Pembangunan Pertanian Indonesia ke Depan : ke Mana Mau Diarahkan* :87-108. Dalam Yusuf Soetanto (Ed.) *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Penerbit Kompas Gramedia, Jakarta.

RIWAYAT PENULIS

Dumairy lahir di Belawan, Sumatra Utara, pada tanggal 17 Februari. Lulusan Fakultas Ekonomi UGM tahun 1980 ini menyelesaikan pendidikan pascasarjananya pada tahun 1986 di Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, dengan konsentrasi ekonomi publik dan moneter. Semasa mahasiswanya giat dalam berbagai kegiatan organisasi intra- dan ekstra-kampus, dan menulis. Ia pernah menjabat Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE-UGM, Deputi Direktur Program Studi Magister Manajemen UGM, Wakil Dekan FE-UGM, dan Sekretaris Program S2 Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UGM. Di ranah praktis, ia pernah menjabat sebagai Komisariss PT BPRS Margirizki Bahagia - Yogyakarta, Komisariss PT Penerbit BPFE - Yogyakarta, dan Komisariss PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI). Buku-buku karyanya antara lain Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi (BPFE), Ikhtisar Teori dan Soal-Jawab Probabilitas (BPFE), Aljabar Linear untuk Ekonomi (Liberty), Ekonomika Sumberdaya Air (BPFE), Perekonomian Indonesia (Erlangga), dan (disunting bersama Tarli Nugroho) Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubyarto (Gama Press). Selain mengajar dan meneliti serta mengabdikan untuk masyarakat, ia kini duduk sebagai anggota Tim Pembina Olimpiade Sains Nasional (OSN) KemDikBud, Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, serta menjabat sebagai Ketua Yayasan Mubyarto (YasMuby). Dia bisa dihubungi melalui dumdumairy@yahoo.com.

Puthut Indroyono lahir di Temanggung, 2/12/1966. Ia menamatkan studi sarjana di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM). Karirnya sebagai peneliti dimulai sejak tahun 2000, ketika ia direkrut sebagai asisten peneliti oleh Prof Mubyarto, ketika menjadi anggota *Indonesia*

Amerika Senior Advisor Group (IASAG). Ia pernah memperdalam ilmu antropologi ekonomi di pasca sarjana untuk menunjang karirnya meskipun tidak tamat. Karir penelitiannya terus ia lanjutkan sejak bergabung dengan Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM pada tahun 2003 hingga sekarang (sekarang bernama Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan). Pernah juga ia menjadi *Program Officer* selama dua tahun (2006-2007) di *Partnership for Government Reform*.

Sebagian besar topik-topik penelitian yang digelutinya mencakup masalah kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, demokrasi ekonomi, keuangan mikro, dan lain-lain. Ia juga beberapa kali menulis artikel dan editor pada jurnal ilmiah, media cetak lokal dan nasional, termasuk media online dan e-Bulletin (www.ekonomirakyat.org, 2009 & Swara33). Beberapa buku telah ikut dibidannya baik sebagai penulis maupun editor, yaitu: *Otonomi Masyarakat Desa: Persepsi Orang Daerah dan Orang Desa*, FPPM, 2001; *Kutai Barat Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan* (Mubyarto ed.), Aditya Media, 2003; *Keuangan Mikro Kulonprogo*, Aditya Media 2003; *Pemberantasan Kemiskinan Melalui Gerakan Sendawar Makmur*, Pustep-UGM, 2004; *E-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*, Kemitraan & LPSE, 2008; *Menahan Serbuan Pasar Modern: Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional*, LOS-DIY, 2012; *Menjaga Pilar Ekonomi Rakyat*, LOS-DIY, 2012; *Sekolah Pasar: Dari Pasar Rakyat Merebut Kedaulatan*, Pustek-UGM, 2013; *Pengembangan Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan di Desa Miskin Sekitar Hutan*, GamaPress, 2013; *Strategi Pengembangan Pasar Rakyat dan Ritel Lokal di DIY*, LOS-DIY, 2016; *Model Kerakyatan dalam Pengembangan Energi Terbarukan: Strategi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Energi Terbarukan*, GamaPress, 2016. Ia bisa dihubungi melalui email: puthut@ugm.ac.id

Satriyantono Hidayat, peneliti, *community organizer*, ahli teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dia adalah salah satu pendiri Yayasan Mubyarto dan Mubyarto Institute (tahun 2008), sebuah organisasi kemasyarakatan dan kewirausahaan sosial dengan komitmen merealisasikan agenda-agenda Ekonomi Kerakyatan (*Economic Democracy*). Dalam 6 tahun terakhir banyak mencurahkan waktu dalam kegiatan-kegiatan pengembangan media, penerapan teknologi dan manajemen untuk pengusaha mikro/koperasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, serta pengembangan model-model sekolah alternatif untuk pengembangan partisipasi dan produktifitas masyarakat pedesaan. Saat ini menjadi menjadi salah satu koordinator peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan – UGM. Dia bisa dihubungi melalui satriyantono@gmail.com.

Rajib Khafif Arruzzi lahir di Kebumen 10 Maret 1987. Menamatkan studi sarjana di Jurusan Geografi Manusia, Fakultas Geografi selesai 2009 dan studi master di Ilmu Lingkungan minat Pembangunan Masyarakat dan Pengelolaan Infrastruktur selesai 2016, Sekolah Pascasarjana keduanya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Karier dimulai sebagai Asisten Dosen di Jurusan Geografi Lingkungan UGM hingga tahun 2012, direktur di Cv Globalindo Multispek konsultan penelitian, pelatihan dan dan perencanaan memiliki spesialisasi untuk bidang Geografi dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Mulai tahun 2015 bergabung di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan penelitian di bidang sosial lebih dari 7 tahun. Pernah bergabung dengan project GTZ *Livelihood Recovery Project* untuk DIY dan JATENG, monitoring dan evaluasi terlibat pada lembaga nasional/ multinasional baik secara langsung maupun tidak langsung (UNICEF, WORLD BANK, GIZ, AMERICAN RED CROSS, SPANISH RED CROSS, PMI, HANDICAP dll). Dia dapat dihubungi melalui arruzzi_rajib@mail.ugm.ac.id.

Dwi Novitasari, lahir di Blitar, 2 November 1989. Aktif di bidang energi sejak menjadi anggota Komunitas Mahasiswa Sentra Energi (Kamase) tahun 2009. Menamatkan pendidikan Sarjana di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika (DTNTF) UGM. Lulus dari program sarjana pada tahun 2012, Novi diterima magang selama 6 bulan di *Project Energizing Development GIZ*. Selama itu, berkeliling ke pelosok Indonesia mulai dari Sumatera Barat hingga Sulawesi Selatan untuk melakukan *Key Performance Indicator* (KPI) dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Setahun berikutnya bekerja sebagai konsultan di project yang sama. Ia juga menjadi salah satu pendiri Yayasan Energi Bersih Indonesia (Enerbi) yang didirikan bersama dengan teman-temannya yang merupakan alumni dari Kamase UGM. Hingga saat ini, masih menjadi salah satu pengurus di Yayasan Enerbi yang terus berkecimpung secara aktif melalui project-project energi terbaru di masyarakat. Tahun 2014, mendapatkan beasiswa Master Program dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Teknik Mesin ITB. Dua paper dihasilkan pada periode kuliah masternya dengan judul "*Study of Micro Grid Hybrid System of Photovoltaic and Diesel Engine*" yang dipresentasikan pada *International Conference on Green Energy and Application (ICGEA)*, Singapore, March 2016 serta "*Design and Optimization of Smart Grid System Based On Renewable Energy in Nyamuk Island, Karimunjawa District, Central Java*" yang dipresentasikan pada *Engineering International Conference (EIC)*, Semarang, October 2016. Sejak lulus dari pendidikan masternya, Novi kembali ke Jogja dan bergabung dengan Pusat Studi Energi UGM. Saat ini, menjadi *Monitoring, Evaluation and Learning Coordinator* di *Centre for Development of Sustainable Region*, sebuah pusat kolaborasi riset beranggotakan delapan perguruan tinggi Indonesia dan Amerika Serikat. Dapat dihubungi melalui dwinovitasari.novi@gmail.com

Awan Santosa, pernah menjadi direktur Mubyarto Institute periode 2016/2017. Dia menjadi *co-founder* Sekolah Pasar, sebuah gerakan mengajar di pasar tradisional yang dimulai dari tahun 2011 dan sudah direplikasi Kementerian Perdagangan RI. Selanjutnya juga menjadi *co-founder* Sekolah Buruh, Sekolah Hijau, dan yang terbaru segera dirilis Sekolah Koperasi Indonesia (Sekopia). Selain itu juga sebagai *co-founder* usaha bersama (prakoperasi) bersama buruh paperbag di Sleman dan buruh tas rajut di Kulon Progo DIY. Aktif menjadi tim ahli di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, serta membantu sebagai tenaga ahli di Komisi A DPRD DIY. Menjadi salah satu tenaga ahli di Konsorsium KEMALA yang mendirikan Sekolah Hijau untuk mengembangkan energi terbarukan, koperasi, dan BUMDes di 3 desa di Jambi dan Solok Selatan. Saat ini sedang menjajagi perintisan Sekolah Nelayan bersama HNSI. Memiliki *concern* di ekonomi kerakyatan, di mana telah merumuskan Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia. Aktif meneliti dan menjadi pembicara di berbagai daerah di Indonesia terkait *concern* tersebut. Dia bisa dihubungi melalui satriaegalita@yahoo.com

Imam Prakoso, telah berpengalaman dalam dunia pembangunan selama lebih dari 22 tahun. Isu yang selama ini digeluti di lapangan adalah pemberdayaan masyarakat, tata kelola pelayanan publik, media dan informasi. Belakangan Imam cukup aktif di isu pengurangan resiko bencana maupun tata kelola desa. Pernah bekerja sebagai jurnalis, tenaga ahli di program pengembangan perkotaan, pengembangan media dan informasi, konsultan lepas pada beberapa program organisasi internasional. Kini ia bekerja di *Center for Civic Engagement Studies* di Yogyakarta sebagai direktur eksekutif. Dia bisa dihubungi melalui imenkyogya@gmail.com.

Aminatun Zubaedah, Menempuh pendidikan S1 dari Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM. Aktif bekerja di dunia NGO dan penelitian sejak tahun 2005, fokus pada isu gender pada

bidang perencanaan dan penganggaran yang repsonsif gender, manajemen bencana, , disabilitas dan inklusi sosial. Menulis pada beberapa buku diantaranya “Difabel (Perempuan) dalam Masyarakat Adat”, Sapda (2017), “Mewujudkan Program PKH Yang Lebih Bermakna”, Aksara-FES-Kemenko PMK (2015), and “Negara Tanpa Warga”, Aksara-Tifa Foundation (2011). Sejak tahun 2007, membantu berbagai NGO sebagai konsultan (seperti SAPDA, Pusat Rehabilitasi Yakkum), Institusi pemerintah (seperti Bappeda dan Kantor Pemberdayaan Perempuan di DI Yogyakarta), selain itu juga di organisasi seperti Friedrich Ebert Stiftung dan GiZ. Dia dapat dihubungi melalui aminzu96@gmail.com.

Dimas Deworo Puruhito saat ini bekerja sebagai staf pengajar pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta. Selama lebih dari delapan belas tahun menjalankan tugas di perguruan tinggi, yang bersangkutan aktif di dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Beberapa mata kuliah yang diampunya antara lain; Pembangunan Pertanian, Pengetahuan Pekebunan, Manajemen Sumberdaya Manusia, Manajemen Konflik, Matematika Ekonomi, Organisasi dan Kepemimpinan serta Sosiologi Pertanian. Sedangkan beberapa penelitian yang telah dan sedang dilakukannya antara lain tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat petani/pekebun, berbagai pola hubungan perusahaan perkebunan, serta manajemen usahatani dan analisis kelayakan usaha pertanian/perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dan sedang dilakukannya seperti pelatihan dan pendampingan bagi kelompok-kelompok tani/masyarakat serta pelatihan *lifeskill* pertanian bagi generasi muda. Baik penelitian maupun kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan selama ini didanai oleh pemerintah (Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Perkebunan, Bank Indonesia, dll)

maupun swasta (Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim, PT. Astra Agro Lestari dll). Dia bisa dihubungi melalui dimasdeworopuruhito@gmail.com.

Fitrotun Aliyah, lahir pada tanggal 7 Januari 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Teknik Nuklir UGM pada tahun 2012 dan S2 di Teknik Kimia UGM pada tahun 2014. Saat ini bekerja sebagai dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya bekerja sekitar 5 bulan di GIZ yaitu salah satu organisasi non-profit kerjasama antara pemerintah Jerman dan Indonesia. Selain itu, dia juga memiliki pengalaman selama 2 tahun sebagai *Petroleum Engineer* di Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (EMP) di Jakarta. Aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat diawali dari organisasi kemahasiswaan yaitu Komunitas Mahasiswa Sentra Energi (KAMASE). Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti survey listrik di daerah Kulon Progo bekerjasama dengan PLN, pengembangan *Solar Water Pumping System* di Banyumeneng, Panggang, Gunung Kidul Yogyakarta, pengembangan Biogas di Madurejo Sleman, Pengembangan Pikohidro di Banjarnegara Jawa Tengah, dan lainnya. Setelah menyelesaikan studi S1 ikut berperan mendirikan yayasan Energi Bersih Indonesia (EnerBI). Saat ini, ia menjabat sebagai bendahara eksekutif EnerBI. Tahun 2016 bergabung dengan Konsorsium KEMALA merangkap dengan *Petroleum Engineer* di EMP. Di Konsorsium KEMALA, memiliki tugas menyiapkan hal yang berkaitan dengan pengadaan, perakitan, dan transportasi PLTS ke lokasi program. Selain itu, ia juga pernah memberikan pelatihan berkaitan dengan pemasaran produk melalui *marketing online* di lokasi program di Jambi. Saat ini sedang menyusun rencana untuk penerjunan tim KKN-PPM UGM di Desa Rawasari dan Sungai Rambut. Berbak, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dia bisa dihubungi melalui fit.liya@gmail.com.

Herry Wirianata, lahir di Kotabaru, 18 Juni 1961. Pendudukan S1 diselesaikan di Institut Pertanian STIPER (d/h Sekolah Tinggi Perkebunan), S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Sejak 1987 hingga sekarang menjadi dosen di Institut Pertanian Stiper. Aktif sebagai narasumber dalam berbagai pelatihan peningkatan kinerja perkebunan berkelanjutan, terutama kelapa sawit. Menaruh minat besar dan terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan di lembaganya. Ia terlibat langsung dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengembangan teknologi ramah yang sesuai dengan kaidah-kaidah *sustainable development*. Ia telah mengikuti beberapa pelatihan yang mempunyai kontribusi untuk partisipasinya dalam bidang tersebut, antara lain Kursus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pelatihan Auditor Indonesian *Sustainable Palm Oil* yang mana yang bersangkutan menjadi auditor untuk sertifikasi ISPO. Dia bisa dihubungi melalui her.wirianara@gmail.com

Marzuki Wahid, Lahir di Cirebon, 20 Agustus 1971. Alumni PP Babakan Ciwaringin Cirebon dan PP Krapyak Yogyakarta. Pernah *ngaji* di PP Salafiyah Pemalang dan PP Lirboyo Kediri. S1 ditempuh pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995), S2 diselesaikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998), sekarang masih menyelesaikan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah mengikuti *short course* selama 1 bulan di Leiden University, Belanda (2006) dan Goethe Universitat, Frankfurt, German (2013), dan selama 1 tahun memperoleh *scholarship* studi di ANU Canberra Australia dalam program PIES (2008-2009). Sekarang, menjadi dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan Dosen sekaligus pendiri Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon. Saat ini, diamanati menjadi Sekretaris Lakpesdam-PBNU periode 2015-2020. Karya tulis terbarunya antara lain: "Agama, Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Inklusif: Catatan Reflektif Atas Hasil Riset pada Empat Daerah" dalam Ahmad Zaenul Hamdi &

Marzuki Wahid (ed.), Ruang untuk yang Kecil dan Berbeda, Pemerintahan Inklusif dan Perlindungan Minoritas (Yogyakarta: Gading, 2017); “Cirebon, West Java: Where Materialism Defeats Personalism,” dalam Edward Aspinnall and Mada Sukmajati (Eds.), *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots*, (Singapore: National University of Singapore Press, 2016); “The Discourse of Indonesia FIQH : Methodological Bid of Family Law Reform,” *Journal of Islamic Law al-Mawarid*, Vol. XV, No. 1, August 2015, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta; dan buku FIQH Indonesia: KHI dan CLD-KHI dalam Konfigurasi Politik Hukum Indonesia (Bandung: Marja’, 2014). Kang Zekky dapat dihubungi melalui email: marzukiwahid@yahoo.com; fb dan twitter: @marzukiwahid.

Suci Handayani, sejak tahun 2000, bekerja di bidang pemberdayaan masyarakat, terutama berpengalaman dalam pendampingan, pengorganisasian masyarakat, advokasi. Juga berpengalaman dalam bidang perencanaan di sejumlah daerah antara lain Solo, Klaten, Gunungkidul, Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulonprogo. Lima tahun terakhir ini, Suci bergabung dengan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang merupakan arena untuk menyemai gagasan dan mendorong gerakan pembaharuan desa serta sebagai konsolidasi gerakan, jaringan yang melahirkan kebijakan responsif terhadap desa. Sebagai fasilitator pemberdayaan dan pembaharuan desa, terlibat dalam pembahasan RUU Desa, usulan revisi PP 43 Tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014 di sejumlah komunitas di Solo dan Yogyakarta. Suci juga mempunyai pengalaman dalam penelitian dan penulisan buku dan modul dengan tema perencanaan, penganggaran, perempuan, dan isu desa. Sejumlah modul dan buku telah ia tuliskan. Dia bisa dihubungi melalui Sucihan03@gmail.com.

Suwartanti Nayono, lahir di Yogyakarta, 4 Maret 1975. Menamatkan pendidikan S1 di bidang Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada, S2 di bidang Resources Engineering di Universitaet Karlsruhe (TH), Jerman dan S3 di bidang *Civil and Environmental Engineering* di Bauhaus-Universitaet Weimar, Jerman. Bidang yang kini ditekuni adalah penilaian dan evaluasi teknologi lingkungan, sanitasi lingkungan dan *Integrated Water Resources Management (IWRM)*. Pada tahun 2004-2005 menjadi peneliti di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral), Universitas Gadjah Mada dan selanjutnya bekerja sebagai *research associate* di Universitaet Karlsruhe (TH), Jerman. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain dampak teknologi transportasi terhadap kualitas lingkungan di wilayah High Rhine, Jerman dan manajemen asset untuk negara berkembang (2005-2007). Pada periode 2009-2014 bekerja sebagai *research associate* di Karlsruhe Institute for Technology (KIT), Jerman untuk proyek *Integrated Water Resources Management (IWRM)* Indonesia. Proyek ini merupakan penelitian kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan the *German Ministry for Education and Research (BMBF)* di bidang penyediaan air bersih, pengolahan limbah dan konservasi sungai bawah tanah dan wilayah karst. Sejak tahun 2014 bekerja sebagai dosen dan kepala laboratorium Teknik Penyehatan Lingkungan di Universitas Janabadra dan menjadi peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek), Universitas Gadjah Mada. Penelitian yang telah dan sedang dilakukan antara lain: pengelolaan sampah mandiri di kawasan wisata karst (LPDP), pengelolaan kualitas air dan lingkungan (MCAI-USA), penanganan limbah di skala industri rakyat (Dikti) dan evaluasi teknologi energi terbarukan (BMBF, Jerman). Dia bisa dihubungi melalui tanti_nayono@yahoo.com

Yuli Nugroho lahir di Kebumen, 14 Juli 1966. Menyelesaikan S-1 di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1992, dan S-2 di *Department of Sociology and Anthropology, School of Social Sciences Ateneo de Manila University* tahun 2003.

Mendapatkan beberapa sertifikat pelatihan/kursus di bidang: metodologi partisipatif, stakeholder dan sistem informasi sosial, sertifikasi hutan, dan sebagainya. Selama lebih dari 20 tahun terlibat dalam banyak penelitian terkait berbagai macam topik diantaranya: pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan, kelembagaan lokal, REDD+ dan perubahan iklim, Perhutanan Sosial, di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai peneliti pernah mendapat penghargaan dan beasiswa penelitian, diantaranya: (1) API (*Asian Public Intellectual, The Nippon Foundation*) untuk melakukan penelitian dengan topik "*decentralization and devolution of forest management*" di Philippine (6 bulan di tahun 2005) dan di Thailand (6 bulan di tahun 2006); (2) ASF (*Asian Scholarship Foundation*) untuk melakukan penelitian dengan topik "*legal pluralism and forest management*" di Kerala, India (9 bulan di tahun 2008); (3) AIGRP (*Australia Indonesia Governance Research Partnership*) untuk melakukan penelitian dengan topik "*local/district autonomy and forest management*" di Indonesia dan Australia (2009); dan (4) API untuk melakukan penelitian dengan topik "*social and environmental safeguard*" di Kalimantan Tengah (2014). Terlibat sebagai tenaga ahli di beberapa konsultan kehutanan untuk mengerjakan berbagai macam proyek diantaranya evaluasi/penilaian keberhasilan tanaman program Gerhan (di NTT, Sulawesi Tengah, dan Sumatra Selatan). Sebagai peneliti dan aktivis akrab dengan metode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, serta tidak asing dengan berbagai macam teknik PRA, survey rumah tangga, wawancara mendalam, dan pengamatan partisipatif. Sebagai aktivis LSM juga berpengalaman dalam fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Dia bisa dihubungi melalui nugroho.yuli@yahoo.co.id

Rachmawan Budiarto lahir di Yogyakarta, 23 September 1971. Aktif di bidang energi sejak bekerja di Pusat Studi Energi (PSE) UGM (1999). Sejak tahun itu, menjadi dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM. Menamatkan studi S1 hingga S3 di UGM (teknik sipil, teknik

pantai, dan teknik mesin). Saat ini, diamanati sebagai koordinator pengembangan energi terbarukan di PSE UGM (sejak 2010), Sekretaris Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM dan Direktur *Centre for Development of Sustainable Region*, sebuah pusat kolaborasi riset beranggotakan delapan perguruan tinggi Indonesia dan Amerika Serikat. Sejak April 2015, menjadi anggota *Evaluation and Accreditation Committee-IABEE (Indonesia Accreditation Board for Engineering Education)*. Periode 2005-2017, pernah terlibat di paling tidak 44 program (menjadi ketua pada 16 program di antaranya) di 53 lokasi pembangkit listrik tenaga air, teknologi energi matahari, teknologi energi bio, teknologi panas bumi, energi laut, teknologi energi hibrid, bangunan hijau, audit energi untuk industri, gas alam, dan panduan pembangunan PLTA di Indonesia, termasuk pula program di bidang sensor/instrumentasi dan Hankam. Pernah/sedang terlibat di berbagai program yang didanai berbagai sumber internasional, antara lain Korindo - Korea Selatan, DAAD - Jerman, GTZ/GIZ - Jerman, JICA - Jepang, SIDA - Swedia, *Non Aligned Movement - Centre for South-South Technical Cooperation*, Shizuoka University - Jepang, Australia - Indonesia Centre, USAID - Amerika Serikat, dan MCAI - Amerika Serikat. Tahun 2011, menerbitkan buku "Kebijakan Energi-Menuju Sistem Energi yang Berkelanjutan." Menjadi penulis pertama buku "Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis" (2015). Tahun 2012, bersama tim mendapat penghargaan the *Regional Centre of Expertise Recognition Award of United Nations University* berkat pengembangan metoda pengajaran "*Preparing Green Economics Through Synergy Among Courses in Engineering Physics, Gadjah Mada University*". Dapat dihubungi melalui rachmawan@ugm.ac.id.

LAMPIRAN

DAFTAR KADER HIJAU DI SETIAP DESA PADA AWAL PEMBENTUKAN

*Tabel 35 Ranking Prioritas Hasil Rekrutmen Calon Kader Hijau
Desa Sungai Rambut*

No	Nama	Usia	L/P	Pendidikan	Pekerjaan	Pengalaman Organisasi
1	Rafik	35	L	SMA	Sekdes	Karang Taruna
2	Syamsiyah	26	P	S1	Guru	Pengurus BEM
3	Arifin	34	L	SMP	Petani	Kelompok Tani
4	Syafrizal	34	L	SMP	Petani	Karang Taruna
5	Al-Amin	24	L	D3	Swasta	Karang Taruna
6	Maslina	32	P	SD	URT	PKK
7	Irwansyah	22	L	SMA	Swasta	Karang Taruna
8	Eva Salina	32	P	SD	URT	PKK
9	Juhardi	30	L	MA	BPD/Petani	MP3KI
10	Maisarah	32	P	SD	URT	Kader Posyandu
11	Sapriyadi	36	L	SMP	Guru/Petani	Karang Taruna
12	M. Isa	31	L	SMA	Petani	Karang Taruna
13	Ernawati	32	P	MTS	URT	PKK
14	Atdriyansah	22	L	SD	Petani	Karang Taruna
15	Saprizal	34	L	SMP	Petani	Karang Taruna
16	Miskiyya	27	P	SD	URT	Karang Tar

Tabel 36 Kader Hijau Desa Rawasari

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir
1.	Dadang	Laki-laki	31 Des 1972	SD
2.	Suyono	Laki-laki	03 Apr 1978	SD
3.	M. Amirudin	Laki-laki	03 Jun 1989	SMA
4.	Erni Zulaeka	Perempuan	14 Okt 1977	S1
5.	Dedi Kuswandi	Laki-Laki	18 Ags 1984	SMA
6.	Sinta Karmila	Perempuan	24 Mei 1995	S1
7.	Parini	Perempuan	17 Ags 1974	S1
8.	Roziqie AZ	Laki-Laki	03 Jun 1987	S1
9.	Trisna Mulyana	Laki-laki	13 Jun 1984	SD
10.	Rosita	Perempuan		S1

Tabel 37 Kader Hijau Jorong Tandai Bukik Bulek

No.	Nama	Jenis kelamin	Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir
1.	Afri Wendi	Laki-laki	07 Agustus 1986	S1
2.	Safrijal	Laki-laki	08 November 1982	MTSn
3.	Mega Putra	Laki-laki	01 Juni 1989	SD
4.	Amilus	Laki-laki	07 November 1987	SD
5.	Hendra Bumalkadri	Laki-laki	04 April 1994	SMA
6.	Yulen Titika Maiza	Perempuan	10 Oktober 1996	SMKN
7.	M. Yusuf	Laki-laki	01 Juli 1980	MTSn
8.	Fitri Julianti	Perempuan	06 Juli 1996	SMA
9.	Yulisna	Perempuan	21 Desember 1973	MTSn
10.	Aprianton	Laki-laki		

Profil

Konsorsium KEMALA

KEMALA (Konsorsium Energi Mandiri Lestari) adalah konsorsium yang terdiri dari 4 (empat) lembaga, yaitu :

1. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-PBNU),
2. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (PUSTEK UGM),
3. Pusat Studi Energi UGM (PSE UGM), dan
4. *Center for Civic Engagement and Studies* (CCES) Yogyakarta.

Bertindak sebagai *lead consortium* adalah LAKPESDAM-PBNU. Bekerjasama dengan MCA-Indonesia, KEMALA melaksanakan *project* "Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Melalui Usaha Hijau Didukung Energi Terbarukan", berlokasi di **Jorong Tandai Bukik Bulek**, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, **Desa Rawasari** dan **Desa Sungai Rambut**, masing-masing di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.



KEMALA

(Konsorsium Energi Mandiri Lestari)



**LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
(LAKPESDAM-PBNU)**

Jl. KH. Ramli Selatan 20A Menteng Dalam, Tebet
Jakarta 12870

Telp. (021) 8298855 / 8281641, Fax. (021) 8354925

lakpesdam@lakpesdam.or.id

<http://lakpesdam.or.id>



**PUSAT STUDI
EKONOMI KERAKYATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**PUSAT STUDI EKONOMI KERAKYATAN UGM
(PUSTEK UGM)**

Center for Economic Democracy Studies UGM

Jalan Mahoni No. B-2, Catur Tunggal, Depok,
Caturtunggal, Sleman, D. I. Yogyakarta 55281

Telp/ Fax : (0274) 555664

ekonomikerakyatan@ugm.ac.id

<http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/>



**PUSAT STUDI ENERGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

PUSAT STUDI ENERGI UGM (PSE UGM)

Center for Energy Studies UGM

Sekip Blok K1-A, Sinduadi, Mlati,

Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta 55281

Telp/ Fax : (0274) 549429

pse@ugm.ac.id dan <https://pse.ugm.ac.id/>



**PUSAT KAJIAN DAN PENGUATAN
KEWARGAAN (CCES)**

Center for Civic Engagement And Studies

Jl Pandega Sakti 11A, Manggung, Condong Catur,
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55283

Telp: 0811256903

office@cces.or.id dan <http://cces.or.id/>

Website : www.konsorsiumkemala.org email konsorsium.kemala@gmail.com